

**BMP.UKI: OS-01-SPP-IPOL-IV-2021**



# **BUKU MATERI PEMBELAJARAN SISTEM PERWAKILAN POLITIK**

Disusun oleh:  
**Dr Osbin Samosir, M.Si**

Reviewer:  
**Fransiskus X. Gian Tue Mali, S.I.Kom., M.Si**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2021**

**BMP.UKI: OS-01-SPP-IPOL-IV-2021**

**BUKU MATERI PEMBELAJARAN  
SISTEM PERWAKILAN POLITIK**

Disusun oleh:  
**Dr Osbin Samosir, M.Si**

Reviewer:  
**Fransiskus X. Gian Tue Mali, S.I.Kom., M.Si**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2021**

## **KATA PENGANTAR**

Modul untuk Mahasiswa Ilmu Politik terkait dengan sistem Perwakilan Politik yang lebih modern perlu dihadirkan untuk memperkaya jenis-jenis modul lama yang sudah banyak diterbitkan selama ini. Format sistem perwakilan yang berubah dan berkembang sangat pesat dewasa ini telah mengubah struktur dan format pola keterwakilan perwakilan di seluruh negara beradab seluruh dunia dewasa ini. Pertumbuhan demokrasi yang semakin matang, membuat demokrasi dipahami tidak lagi sekedar kewajiban rutin bagi warga negara untuk melakukan partisipasi politiknya dalam pemilihan umum, tetapi di sana dimuat pertarungan gagasan antar kandidat, kemampuan kandidat mempengaruhi para pemilih, dan kebebasan para pemilih untuk menentukan siapa kandidat yang paling dianggap terbaik. Termasuk dalam hal ini adalah dorongan atau desakan akan adanya sistem perwakilan politik dari kalangan minoritas itu sendiri yang selama ini dianggap tidak pernah mendapat perhatian akan kebijakan pemerintah yang membela hak hak dan kepentingan kalangan minoritas.

Teori-teori utama terbaru yang dipaparkan di sini akan sangat sangat berguna bagi mahasiswa untuk menentukan arah pokok analisis mereka baik dalam pembuatan makalah pada berbagai mata kuliah, maupun pada akhirnya nanti ketika skripsi. Secara harafiah mata kuliah Sistem Perwakilan Politik ini akan membantu mahasiswa melihat bagaimana sistem perwakilan modern telah hadir yang meninggalkan pola pola lama dalam sistem perwakilan yang cenderung sekedar membahas teori-teori lama. Artinya lebih tepat dikatakan bahwa kehadiran Buku Materi Pembelajaran ini memperkaya terhadap BMP yang telah terlebih dahulu hadir sebelumnya.

BMP ini terdiri dari 9 (Sembilan) modul yang terdiri dari 14 Materi Pengajaran, artinya memang modul ini dipersiapkan untuk pertemuan sejumlah 14 kali pertemuan dengan berbagai variasi yakni kuliah tatap muka atau dalam kondisi sejak munculnya Covid-19 dilakukan lewat virtual, yakni perkuliahan dilakukan dari rumah masing-masing. Selain itu perkuliahan juga diisi dengan diskusi dan membuat summary/ringkasan mata kuliah, serta tentu saja jenis pertemuan lain seperti kuliah umum atau kuliah lain. Dua pertemuan

yang lain, yakni Pertemuan ke 8 di isi dengan Ulangan Tengah Semester (UTS) dan Pertemuan ke 16 diisi dengan Ulangan Akhir Semester (UAS). Sehingga total seluruh pertemuan Mata kuliah ini diberi bobot 3 sks. Semoga BMP ini sungguh memberi manfaat untuk siapa saja yang menggunakannya.

Jakarta, 3 September 2021

Penyusun,

**Dr Osbin Samosir, M.Si**

# DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Petunjuk Penggunaan Buku Materi Pembelajaran	1
Capaian Pembelajaran Lulusan	2
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	4
Sistem Penilaian	27

## MODUL 1:

<b>PERWAKILAN POLITIK DI ATHENA KUNO DAN KONSEP SISTEM PERWAKILAN MODERN</b>	34
A. PENDAHULUAN	34
B. KEGIATAN PEMBELAJARAN	
B.1. Kegiatan Pembelajaran-1	35
1. Judul Kegiatan Pembelajaran: "Perwakilan Politik Di Athena Kuno"	36
2. Kemampuan Akhir (KA)	36
3. Uraian, Penjelasan, dan Praktek Keterwakilan	36
a. Pengertian Umum	36
b. Demokrasi Yunani dan Keruntuhannya	39
c. Riwayat Perwakilan Rakyat	46
B.2. Kegiatan Pembelajaran-2	49
1. Judul Kegiatan Pembelajaran: "Konsep Sistem Perwakilan Modern"	49
2. Kemampuan Akhir (KA)	49
3. Uraian, Penjelasan, dan Praktek Keterwakilan	50
a. Pendahuluan	50
b. Konsep Sistem Perwakilan	52
c. Ide Perwakilan Rakyat	56

d. Lembaga Parlemen dan Hubungan Kekuasaan	58
e. Teori Perwakilan	63
C.PENUTUP	68
1. Rangkuman	68
2. Daftar Istilah	69
3. Daftar Referensi	72

## **MODUL 2:**

<b>PELETAK DASAR SISTEM PERWAKILAN DAN STRUKTUR SISTEM PERWAKILAN MODERN</b>	<b>73</b>
A. PENDAHULUAN	73
B. KEGIATAN PEMBELAJARAN	
B.1. Kegiatan Pembelajaran-1	76
1. Judul Kegiatan Pembelajaran: “Peletak Dasar Sistem Perwakilan Politik”	76
2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir	76
3. Uraian, Pokok Pikiran, dan Fakta Riil	76
a. Thomas Hobbes (1588-1679)	77
b. John Locke (1632-1704)	80
c. Montesquieu (1689-1755)	82
d. Jean Jacques Rousseau (1712-1778)	84
B.2. Kegiatan Pembelajaran-2	90
1. Judul Kegiatan Pembelajaran: “Struktur Sistem Perwakilan Modern”	90
2. Kemampuan Akhir (KA)	90
3. Uraian, Pokok Pikiran, dan Fakta Riil	90
a. Sistem Perwakilan Modern	90
b. Struktur kelembagaan Perwakilan Rakyat	92
c. Posisi Perwakilan	94
d. Peran Perwakilan Politik/Parlemen	98
e. Keanggotaan di Perwakilan Politik/Parlemen	101

C.PENUTUP	105
1. Rangkuman	105
2. Daftar Istilah	106
3. Daftar Referensi	108
<b>MODUL 3:</b>	
<b>SISTEM PERWAKILAN POLITIK MODERN:</b>	
<b>Figur Politik, Kedalaman Penetrasi, dan Seleksi Kandidat</b>	<b>110</b>
A. PENDAHULUAN	110
B. KEGIATAN PEMBELAJARAN	
B.1. Kegiatan Pembelajaran-1	112
1. Judul Kegiatan Pembelajaran:	
<b>“Format Sistem Perwakilan Modern”</b>	<b>112</b>
2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir	112
3. Pemikiran, Penjelasan dan Contoh	112
a. Kehadiran Figur/Sosok Politik	112
b. Kedalaman Penetrasi Partai Politik	117
B.2. Kegiatan Pembelajaran-2	125
1. Judul Kegiatan Pembelajaran:	
<b>“Seleksi Kandidat Partai Politik Dan Penerimaan</b>	
<b>Publik Atas Kader”</b>	<b>125</b>
2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir	125
3. Uraian, Penjelasan, dan Praktek Keterwakilan	125
a. Seleksi Kandidat Partai dan Penerimaan Publik	125
b. Dominasi Partai Politik Konteks Indonesia	128
C.PENUTUP	138
1. Rangkuman	138
2. Daftar Istilah	139
3. Daftar Referensi	141

<b>MODUL 4:</b>	
<b>POLITIK KEHADIRAN SEBAGAI BENTUK PERWAKILANPOLITIK</b>	<b>143</b>
A. PENDAHULUAN	143
B. KEGIATAN PEMBELAJARAN	145
1.Judul Kegiatan Pembelajaran:	145
<b>“POLITIK KEHADIRAN”</b>	145
2.Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir	145
3. Pemikiran, Penjelasan, dan Contoh	146
a. <i>Politics of Presence</i> Pengakuan Kesetaraan	146
b. Kontrol Publik Dan Persamaan Politik	148
c. Politik Gagasan Para Kandidat	152
d. <i>Politics of Presence</i> Pemerintahan Mayoritas	156
e. Catatan Kehadiran Politik Konteks Indonesia	159
C.PENUTUP	167
1. Rangkuman	167
2. Daftar Istilah	168
3. Daftar Referensi	172
<b>MODUL 5:</b>	
<b>IKATAN PRIMORDIAL PERWAKILAN POLITIK</b>	<b>173</b>
A. PENDAHULUAN	173
B. KEGIATAN PEMBELAJARAN	175
1.Judul Kegiatan Pembelajaran:	
<b>“Ikatan Primordial Dalam Perwakilan Politik”</b>	175
2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir	175
3. Uraian, Pokok Pikiran, dan Refleksi Kontekstual	175
a. Lahirnya Kepentingan Politik Primordial	175
b Sifat Alami Kelompok Primordial	183
c. Dampak Riil Primordialisme Politik dan Sosial	190
C.PENUTUP	199
1. Rangkuman	199
2. Daftar Istilah	199
3. Daftar Referensi	203

## **MODUL 6:**

### **MENOLAK PRIMORDIALISME DALAM POLITIK PRAKTIS 204**

A. PENDAHULUAN	204
B. KEGIATAN PEMBELAJARAN	206
1. Judul Kegiatan Pembelajaran:	
“Menolak Ikatan Primordialisme Dalam Politik Praktis”	205
2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir	205
3. Uraian, Pokok Pikiran, dan Refleksi Kontekstual	206
a. Dampak Kelompok Primordialisme	205
b. Menolak Isu Primordial dalam Politik Praktis	213
c. Primordialisme Pemilu Era Reformasi Indonesia	223
C. PENUTUP	229
1. Rangkuman	229
2. Daftar Istilah	230
3. Daftar Referensi	233

## **MODUL 7:**

### **POLITIK ALIRAN DAN PRINSIP NASIONALISME 234**

A. PENDAHULUAN	234
B. KEGIATAN PEMBELAJARAN	236
B.1. Kegiatan Pembelajaran-1	236
1. Judul Kegiatan Pembelajaran: “Politik Aliran”	236
2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir	236
3. Uraian, Pemikiran, Penjelasan, dan Fakta Politik	236
a. Prinsip Determinan Sosial, Agama, Dan Budaya	236
b. Fondasi Nasionalisme dalam Keterwakilan Politik	242
B.2. Kegiatan Pembelajaran-2	247
1. Judul Kegiatan Pembelajaran:	
“Penguatan Nasionalisme Dan Kebangsaan”	247
2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir	247
3. Uraian, Pemikiran, Penjelasan, dan Fakta Politik	247
a. Penguatan Nasionalisme dan Kebangsaan	247
b. Tantangan ke-Indonesiaan kita	251

C.PENUTUP	257
1. Rangkuman	257
2. Daftar Istilah	258
3. Daftar Referensi	263
<b>MODUL 8:</b>	
<b>POLITIK ALIRAN DI PEMILU ORDE BARU:</b>	
<b>Keterwakilan Politik di Golkar, PPP, dan PDI</b>	<b>265</b>
A. PENDAHULUAN	265
B. KEGIATAN PEMBELAJARAN	267
B.1. Kegiatan Pembelajaran-1	267
1. Judul Kegiatan Pembelajaran:	267
“Politik Aliran Di Pemilu Orde BaruI”	267
2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir	267
3. Uraian, Penjelasan, dan Praktek Keterwakilan	267
a. Politik aliran di masa Orde Baru	267
b. Praktek Patron Klien	272
B.2. Kegiatan Pembelajaran-2	279
1. Judul Kegiatan Pembelajaran:	
“Piramida Patron Klien Orde Baru Dan Kejatuhannya”	279
2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir	279
3. Uraian, Penjelasan, dan Praktek Keterwakilan	279
a. Piramida Patron Klien di Orde Baru	279
b. Oposisi Menguat dan Kejatuhan Orde Baru Suharto	287
C.PENUTUP	292
1. Rangkuman	292
2. Daftar Istilah	293
3. Daftar Referensi	298

<b>MODUL 9:</b>	
<b>KETERWAKILAN POLITIK PADA PEMILU</b>	
<b>ERA REFORMASI: Belajar dari Keterpilihan Minoritas</b>	<b>300</b>
A. PENDAHULUAN	300
B. KEGIATAN PEMBELAJARAN	302
1. Judul Kegiatan Pembelajaran:	
“Keterwakilan Politik Pada Pemilu Era Reformasi”	302
2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir	302
3. Uraian, Fakta Pemilu, dan Analisis	302
a. Memahami Kondisi Politik Era Reformasi	302
b. Maraknya Politik Identitas	309
c. Alasan Pemilih Muslim Memilih Caleg Minoritas	318
C. PENUTUP	326
1. Rangkuman	326
2. Daftar Istilah	327
3. Daftar Referensi	330
<b>DAFTAR LAMPIRAN BMP</b>	<b>332</b>
<b>BIOGRAFI PENYUSUN</b>	<b>340</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
TABEL 1: Struktur Legislatif di Negara Kesatuan dan Federal	93
TABEL 2: Beberapa Struktur Legislatif di Beberapa Negara	94
TABEL 3: Cara Pemilihan Legislatif di Beberapa Negara	102
TABEL 4: Perolehan Suara Pilpres Tahun 2019	312
TABEL 5: Daftar Provinsi berbasis Islam dengan Anggota Legislatif beragama Kristen di Pemilu 2014	319
TABEL 6: Daftar Provinsi berbasis Islam dengan Anggota Legislatif beragama Kristen di Pemilu 2019	320
TABEL 7: Kursi DPR RI Beragama Kristen Hasil Pemilu Legislatif 2019	322
TABEL 8: Kursi DPR RI Beragama Kristen Hasil Pemilu Legislatif 2014	323

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Parthenon sebagai Kuil Dewi Athena di masa Yunani Kuno	37
Gambar 2. The Age of Pericles, Pericles menyampaikan pidato menghormati orang Athena yang tewas	42
Gambar 3. Pertemuan Dewan Athena alias Boule tahun 594.	45
Gambar 4. Raja John pada 15 Juni 1215 di padang rumput Runnymede di samping Sungai Thames antara Windsor dan Staines, dikenal sebagai Magna Charta	53
Gambar 5: Thomas Hobbes (1588-1679)	77
Gambar 6: John Locke 1632-1704	81
Gambar 7: Charles de Montesquieu (1689-1755)	83
Gambar 8: Jean Jacques Rousseau (1712-1778)	85
Gambar 9: Memilih dalam Pemilihan Umum adalah hak setiap warganegara terhadap bangsanya	114
Gambar 10: Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 karena keunggulan figure politiknya.	119
Gambar 11 : Setelah selesai Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk para Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024	121
Gambar 12: Sejumlah 14 Partai politik sebagai peserta Dalam Pemilu Nasional Tahun 2019	127
Gambar 13: Penentuan final calon/kandidat peserta Pilkada politik diputuskan oleh DPP Partai	131
Gambar 14: Pemilukada sarana pembuktian martabat politik warganegara	135
Gambar 15: Pentingnya kesetaraan politik untuk semua pihak.	147
Gambar 16: Keterwakilan politik semua pihak harus terakomodir dalam demokrasi	154
Gambar 17: Pemilihan Umum untuk kesejahteraan semua	158
Gambar 18: Komisi Pemilihan Umum menjadi tahapan terakhir penentu hadirnya sebuah partai dalam pemilu	160

Gambar 19: Partai Politik hadir untuk kepentingan dan martabat warga negara	163
Gambar 20: Primordialisme seadanya bisa membanggakan dan menjadi berbahaya jika merendahkan kelompok lain	176
Gambar 21: Betapa berbahayanya ketika primordialisme ras, etnis dan agama masuk dalam wilayah politik	179
Gambar 22: Primordialisme sangat berpotensi melecehkan kelompok lain	185
Gambar 23: Efek dari primordialisme berlebihan adalah keresahan social yang bisa berujung pada perang fisik antar kelompok	189
Gambar 24: Primordialisme harus ditolak karena membuat pemisahan yang tajam antar kelompok masyarakat	207
Gambar 25: Solidaritas tanpa sekat adalah kunci kemajuan sebuah bangsa	212
Gambar 26: Betapa indahnyanya kebersamaan antar suku, antar agama, antar ras dan antar golongan membangun Indonesia	222
Gambar 27: Menguatnya politik aliran di Indonesia	238
Gambar 28: Politik aliran mendapat muaranya dalam pilihan partai politik	240
Gambar 29: Pilkada DKI Jakarta yang sempat mengguncang tatanan social	243
Gambar 30: Berbahaya ketika isu identitas agama menguasai politik praktis	250
Gambar 31: Presiden Soeharto saat diambil sumpah/dilantik kembali sebagai Presiden	268
Gambar 32: Pemerintahan yang kuat Orde Baru selama 32 tahun berkuasa	272
Gambar 33: Salah satu kampanye politik di masa Pemilu Orde Baru	276
Gambar 34: Hanya ada tiga peserta pemilu sejak Pemilu 1977 hingga 1997 di masa Orde Baru	282
Gambar 35: Gaya Presiden Soeharto di zaman Orde Baru pangkas partai politik	287

Gambar 36: Mahasiswa bersama rakyat menduduki Gedung Parlemen pada Mei 1998 memaksa Presiden Soeharto mundur setelah berkuasa 32 tahun	304
Gambar 37: Sistem multi partai politik kembali di Pemilu Era Reformasi tahun 1999 dengan 48 partai politik peserta pemilu	308
Gambar 38: Empat Presiden Indonesia hasil pemilu Era Reformasi: pembatasan masa jabatan presiden	314
Gambar 39: Partai-partai politik berkibar tumbuh subur di masa Era Reformasi sejak 1998	317
Gambar 40: Antusiasme pemilih di luar negeri pada Pemilu Nasional 2019. Partisipasi pemilih adalah salah satu wujud kebebasan politik warga	324

## **PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU MATERI PEMBELAJARAN**

Kehadiran modul modul Buku Materi Pengajaran (BMP) dewasa ini dianggap sangat mendesak karena situasi perubahan pola kebiasaan dunia setelah serangan Covid-19 yang melanda seluruh dunia dewasa ini, sejak menyebarnya virus mematikan ini pada Desember 2019. Karena itulah BMP ini disusun dalam rangka menjawab tantangan dan tuntutan pembelajaran saat ini di tengah maraknya pembelajaran bersifat daring/online karena wabah Covid 19 yang sangat mengkhawatirkan. Diharapkan BMP ini menjadi panduan pembelajaran bagi mahasiswa dan pemerhati Ilmu Politik secara khusus dan bagi masyarakat luas untuk memahami bagaimana Sistem Perwakilan Politik bisa dipahami dengan mudah. BMP ini juga akan memuat bagaimana pemikiran para tokoh politik terkait apa itu Sistem Perwakilan Politik dan bagaimana konteksnya dalam sistem politik Indonesia dewasa ini.

BMP ini terdiri dari 9 (sembilan) modul yang kiranya membantu mahasiswa dan setiap pihak yang berminat untuk dapat dengan mudah mempelajari modul ini dengan cara yang berurutan. Setiap mahasiswa diharapkan dapat menguasai dan mengembangkan setiap materi dalam setiap modul, dan kemudian mempresentasikannya dalam bentuk seminar kepada masyarakat.

Setelah mempelajari setiap materi dalam buku ini. Setiap kegiatan belajar disertai dengan tes pemahaman dan tes kompetensi sebagai alat ukur tingkat penguasaan para mahasiswa akan materi dalam modul. Modul ini perlu dicermati dan dipelajari dengan seksama agar mahasiswa dapat memahami secara mendalam mengenai definisi, unsur, dan ruang lingkup dari berbagai teori Sistem Perwakilan Politik.

## **CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN**

### **A. Unsur Sikap**

1. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan berpolitik dan berdemokrasi dalam rangka meningkatkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
2. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
3. Mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat yang berbeda dari orang lain;
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat lain yang berbeda suku maupun agamanya;
5. Mampu menunjukkan sikap yang menghargai perbedaan, rendah hati, bekerja keras, berbagi dan peduli, disiplin, profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Universitas Kristen Indonesia.

### **B. Unsur Keterampilan Umum:**

1. Mampu menerapkan pemikiran rasional, analisis yang kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam menyikapi perkembangan pemilihan umum dan peran partai politik di Indonesia;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
3. Mampu mengkaji kasus-kasus dalam proses politik dan berdemokrasi di Indonesia terkait pemilihan umum dan perkembangan politik nasional dalam rangka menyusun hasil kajiannya;
4. Mampu menyusun hasil kajian tentang pemilihan umum dan partai politik dalam bentuk esai dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
6. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang demokrasi dan politik nasional, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.

**C. Unsur Keterampilan Khusus:**

1. Mampu membuat analisa dan penelitian baik mandiri maupun berkelompok terkait dengan konsep-konsep apa itu Sistem Perwakilan Politik, apa itu partai politik dan bagaimana itu dipraktekkan dalam sistem pemilihan umum dalam Ilmu Politik;
2. Mampu mengeluarkan pendapat serta mempresentasikan hasil penelitian secara lisan dan tulisan terkait Sistem Perwakilan Politik;
3. Mampu memanfaatkan situasi actual politik nasional sebagai ajang untuk mengembangkan diri dalam proses belajar mengajar untuk memahami apa itu Sistem perwakilan politik dewasa ini, dan bagaimana keterkatiannya dengan Sistem perwakilan politik dalam konteks Indonesia.

**D. Unsur Pengetahuan:**

1. Mampu memahami ruang lingkup kajian Sistem perwakilan politik dalam studi Ilmu Politik;
2. Mampu memahami pengetahuan dasar tentang studi Ilmu Politik;
3. Mampu memahami berbagai perspektif dan aliran pemikiran yang mengkaji situasi politik nasional dalam studi Ilmu Politik;
4. Mampu menjelaskan berbagai konsep dan teori Sistem perwakilan politik dalam Ilmu Politik pada setiap perspektif;
5. Mampu memahami bagaimana berjalannya Sistem perwakilan politik dalam studi Ilmu Politik;
6. Mampu memahami makna utama dari Sistem perwakilan politik lewat partai politik dan bagaimana proses sistem perwakilan politik itu melalui pemilihan umum dalam studi Ilmu Politik;
7. Mampu mengidentifikasi permasalahan, isu, aktor dan interaksi diantara Sistem perwakilan politik dalam studi Ilmu Politik;
8. Mampu memantapkan dasar pijakan keilmuan sebagai bekal dalam mata kuliah Ilmu Politik selanjutnya;
9. Mampu menganalisa fenomena atau peristiwa politik nasional khususnya yang terkait dengan Sistem perwakilan politik nasional dan pemelukada yang lebih lokal dengan menggunakan kerangka pikir, konsep, dan teori Ilmu Politik.

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER  
SISTEM PERWAKILAN POLITIK**

		<b>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU POLITIK</b>			
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
<b>Sistem Perwakilan Politik</b>	73124230	Mata Kuliah Peminatan	3	4	Kamis 2September 2021
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Kaprodi
	<b>Dr Osbin Samosir, M.Si</b>		<b>Dr Osbin Samosir, M.Si</b>		<b>Fransiskus X. Gian Tue Mali, S.I.Kom., M.Si</b>
<b>Capaian Pembelajaran(CP)</b>	<b>CPL</b>				

A. Unsur Sikap

1. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan berpolitik dan berdemokrasi dalam rangka meningkatkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
2. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
3. Mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat yang berbeda dari orang lain;
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat lain yang berbeda suku maupun agamanya;
5. Mampu menunjukkan sikap yang menghargai perbedaan, rendah hati, bekerja keras, berbagi dan peduli, disiplin, profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Universitas Kristen Indonesia.

- B. Unsur Keterampilan Umum:
1. Mampu menerapkan pemikiran rasional, analisis yang kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam menyikapi perkembangan pemilihan umum dan peran partai politik di Indonesia;
  2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
  3. Mampu mengkaji kasus-kasus dalam proses politik dan berdemokrasi di Indonesia terkait pemilihan umum dan perkembangan politik nasional dalam rangka menyusun hasil kajiannya;
  4. Mampu menyusun hasil kajian tentang pemilihan umum dan partai politik dalam bentuk esai dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
  5. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
  6. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang demokrasi dan politik nasional, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
  7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
- C. Unsur Keterampilan Khusus:
1. Mampu membuat analisa dan penelitian baik mandiri maupun berkelompok terkait dengan konsep-konsep apa itu Sistem perwakilan politik, apa itu partai politik dan bagaimana itu dipraktekkan dalam sistem pemilihan umum dalam Ilmu Politik;
  2. Mampu mengeluarkan pendapat serta mempresentasikan hasil penelitian secara lisan dan tulisan terkait Sistem perwakilan politik;
  3. Mampu memanfaatkan situasi actual politik nasional sebagai ajang untuk mengembangkan diri dalam proses belajar mengajar untuk memahami apa itu Sistem Perwakilan Politik dewasa ini, dan bagaimana keterkatiannya dengan Sistem Perwakilan Politik dalam konteks Indonesia.

	<p>D. Unsur Pengetahuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memahami ruang lingkup kajian Sistem perwakilan politik dalam studi Ilmu Politik;</li> <li>2. Mampu memahami pengetahuan dasar tentang studi Ilmu Politik;</li> <li>3. Mampu memahami berbagai perspektif dan aliran pemikiran yang mengkaji situasi politik nasional dalam studi Ilmu Politik;</li> <li>4. Mampu menjelaskan berbagai konsep dan teori Sistem Perwakilan Politik dalam Ilmu Politik pada setiap perspektif;</li> <li>5. Mampu memahami bagaimana berjalannya Sistem perwakilan politik dalam studi Ilmu Politik;</li> <li>6. Mampu memahami makna utama dari Sistem Perwakilan Politik lewat partai politik dan bagaimana proses sistem perwakilan politik itu melalui pemilihan umum dalam studi Ilmu Politik;</li> <li>7. Mampu mengidentifikasi permasalahan, isu, aktor dan interaksi diantara Sistem perwakilan politik dalam studi Ilmu Politik;</li> <li>8. Mampu memantapkan dasar pijakan keilmuan sebagai bekal dalam mata kuliah Ilmu Politik selanjutnya;</li> <li>9. Mampu menganalisa fenomena atau peristiwa politik nasional khususnya yang terkait dengan Sistem Perwakilan Politik nasional dan pemelukadayang lebih lokal dengan menggunakan kerangka pikir, konsep, dan teori Ilmu Politik.</li> </ol>
	CPMK

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CP 1: Mampu menguasai teori Sistem Perwakilan Politik sebagai dasar analisis fenomena politik baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara maupun tugas sebagai mahasiswa politik.</li> <li>2. CP 2: Terbentuknya kesadaran sosial akan persoalan politik bangsa berdasarkan pemahaman teori Sistem Perwakilan Politik</li> <li>3. CP 3: Mampu menemukan solusi atas fenomena politik berdasarkan konsep dan teori yang dipelajari;</li> <li>4. CP 4: Menganalisis fenomena politik berdasarkan pembelajaran <i>student center learning</i> melalui praktek penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. CP 5: Mampu menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam pengaplikasian teori Sistem Perwakilan Politik di Indonesia dalam perannya sebagai makhluk social dan berpolitik.</li> </ol>
Bahan Kajian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Perwakilan Politik</li> <li>2. Peletak Dasar Sistem Perwakilan</li> <li>3. Sistem Perwakilan Politik Modern</li> <li>4. Politik Kehadiran Sebagai Bentuk Perwakilan Politik</li> <li>5. Ikatan Primordial Dalam Perwakilan Politik</li> <li>6. Menolak Primordialisme Dalam Politik Praktis</li> <li>7. Politik Aliran Dan Prinsip Nasionalisme</li> <li>8. Politik Aliran Di Pemilu Orde Baru</li> <li>9. Keterwakilan Politik Pada Pemilu Era Reformasi</li> </ol>

Deskripsi Singkat MK	<p>Mata kuliah Sistem Perwakilan Politik ini memiliki kebaruan paling mendasar (newest/novelty) dari buku ini adalah format pemikirannya yang memperkaya dari isi buku-buku system perwakilan politik sebelumnya. Dalam buku-buku Sistem Perwakilan Politik yang selama ini hadir memuat tentang sejarah system perwakilan, jenis-jenis lembaga, format-format system legislative atau presidensial di Inggris, Amerika, dan Eropah pada umumnya, dan bentuk-bentuk tekhnis lainnya. Perbedaan mendasarnya dengan buku ini adalah ketika buku ini justru tidak membahas mendalam system-sistem itu lagi karena sudah terlalu banyak dan sudah menjadi isu yang tidak mendapat pembaharuan berarti sejak hamper 200 tahun terakhir. Buku ini sangat berbeda dari semua buku-buku sebelumnya tersebut, karena buku ini lebih melihat bagaimana formasi atau upaya perwakilan politik bisa dihadirkan di era modern dewasa ini.</p> <p>Buku ini justru melihat, jika misalnya di zaman masa awal demokrasi bahwa ideologi partai politik sebagai satu-satunya ukuran determinan penentuan perwakilan politik, dalam era dewasa ini justru mengalami pembaharuan sangat signifikan ketika ideologi partai politik justru hampir ditinggalkan di seluruh dunia. Figure politik, kehadiran langsung pihak yang diwakili, pengaruh primordialisme politik, termsuk politik identitas dalam pemilihan umum dalam konteks Indonesia menjadi format mendasar buku ini merumuskan Sistem Perwakilan Politik di Era Modern.</p>
Referensi Utama	<p><i>Comparative Government and Politics: An Introduction</i>. Hampshire: MacMillan Press Ltd, 2016.</p> <p>Dahl, Robert A. <i>Perihal Demokrasi</i>. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.</p> <p>----- <i>Democracy and its Critics</i>. New Haven, 1989.</p> <p>Gaffar, Afan. <i>Javanese Voters: a case study of election under a hegemonic party system</i>. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.</p> <p>----- <i>Politik Indonesia transisi menuju demokrasi</i>. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999.</p> <p>Geertz, Clifford. (editor). <i>Old Societies and New States. The Quest for Modernitu in Asia and Africa</i>, New York: The Free Press, 1963.</p> <p>----- <i>The Religion Of Java</i>. Glencoe, Ill: Free Press, 1960.</p> <p>Magenda, Burhan D. <i>Aspek Keadilan Sosial dalam Kebudayaan PolitikIndonesia: Beberapa Pendekatan Teoritis</i>. Makalah dalam Kongres II HIPIS/Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial, 14-20 November 1977, Manado.</p> <p>Majalah TELSTRA No 64 Januari-Februari 2001.</p>

	<p>Philips, Anne. <i>The Politics Of Presence</i>. Oxford: Clarendon Press, 1995.</p> <p>Rauf, Maswadi <i>Konsensus Politik: sebuah penjajagan teoritis</i>. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas, 2000.</p> <p>----- “Pemerintah Daerah dan Konflik Horizontal” (Makalah). Jakarta: 2002.</p> <p>----- <i>Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia</i>. Jakarta, Salemba Raya 6, 1 November 1997.</p> <p>Samosir, Osbin. <i>Keterwakilan Politik Kristen di Basis Islam yang Kuat</i>. Jakarta: UKIPress, 2017.</p> <p>Ware, Alan. <i>Political Parties and Party Systems</i> (United States, New York: Oxford University Press Inc., 1996.</p>	
Media Pembelajaran	Perangkat lunak:	Perangkat keras:
	<p>MS Windows</p> <p>MS Office Power Point</p> <p>MS Windows Media Player Internet Explorer</p>	<p>Laptop</p> <p>Spidol board marker</p> <p>Whiteboard</p> <p>Poster</p> <p>LCD</p>
Matakuliah syarat	Sistem Perwakilan Politik	
Dosen Pengampu	<b>Dr Osbin Samosir, M.Si</b>	
Estimasi waktu	2 x 50 menit dalam setiap pertemuan, dilanjutkan dengan diskusi dalam kelas pada 50 menit terakhir.	

Mg. Ke-	Sub CP MK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
					Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu memahami apa itu Konsep dan Pengertian Sistem Perwakilan. Bagaimana Pengertian ini dikaitkan dengan asal muasal perwakilan polirik perdana Yunani dalam bentuk polis-polis hingga keruntuhannya, hingga lahirnya Kembali demokrasi setelah berabad-abad terkubur oleh praktek feodalisme	<p><b>“Perwakilan Politik Di Athena Kuno”</b></p> <p>a.Pengertian Umum</p> <p>b.Demokrasi Yunani dan Keruntuhannya</p> <p>c. Riwayat Perwakilan Rakyat</p>	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	- Kemampuan Akhir Mahasiswa mampu memahami Mahasiswa bagaimana sistem perwakilan politik dimulai di Athena Yunani kuno sebagai Sistem Perwakilan Politik perdana yang dipraktikkan dalam sistem bernegara dalam bentuknya yang sangat	- Keaktifan dan kemampuan komunikasi dalam diskusi dan Tanya jawab. - Ketepatan dalam menjawab pertanyaan yang muncul pada saat diskusi. - Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pengertian Sistem Perwakilan Politik, praktek masa Athena Yunanai, dan keruntuhannya - memahami bahwa demokrasi lahir Kembali setelah ribuan tahun terkubur oleh	2%

Mg. Ke-	Sub CP MK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
					Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<p>sederhana dan kemudian kelak hilang dari sistem politik dunia dalam masa yang lama dan panjang.</p> <p>-Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis</p>	feodalisme	
2	<p>Mahasiswa mampu memahami bagaimana konsep system perwakilan di zaman modern terkait dengan konsep system perwakilan hingga lahirnya Lembaga paralem dan kaitannya dengan kekuasaan. Sistem</p>	<p><b>“Konsep Sistem Perwakilan Modern”</b></p> <p>a.Konsep Sistem Perwakilan</p> <p>b.Ide Perwakilan Rakyat</p> <p>c.Lembaga Parlemen dan</p>	<p>Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab</p>	<p>Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan</p>	<p>- Kemampuan Akhir Mahasiswa mampu memahami bagaimana sistem perwakilan politik modern, lahirnya ide perwakilan</p>	<p>- Keaktifan dan kemampuan komunikasi dalam diskusi dan Tanya jawab.</p> <p>- Ketepatan dalam menjawab pertanyaan yang muncul pada saat diskusi.</p> <p>- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ap</p>	2%

Mg. Ke-	Sub CP MK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
					Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ini adalah bentuk dari lahirnya Kembali demokrasi setelah berabad-abad terkubur oleh praktek feodalisme	Hubungan Kekuasaan  d.Teori Perwakilan			hinga pembentukan kelembagaan di parlemen dan hubungan kekuasaan.  -Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	aitu Sistem Perwakilan Politik modern, praktek masa Athena Yunanai, dan keruntuhannya - memahami bahwa demokrasi lahir Kembali setelah ribuan tahun terkubur oleh feodalisme	

Mg. Ke-	Sub CP MK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
					Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa mampu memahami para tokoh Peletak Dasar Sistem Perwakilan Politik</li> <li>Dapat menjelaskan Format Sistem Perwakilan Modern.</li> </ul>	<p><b>“Peletak Dasar Sistem Perwakilan Politik”</b></p> <p>a. Perwakilan Politik menurut Thomas Hobbes</p> <p>b. Perwakilan Politik menurut John Locke</p> <p>c. Perwakilan Politik menurut Montesquieu</p> <p>d. Perwakilan Politik menurut JJ. Rousseau.</p>	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa test, kuis lisan dan tertulis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keaktifan dan kemampuan komunikasi dalam diskusi dan Tanya jawab.</li> <li>Ketepatan dalam menjawab pertanyaan yang muncul pada saat diskusi.</li> <li>Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teoriterbentuknya maupun tujuan negara baik teori klasik maupun teori kontemporer.</li> </ul>	2%

Mg. Ke-	Sub CP MK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
					Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa mampu memahami apa dan bagaimana postur Struktur sistem Perwakilan Politik di era Modern.</li> <li>Dapat menjelaskan Format Sistem Perwakilan Modern.</li> </ul>	<p><b>“Struktur Sistem Perwakilan Modern ”</b></p> <p>a. Sistem Perwakilan Modern  b. Struktur kelembagaan Perwakilan Rakyat  c. Posisi Perwakilan  d. Peran Perwakilan Politik/Parlemen  e. Keanggotaan di Perwakilan Politik/Parlemen</p>	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa test, kuisioner dan tertulis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keaktifan dan kemampuan komunikasi dalam diskusi dan Tanya jawab.</li> <li>Ketepatan dalam menjawab pertanyaan yang muncul pada saat diskusi.</li> <li>Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teoriterbentuknya maupun tujuan negara baik teori klasik maupun teori kontemporer.</li> </ul>	2%

Mg. Ke-	Sub CP MK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
					Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	Mahasiswa/i diharapkan mampu memahami perkembangan Format sistem Perwakilan Politik Modern yakni menyangkut: Kehadiran Figur Politik dan Bagaimana Kedalaman Penetrasi Partai Politik.	<p><b>“Format Sistem Perwakilan Modern: kehadiran figur politik dan kedalaman penetrasi partai politik”</b></p> <p>a. Kehadiran Figur/Sosok Politik</p> <p>b)Kedalaman Penetrasi Partai Politik</p>	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian dilakukan dengan cara mahasiswa menemukan contoh kasus dari keempat pendekatan tersebut dan rencana penelitian yang didasarkan pada konsep Format Sistem Perwakilan Modern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan dan kemampuan komunikasi dalam diskusi dan Tanya jawab.</li> <li>- Ketepatan dalam menjawab pertanyaan yang muncul pada saat diskusi.</li> <li>- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana Format Sistem Perwakilan Modern terkait pokok bahasan: Kehadiran Figur Politik , dan Kedalaman Penetrasi Partai Politik</li> </ul>	2 %

Mg. Ke-	Sub CP MK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
					Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Mahasiswa/i mampu memahami dan menjelaskan bagaimana Partai Politik melakukan seleksi terhadap para kandidatnya sebagai ukuran dari figur yang dapat diterima oleh publik secara luas sebagai pertimbangan utama partai menempatkan para kandidat atau calonnya.	<p><b>Seleksi Kandidat Partai Politik Dan Penerimaan Publik Atas Kader</b></p> <p>a. Seleksi Kandidat Partai dan Penerimaan Publik atas Kader</p> <p>b) Dominasi Partai Politik Konteks Indonesia</p>	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan dan kemampuan komunikasi dalam diskusi dan Tanya jawab.</li> <li>- Ketepatan dalam menjawab pertanyaan yang muncul pada saat diskusi.</li> <li>- Mahasiswa mampu memahami bagaimana Partai Politik melakukan seleksi terhadap para kandidatnya sebagai ukuran dari figur yang dapat diterima oleh publik secara luas sebagai pertimbangan utama</li> </ul>	2%

Mg. Ke-	Sub CP MK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
					Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	<p>1) Agar mahasiswa/i mampu memahami dan menjelaskan bagaimana Politik Kehadiran Sebagai Bentuk Perwakilan Politik baik dalam bentuk <i>Politics of Presence</i> sebagai Pengakuan Kesetaraan, maupun dalam Kontrol Publik dan Persamaan Politik sebagai model sistem perwakilan di era modern</p> <p>2) Mahasiswa mampu mengerti betul bagaimana <i>Politics of Presence</i> menjadi tuntutan pokok dalam Pemerintahan Mayoritas ketika</p>	<p><b>Politik Kehadiran: perwakilan politik dan kontrol publik</b></p> <p>a.) <i>Politics of Presence</i> sebagai Pengakuan Kesetaraan</p> <p>b) Kontrol Publik Dan Persamaan Politik</p> <p>c.) Politik Gagasan Para Kandidat</p> <p>d.) <i>Politics of Presence</i> dalam Pemerintahan Mayoritas</p> <p>e.) Catatan untuk Kehadiran Politik konteks Indonesia</p>	<p>Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab</p>	<p>Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan</p>	<p>Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis</p>	<p>Keaktifan dan kemampuan komunikasi dalam diskusi dan Tanya jawab.</p> <p>- Ketepatan dalam menjawab pertanyaan yang muncul pada saat diskusi.</p> <p>- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana Politik Kehadiran sebagai Bentuk Perwakilan Politik baik dalam bentuk <i>Politics of Presence</i> sebagai Pengakuan Kesetaraan, maupun dalam Kontrol Publik dan Persamaan Politik.</p> <p>- Mahasiswa</p>	<p>2%</p>

Mg. Ke-	Sub CP MK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
					Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kalangan minoritas menjadi pihak yang selalu terpinggirkan dan terlupakan oleh penguasa					mampu menjelaskan politik Gagasan dan <i>Politics of Presence</i> dalam pemerintahan Mayoritas	
8	Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan materi yang telah diajarkan dengan contoh atau studi kasus yang telah diajarkan	<b>ULANGAN TENGAH SEMESTER</b>	Pertanyaan atau tugas terstruktur	Mahasiswa menjelaskan dan menganalisis kasus dan konsep materi Sistem Perwakilan Politik yang telah diajarkan	Mahasiswa menjelaskan kasus dan konsep tentang Sistem Perwakilan Politik yang telah diajarkan	-Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. -Kualitas analisis, sistematika, dan substansi analisis yang didukung oleh argumentasi yang dalam dan kuat -Mahasiswa mampu apa itu Sistem Perwakilan Politik termasuk perkembangannya sejak zaman masa kuno di Athena Yunani hingga	30%

Mg. Ke-	Sub CP MK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
					Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
						kemudian pengertian di era modern dengan kehadiran figur Politik hingga <i>Politics of Presence</i> .	
9	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Ikatan Primordial Dalam Perwakilan Politik khususnya terkait dengan Lahirnya Kepentingan Politik Primordial, dan bagaimana Sifat Alami Kelompok Primordial yang masih menghantui peta politik diseluruh dunia termasuk dalam konteks Indonesia	<b>Ikatan Primordial Dalam Perwakilan Politik</b>  a. Lahirnya Kepentingan Politik Primordial  b Sifat Alami Kelompok Primordial  c.Dampak Riil Primordialisme Politik dan Sosial	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	- Keaktifan dan kemampuan komunikasi dalam diskusi dan Tanya jawab. - Ketepatan dalam menjawab pertanyaan yang muncul pada saat diskusi. - Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Ikatan Primordial Dalam Perwakilan Politik khususnya terkait dengan Lahirnya	2%

Mg. Ke-	Sub CP MK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
					Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Kepentingan Politik Primordial, dan bagaimana Sifat Alami Kelompok Primordial.	
10.	Mahasiswa/i mampu memahami dan menjelaskan bagaimana Dampak yang ditimbulkan oleh kehadiran Kelompok Primordialisme. Maka dalam praktek politik semua pihak harus menolak Isu Primordial dalam Politik Praktis karena dampaknya yang berbahaya.	<p><b>Menolak Ikatan Primordialsme Dalam Politik Praktis</b></p> <p>a.Dampak Kelompok Primordialisme</p> <p>b.Menolak Isu Primordial dalam Politik Praktis</p> <p>c.Primordialisme dalam Pemilu Era Reformasi Indonesia</p>	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan dan kemampuan komunikasi dalam diskusi dan Tanya jawab.</li> <li>- Ketepatan dalam menjawab pertanyaan yang muncul pada saat diskusi.</li> <li>- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana Dampak yang ditimbulkan oleh kehadiran Kelompok</li> </ul>	2%

Mg. Ke-	Sub CP MK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
					Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Primordialisme. Maka dalam praktek politik semua pihak harus Menolak Isu Primordial dalam Politik Praktis	
11.	Mahasiswa/i diharapkan mampu menguraikan berbagai macam konsep sistem Perwakilan politik dalam dua bidang, yakni: Politik Aliran, Figur Pemimpin Dan Nasionalisme, dan Prinsip Determinan Sosial, Agama, dan Budaya sebagai aspek yang masih berpengaruh dalam politik perwakilan.	<p><b>Politik Aliran</b></p> <p>a.Prinsip Determinan Sosial, Agama, Dan Budaya</p> <p>b.Fondasi Nasionalisme dalam Keterwakilan Politik</p>	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	<p>-Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan.</p> <p>-Kualitas analisis, sistematika, dan substansi analisis yang didukung oleh data objektif Mahasiswa mampu menjelaskan implementasi Politik Aliran, Figur Pemimpin Dan pentingnya prinsip Nasionalisme, dan Prinsip Determinan</p>	2 %

Mg. Ke-	Sub CP MK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
					Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Sosial, Agama, dan Budaya.	

Mg. Ke-	Sub CP MK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
					Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
12.	Mahasiswa/i diharapkan mampu menguraikan berbagai macam konsep sistem Perwakilan politik dalam dua bidang, yakni: Politik Aliran, Figur Pemimpin Dan Nasionalisme, dan Prinsip Determinan Sosial, Agama, dan Budaya sebagai aspek yang masih berpengaruh dalam politik perwakilan.	<p><b>“Penguatan Nasionalisme Dan Kebangsaan”</b></p> <p>a.Penguatan Nasionalisme dan Kebangsaan</p> <p>b.Tantangan ke-Indonesiaan kita</p>	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	<p>-Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan.</p> <p>-Kualitas analisis, sistematika, dan substansi analisis yang didukung oleh data objektif</p> <p>Mahasiswa mampu menjelaskan implementasi Politik Aliran, Figur Pemimpin Dan pentingnya prinsip Nasionalisme, dan Prinsip Determinan Sosial, Agama, dan Budaya.</p>	2 %

Mg. Ke-	Sub CP MK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
					Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
13.	Mahasiswa/i mampu memahami dan mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan bagaimana format Keterwakilan Politik di Golkar, PPP, dan PDI, serta pentingnya Fondasi Nasionalisme dalam Keterwakilan Politik. Dengan demikian tantangan primordialisme politik dan politik aliran akan dihadapi dengan jiwa nasionalisme.	<p><b>Politik Aliran Di Pemilu Orde Baru: keterwakilan politik di Golkar, PPP, dan PDI</b></p> <p>a. Politik aliran di masa Orde Baru</p> <p>b.) Praktek Patron Klien</p>	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	<p>-Keaktifan dan kemampuan komunikasi dalam diskusi dan Tanya jawab.</p> <p>- Ketepatan dalam menjawab pertanyaan yang muncul pada saat diskusi.</p> <p>- Mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan Keterwakilan Politik di Golkar, PPP, dan PDI, serta pentingnya fondasi Nasionalisme dalam Keterwakilan Politik.</p>	2%

Mg. Ke-	Sub CP MK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
					Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
14.	Mahasiswa/i mampu memahami dan mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan bagaimana format Keterwakilan Politik di Golkar, PPP, dan PDI, serta pentingnya Fondasi Nasionalisme dalam Keterwakilan Politik. Dengan demikian tantangan primordialisme politik dan politik aliran akan dihadapi dengan jiwa nasionalisme.	<p><b>Piramida Patron Klien Orde Baru Dan Kejatuhannya Kemudian</b></p> <p>a. Piramida Patron Klien di Orde Baru</p> <p>b. Oposisi Menguat dan Kejatuhan Orde Baru Suharto</p>	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	<p>-Keaktifan dan kemampuan komunikasi dalam diskusi dan Tanya jawab.</p> <p>- Ketepatan dalam menjawab pertanyaan yang muncul pada saat diskusi.</p> <p>- Mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan Keterwakilan Politik di Golkar, PPP, dan PDI, serta pentingnya fondasi Nasionalisme dalam Keterwakilan Politik.</p>	2%
15.	Mahasiswa mampu memahami dan	<b>Keterwakilan Politik Pada</b>	Ceramah, Diskusi dan	Mendengarkan penjelasan	Penilaian kualitatif	- Keaktifan dan kemampuan	2%

Mg. Ke-	Sub CP MK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
					Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
	menganalisis implementasi Sistem Perwakilan Politik di Era Reformasi ketika maraknya politik identitas khususnya atas nama agama dalam kaitannya dengan Nasib Politisi Kristen di Basis Islam di Era Reformasi, serta Alasan Pemilih Muslim Memilih Caleg Kristen di Basis Islam. Suatu fakta riil yang menarik dalam Pemilu Era Refromasi Indonesia.	<p><b>Pemilu Era Reformasi: Belajar Dari Keterpilihan Minoritas</b></p> <p>a.Memahami Kondisi Politik Era Reformasi</p> <p>b.Maraknya Politik Identitas</p> <p>c.Alasan Pemilih Muslim Memilih Caleg Minoritas</p>	Tanya jawab	dosen dan mengajukan pertanyaan	berupa tes, kuis lisan dan tertulis	<p>komunikasi dalam diskusi dan Tanya jawab.</p> <p>- Ketepatan dalam menjawab pertanyaan yang muncul pada saat diskusi.</p> <p>- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Sistem Perwakilan Politik di Era Reformasi ketika maraknya politik identitas khususnya atas nama agama dalam kaitannya dengan Nasib Politisi Kristen di Basis Islam</p>	

Mg. Ke-	Sub CP MK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
					Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan materi yang telah diajarkan dengan contoh atau studi kasus yang telah diajarkan	<b>EVALUASI AKHIR SEMESTER</b>	Pertanyaan atau tugas terstruktur	Mahasiswa menjelaskan dan menganalisis kasus dan konsep materi yang telah diajarkan	Mahasiswa menjelaskan kasus dan konsep yang telah diajarkan	-Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. -Kualitas analisis, sistematika, dan substansi analisis yang didukung oleh data objektif	45%

## **SISTEM PENILAIAN**

### A. Persyaratan Umum

#### 1. Kehadiran:

- a. Jumlah kuliah tatap muka per semester yang harus dihadiri oleh mahasiswa/i adalah 16 pertemuan.
- b. Batas toleransi kehadiran mahasiswa/i 75 % dari total jumlah pertemuan.
- c. Kriteria ketidakhadiran mahasiswa/i adalah: S (sakit) ditandai dengan surat keterangan dokter, I (Ijin) ditandai dengan surat ijin resmi, dan A (Alpa), maksimal 4x pertemuan kelas.
- d. Mahasiswa aktif dan parsitipatif mengikuti ibadah keluarga besar UKI dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan lain selama ibadah berlangsung.
- e. Toleransi keterlambatan perkuliahan (dosen + mahasiswa/i) setiap tatap muka adalah 15 menit. Jika setelah 15 menit dosen + mahasiswa/i tidak hadir maka perkuliahan dibatalkan. (kecuali ada persetujuan atau ada masalah tertentu).

#### 2. Perkuliahan:

- a. Mata kuliah dilaksanakan mahasiswa berbasis KKNI.
- b. Mata kuliah berbasis KKNI dinilai/dievaluasi per topik yang telah tuntas
- c. Persentase penilaian/evaluasi ditentukan oleh dosen yang bersangkutan sesuai kompetensi MK dan capaian pembelajaran.
- d. Tidak diperkenankan meninggalkan kelas selama perkuliahan tanpa ijin oleh dosen.
- e. Mahasiswa tidak diijinkan membuka HP saat proses belajar mengajar berlangsung tanpa ijin oleh dosen.
- f. Mahasiswa memakai busana yang sopan.
- g. Tidak membuat kegaduhan selama proses pembelajaran berlangsung.

3. Kejahatan akademik: plagiarisme Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010:

“Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. ” (Permendik No 17Tahun 2010 dan Panduan Anti Plagiarisme terlampir).

Sanksi sesuai Permendik No 17 Tahun 2010 Pasal 12:

- a. Teguran;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
- d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
- e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
- f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
- g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

B. Persyaratan Khusus

1. Tugas dan Tanggung jawab mahasiswa/i

Pada setiap tatap muka mahasiswa/i diwajibkan berpartisipasi aktif dalam proses perkuliahan melalui hal-hal berikut

- a. Kuis reguler: mahasiswa wajib mempersiapkan diri dan mengikuti kuis reguler yang diadakan setiap tatap muka. Materi kuis diambil dari materi yang akan dibahas pada tatap muka hari itu.
- b. Presentasi: mahasiswa/i wajib berpartisipasi aktif dalam diskusi yang diadakan dalam setiap tatap mukasesuai kebutuhan materi perkuliahan (lihat RPS).
- c. Studi lapangan/*service learning*: mahasiswa/I wajib berpartisipasi aktif dalam studi lapangan yang diadakandi

- luar kampus sesuai topik materi perkuliahan yang sudah ditentukan dalam RPS.
- d. Tugas Mandiri: mahasiswa/i wajib mengerjakan tugas mandiri dalam bentuk review materi kuliah yang telah diberi tanda bintang pada referensi yang digunakan di RPS.
  - e. Tugas terstruktur: mahasiswa/i wajib membentuk kelompok untuk mendiskusikan berbagai fenomena sosiologis yang berhubungan dengan media dengan menerapkan konsep, teori dan metode analisis sosiologis media untuk menganalisis dan menjelaskannya.
2. Gaya Selingkung Pengerjaan Tugas
- a. Untuk mengerjakan tugas review, mahasiswa/i wajib mematuhi ketentuan berikut:
    - i. Artikel mahasiswa/i harus ditulis dengan komposisi: Pendahuluan (1 hal), Pembahasan (2 hal), Kesimpulan (½ hal).
    - ii. Daftar referensi minimal menggunakan 3 buku dan 2 jurnal ilmiah.
    - iii. Pengutipan dan penulisan daftar pustaka menggunakan “Chicago Manual Style” (terlampir).
    - iv. Ketentuan kertas A4, huruf Cambria, ukuran jenis 12, spasi 1½.
  - b. Untuk mengerjakan tugas makalah kelompok, mahasiswa/i wajib mematuhi ketentuan berikut:
    - i. Artikel mahasiswa/i harus ditulis dengan komposisi: Pendahuluan berisi permasalahan dan pentingnya isu/fenomena tersebut dibahas (2 hal), Tinjauan Teoritis berisi teori apa yang hendak digunakan sebagai pisau analisis (2 hal), Pembahasan (5 hal), Kesimpulan (1 hal).
    - ii. Daftar referensi minimal menggunakan 5 buku dan 10 jurnal ilmiah.
    - iii. Pengutipan dan penulisan daftar pustaka menggunakan “APA (American Psychological Association).

- iv. Ketentuan kertas A4, jenis huruf Cambria, ukuran 12, spasi 1½.

C. Bentuk Evaluasi

1. Makalah
2. Artikel

Kriteria Penilaian Makalah dan Artikel

No	Indikator	Bobot (B)	Nilai (N)	B X N
1	Isi	60 %		
2	Referensi	15 %		
3	Jumlah Halaman	10 %		
4	Pengutipan	15 %		
<b>JUMLAH</b>				

3. Seminar

No	Indikator	Bobot (B)	Nilai (N)	B X N
1	Simulasi	20 %		
2	Topik dan penyajian jelas dan menarik	40%		
2	Kontekstual	20%		
3	Sumber data yang valid dan mutakhir	20%		
<b>JUMLAH</b>				

4. Aturan Untuk Presentasi Seminar:
  - a. Dibuat dalam bentuk power point.
  - b. Jumlah slide power point 15-20 slide, boleh menyertakan gambar jika diperlukan (maksimal 3 slide).
  - c. Pada setiap slide mencantumkan sumber data dari mana anda mengutip (jika pada slide itu anda mengutip).
  - d. Materi *power point* dikirimkan kepada dosen *by email* paling lambat satu minggu sebelum presentasi dilakukan.

D. Skala nilai akhir dalam huruf dan angka:

Nilai Akhir (NA)	Nilai Huruf (NH)	Nilai Mutu (NM)
81,0-100,0	A	4,0
75,0-80,9	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0
60,0-64,9	B-	2,7
55,0-59,9	C	2,3
50,0-54,9	C-	2,0
45,0-49,9	D	1,0
<44,9	E	0

Prosentase Tahap Penilaian Tugas dan kewajiban mahasiswa:

Kehadiran	: 10 %
Tugas Mandiri (Diskusi Dan Makalah)	: 20 %
Ujian Tengah Semester (UTS)	: 30 %
Ujian Akhir Semester (UAS)	: 40 %

Jakarta, 2 September 2021

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Politik,



**Fransiskus X. Gian Tue Mali, S. I.Kom, M.Si**

Dosen Pengampu,



**Dr. Osbin Samosir, M.Si**

# **MODUL 1**

## **PERWAKILAN POLITIK DI ATHENA KUNO DAN KONSEP SISTEM PERWAKILAN MODERN**

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1. Deskripsi Singkat**

Modul-1 ini akan membantu mahasiswa mempelajari sistem perwakilan politik sebagai model dari perwakilan rakyat dalam pengambilan kebijakan bernegara dengan praktek perdana di masa pemerintahan Yunani kuno. Bentuk demokrasi pertama yang dipraktekkan di Athena Yunani kuno memberikan contoh konkrit bagaimana sistem perwakilan politik perdana telah dipraktekkan dalam bentuk bernegara yang melibatkan langsung hampir seluruh warga negara dari masyarakat negara-negara kota (polis) di Yunani. Bentuk negara kota ini menjadi gambaran riil bagaimana sistem perwakilan politik pertama dipraktekkan. Namun sistem politik ini kemudian mengalami keruntuhan karena format sistem perwakilan yang dipraktekan saat itu sangat tidak memadai menghadapi situasi perang dan pertikaian dengan negara/daerah lain yang membutuhkan kecepatan pengambilan keputusan.

#### **2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

Capaian pembelajaran dari Modul 1 ini adalah:

- a.** Mahasiswa mampu memahami bagaimana praktek sangat awal sistem perwakilan dilaksanakan di Athena Yunani kuno sekitar tahun 400 an sebelum masehi
- b.** Memahami bagaimana terbentuknya kesadaran sosial akan persoalan politik bangsa berdasarkan pemahaman akan Sistem Perwakilan Politik di Yunani kuno;
- c.** Mahasiswa mampu memahami apa itu Konsep dan Pengertian Sistem Perwakilan Politik, bagaimana Pengertian ini dikaitkan dengan asal muasal perwakilan politik perdana di Yunani kuno dalam bentuk polis-polis;
- d.** Mampu menemukan solusi atas fenomena politik berdasarkan konsep dan teori yang dipelajari.

### **3. Kemampuan Akhir**

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari Modul 1 ini adalah:

- a. Mahasiswa mampu memahami bagaimana sistem perwakilan politik dimulai di Athena Yunani;
- b. Mahasiswa mampu memahami bagaimana dunia kelak kehilangan sistem perwakilan itu dalam masa yang lama dan panjang;
- c. Mahasiswa mampu menuntaskan ujian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis.

### **4. Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)**

### **5. Kegunaan Modul 1**

Kegunaan atau manfaat dari Modul 1 ini adalah menolong mahasiswa memahami Sistem Perwakilan Politik sebagai sebuah sistem yang secara alamiah terjadi dalam sebuah negara. Mahasiswa juga memiliki landasan analisis dalam memahami berbagai teori tentang terbentuknya, sifat, dan ruang lingkup sistem perwakilan politik yang lahir dalam sebuah negara.

### **6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

Materi pokok dalam Modul 1 ini adalah bentuk, aktor, institusi dan cara kerja Sistem Perwakilan Politik dengan melihat praktek langsung sistem perwakilan politik di Athena Yunani, serta pada pembelajaran II adalah bagaimana sistem itu kemudian malah hilang dan tak dipakai dalam ribuan tahun kemudian karena dianggap tidak memadai dalam sistem bernegara saat itu dan dimasa kemudian hingga menjelang lahirnya zaman perubahan kemudian yakni masa *Aufklarung* di masa hingga akhir Abad Pertengahan.

## **B. KEGIATAN PEMBELAJARAN**

### **B.1. KEGIATAN PEMBELAJARAN 1**

#### **1. Judul Kegiatan Pembelajaran : Perwakilan Politik Di Athena Kuno**

#### **2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

Mahasiswa mampu memahami Mahasiswa memahami bagaimana sistem perwakilan politik dimulai di Athena Yunani kuno sebagai Sistem Perwakilan Politik perdana yang dipraktekkan dalam sistem bernegara dalam bentuknya yang sangat sederhana.

#### **3. Uraian, Penjelasan, dan Praktek Keterwakilan**

##### **a. Pengertian Umum**

Dalam kegiatan mempelajari berbagai materi dalam Sistem Perwakilan Politik, penting untuk harus terlebih dahulu memahami konsep atau teori tentang apa pengertian mendasar dari Sistem Perwakilan Politik sebagai upaya memahami peta politik perwakilan secara umum. Karena itu, materi pertama ini membahas tentang pengertian dasar sistem perwakilan politik, bagaimana sistem perwakilan politik lahir di masa kuno di Athena Yunani, dan kelak keruntuhannya kemudian. Pemahaman awal ini menjadi penting karena teori, teori-teori dalam ilmu politik memiliki objek analisis yang terbagi dalam institusi politik dan perilaku politik dari para aktor politik. Keduanya terjadi di dalam sistem politik yang dianut atau dimiliki oleh sebuah negara.

Secara sederhana, Sistem Perwakilan Politik bisa dipahami sebagai salah satu bentuk demokrasi yang dizaman modern mengalami perubahan semakin matang sejak kelahirannya perama sekali di masa Yunani Kuno. Kata dasar utama adalah Perwakilan dalam konteks Politik. Perwakilan sekurang-kurangnya menandai tiga makna yang tersirat di dalamnya, yakni: ada pihak yang menjadi diwakili, ada gagasan yang diwakilkan, dan ada pihak si Terwakil, dan ranah ketiganya berada dalam lingkup politik. Pengertian politik di sini adalah seluruh yang menyangkut kebijakan negara yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan apapun yang diambil oleh negara selalu berurusan dengan kepentingan utama masyarakat luas,

karena itulah apapun kebijakan pemerintah seluruhnya harus disebut sebagai urusan politik.

Jika melihat tiga pihak utama dalam perwakilan di atas, bisa dijelaskan satu persatu secara sederhana demikian: pihak yang diwakili, adalah warga negara yang jumlahnya tentu tidak memadai untuk seluruhnya digabungkan dalam satu wadah pengambilan kebijakan. Untuk mewadahi keberadaannya dalam pengambilan kebijakan politik negara, maka warga negara menentukan siapa yang akan menjadi wakil mereka. Artinya, kehadiran warga negara tetap dihormati dan diakui sepenuhnya tanpa kecuali, warga negara tidak menjadi pihak yang tidak berarti, apalagi sebagai pihak yang dianggap tidak ada. Sesungguhnya warga negara yang jumlahnya teramat banyak itu membuat sebuah kesepakatan untuk membulatkan hati dan pilihan mereka menunjuk atau menentukan satu atau sejumlah orang saja sebagai wakil mereka.



Gambar 1. Parthenon sebagai Kuil Dewi Athena di masa Yunani Kuno

Dalam hal ini menjadi sangat penting bahwa keberadaan setiap orang entah dia minoritas dalam hal identitas agama, identitas jenis kelamin, identitas suku, identitas warna kulit, identitas pendidikan dan keterpencilan serta terlupakan, harus tetap dianggap sebagai bagian dari warga negara yang diwakili itu juga. Dalam paham yang paling masuk akal, warga negara meliputi seluruh warga negara, dan perjuangan atas kepentingan mereka termasuk kepentingan kalangan yang paling terpinggirkan dan paling minoritas dalam kuantitas atau juga dalam kualitas (pendidikan sangat rendah, kalangan miskin, daerah terpencil) harus masuk dalam lingkup

warga negara yang memiliki kedaulatan yang sama sebagai masyarakat bemartabat.

Dalam sistem perwakilan, ada gagasan atau kehendak umum yang dibawa atau diperjuangkan. Gagasan itu tidak menjadi barang kosong seperti kebanyakan terjadi yang mengundang kekecewaan masyarakat yang gagasan dan kepentingannya kerap jauh panggang dari api, jauh dari apa yang harus diperjuangkan. Kekecewaan terbesar warga negara adalah Ketika kebohongan besar terjadi dari saat masa kampanye atau perumusan gagasan untuk dibawa dan diperjuangkan dalam pengambilan kebijakan negara, tetapi justru tak pernah disentuh sebagai bagian dari yang diperjuangkan.

Kepentingan pribadi, atau egoism kelompok atau hanya kepentingan orang per orang tertentu atau kepentingan pertemanan dan lingkup di sekitarnya saja yang kerap menjadi perjuangan dari orang yang dipilih sebagai wakil. Padahal misi utama atau pokok mendasar kehadiran seorang wakil adalah mengusung gagasan besar dan kehendak utama dari masyarakat yang mewakilkan dirinya. Gagasan itu harus menjadi gagasan dari seluruh masyarakat, entah gagasan itu dari masyarakat yang paling kecil dan terlupakan sesuai kehendak dan keinginan mereka, pun gagasan dari masyarakat yang jauh dan tak terjangkau oleh pusat kekuasaan pengambil kebijakan harus selalu dipertimbangkan dan sangat serius sebagai gagasan yang harus diperjuangkan.

Pihak ketiga yang tentu sangat penting adalah si Terwakil itu sendiri, yakni pribadi atau sosok atau sejumlah orang yang terpilih sebagai wakil dari masyarakat yang memilihnya. Keberadaan si Terwakil harus benar benar disadari sebagai pembawa suara dan gagasan serta kehendak mendalam dari seluruh warga negara terutama yang memilihnya. Setidaknya keberadaan si Terwakil adalah gambaran dari warga negara di lingkup wilayah atau daerah darimana dia berasal dan berangkat terpilih sebagai wakil warga negara. Terlebih harus diingat, bahwa apa yang dijanjikan dimasa sebelum terpilih secara resmi, atau apa yang disepakati bersama dengan warga negara ketika masih merumuskan draft pokok gagasan yang akan dibawa, atau setidaknya yang mungkin disampaikan dalam kampanye sebelum pemilihan, harus menjadi bagian kesadaran pokok terpenting.

Si Terwakil adalah bahagian utama dari sejumlah masyarakat darimana ia terpilih. Ini yang sering tidak memunculkan kesadaran bagi setiap si Terwakil ketika dalam proses berjalannya waktu ia lupa sebagai bahagian yang harus sadar bahwa dirinya ada karena kehendak warga negara dari wilayahnya. Maka secara sederhana bisa dijelaskan bahwa ketiga pihak dalam sistem perwakilan politik menunjukkan langsung pada urusan yang berbau urusan politik yakni kebijakan negara. Kebijakan politik dimaksud diurus dan dilaksanakan oleh si Terwakil dimaksud ketika berhadapan dengan kebijakan negara, yakni kebijakan yang meliputi seluruh kepentingan masyarakat sebagai warga dari sebuah negara.

Gagasan yang dibawa dan dirumuskan sejak awal harus dikonversi menjadi gagasan dan kepentingan yang harus diperjuangkan kepada negara karena keberadaannya adalah wakil dari para rakyat yang sangat banyak sehingga harapan dari warga negara yang mengharapkannya sejak sangat awal. Target tertinggi tentu saja gagasan itu menjadi program kerja pemerintah yang langsung diaplikasikan dalam tindakan konkrit berjabahkan kebijakan pemerintah. Atau setidaknya, menjadi prioritas gagasan yang diharapkan bisa terwujud, atau setidaknya terlihat bahwa sudah diperjuangkan. Kritik terbesar pada umumnya selama ini karena si Terwakil cenderung menjadi menara gading yang jauh dari kehidupan dan perjuangan realitas masyarakat miskin dan masyarakat tertinggal.

#### **b. Demokrasi Yunani dan Keruntuhannya**

Demokrasi Athena merupakan suatu pelaksanaan demokrasi langsung, yaitu bahwa orang tidak memiliki perwakilan untuk memberikan suara atas nama mereka, melainkan masyarakat langsung memberikan suara untuk menentukan kebijakan. Kisah itu dimulai dengan berakhirnya pemerintahan Hippias yang kekuasaan tiran, digantikan oleh Kleisthenes (lahir 570 SM) dari keluarga Alkmaeonid. Kleisthenes terkenal karena mereformasi konstitusi Athena kuno dan menetapkan dasar bagi demokrasi Athena pada tahun 508/7 SM, sehingga para sejarawan sering menyebutnya sebagai "Bapak Demokrasi Athena." Dia juga disebutkan meningkatkan kekuasaan majelis Athena dan mengurangi kekuasaan para bangsawan Athena. Kleisthenes tidak menghendaki Athena kembali dipimpin oleh tiran. Kleisthenes menginginkan rakyat jelata di Athena merasa bahwa

pemerintahan dan masyarakat sendiri dapat mengubah hal yang tak mereka kehendaki dengan cara memilih tanpa perlu menimbulkan perang. Maka Kleisthenes menciptakan sistem demokrasi.

Demokrasi Athena menempatkan laki-laki dewasa ikut menentukan semua keputusan penting terkait Athena, misalnya apakah Athena harus berperang atau tidak. Rakyat berkumpul di Majelis (Ekklesia) di sebuah bukit di Athena yang disebut Pnyx. Majelis ini tidak boleh dihadiri oleh perempuan, budak, anak-anak, dan orang asing. Penetapan keputusan apapun baru boleh dilakukan setelah sekitar 6000 (enam ribu) pria berkumpul di Ekklesia. Pertemuan dilakukan sekitar sebulan sekali, kecuali dalam keadaan darurat.

Rakyat Athena juga memilih 500 (lima ratus) pria setiap tahun melalui undian untuk masuk dalam Dewan Lima Ratus atau Boule, yang melakukan rapat lebih sering. Boule membahas pengajuan hukum baru kepada Majelis, mengawasi pelaksanaan hukum yang berlaku, mengelola sarana umum seperti jalan, stoa, dan kuil, serta mengurus penyediaan kapal dalam angkatan laut Athena. Tugas mereka yang paling penting adalah menyusun musyawarah untuk dibahas dan disetujui di Majelis. Mereka juga mengarahkan keuangan, mengendalikan pemeliharaan armada dan kavaleri, menilai kelayakan hakim terpilih, menerima duta besar asing, memberi nasihat kepada para jenderal dalam masalah militer, dan mereka dapat diberi kekuatan khusus dalam keadaan darurat.

Rakyat Athena juga memilih beberapa pejabat untuk mengelola urusan tertentu. Sembilan orang pria dipilih melalui undian untuk menjadi arkhon. Pada masa Kleisthenes dan setelahnya, arkhon bertugas terutama untuk mengelola urusan keagamaan seperti menyelenggarakan kurban umum. Setiap tahun, Majelis memilih sepuluh pria untuk menjadi strategos (jenderal). Pada awalnya para strategos hanya bertugas memimpin angkatan darat dan angkatan laut Athena. Namun pada masa Perang Peeloponnesos, mereka ikut terlibat dalam pemerintahan. Beberapa Strategos yang terkenal adalah Perikles, Themistokles, dan Alkibiades. Perang Peloponnesos (431-404 SM) antara Sparta dan Athena, beserta sekutu masing-masing, amat sangat melemahkan kekuatan kolektif Yunani, dan pada 336 SM, hampir semua negara-kota di Yunani berada di bawah kekuasaan Makedonia.

Bagian lainnya dalam sistem demokrasi Athena adalah sistem peradilan. Setiap pria dapat secara sukarela menjadi juri. Diperlukan 6000 (enam ribu) sukarelawan setiap tahunnya. Setiap harinya, dipilih 500 (lima ratus) pria sebagai juri dalam persidangan. Para juri menetapkan putusan dalam suatu kasus melalui pemungutan suara. Terdakwa tidak dapat mengajukan banding. Juri di Athena tidak hanya mengurus kasus pidana dan perdata, melainkan juga menentukan layak atau tidaknya hukum yang diloloskan oleh Majelis.

Demokrasi Athena amat terguncang oleh Perang Peloponnesos, yang bermula pada tahun 441 SM. Ketika Athena mulai mengalami kekalahan atas Sparta, beberapa orang termasuk filsuf yang dianggap abadi pemikirannya hingga saat ini seperti Sokrates dan Plato, merasa bahwa Athena harus meninggalkan demokrasi dan kembali menerapkan oligarki. Kekalahan terjadi karena terlalu banyak diskusi menghadapi perang, Ketika setiap orang, baik petani, buruh bangunan, pekerja di pasar dan masyarakat tidak terdidik lainnya sama hak dan suaranya dalam rapat di Ekklesia untuk menentukan keputusan strategi apa yang akan digunakan dalam perang, apakah perang perlu diadakan atau tidak, dan diskusi panjang bertele-tele apakah kekuatan perang Yunani mampu menghadapi Sparta atau tidak. Ketika diskusi belum rampung, perang sudah di depan mata. Pada tahun 404 SM Athena benar-benar kalah dalam perang itu.

Setelah perang usai, Athena kembali menerapkan demokrasi, dan hasil demokrasi yang paling dikenang adalah keputusan rakyat tidak terpelajar Athena menghukum mati Sokrates karena pemikirannya dianggap meracuni kaum muda. Sokrates dipaksa meminum racun yang dia tahu sendiri bahwa itu akan mematikannya. Lewat sebuah teori logika berpikir *Argumentum Ad Misericordiam* (memohon belas kasihan), Sokrates memohon kepada hakim untuk membatalkan keputusannya, namun permintaan Sokrates ditolak, dan Sokrates mati dengan meminum racun. Demokrasi Athena benar benar berakhir ketika raja Phillipos dari Makedonia tahun 300-an SM menyerang Athena. Pasukan Athena tak mampu mempertahankan kota dan akhirnya Athena jatuh dalam kekuasaan Makedonia.



Gambar 2. *The Age of Pericles*, cetakan berwarna yang menunjukkan Pericles menyampaikan pidato untuk menghormati orang Athena yang tewas dalam pertempuran pertama Perang Peloponnesia, setelah lukisan abad ke-19 oleh Philipp von Foltz.(britannica.com)

“Konsep representasi dalam arti satu orang mewakili orang lain pada dasarnya adalah istilah modern. Yunani Kuno tidak memiliki kata itu meskipun warga negara kota memilih sejumlah pejabat dan terkadang mengirim duta besar yang sebenarnya merupakan kegiatan yang saat ini dikategorikan dalam representasi”. Meskipun pada Abad Pertengahan kata itu dikenal dalam literatur agama Kristen dan digunakan dalam kehidupan masyarakat Kristen, namun maknanya belum mengandung arti tentang pendelegasian (utusan) atau agen (wali). Gagasan tentang seorang raja yang bertindak atas nama rakyat dan berusaha membangun kesejahteraan mereka terbentuk pada zaman Romawi. Pada abad ke-13 gagasan tersebut mulai diterapkan dalam kehidupan yang lebih luas, yaitu di bidang peradilan. Di Inggris konsep ini diperkirakan telah dikenal pada abad ke-14.

Penggunaan konsep representasi dalam kehidupan politik erat kaitannya dengan pertumbuhan institusi, perkembangan pemikiran tentang institusi dan perkembangan kata secara etimologis. Perkembangan parlemen di Inggris telah dikenal sejak Magna Charta pada tahun 1215. Perkembangan fungsi parlementer yang dijalankan oleh para anggotanya juga didorong oleh gagasan bahwa setiap orang terwakili di parlemen dan gagasan bahwa penguasa adalah simbol seluruh rakyat. Pada tahun 1583 Thomas Smith menggunakan kata perwakilan di parlemen.

Selama ini konsep baru representasi politik menggambarkan hubungan perwakilan dimana perwakilan bertindak sebagai delegasi bagi perwakilan. Namun pengaruh pemikiran Hobbes yang muncul pada pertengahan abad ke-16 dan Burke lebih dari satu abad kemudian (1774) memasukkan unsur baru ke dalam konsep tersebut, yaitu kebebasan perwakilan dalam menentukan sikap mereka untuk diwakili. Itu juga selama masa itu bahwa gagasan diwakili sebagai individu memperkaya pemahaman asli bahwa perwakilan bertindak atas nama kelompok. Perkembangan kehidupan politik seperti parlemen, pemilihan umum yang juga terkait dengan pertumbuhan ilmu-ilmu sosial, semakin memperkaya konsep ini dengan berbagai unsur dan maknanya. Pada pertengahan abad ke-19 J.S. Mill diikuti oleh Clark dan Smith pada awal abad ini dan tokoh-tokoh seperti John Whalke, Heinz Eulau, William Buchanan pada tahun 1960-an mengembangkan konsep tersebut. Jika kita berhadapan dengan konsep modern representasi politik saat ini, maka pemahaman rinci tentang perwakilan, yang diwakili, fokus perwakilan, posisi perwakilan, tanggapan dan tanggung jawab perwakilan sudah menjadi bagiannya.

Walaupun cara perwakilan melalui pemilihan umum sekarang sudah menjadi hal yang umum, namun cara perwakilan dengan penunjukan atau pengangkatan tetap digunakan secara utuh, dalam arti semua anggota badan perwakilan menggunakan atau menggunakan cara sebelumnya. Memang, perbedaan antara sistem perwakilan politik modern dan sistem yang belum berkembang didasarkan pada proses keanggotaan dalam badan perwakilan. Proses pengangkatan atau pengangkatan tergolong tradisional karena telah ada selama 22 abad, yaitu pada zaman Yunani dan Romawi kuno. Selain itu, metode ini diharapkan tidak menciptakan badan perwakilan yang lebih mencerminkan realitas masyarakat karena anggota masyarakat tidak menunjuk wakilnya. Karena para deputi dipilih oleh penguasa, terserah

Bentuk, kemudian, tentu saja, anggota parlemen bersama lebih mencerminkan aspirasi partai-partai yang membentuknya. Sekurang-kurangnya susunan anggota badan perwakilan yang diangkat menurut pandangan partai menjamin status orang-orang yang diwakilinya. Pemilihan dianggap sebagai prosedur untuk menjadi anggota parlemen modern, karena metode ini memberikan kesempatan kepada umat paroki untuk menunjuk wakilnya secara independen. Cara ini diyakini memungkinkan terbentuknya komposisi badan perwakilan yang menggambarkan komposisi masyarakat sehingga badan perwakilan dipandang

sebagai miniatur dari masyarakat itu sendiri. Selain itu, pemilihan parlemen modern moniker juga berasal dari penemuan dan penggunaannya yang relatif baru. Lembaga politik ini tidak diakui di Inggris sampai pertengahan abad ke-17 dan digunakan untuk mengangkat anggota parlemen.

Perkembangan pemilu Umum menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sistem yang pada hakekatnya diturunkan dari dua bentuk utama, yaitu sistem pemilu berimbang (*multiple constituency*) dan sistem pemilu distrik (*single constituency*). Ternyata hasil dari kedua sistem ini tidak menjamin tingkat keterwakilan politik yang sama. Perbandingan kelebihan dan kekurangan kedua sistem memberikan pemahaman tentang hubungan antara sistem individu dan kualitas representasi politik.

Sistem pemilihan distrik sebenarnya mudah dihitung, karena hanya satu anggota parlemen yang diharapkan untuk setiap distrik sebagai daerah pemilihan, terlepas dari jumlah kandidat dan organisasi politik yang berpartisipasi dalam pemilihan. Akibatnya, partai-partai yang telah lama tidak mampu memenangkan pemilih yang mendekati pemenang di daerah pemilihan kehilangan dukungan karena putus asa dan akhirnya bubar atau menjadi tidak aktif. Kecenderungan ini membawa sistem kepartaian ke dalam struktur yang lebih sederhana, seperti sistem dua partai atau bentuk lainnya. Justru dua karakteristik sistem distrik inilah yang tidak mendukung keterwakilan politik. Karena itu sudah berakhir. Satu anggota parlemen per distrik berarti bahwa suara partai yang kalah sejauh ini telah diberikan oleh anggota parlemen, meskipun pemenang melihat dirinya sebagai wakil dari seluruh penduduk distrik yang diwakilinya. Namun, kecenderungan penyederhanaan sistem kepartaian seperti yang dimanifestasikan di banyak partai telah mempersempit saluran aspirasi rakyat. Tidak aktif atau bubar partai memaksa pendukung partai menjadi pasif secara politik karena merasa tidak terwakili dalam sistem politik.

Pada saat yang sama, menganjurkan sistem yang seimbang berdasarkan jumlah pemilih atau badan. Itulah sebabnya para pendiri partai selalu mengharapakan sistem ini, sehingga banyak yang melihat perlunya membangunnya. Jumlah partai yang cenderung besar tentu menjadi peluang bagi penduduk untuk memilih salah satu yang paling mereka pertimbangkan sesuai dengan kepentingan dan ambisi politiknya. Selain itu, sistem tidak mengabaikan jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mendukung seorang wakil dengan menambahkan mereka ke pemilih dari

partai yang sama dari daerah pemilihan yang berbeda untuk mendapatkan jumlah suara yang cukup untuk mendukung seorang calon. Adanya alternatif yang cukup untuk menyalurkan upaya keterwakilan di satu sisi dan pengabaian pemilu perwakilan yang berpihak pada partai kecil menunjukkan bahwa sistem pemilu yang berimbang menawarkan lebih banyak peluang bagi terbentuknya jenjang politik yang lebih tinggi, sehingga keterwakilan politik lebih terjamin.



Gambar 3. Pertemuan Dewan Athena alias Boule, pada tahun 594. Masing-masing dari 10 suku menyediakan 50 anggota dewan yang berusia minimal 30 tahun.

Pada kenyataannya, sistem pemilu yang berimbang tidak menjamin tingkat keterwakilan politik secara penuh. Karena sistem pemilu yang berlaku di banyak negara menggabungkan unsur dari dua sistem utama tersebut. Masalahnya, tidak ada jaminan bahwa kombinasi yang dikembangkan akan berdampak positif pada representasi politik. Pada akhirnya, pemilihan elemen dari dua sistem utama yang digabungkan ditentukan oleh niat pembuat kombinasi itu sendiri. Kombinasi yang lebih berpotensi memberikan peluang untuk tetap berkuasa dipandang kurang kondusif bagi pertumbuhan keterwakilan politik, karena kombinasi tersebut dapat mengecualikan sejumlah kandidat, sehingga kegagalan kandidat tersebut dipandang sebagai penurunan keterwakilan politik masyarakat. orang orang. para pemilih. Di sisi lain, komunikasi yang terus menerus dari

anggota parlemen dengan semua pihak di distriknya, berdasarkan keterwakilan terbuka, dipandang sebagai perbaikan atas kelemahan sistem distrik.

Sebagai anggota kelompok terpilih dalam masyarakat, perwakilan biasanya diperlakukan dan dimasukkan dalam kelompok kepemimpinan. Kekuasaan politik, dukungan, formalitas, status sosial, moralitas, dan segala atribut yang terkait dengan agen akan menjadi sumber kekuasaan bagi agen. Tingkat kumulatif sumber daya ini menentukan tingkat kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat. Namun, secara analitis, perbedaan harus dibuat antara perwakilan dengan kualitas kepemimpinan dan mereka yang memiliki otoritas murni. Karena tidak semua perwakilan mendapat legitimasi yang cukup melalui perwakilannya, maka perwakilan lebih mengandalkan formalitas dan posisi perwakilannya dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, tipe perwakilan ini lebih dipandang sebagai penguasa daripada pemimpin rakyat.

### **c. Riwayat Perwakilan Rakyat**

Gagasan pembentukan badan perwakilan pada hakikatnya muncul dari kebutuhan masyarakat akan hukum sebagai alat pengatur hidup berdampingan dan sebagai organ yang menciptakan dan menegakkannya. Mengikuti ide ini, penguasa semua negara memberlakukan dan menerapkan hukum atas nama rakyatnya untuk mengatur koeksistensi. Di sini kekuasaan negara dibagi menurut tugas-tugas tertentu, tetapi semua pihak terlibat dalam proses legislatif.

Semua penyelenggara negara dapat terlibat dalam penyusunan konstitusi dan juga dalam penyusunan ketentuan-ketentuan pelaksanaan konstitusi/UU. Partisipasi semua penguasa seperti ini dianggap pembuatan hukum dalam arti yang seluas-luasnya. Di zaman modern ini, parlemen digunakan semata-mata sebagai badan legislatif. Oleh karena itu, dikatakan bahwa fungsi utama legislatif khususnya di masa lalu kerap sekedar menjalankan proses legislasi dalam arti sempit.

Munculnya lembaga yang dirancang khusus sebagai legislator bertepatan dengan pertumbuhan hukum Romawi dari hari-harinya yang sederhana. Bangsa Romawi bahkan membuat perbedaan antara prosedur legislatif dan hukum. Namun, Kekaisaran Romawi dan penguasa yang

ditunjuk, yang memusatkan semua kekuasaan, melemahkan peran parlemen sebagai badan legislatif khusus. Tumbuhnya kekuasaan agama atas negara, yang diikuti dengan tumbuhnya feodalisme di Eropa, mengurangi peran badan perwakilan dalam perundang-undangan dengan cara lain: ketika kekuasaan gereja menghapuskan kekuasaan badan perwakilan karena undang-undang tentang doktrin agama, maka penguasa feodal menggerogoti pusat kekuasaan negara, yang menyebabkan melemahnya peran institusi. Perwakilan sebagai bagian dari lembaga negara yang mendukung kekuasaan pusat.

Peran legislatif di parlemen kembali diperkuat pada abad ke-11. Melemahnya para tuan tanah feodal yang digantikan oleh pusat kekuasaan negara, dan menguatnya gagasan tentang keharusan hukum menjadi sejumlah penyebab munculnya fenomena ini. Perkembangan selanjutnya menunjuk pada pembentukan badan perwakilan yang berfungsi secara otonom sebagai badan legislatif khusus. Memang, pada akhir abad ke-17, Inggris telah berhasil mengatasi kekuasaan raja dengan undang-undang yang diberlakukan oleh badan tersebut.

Bahkan, sejarah legislatif dapat ditelusuri kembali ke Yunani kuno. Warga Athena yang tergabung dalam Dewan Polis (Ekklesia) memiliki kesempatan untuk mempengaruhi politik, meskipun sejumlah kecil dari mereka mendominasi majelis. Dewan yang mendampingi Badan Eksekutif Lima Ratus (Vouli ton Pentakosion) ini bertugas memeriksa keputusan badan eksekutif dan membawanya ke dalam bentuk hukum melalui perdebatan di antara para anggota.

Senat Romawi datang pada akhir abad ke-5 SM. Untuk kekuatan. Kr. Bertanggung jawab sebagai badan penasihat. Pertengahan abad ke-4 SM Pihak berwenang diberi kekuasaan untuk menegakkan keputusan Comitia Centuriata, sebuah badan semi-militer yang terdiri dari 100 orang. Sejak akhir abad ke-3 SM Semua resolusi Masyarakat Plebeian (Concilium Plebis) sepenuhnya ditegakkan sebagai hukum. Pada saat ekspansi Roma, senat dan masyarakat dibentuk di semua negara yang ditaklukkan.

Parlemen dalam bentuknya yang sekarang didirikan di Inggris pada akhir abad ke-12. Baru pada akhir abad ke-14 Parlemen melayani Raja Inggris sebagai badan penasihat legislatif. Kemudian Parlemen bekerja pada

awal abad ke-15 melalui pemilihan umum yang tidak terjadi di Inggris hingga abad ke-18.

#### **4. Rangkuman**

Kehidupan politik menggunakan sistem perwakilan politik sesungguhnya sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu dalam kehidupan dimasa Yunani Kuno. Dimulai dengan demokrasi yang dicoba dipraktekkan di masa purba dalam kehidupan di negara-negara polis Yunani yang tentu format demokrasi dan perwakilan yang dilakukan sangat berbeda dengan praktek demokrasi yang saat ini dipraktekkan di seluruh dunia dewasa ini. Perkembangannya baru muncul puluhan abad kemudian di Eropah setelah lahirnya kesadaran baru yang menandai munculnya zaman pencerahan (*aufklarung*) di Abad Pertengahan.

Masa-masa kegelapan (*the dark ages*) yang meliputi seluruh dunia selama puluhan abad perlahan tergantikan dengan lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang menandai perlahan tergesernya masa-masa perbudakan dan kekuasaan tirani kerajaan dengan dua kekuasaan dalam satu pedang tunggal antara Imperium (Kaisar/Caesar) dan Gereja (Paus/Papa) dengan sebutan *Caecaropapisme*. Beberapa abad kemudian, demokrasi bertumbuh subur di daratan Eropah dan di masa-masa akhir abad ke-18 hingga menuju ke pertengahan abad ke-20, demam demokrasi melanda hampir seluruh dunia. Termasuk negara-negara yang baru melepaskan diri dari kolonialisme, termasuk Indonesia.

#### **5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek**

##### **a. Latihan**

- i. Setiap mahasiswa diminta untuk menjelaskan ulang secara ringkas mengenai praktek Sistem Perwakilan Politik yang dipahami di Athena Yunani kuno.
- ii. Setiap mahasiswa diberikan tugas menganalisis keruntuhan Sistem Perwakilan di Yunani kuno, tetapi malah sistem itu dihidupkan dalam demokrasi dewasa ini.
- iii. Mahasiswa diminta memberikan hasil analisis perbandingan sistem keterwakilan politik yang dilakukan di Yunani dikaitkan dengan Sistem Perwakilan Politik saat ini di Indonesia.

**b. Lembar Kerja Praktik**

Dalam lembar kerja praktek ini mahasiswa menuliskan contoh contoh praktek sistem Perwakilan di Yunani Kuno dan apa pandangan mahasiswa atas praktek itu.

No	Jenis Praktek di Yunani Kuno	Analisis Mahasiswa
1		
2		
3		

**c. Evaluasi Pembelajaran**

Mahasiswa memberikan analisis atas praktek-praktek pembelajaran sebagaimana terjadi di Yunani kuno, lalu dosen memberikan tanggapan dan masukan akhir seluruh atas seluruh proses pembelajaran.

**d. Umpan Balik**

Dosen memberikan tanggapan dan masukan akhir atas seluruh proses pembelajaran dengan melihat refleksi konteks Yunani kuno.

**B.2.KEGIATAN PEMBELAJARAN 2**

**1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Konsep Sistem Perwakilan Modern**

**2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

**a. Kemampuan Akhir (KA)**

Mahasiswa mampu memahami bagaimana sistem perwakilan politik lahir dan berkembang menjadi sistem perwakilan politik modern dari format sistemtem Perwakilan Politik perdana yang dipraktekkan dalam sistem bernegara dalam bentuknya yang sangat sederhana. Kompetensi umum yang diharapkan setelah mempelajari Modul 1 adalah mampu menjelaskan konsep representasi politik. Kompetensi spesifik yang diharapkan adalah kompetensi yang dapat digambarkan: sejarah terbentuknya parlemen di dunia, perbedaan hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan

presidensial dan parlementer, struktur kelembagaan parlemen menurut jumlah anggota, jumlah rapat, dan jumlah komite, fungsi Lembaga perwakilan, data cara pemilihan anggota parlemen, teori hubungan antara anggota parlemen dan pemilihnya, masa depan Lembaga perwakilan di tengah perubahan politik di dunia modern.

**b. Sub kemampuan akhir**

- 1) Dalam modul ini, konsep representasi politik dijelaskan dan dibahas secara khusus. Konsep-konsep yang dituangkan dalam modul ini nantinya akan menjadi semacam panduan untuk memahami lembaga legislatif di banyak negara pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya. Kami berharap dengan memahami konsep-konsep yang ada, nantinya Anda akan mengetahui dan memahami berbagai gaya dan bentuk lembaga legislatif di Indonesia.
- 2) Modul ini dimaksudkan sebagai pengantar untuk mempelajari dan memahami sejarah, konsep dasar dan teori lembaga perwakilan. Dengan pemahaman yang Anda peroleh dari modul ini, kami berharap Anda dapat menjelaskan konsep representasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini.

**3. Uraian, Penjelasan, dan Praktek Keterwakilan**

**a. Pendahuluan**

Sistem perwakilan politik dalam sistem politik dewasa ini menjadi isu politik yang sering diperbincangkan apalagi dalam sistem politik Indonesia pasca Reformasi 1998 yang melahirkan tatanan baru dalam sistem perwakilan Indonesia. Kehadiran perwakilan politik dalam tatanan lama Orde Baru selama 32 tahun berkuasa yang hanya menempatkan perwakilan politik warga negara sekedar sebagai formalitas belaka yang tanpa makna dengan lompatan besar ditinggalkan. Disebut tanpa makna karena semua urusan bernegara dari perwakilan politik rakyat di masa Orde Baru hanya menjadi ‘yes man’ atau “Asal Bapak Senang (ABS)” yakni mengikuti semua perintah untuk mengamankan kepentingan istana negara. Semua satu komando karena kewenangan eksekutif dibawah kendali Presiden Presiden

Soeharto teramat dominan (*executive heavy*) dalam semua lini sistem bernegara. Pasca reformasi 1998, lembaga perwakilan rakyat malah menjadi “*legislative heavy*” dengan kewenangan dan partisipasi pengambilan kebijakan politik sangat aktif dan terkesan mengalahkan kewenangan eksekutif khususnya dimasa 15 tahun awal sejak lahirnya reformasi Indonesia.

Maka menjadi sangat penting dan menjadi kebutuhan dewasa ini untuk melihat kembali kehadiran dan posisi sistem perwakilan rakyat sebagai representasi dari kehadiran warga negara. Dalam konteks Indonesia, tentu saja luas wilayah dan kepadatan penduduk harus diperhitungkan, sehingga tidak mungkin tercipta forum dengan seluruh masyarakat untuk mengambil keputusan langsung tentang banyak hal. Representasi yang memadai, adil dan sosial diperlukan untuk mendukung sistem ini. Keterwakilan politik diperlukan agar semua aspirasi, keinginan dan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi dinyatakan dalam kebijakan pemerintah.

Lembaga legislatif yang mencerminkan representasi politik kontemporer harus mampu beradaptasi dengan keberadaan lembaga eksekutif. Sistem presidensial atau parlementer merupakan pilihan bagi setiap negara untuk melihat mana yang paling cocok dan adil untuk semua. Namun, keberadaan lembaga legislatif juga harus mencerminkan konteks keterwakilan yang diinginkan, baik berdasarkan wilayah, suku, suku, agama, atau ikatan keluarga lainnya. Artinya, konsep representasi harus mencerminkan suara masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai lembaga politik modern, lembaga legislatif harus mampu bekerja dengan fungsi organisasi yang jelas. Oleh karena itu, fungsi legislasi harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, hubungan antara representasi dan representasi menjadi penting agar keputusan yang dihasilkan menjadi efektif. Dengan perubahan politik yang sedang berlangsung, legislatif berkewajiban untuk terus mempertimbangkan aspek hubungan elektoral. Periksa juga apakah wakil-wakil yang terpilih mampu mewakili kepentingan rakyat.

Dalam konteks Indonesia sebelum lahirnya Era Reformasi bisa dijelaskan bahwa keberadaan lembaga legislatif merupakan entitas politik yang menarik untuk dikaji. Bahkan mampu mengikuti perubahan dan dinamika politik yang menyertainya. Awalnya hanya berbentuk panitia sementara yang disebut KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) sampai menjadi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MPR (Dewan Perwakilan Rakyat), yang melalui periode politik yang berbeda. Lembaga legislatif di Indonesia dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik Indonesia, yang mengalami perubahan baik dari segi hubungan kelembagaan, kelembagaan internal, fungsi yang dirasakan dan cara pemilihan anggota.

**b. Konsep Sistem Perwakilan**

Gagasan akan lahirnya kembali demokrasi dimulai dari munculnya kekaguman pertama pada akal budi manusia sejak Zaman Skolastik hingga Abad Pertengahan (abad V – XV). Dimasa ini bermunculan tempat-tempat belajar di biara-biara Gereja berupa Skolastika. Sampai abad XII, institusi-institusi pendidikan di Eropa berada di bawah kekuasaan gereja dan biara. Kemudian lambat laun mereka mulai melepaskan diri dari dominasi gereja dan secara perlahan menunjukkan otonominya. Contohnya, Universitas Salerno (dekat Napoli) merupakan universitas pertama yang didirikan untuk studi kedokteran. Universitas Paris dan Bologne di bidang Hukum. Di Inggris dibuka universitas Oxford (1170) dan Cambridge (1209). Di Jerman berdiri juga universitas Vienna (1366) dan Heidelberg (1386). Rasionalitas manusia membawa manusia mampu berpikir untuk melepaskan diri dari kekuasaan feodalisme di masa masa kegelapan (dark ages), ketika Gereja dan raja-raja menjadi pemilik lahan/tanah dan masyarakat menjadi buruh atas tanah mereka sejak tahun 300 SM hingga tahun 1600 M.

Berbeda dari demokrasi langsung (*direct democray*) di masa Athena, demokrasi yang dipikirkan di masa kemudian ini adalah demokrasi secara tidak langsung (*indirect democracy*). Demokrasi tidak langsung menjadi pilihan karena faktor-faktor seperti luasnya suatu wilayah negara, populasi penduduk yang sangat cepat, makin sulit

dan rumitnya masalah politik dan kenegaraan, serta kemajuan ilmu dan teknologi merupakan persoalan yang menjadi kendala untuk melaksanakan demokrasi langsung pada era globalisasi sekarang. Demokrasi tidak langsung menunjukkan perlunya lembaga perwakilan yakni parlemen. Kelahiran parlemen ini pada dasarnya bukan karena gagasan dan cita-cita demokrasi tapi karena kelicikan sistem feodal.

Sejarahinya dimulai di Abad Pertengahan ketika yang berkuasa di Inggris adalah raja-raja/bangsawan yang sangat feodalistis (*monarchi feodal*). Dalam kerajaan yang berbentuk feodal, kekuatan berada pada kaum feodal yang berprofesi sebagai tuan tanah. Mereka tidak hanya kaya, mempunyai tanah yang luas, tapi mereka juga menguasai orang-orang yang ada dalam lingkaran kekuasaan (kerajaan). Raja membentuk suatu badan/lembaga yang terdiri dari para *lord* ditambah para pendeta. Kepada mereka raja meminta nasehat dalam masalah-malmasalah kenegaraan terutama yang berhubungan dengan pajak. Secara pelan tapi pasti lembaga ini menjadi permanen yang kemudian disebut "*Curia Regis*" dan kemudian menjadi *House of Lords* seperti sekarang.



Gambar 4. Raja John pada 15 Juni 1215 di padang rumput Runnymede di samping Sungai Thames antara Windsor dan Staines, menyegel (tidak menandatangani) dokumen yang sekarang dikenal sebagai Magna Charta.

Kelahiran *House of Lords* menjadi pertanda kelahiran lembaga perwakilan pertama di era modern. *House of lord* dalam perjalannya mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Maka ketika raja berkehendak untuk mengurangi kekuasaan dan hak-hak para *lord* maka muncullah pertikaian antara raja dan kaum ningrat (*lords*) yang didukung oleh rakyat dan kaum borjuis. Oleh kekuasaan pada kaum ningrat yang semakin besar dan kuat, maka raja mengalah dan bahkan hak k raja pun semakin dibatasi.

Kalangan rakyat dan kaum menengah yang menjadi korban kebijakan raja disaat ada kebijakan raja untuk menaikkan pajak, membuat rakyat semakin berani menuntut perlunya ada wakil mereka yang memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat ketika raja harus membuat kebijakan menaikkan pajak rakyat dan kebijakan pemeritahan lan yang langsung mengenai diri mereka. Para wakil itu akan menjadi tempat raja meminta pendapat dan keterangan sebelum sebuah kebijakan dibuat. Perjuangan kalangan nigrat di dalam *house of lord* yang didukung oleh para rakyat dan kaum menengah membuat kaum ningrat mendapatkan kemenangan. Sejak saat itu pula kedudukan rakyat dan kaum menengah menjadi kuat. Sebagai bagian dari perwujudan agar terbentuk perwakilan rakyat maka lahirlah apa yang disebut *Magnum Consilium* yang terdiri dari para wakil rakyat yang akhirnya disebut *House of Commons* sampai sekarang.

Perkembangan selanjutnya, *House of Commons* mempunyai kekuatan yang semakin bertambah. Mereka dapat membebaskan tugas para menteri (perdana menteri) yang tidak mereka sukai untuk turun dari kekuasaan, walaupun tidak berbuat kejahatan. Kekuasaan yang demikian dilakukan dengan mengajukan "mosi tidak percaya" yang dapat mengakibatkan jatuh dan mundurnya sebuah kabinet dan itu berlangsung sampai sekarang. Dalam konstitusi Inggris yang lebih berkuasa adalah *House of Commons* yang dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan *House of Lord* adalah kumpulan para lord yang terdiri dari para orang-orang yang ditunjuk dan turun-temurun.

### **c. Ide Perwakilan Politik**

Perwakilan Politik bisa dimaknai sebagai seseorang atau sekelompok orang berwenang untuk menyatakan suatu sikap atau melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk atau atas nama pihak lain, harus dialami dan diterima oleh setiap bentuk kehidupan sosial. Ketika masyarakat mengalami perubahan dan perkembangan, wajar untuk mengetahui bahwa alasan, prosedur, dan tingkat otoritas yang ditangani oleh setiap komunitas berbeda dan juga berkembang. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa orang-orang yang telah mencapai tingkat perkembangan yang lebih kompleks merumuskan motivasi mereka untuk menggunakan perwakilan secara jelas dan rinci. Selain itu, prosedur substitusi yang semakin lengkap dikontraskan dengan tanggung jawab yang jelas untuk tingkat alokasi.

Dalam kerangka ini kita dapat memahami berbagai bentuk representasi dalam kehidupan sehari-hari, dari makelar, agen, komisaris, makelar hingga utusan, perwakilan organisasi, dll. Kontrak atau perjanjian dalam bentuk lisan atau tertulis berdasarkan tradisi atau hukum positif mengatur interaksi antara wakil sebagai pengembalian tugas perwakilan dan yang “diwakili” sebagai penerima hak.

Karena ruang lingkup hubungan perwakilan dalam kehidupan non-politik masyarakat relatif terbatas, baik dari segi jumlah orang yang terlibat maupun dari segi materi, proses tersebut dapat terjadi tanpa perhatian masyarakat luas. Dengan kata lain, ada kecenderungan yang lebih besar untuk melanjutkan secara alami. Sebaliknya, ada hubungan antara perwakilan dalam kehidupan politik. Karena sifat kebijakan, yang dalam hal efek proses dan hasil proses, cenderung meresap ke hampir semua aspek kehidupan, cakupannya juga luas. Proses hubungan representasi politik menarik minat dan perhatian sebagian besar anggota masyarakat dalam batas-batas wilayah di mana proses itu berlangsung. Memang tidak jarang proses representasi politik menjadi masalah bagi masyarakat di luar batas wilayah perwakilan politik. Namun perlu dicatat bahwa tingkat keterlibatan langsung anggota masyarakat dalam proses representasi politik seringkali lebih rendah daripada keterlibatan mereka dalam hal kepentingan dan kepedulian.

Kepentingan, perhatian, dan partisipasi publik dalam representasi politik bersumber dari gagasan atau konsepsi demokrasi sebagai cerminan tatanan kehidupan sosial dan politik. Pada dasarnya, ide demokrasi muncul dalam menanggapi realitas sosial-politik yang menggugah perasaan dan pikiran sebagian masyarakat tertentu. Pembatasan atau pembatasan sebagian atau semua hak, eksploitasi orang lain untuk keuntungan sepihak dan perlakuan yang berbeda terhadap orang yang berbeda menginspirasi orang yang berpikiran idealis untuk merumuskan pola hubungan manusia yang ideal. Dari situlah Anda sampai pada tiga nilai ideal yang membangun demokrasi sebagai gagasan kehidupan, yaitu kemandirian, kesetaraan dan keadilan. Kenyataannya, gagasan ini diwujudkan melalui perwujudan simbol-simbol dan esensi nilai-nilai dasar demokrasi. Artinya simbol-simbol demokrasi dan makna atau esensi demokrasi benar-benar mewakili atau dipisahkan dari realitas kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai itu sendiri. Dengan kata lain, dalam kehidupan demokrasi, kesenjangan antara nilai dan simbol demokrasi dengan sifatnya tidak cukup besar untuk dijadikan alasan bagi kehidupan yang bersangkutan untuk tidak demokratis.

Perwujudan paling luas dari bentuk kehidupan demokrasi adalah negara demokrasi. Dari sekian banyak unsur atau aspek kehidupan negara demokrasi, di sini disebutkan dua aspek yang berkaitan dengan kebutuhan pembahasan tentang perwakilan politik. Kedua aspek tersebut adalah demokrasi perwakilan dan pemerintahan perwakilan.

Karena kekuasaan merupakan instrumen terpenting dalam interaksi politik dimanapun dan kapanpun proses itu berlangsung, maka konsepsi negara demokrasi menunjukkan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat dan oleh karena itu kekuasaan dirumuskan di tangan rakyat. Sadar akan kemustahilan mengambil manfaat dengan baik dari pola distribusi kekuasaan seperti itu, kehidupan bernegara dipandang sebagai fase pemusatan kekuasaan. Untuk mengatasi kontradiksi dua gagasan di atas, muncul gagasan tentang transfer kekuasaan secara sukarela. Pemikir seperti T. Hobbes, Rousseau, J. Lock sampai pada teori kontrak sosial untuk menggambarkan proses mencapai kesepakatan komunal untuk mencapai konsentrasi kekuasaan yang

diperlukan untuk memastikan keberadaan dan kemampuan negara, untuk mencapai tujuan bersama. sasaran. Kelompok yang dipercaya sebagai penguasa diberi kewenangan untuk mengatur koeksistensi sedemikian rupa sehingga terbentuklah suatu pemerintahan. Karena pengaturan hidup pada dasarnya adalah tanggung jawab setiap orang, maka si penerima amanah mengatur tugasnya dengan menyerahkan kekuasaan atas nama semua pemberi amanah. Dengan cara ini pemerintahan perwakilan terbentuk.. dalam arti bahwa pemerintahan yang mewakili warga negara menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk mengatur kehidupan bersama.

Untuk menjamin agar kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah tetap menguntungkan semua pihak, ditetapkan bahwa penggunaan kekuasaan yang diperoleh negara harus menguntungkan sebanyak mungkin warga negara. Selain itu, tata cara penggunaan daya harus saling konsisten, begitu juga dengan proses pemusatan daya. Selain itu, seluruh proses pelaksanaan kekuasaan diawasi oleh sekelompok orang yang dipercayakan yang pada dasarnya merupakan bagian dari seluruh partai yang dipercayakan yang dikenal sebagai wakil terpilih. Pengawasan wakil rakyat yang bertindak sebagai pengawas pemerintahan dapat didukung oleh berbagai hak yang tetap berada di tangan rakyat, seperti hak atas kebebasan berekspresi, keadilan, dan lain-lain, yang diberikan oleh wakil-wakil yang bersangkutan. Seluruh proses pemerintahan yang berjalan secara demokratis dan ditangani oleh wakil rakyat merupakan konsep demokrasi perwakilan.

Selain mencari kejelasan tentang gagasan representasi politik, perlu juga menelaah seluruh aspek sistem representasi dengan menjawab pertanyaan: Bagaimana perkembangan, konsepsi representasi politik? Bagaimana posisi wakil terhadap pihak yang diwakili? Apa fokus perhatian para wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya? Bagaimana kontak antara perwakilan dan perwakilan terjadi? Dan apa yang disebut representasi politik dalam kaitannya dengan representasi politik.

#### **d. Lembaga Parlemen dan Hubungan Kekuasaan**

Gagasan demokrasi langsung, sebuah sistem politik yang melibatkan warga secara langsung dalam pengambilan keputusan, menemui banyak kendala mendasar dalam kehidupan politik modern. Wilayah yang luas, jumlah penduduk yang terus bertambah, telah memaksa warga untuk menyalurkan pendapat dan keinginannya melalui lembaga yang terdiri dari orang-orang pilihannya. Dalam konsep demokrasi perwakilan (indirect democracy), warga negara dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mewakili perwakilan dan kelompok yang diwakili disebut perwakilan. Agen adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan/kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama sejumlah besar agen.

Ada beberapa istilah yang biasa digunakan untuk menyebut lembaga perwakilan, antara lain legislatif, majelis, dan parlemen. Istilah legislatif atau lembaga legislatif mencerminkan salah satu fungsi utama lembaga yaitu membuat undang-undang (legislasi) sedangkan istilah majelis mengacu pada pengertian bahwa lembaga tersebut merupakan tempat pertemuan untuk membahas urusan publik. Istilah parlemen memiliki arti yang hampir sama dengan istilah majelis. Dengan asal kata parler yang berarti suka berbicara, parlemen dianggap sebagai tempat berbicara atau merundingkan urusan negara. Istilah tersebut merujuk pada sejarah perkembangan lembaga perwakilan di dunia, dengan istilah legislatif banyak digunakan di Amerika Serikat, sedangkan istilah parlemen atau assembly lebih umum digunakan di negara-negara Eropa atau Eropa. . negara-negara non-AS.

Parlemen yang dibentuk di Inggris pada Abad Pertengahan adalah parlemen pertama di dunia. Padahal, lembaga ini pada awalnya memiliki fungsi dan peran yang sama sekali berbeda dengan parlemen saat ini. Saat itu parlemen hanya terdiri dari raja, bangsawan, tuan tanah, dan pemuka agama yang mengadakan pertemuan hanya ketika raja menginginkannya. Pada abad ke-14, raja mengembangkan pertemuan sebagai media untuk meminta nasihat atau informasi dari pejabat kerajaan tentang masalah-masalah penting. Pejabat kerajaan memainkan peran sebagai penasihat dan asisten raja. Meskipun Raja tidak selalu mempertimbangkan nasihat mereka ketika membuat

keputusan, komunikasi satu arah ini menjadi cikal bakal House of Lords, salah satu Houses of Parliament di Inggris yang masih ada sampai sekarang.

Meningkatnya kekuasaan House of Lords menyebabkan raja mengurangi hak lembaga, tetapi upaya ini menyebabkan konflik di antara keduanya. Dengan dukungan rakyat dan borjuasi, para bangsawan ini akhirnya berhasil memaksa raja untuk membatasi kekuasaan. Fondasi monarki konstitusional di Inggris mulai terbentuk. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat dan kelas menengah, yang secara kelompok merasa langsung disikapi politik, menuntut untuk dilibatkan dalam diskusi tentang pajak dan rencana anggaran. Dari sini, perwakilan rakyat jelata, yang dikenal sebagai House of Commons, lahir.

Perkembangan parlemen di Inggris menunjukkan betapa besar pengaruh perkembangan sosial ekonomi terhadap sistem politik. Pada abad ke-17, parlemen tidak hanya terdiri dari bangsawan dan gereja, tetapi juga pengusaha. Sementara itu, efek dari revolusi industri yang terjadi pada abad ke-19 menyebabkan alokasi kursi parlemen untuk kawasan industri seperti Manchester, Birmingham dan Sheffield. The Great Reform Act disahkan pada tahun 1832 memperkuat perumahan beberapa kekuatan di Parlemen. Undang-Undang Reformasi tahun 1867 memperluas hak tersebut kepada pekerja dan petani. Pada tahun 1918 hak memilih diberikan kepada semua warga negara yang telah mencapai usia 21 tahun untuk pria dan 30 tahun untuk wanita. Baru pada tahun 1970 usia pemungutan suara untuk pria dan wanita diturunkan menjadi 18 tahun.

Dalam negara demokrasi, hubungan antara parlemen dan eksekutif dapat dibedakan menjadi sistem parlementer dan sistem presidensial. Selain keduanya, ada beberapa negara yang mencoba menggabungkan keduanya, seperti sistem semi-presidensial Prancis. Sistem pemerintahan Inggris dan Amerika Serikat sering dijadikan acuan bagaimana kedua sistem ini beroperasi. Perbedaan mendasar antara sistem kabinet dan sistem presidensial terletak pada kedudukan dan kekuasaan kepala pemerintahan serta hubungannya dengan

parlemen. (Budiardjo, 2008: 297). Berikut penjelasan mengenai sistem parlementer dan sistem presidensial.

### **1). Sistem Kabinet Parlementer**

Dalam sistem parlementer, fungsi administratif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, yang memimpin kabinet dan bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan. Ia biasanya adalah pemimpin partai yang memenangkan pemilihan umum, sedangkan fungsi kepala negara dilakukan oleh presiden atau raja/ratu dalam kerajaan. Kekuasaan kepala negara biasanya bersifat simbolis dan tidak menjalankan kekuasaan secara nyata dalam kehidupan politik sehari-hari, sehingga ia tidak dapat bertanggung jawab atas kekuasaan pemerintah.

Di negara-negara seperti Inggris, Jepang, India, Eropa Barat, negara-negara Skandinavia, dan Persemakmuran yang menganut sistem parlementer, prinsip dasar pemerintahan adalah menyatukan kekuasaan dan memusatkan seluruh kekuasaan di parlemen. Prinsip ini antara lain dicapai melalui adanya tenaga kerja yang berlebihan. Ada beberapa pengecualian dalam konstitusi nasional parlementer, yang mengharuskan posisi manajemen senior dipegang oleh anggota DPR. Ada juga supremasi formal parlemen. Kekuasaan menteri untuk memimpin pemerintahan adalah kekuasaan yang diberikan oleh parlemen. Oleh karena itu, dalam sistem parlementer, menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen dapat memperoleh persetujuan untuk mengubah menteri atau kabinet tertentu setiap saat.

Jangan percaya ini dilakukan dengan voting. Jika mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan mosi tidak percaya, perdana menteri atau kabinet harus mengundurkan diri. Jika ada konflik dengan parlemen, perdana menteri biasanya memiliki kekuasaan untuk membubarkan parlemen. Pembubaran ini harus dibarengi dengan pemilihan anggota DPR yang baru untuk memilih kabinet baru. Sistem ini merupakan sistem pemerintahan yang paling banyak digunakan dalam demokrasi saat ini.

## 2). Sistem Presidensial

Saat menyusun konstitusi, 55 pendiri Amerika Serikat menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan hak asasi manusia. Mereka percaya bahwa ketika membangun pemerintahan yang benar-benar adil dan bebas, orang-orang berada di antara dua kecenderungan yang sama berbahayanya. Di satu sisi, kekuatan besar dan kemampuan pemerintah untuk menggunakan cara-cara koersif merupakan ancaman permanen bagi kebebasan sipil. Dalam hal ini, rakyat menghadapi risiko kediktatoran. Di sisi lain, kenyataan bahwa pemerintah sangat lemah sehingga tidak ada hukum dan anarki juga merupakan ancaman bagi hak asasi manusia, karena satu orang mengancam orang lain.

Jadi bagaimana kita bisa mendamaikan kebutuhan akan pemerintahan yang cukup kuat untuk menjaga hukum dan ketertiban dengan kebutuhan untuk menghindari menjadi tirani? James Madison dan perancang Konstitusi lainnya sepakat bahwa jawabannya adalah desentralisasi. Misalnya, di Amerika Serikat, tiga kekuasaan dipisahkan: Kongres, Presiden, dan Mahkamah Agung. Dalam filsafat, pemikiran para founding fathers sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke. Sebagai kepala negara dan pemerintahan, presiden menjalankan kekuasaan eksekutif, dan Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan kehakiman untuk melindungi hukum, ketertiban, dan konstitusi. Parlemen terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan perwakilan.

Di Amerika Serikat, ada dua alat yang dapat digunakan untuk menegakkan pemisahan kekuasaan: checks and balances dan segregasi personel. Desentralisasi tidak berarti memisahkan satu cabang kekuasaan dari yang lain. Faktanya, setiap cabang memiliki banyak kekuatan untuk mengendalikan cabang lain untuk mencapai keseimbangan antara satu cabang dengan cabang lainnya. Mekanisme kontrol dalam hubungan antara presiden dan Kongres dilakukan oleh Kongres, memberikan Kongres kekuasaan untuk menuntut presiden, menyetujui atau memveto usulan anggaran presiden, dan menjalankan fungsi-fungsi penting pemerintah. Sebaliknya, Presiden memiliki kekuasaan untuk mengontrol Kongres dengan memveto keputusan

Kongres. Pada saat yang sama, Konstitusi AS melarang rangkap jabatan terkait dengan profesinya. Indonesia, Filipina, Meksiko, Kolombia, Kosta Rika dan negara-negara Amerika Latin juga memiliki sistem presidensial.

Dalam sistem presidensial, kepala pemerintahan dan fungsi eksekutif sebagai kepala negara dilaksanakan oleh presiden. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh organisasi tertentu untuk masa jabatan tertentu. Sebagai kepala pemerintahan, presiden mengangkat seorang menteri, yang berfungsi sebagai asisten dalam kabinet dan bertanggung jawab kepada presiden. Sebagai kepala negara, presiden memiliki berbagai kekuasaan simbolik.

Dalam sistem presidensial, posisi ini sama kuatnya, karena presiden dan parlemen sama-sama memastikan legitimasinya melalui pemilihan umum yang terpisah. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Kongres, dan Kongres tidak dapat memberhentikan Presiden, kecuali pelanggaran hukum yang serius memerlukan proses yang panjang. Sejarah terbentuknya perwakilan politik atau parlemen dunia adalah dengan munculnya Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. The Medieval House of Councilors, pendahulu parlemen pertama di dunia, pada awalnya tidak memiliki fungsi dan fungsi yang sama dengan parlemen saat ini, tetapi lebih merupakan wahana untuk saran dan informasi dari pejabat kerajaan tentang hal-hal penting.

Dalam kegiatan pembelajaran ini, kami juga membahas tentang sistem presidensial dan parlementer. Perbedaan keduanya terletak pada kedudukan dan kewenangan kepala pemerintahan serta hubungannya dengan parlemen. Dalam sistem parlementer, pusat kekuasaan berada di tangan anggota, sedangkan dalam sistem presidensial, kekuasaan didistribusikan di antara sektor-sektor kekuasaan melalui mekanisme checks and balances. Berbeda dengan sistem parlementer di mana dua lembaga independen, kepala pemerintahan, menjalankan fungsi administrasi dan fungsi kepala negara, dalam sistem presidensial, presiden menjalankan kedua fungsi ini secara bersamaan.

Sadar akan luasnya proses representasi politik, para ilmuwan membangunnya dengan semua teori dan pendekatannya ke dalam subjek mereka sendiri. Namun secara fungsional, representasi politik

tidak dapat dipisahkan dari Lembaga perwakilan sebagai lembaga yang dibentuk oleh wakil rakyat dengan fungsi mewujudkan kekuasaan rakyat dalam bentuk aspek lembaga dan proses negara. Sebagai sebuah institusi, Lembaga perwakilan tentu dihadapkan pada tekanan dan tuntutan semua pihak yang berkepentingan dalam menjalankan tugasnya dan mendapat dukungan darinya sebagai penyeimbang.

Salah satu pihak yang berwenang mewakili adalah masyarakat atau rakyat sebagai pihak yang diwakili dan sebagai pihak yang mendelegasikan kekuasaan, yang harus mewakili pendapat, sikap dan kepentingannya dalam proses politik dan kenegaraan. Pihak lain yang berkepentingan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterwakilan rakyat adalah eksekutif dan yudikatif. Lembaga-lembaga tersebut membutuhkan dukungan dari badan perwakilan melalui undang-undang yang mereka buat agar lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menjalankan tugasnya.

Pelaksanaan peran dan fungsi Lembaga perwakilan tidak terbatas pada interaksinya dengan ketiga pihak tersebut. Proses peran dan fungsi instansi juga ditentukan oleh permasalahan yang berkaitan dengan struktur jabatan itu sendiri. Dengan kata lain, peran dan fungsi badan perwakilan ditentukan di satu sisi oleh keberadaannya sebagai lembaga politik dan di sisi lain oleh penampilannya sebagai organisasi yang mewadahi proses politik.

Pembicaraan tentang representasi politik pada awalnya merupakan bagian dari diskusi tentang proses badan perwakilan, khususnya yang berkaitan dengan perannya dalam representasi rakyat. Pada bagian ini pembahasan difokuskan pada aspek organisasi lembaga perwakilan dan hubungannya dengan lembaga pemerintah lainnya, khususnya lembaga eksekutif. Kajian berfokus pada sejarah, fungsi dan peran, organisasi dan proses, hubungan dengan lembaga negara lain dan posisinya dalam sistem politik.

#### **e. Teori Perwakilan**

Kedudukan seseorang dalam lembaga perwakilan, baik atas dasar pengangkatan/pengangkatan maupun melalui pemilihan, menimbulkan hubungan antar perwakilan dengan apa yang diwakilinya. Ada

beberapa teori yang membahas tentang bentuk hubungan ini. **Teori Mandat**, melihat Perwakilan dianggap memiliki kursi di lembaga perwakilan berdasarkan amanat rakyat, oleh karena itu disebut mandat. Doktrin ini berasal selama Revolusi Perancis dan dikembangkan oleh Rousseau dan diperkuat oleh Petion. Sejalan dengan perkembangan saman, teori amanat juga menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Pertama kali teori ini lahir disimbolkan sebagai berikut:

Menurut ajaran ini, wakil bertindak sebagai wakil sesuai dengan instruksi wakilnya. Perwakilan tidak boleh bertindak di luar instruksi. Dan jika sesuatu yang baru tidak termasuk dalam instruksi, wakil yang diwakilinya harus menerima instruksi baru sebelum dia dapat melaksanakannya. Setiap kali muncul masalah baru, yaitu tugas agen terhambat, muncul teori mandat baru, yang disebut teori mandat bebas.

Mandat Gratis, ajaran ini antara lain dikembangkan oleh Abbe Sieyas di Prancis dan Block Stone di Inggris. Doktrin ini menyatakan bahwa agen dapat bertindak terlepas dari instruksinya. Menurut doktrin ini, wakil adalah orang yang dapat dipercaya dan dipilih serta secara hukum mengetahui masyarakat yang diwakilinya, sehingga wakil itu dapat bertindak atas nama orang yang diwakilinya atau atas nama rakyat. Teori ini kemudian dikembalikan ke teori mandat perwakilan. Sementara Mandat Perwakilan merumuskan wakil dianggap sebagai anggota badan perwakilan (parlemen). Rakyat memilih lembaga perwakilan dan memberikan kekuasaan kepada mereka sehingga perwakilan sebagai individu tidak ada hubungannya dengan pemilih, apalagi dengan tanggung jawab. Lembaga perwakilan dalam hal ini bertanggung jawab kepada rakyat.

Semenara **Teori Organ** yang dimotori oleh Von Gierke muncul karena ketidakpuasan dengan teori mandat yang awalnya berkembang di Perancis, para ulama mulai mencari teori baru yang bertemakan hubungan antara yang representatif dan yang diwakilkan. Kemudian muncul teori Von Gierke (Jerman). Menurut teori ini, negara adalah suatu organisme dengan instrumen-instrumennya seperti eksekutif, parlemen, dan rakyat, yang kesemuanya memiliki fungsi masing-masing dan saling bergantung. Setelah rakyat memilih lembaga perwakilannya, mereka tidak perlu lagi ikut campur dalam lembaga itu

dan lembaga itu dapat berjalan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Teori ini didukung oleh Paul Laband dan G. Jellinek.

Hubungan antara wakil dan orang yang diwakilinya tidak dapat dipertanyakan secara hukum, kata Laband. Rakyat dan parlemen adalah organ kehakiman, masing-masing dengan fungsinya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, organ perwakilan dan organ rakyat tidak perlu diperhitungkan. Rakyat mempunyai hubungan hukum dengan parlemen yaitu pemilihan dan pembentukan suatu badan parlementer (perwakilan) dan setelah badan tersebut terbentuk maka rakyat tidak perlu lagi campur tangan dan badan tersebut dapat bertindak bebas sesuai fungsinya. Menurut Jellinek, rakyat adalah badan primer, tetapi badan ini tidak bisa mengatakan kehendaknya, sehingga harus melalui badan sekunder, yaitu parlemen. Hubungan antara perwakilan dan perwakilan hukum tidak terbantahkan.

Sejumlah teori lain adalah Teori Sosiologi, yang dilihat oleh Rieker bahwa lembaga perwakilan bukan sebagai struktur politik, tetapi sebagai struktur komunitas (sosial). Para pemilih akan memilih wakil-wakil yang benar-benar ahli di bidang kenegaraan dan yang benar-benar mewakili kepentingan pemilih, sehingga terbentuklah lembaga perwakilan dari kepentingan-kepentingan sosial. Dan strata masyarakat tercermin dalam lembaga perwakilan ini.

Teori Hukum sebagaimana dipahami oleh Duguit melihat bahwa dasar hubungan antara rakyat dan parlemen adalah solidaritas. Wakil rakyat hanya dapat menjalankan fungsi kenegaraannya atas nama rakyat, sedangkan rakyat tidak dapat menjalankan fungsi kenegaraannya tanpa dukungan wakilnya dalam menentukan kekuasaan pemerintahan. Jadi ada pembagian kerja. Keinginan akan suatu kelompok yang disebut solidaritas merupakan dasar dari hukum objektif yang muncul. Hak objektif inilah yang menjadikan korporasi sebagai suatu struktur hukum, dan bukan hak-hak yang diberikan atas mandat yang membentuk korporasi.

Orang-orang (kelompok) yang diwakili harus berpartisipasi dalam pembentukan badan perwakilan dan idealnya melalui pemilihan umum yang menjamin pengembangan “solidaritas sosial” sehingga

sebanyak mungkin orang dapat memiliki suara dalam kelompok. Kedudukan hukum para pemilih dan yang dipilih didasarkan secara eksklusif pada hukum objektif. Jadi tidak ada pertanyaan tentang hak-hak salah satu kelompok ini. Setiap orang harus lari kewajiban mereka sesuai dengan keinginan mereka untuk mengelompokkan diri atas dasar solidaritas sosial dalam negara. Bukan karena mandatnya, tetapi karena ia berkewajiban pada hukum objektif berdasarkan solidaritas, anggota parlemen harus menyesuaikan tindakannya dengan kehendak pemilihnya dalam menjalankan tugasnya. Bahkan jika tidak ada sanksi, peralatan pemerintah tingkat tertinggi tidak mungkin gagal.

Jika melihat pandangan Gilbert Abcarier, terdapat sekurang-kurangnya empat pola hubungan antara agen dan yang diwakilinya. Agen mesti bertindak sebagai "wali amanat". Perwakilan bebas untuk bertindak atau memutuskan atas kebijaksanaan mereka sendiri tanpa berkonsultasi dengan orang yang mereka wakili. Perwakilan semestinya bertindak sebagai "delegasi". Wakil bertindak sebagai utusan atau duta bagi orang yang diwakilinya, dimana wakil selalu mengikuti petunjuk dan petunjuk orang yang diwakilinya dalam menjalankan tugasnya. Peran ketiga, Perwakilan bertindak sebagai "Politicos", dengan perwakilan terkadang bertindak sebagai wali dan terkadang sebagai delegasi. Langkah-langkahnya tergantung pada topik yang sedang ditangani. Perwakilan bertindak sebagai "partisan". Disini agen bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari agen (organisasi). Setelah pemilihan wakil oleh pemilih (yang diwakilinya), hubungan dengan partai (organisasi) yang mencalonkannya dalam pemilihan terputus.

Sementara Hoogerwerf memandang terdapat lima model hubungan antara yang mewakili dan yang diwakili. Dengan model delegasi (delegasi), perwakilan bertindak sebagai orang yang ditunjuk oleh pengacara bisnis yang harus melaksanakan perintah dari orang yang diwakilinya. Dengan Model Penjaga, Wakil bertindak sebagai wakil yang sah yang menerima kuasa penuh dari orang yang diwakilinya sehingga ia dapat bertindak atas pendiriannya sendiri. Sebagai Politisi teladan, terkadang perwakilan bertindak sebagai delegasi dan terkadang sebagai agen, satu ukuran cocok untuk semua

dimana wakil dipandang sebagai wakil penuh dari seluruh rakyat. Dengan Model diversifikasi, Perwakilan di sini dipahami sebagai perwakilan dari kelompok teritorial, sosial atau kelompok tertentu.

#### **4. Rangkuman**

Lembaga legislatif yang mencerminkan representasi politik kontemporer harus mampu beradaptasi dengan keberadaan lembaga eksekutif. Sistem presidensial atau parlementer merupakan pilihan bagi setiap negara untuk melihat mana yang paling cocok dan adil untuk semua. Namun, keberadaan lembaga legislatif juga harus mencerminkan konteks keterwakilan yang diinginkan, baik berdasarkan wilayah, suku, suku, agama, atau ikatan keluarga lainnya. Artinya, konsep representasi harus mencerminkan suara masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai lembaga politik modern, lembaga legislatif harus mampu bekerja dengan fungsi organisasi yang jelas. Oleh karena itu, fungsi legislasi harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, hubungan antara representasi dan representasi menjadi penting agar keputusan yang dihasilkan menjadi efektif. Dengan perubahan politik yang sedang berlangsung, legislatif berkewajiban untuk terus mempertimbangkan aspek hubungan elektoral. Periksa juga apakah wakil-wakil yang terpilih mampu mewakili kepentingan rakyat.

#### **5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek**

##### **a. Latihan**

- 1) Setiap mahasiswa diminta untuk menjelaskan ulang secara ringkas mengenai praktek konsep Sistem Perwakilan sebagaimana dipahami oleh par ahli.
- 2) Setiap mahasiswa diberikan tugas menganalisis apa bagian terpenting dari konsep sistem perwakilan dan bagaimana konsep sistem perwakilan itu dalam praktek sistem perwakilan saat ini.
- 3) Mahasiswa diminta memberikan hasil analisis perbandingan konsep sistem keterwakilan politik sebagaimana yang dilakukan di Indonesia saat ini dengan konsep-konsep yang mestinya dilaksanakan.

## **b. Lembar Kerja Praktik**

Dalam lembar kerja praktek ini mahasiswa menuliskan contoh-contoh dari konsep-konsep sistem perwakilan politik modern dengan sistem perwakilan politik yang berlangsung saat ini di Indonesia.

No	Sistem Perwakilan politik modern	Prakteknya dalam konteks Indonesia
1		
2		
3		

## **c. Evaluasi Pembelajaran**

Mahasiswa memberikan analisis atas praktek-praktek pembelajaran sebagaimana dipahami dalam konsep-konsep sistem perwakilan politik modern dan bagaimana prakteknya saat ini dalam konsep sistem perwakilan yang kita alami dalam dalm hidup bernegara. Lalu dosen memberikan tanggapan dan masukan akhir seluruh atas seluruh proses pembelajaran.

## **d. Umpan Balik**

Dosen memberikan tanggapan dan masukan akhir atas seluruh proses pembelajaran dengan melihat refleksi konsep sistem perwakilan politik dan konteks realita sistem perwakilan politik saat ini.

## **C. PENUTUP**

### **1. Rangkuman**

Mahasiswa mestinya memahami bahwa praktek keterwakilan politik di Yunani kuno yang dilakukan secara langsung oleh para wakil-wakil warga telah menjadi pilihan terbaik pertama saat itu sebagai bentuk demokrasi perdana yang lahir. Tetapi praktek itu tidak bisaditeruskan karena raktek demrkasi langsung di negara negara kota di Yunani kunojustru menjadi awal keruntuhan dari negara polis di Athena itu sendiri. Dan beberapa ribu tahun kemudian, yakni di masa Abad Pertengahan, barulah

muncul kembali sistem perwakilan baru, tetapi berbeda dari praktek demokrasi di Yunani. Sistem perwakilan model baru ini adalah sistem perwakilan tidak langsung dimana sejumlah sangat kecil dipilih untuk mewakili rakyat, mirip dengan format keterwakilan politik di era modern saat ini.

## 2. Daftar Istilah

<b>Istilah</b>	<b>Pengertian</b>
Polis	Polis adalah istilah yang digunakan menunjuk negara kota pada masa Yunani kuno. Negara Kota ini sendiri adalah sebuah wilayah atau daerah dalam bentuk kota namun memiliki kedaulatan sendiri dan dikelola secara eksklusif atau terpisah.
Ekklesia	Ecclesia atau ekklesia (bahasa Yunani: ἐκκλησία) adalah majelis utama demokrasi Athena kuno. Majelis tersebut adalah majelis populer, terbuka bagi warga laki-laki sepanjang mereka terqualifikasi untuk kewarganegaraan. Dalam alam Yunani-Romawi, ekklesia dipergunakan sebagai merujuk suatu pertemuan aci, atau dinamakan badan kepengurusan. Sejak awal pada 100 tahun Pythagoras, kata ini mengandung definisi lain yaitu komunitas dengan keyakinan yang sama.
Arkhon	Arkhon (bahasa Yunani: ἄρχων, pl. ἄρχοντες) adalah kata Yunani yang bermakna "penguasa" atau "raja", sering kali digunakan sebagai gelar untuk jabatan publik tertentu. Polis Athena menerapkan sistem demokrasi di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan Dewan Rakyat. Pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh sembilan orang Archon yang berganti setiap tahun. Kinerja dari para Archon diawasi oleh Aeropagus (Mahkamah Agung).
<i>Argumentum ad Misericordiam</i>	Ini adalah jenis argumen sengaja diarahkan untuk membangkitkan rasa belas kasihan lawan bicara dengan tujuan untuk memperoleh pengampunan atau keinginan tertentu.
<i>Aufklarung</i>	sebuah istilah yang menggambarkan masa pencerahan di Eropa. Istilah aufklarung berasal dari bahasa Jerman

<b>Istilah</b>	<b>Pengertian</b>
	yang berarti pencerahan. Masa Aufklarung mulai muncul pada sekitar abad ke-17 Masehi di Eropa.
<i>Caesaropapisme</i>	adalah gagasan untuk menggabungkan kekuatan sosial dan politik pemerintah sekuler dengan kekuatan agama, atau membuat otoritas sekuler lebih tinggi daripada otoritas spiritual Gereja; khususnya mengenai hubungan Gereja dengan pemerintah.
Skolastika	Nama sebuah periode pada Abad Pertengahan yang dimulai sejak abad ke-9 hingga abad ke-15. Masa ini ditandai dengan munculnya banyak sekolah (dalam bahasa Latin schola) berbasis keagamaan dan banyak pengajar ulung menganalisis pemecahan masalah dogmatis secara rasional. Selain itu, skolastik juga merujuk pada metode keilmuan tertentu berbasis dogmatika rasional untuk memecahkan diskursus keilmuan melalui nilai-nilai spiritualisme Barat.
Filsuf/filosof	Seseorang yang ahli dalam Filsafat (dari kata Yunani: <i>filosofia</i> , arti harfiahnya "cinta akan hikmat). Filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Istilah ini kemungkinan pertama kali diungkapkan oleh Pythagoras (c. 570–495 SM). Metode yang digunakan dalam filsafat antara lain mengajukan pertanyaan, diskusi kritis, dialektik, dan presentasi sistematis.
<i>Magnum Concilium</i>	Magnum Concilium, atau Dewan Agung, adalah majelis di Kerajaan Inggris yang secara historis diadakan pada waktu-waktu tertentu dalam setahun ketika para pemimpin gereja dan pemilik tanah yang kaya diundang untuk membahas urusan negara dengan raja.
<i>Houses of Lord</i>	House of Lords adalah kamar kedua Parlemen Inggris. Ini independen dari, dan melengkapi pekerjaan, House of Commons terpilih. The Lords berbagi tugas membuat dan membentuk undang-undang dan memeriksa dan menantang pekerjaan pemerintah.
<i>House of Commons</i>	majelis Parlemen Inggris yang dipilih secara demokratis, bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan memeriksa pekerjaan Pemerintah.

<b>Istilah</b>	<b>Pengertian</b>
<i>Curia Regis</i>	Curia regis adalah istilah Latin Abad Pertengahan yang berarti “dewan kerajaan” atau “pengadilan raja.” Itu adalah nama yang diberikan kepada dewan penasihat dan administrator di Eropa abad pertengahan yang melayani raja, termasuk raja Prancis, raja Norman di Inggris dan Sisilia, dan raja Polandia.
Feodalisme	Feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik (sosial politik) yang dijalankan di kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin local pada sistem politik di Eropa pada Abad Pertengahan. Feodalisme menempatkan kalangan kesatria dan kelas bangsawan lainnya (vassal) sebagai penguasa kawasan atau hak tertentu (disebut fief atau, dalam bahasa Latin, feodum) yang ditunjuk oleh monarki (biasanya raja atau lord).
Perang Peloponnesos	Perang Peloponnesos (431–404 SM) adalah konflik militer pada zaman Yunani Kuno, terjadi antara Athena dan kekaisarannya melawan Liga Peloponnesos, dipimpin Archidamia. Sparta melancarkan invasi ke Attica, sementara Athena mengambil kesempatan keunggulan angkatan lautnya dan menyerang pantai Peloponnesos untuk menekan mereka. Periode perang ini berakhir pada tahun 421 SM, dengan ditandatanganinya Perjanjian Nicias.
Abad Pertengahan	Abad Pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Abad Pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut manakala Eropa mulai memasuki Abad Pembaharuan dan Abad Penjelajahan.

### 3. Daftar Referensi:

- Boboy, Max. *DPR RI dalam Perspektif Sejarah dan Tatanegara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Comparative Government and Politics: An Introduction*. Hampshire: MacMillan Press Ltd, 2016.
- Dahl, Robert A. *Perihal Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Fakih, M. *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Hague, Rod Martin Harrop, and Shaun Breslin. *Comparative Government and Politics: An Introduction*. Hampshire: MacMillan Press Ltd, 2016.
- [https://id.wikibooks.org/wiki/Yunani\\_Kuno/Pemerintahan/Athena](https://id.wikibooks.org/wiki/Yunani_Kuno/Pemerintahan/Athena).
- Ichwanuddin, Wawan. "Konsep Perwakilan Politik" dalam *IPEM4323/MODUL-1*. [tanpa penerbit dan tanpa tahun].  
kbbi.web.id:<https://kbbi.web.id/negara>, Agustus 2021
- Kolip, E. S. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana. Lessnoff, M. (1990). *Social Contract Theory*. Oxford: Basil Blackwell, 2013.
- Lengkong, Johny Peter. *Mata Kuliah Sistem Perwakilan Politik*. Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2019.
- Mukhtar, A. *Ilmu-ilmu Kenegaraan*. Bandung: Alumni, 1971.
- Petrus L. Tjahjadi, Simon. *Petualangan Intelektual*. Yogyakarta: Kanisius. 2004.
- Ranney, Austin. *Governing: An Introduction to Political Science*. New Jersey: Prentice-Hall, 1993.
- Rohaniah, Yoyo. *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Suhirman. *Kerangka Hukum dan Kelembagaan untuk Perencanaan dan Penganggaran Daerah di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Partisipasi Publik*. (makalah)  
*The Cambridge Dictionary of Philosophy*. London: Cambridge University Press, 1999.
- Yudi Widagdo. *Hukum Kekuasaan Dan Demokrasi Masa Yunani Kuno*. Journal Diversi, Volume 1, Nomor 1, April 2015.

## MODUL 2

# PELETAK DASAR SISTEM PERWAKILAN DAN STRUKTUR SISTEM PERWAKILAN MODERN

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Deskripsi Singkat

Setidaknya ada empat tokoh peletak dasar sistem perwakilan politik dari banyak tokoh lain tentu saja yang sering dan hampir selalu muncul dari perbincangan sangat awal tentang Sistem Perwakilan Politik yang tentu saja terkait demokrasi. Keempat tokoh tersebut selalu menjadi rujukan besar dalam ilmu Politik baik terkait dengan demokrasi dan tentu saja terkait dengan pembahasan kali ini adalah terkait dengan Sistem Perwakilan Politik.

Keempat tokoh tersebut adalah: Pertama, Thomas Hobbes dengan pikirannya yang sangat terkenal dengan “Leviatan” yang membayangkan sistem perwakilan itu menghasilkan seorang figure pemimpin yang kuat, sangat tegas, keras, dan berkesan kejam dan ditakuti oleh semua warga negara. Menurut Hobbes hanya dengan kehadiran sosok figure seperti Leviatan maka hidup bernegara dan bermasyarakat akan lebih tertata dan bisa diatur dengan sebaik-baiknya tanpa perlu ada perlawanan yang kelak menghalangi semua rencana negara untuk pembangunan sesuai kepentingan utama masyarakat.

Kedua, John Locke yang melihat bahwa sistem perwakilan politik menghasilkan kontrak social antara masyarakat luas dengan negara. Kontrak itu menjadi sarana dan alat bagi masyarakat untuk mentaati negara tanpa pamrih, dan menjadi sarana dan kesempatan bagi negara untuk melakukan apapun yang terbaik untuk negara. Maka dari pihak masyarakat tidak ada lagi penolakan selain ketundukana tanpa pamrih kepada negara. Semua kewenangan negara sebagai *supreme of power* diberikan oleh warga negara kepada negara atas dasar sebuah kepercayaan kepada penyelenggaraan negara akan memberi yang terbaik kepada kebutuhan dan yang terbaik dipikirkan oleh negara kepada masyarakat warganya.

Ketiga, Montesquieu, yang melihat pentingnya keterwakilan politik itu selalu mengedepankan perangkat hukum atau regulasi yang dipaktekkan dengan tegas dan benar dalam mengelola negara. Bagi Montesquieu, kehadiran perangkat hokum dalam mengelola masyarakat luas menjadi sangat utama karena negara tidak bisa mengatur dan menjamin perilaku masyarakat yang kerap akan berujung pada ketidakadilan. Aturan menjadi tertib hokum yang dipakai oleh negara dalam mengendalikan dan mengelola masyarakatnya, sebab tanpa hokum kualitas bernegara akan menjdi terancam oleh perilaku ketidakadilan yang akan muncul. Montesquieu menganggap sifat alamiah manusia adalah bersikap adil namun karena situasi sosial tertentu, manusia malah mulai cenderung memilih untuk bersikap adil atau tidak adil.

Keempat, JJ Rousseau, seorang pemikir besar yang kerap dengan sangat kabur menjelaskan pikirannya tentang peran pokok dari sistem perwakilan politik warga negara dengan pikirannya yang sangat terkenal: "*Volonte Generale*". Dalam konteks yang lebih umum dikenal dengan istilah "*General Will*" atau Kehendak Umum yang memberi peluang sistem perwakilan politik atas nama negara harus bisa memahami persis apa yang ada di benak seluruh warga negara. Anggapan bahwa negaralah yang paling tahu akan seluruh kehendak warga negara maka yang ada adalah negara pasti akan tahu memilih yang terbaik untuk warga negaranya. Dari konteks keyakinan ini terlihat bahwa negara "seolah" sangat baik dan sangat tahu bahwa yang dilakukannya bagi warga negara pastilah harapan seluruh warga negara. Tetapi sesungguhnya, itu berarti memberi negara kewenangan teramat kuat dan bisa jatuh kepada kewenangan tunggal yang otoritarian. Sebuah sistem perwakilan yang mungkin bisa menjadi sangat berbahaya.

## **2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

Capaian pembelajaran dari Modul 2 ini adalah:

- a. Mahasiswa mampu memahami para tokoh Peletak Dasar Sistem Perwakilan Politik dimasa masa awal lahirnya demokrasi

- b. Mahasiswa dapat menjelaskan Format Sistem Perwakilan Modern dibandingkan dengan format sistem perwakilan yang dijalankan dimasa awal demokrasi Athena Yunani.
- c. Mahasiswa mampu melihat pokok-pokok pikiran dari setiap tokoh sesuai dengan pikiran mendasar setiap tokoh.
- d. Mahasiswa mampu membandingkan apa yang mereka pahami dari para tokoh ini dengan apa yang terjadi saat ini dalam demokrasi modern

### **3. Kemampuan Akhir**

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari Modul 2 ini adalah: Mahasiswa/i diharapkan mampu memahami perkembangan politik sebagai *science* sejak awal politik khususnya terkait dengan pokok pikiran keempat filsuf politik ini. Keempat pemikiran tokoh tersebut menjadi pokok utama yang harus dipahami oleh seluruh mahasiswa.

### **4. Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)**

### **5. Kegunaan Modul 2**

Modul 2 ini akan sangat berguna bagi mahasiswa ilmu politik dalam melakukan berbagai analisis dalam bentuk makalah, maupun penelitian ilmu politik. Bahwa dengan pemikiran keempat tokoh/pemikir politik di atas, mahasiswa diharapkan mampu memiliki refleksi atau perbandingan dengan situasi politik keterwakilan yang terjadi saat ini dalam diri para legislative dan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat.

### **6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

Materi pokok antara lain:

- a. Sistem Perwakilan Politik menurut Thomas Hobbes
- b. Sistem Perwakilan Politik menurut John Locke
- c. Sistem Perwakilan Politik menurut Montesquieu
- d. Sistem Perwakilan Politik menurut JJ. Rousseau

## **B. KEGIATAN PEMBELAJARAN**

### **B1. KEGIATAN PEMBELAJARAN-1**

#### **1. Judul Kegiatan Pembelajaran:**

**“PELETAK DASAR SISTEM PERWAKILAN POLITIK”**

#### **2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

Mahasiswa/i diharapkan mampu memahami perkembangan politik dalam konteks pikiran keempat pemikir/filsuf politik yang meletakkan dasar-dasar utama yang hingga kini menjadi rujukan terpokok dalam bidang ilmu politik. Termasuk dalam hal ini adalah pemikiran keempat filsuf tersebut dalam bidang Sistem Perwakilan Politik dengan berbagai kekhasan pikiran masing masing. Empat filsuf politik tersebut adalah Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan JJ. Rousseau.

#### **3. Uraian, Pokok Pikiran, dan Fakta Riil**

Pada Modul 2 ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai pendekatan dalam ilmu politik terutama terkait dengan sejumlah nama tokoh peletak dasar Sistem Perwakilan Politik. Studi perwakilan politik terpusat kepada pokok-pokok masalah perwakilan politik yaitu: konsepsi, pemilihan umum, lembaga perwakilan, partai politik. Pokok-pokok perwakilan politik di atas mendasari seluruh pemikiran tentang sistem perwakilan politik. Perlu kiranya untuk melihat gagasan dan pemikiran dasar dari pemikir demokrasi dan sistem perwakilan politik di masa-masa awal Abad Pertengahan hingga masa menjelang modern, yang pemikirannya hingga saat ini sangat relevan untuk didiskusikan. Keempat tokoh dimaksud adalah: Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan JJ Rousseau. Keempatnya memiliki kekayaan pemikiran yang hingga saat ini menjadi bahan diskusi yang tak pernah selesai, khususnya dengan pemikiran JJ Rousseau.

Tanpa menghilangkan hormat dan kekaguman kepada para pemikir/ filsuf sistem perwakilan politik lain sebelum dan sesudahnya kemudian, sampai sekarang pemikiran keempat filsuf ini menjadi bahan diskusi sangat menarik karena menjadi realitas dan praktek bernegara

yang berjalan di seluruh belahan dunia, baik di Eropah, Amerika, Afrika, bahkan di Asia termasuk di Asia Tenggara.

Maka pemahaman sistem perwakilan pada modul ini menjadi sangat tepat untuk dipahami oleh mahasiswa dengan setidaknya empat model dan harapan dari Sistem Perwakilan Politik yang dipikirkan oleh para ilmuwan atau filsuf bernegara dimasa-masa awal lahirnya demokrasi.

#### **a. Thomas Hobbes (1588-1679)**

Thomas Hobbes menggambarkan pemikirannya dengan sosok bernama "Leviatan". Menurut Hobbes, kehidupan manusia tidak terlepas dari suatu keterikatan sosial, karena kehidupan setiap manusia senantiasa berlandaskan pada kepentingan. Maka perjanjian (keterikatan) sosial itu mengakibatkan setiap manusia menyerahkan segenap kekuatan dan kekuasaannya masing-masing kepada sebuah majelis, agar kepentingannya tersalurkan seperti halnya sebuah "kanal".



Gambar 5: Thomas Hobbes (1588-1679)

Kanal itu ada dalam bentuk Majelis (dewan perwakilan) sebagai bentuk sejati penyerahan hak dan kekuasaan manusia untuk memerintah dirinya sendiri dalam sebuah komunitas bersama (politik). Namun demikian, majelis pun harus dikenakan syarat yaitu ia harus menyerahkan hak kekuasaannya pada manusia-manusia yang telah memandatkannya, apabila terjadi perusakan moral majelis.

Hobbes mendasari pemikiran perwakilan politik itu dengan melihat bahwa kekuasaan majelis harus bersifat "absolut" karena keterikatan (perjanjian) social. Akibat keterikatan setiap orang tersebut, sistem perwakilan mau tidak mau dibangun atas dasar penyerahan hak yang dominan dari manusia-manusia kepada majelis, dan bukan sebaliknya. Karenanya, majelis (dan juga penguasa politik yang dimandatkan oleh perjanjian) dapat menggunakan segala cara, termasuk kekerasan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban. Penguasa harus menjadi "Leviathan" (binatang buas) (dalam Perjanjian Baru, dalam Wahyu:12). Idealnya, kekuasaan oleh satu majelis lebih baik dijalankan oleh satu orang (*center of power*), karena jalan satu-satunya mendirikan kekuasaan ialah dengan menyerahkan kekuasaan dan kekuasaan seluruhnya kepada satu orang. Sejatinya dewan rakyat/majelis (perwakilan) dipegang oleh penguasa negara, sehingga aspirasi kepentingan rakyat akan cepat terselesaikan daripada menunggu kerja majelis yang penuh dengan perbantahan. Fokusnya majelis berada dalam "heredity power".

Pemikiran Hobbes atas terbentuknya negara didasari pada pikiran awal bahwa manusia tidaklah bersifat sosial. Manusia hanya memiliki satu kecenderungan dalam dirinya, yaitu keinginan mempertahankan diri. Kecenderungan ini membuat manusia bersikap memusuhi dan mencurigai setiap manusia lain: *homo homini lupus!* (manusia adalah serigala bagi sesamanya). Keadaan ini mendorong terjadinya "perang semua melawan semua" (*bellum omnium contra omnes*). Inilah "keadaan alamiah" saat belum terbentuknya negara.

Perang yang terus-menerus membuat terjadi perang semua melawan semua, dan eksistensi manusia juga terancam. Untuk itu, manusia-manusia mengadakan sebuah perjanjian bersama untuk mendirikan negara, yang mengharuskan mereka untuk hidup dalam perdamaian dan ketertiban. Maka status negara menjadi berkuasa secara mutlak dan berhak menentukan nasib rakyatnya demi menjaga ketertiban dan perdamaian. Status mutlak dimiliki negara muncul sebagai hasil dari perjanjian antar-warga negara. Dalam perjanjian membentuk negara, setiap warga negara menyerahkan semua hak mereka kepada negara. Namun, negara sama sekali tidak memiliki kewajiban apapun atas warganya, termasuk kewajiban untuk bertanggung jawab atas rakyat.

Maka bagi Hobbes, negara berada di atas seluruh warga negara dan berkuasa secara mutlak, persis seperti sosok “Leviathan”, binatang buas yang digambarkan Thomas Hobbes yang berada di lautan dan menguasai segala-galanya. Atas kewenangan itu, negara berhak menuntut ketaatan mutlak warga negara kepada hukum-hukum yang ada, serta menyediakan hukuman bagi yang melanggar, termasuk hukuman mati. Itulah alasan sehingga warga negara akan menekan hawa nafsu dan insting untuk berperilaku destruktif. Akibatnya, warga negara akan memilih untuk patuh kepada hukum karena memiliki rasa takut dihukum mati. Hilangnya kebebasan warga negara terhadap negara adalah harga yang harus dibayar jika semua orang ingin hidup dalam ketenteraman, keteraturan, dan kedamaian.

Menurut Hobbes, pada dasarnya dalam kondisi alamiah, sebelum terbentuknya suatu negara dan kekuasaan superior, manusia cenderung bertindak sebebaskan mungkin dan berusaha mempertahankannya dengan cara menguasai orang lain. Kehendak untuk dapat mempertahankan kebebasan mereka pada dasarnya didorong oleh kehendak mereka untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Dengan adanya persaingan untuk dapat menyelamatkan diri mereka masing-masing, konflik antar manusia tidak dapat dihindari. Oleh karena itu menurut Hobbes, dalam kondisi manusia secara alamiah tidak ada yang namanya kepemilikan, keadilan ataupun ketidakadilan. Yang ada hanyalah peperangan, kekuatan dan penipuan dalam usaha menyelamatkan diri mereka masing-masing. Keinginan atau hasrat yang dimaksud Hobbes adalah kekuasaan, kekayaan, pengetahuan dan kehormatan, sementara keengganan yang dimaksud adalah hidup sengsara dan mati. Maka setiap anggota masyarakat akan saling membuat kesepakatan untuk melepaskan hak-hak mereka dan kemudian disalurkan pada beberapa orang atau lembaga untuk dapat dijalankan dengan baik tanpa menimbulkan benturan.

Semakin kompleksnya persaingan antar manusia akan semakin meningkatkan keengganan manusia untuk sengsara dan mati. Sehingga pada kondisi alamiah, manusia dengan akalnyanya berusaha untuk saling menghindari peperangan yang terjadi sebagai akibat benturan. Selanjutnya yaitu kekuasaan yang tertib dan kuat adalah kekuasaan yang berada dibawah satu orang yang diberikan kedaulatan oleh rakyatnya.

Setelah rakyatnya memberikan hak-haknya pada sang penguasa, rakyat tidak dapat lagi menarik hak tersebut apalagi mendapatkan hak tersebut kecuali sang penguasa memberikannya. Dengan kondisi yang demikian, rakyat akan tertib karena takut akan kekuasaan di luar kontrak yang dijalankan karena rakyat tidak dapat mengganggu-gugat. Kondisi inilah yang sebenarnya oleh Hobbes disebut sebagai kontrak sosial.

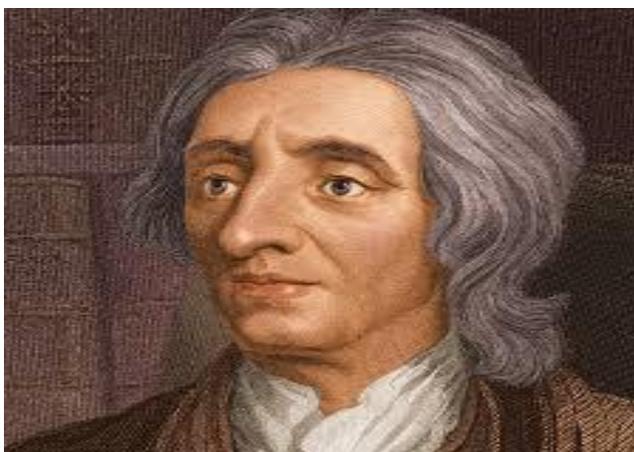
Tulisan-tulisan Hobbes, khususnya "Leviathan", sangat memengaruhi seluruh filsafat politik dan filsafat moral di Inggris pada masa-masa selanjutnya. Di Eropa Daratan, Hobbes juga membawa pengaruh kuat. Hobbes juga merupakan salah seorang filsuf, jika bukan yang pertama, yang amat berpengaruh dalam perdebatan antara kehendak bebas dan determinisme.

#### **b. John Locke (1632-1704)**

Setiap manusia memiliki berbagai macam kepentingan dan diharapkan kepentingan itu bisa terwujud. Maka semua niat-niat itu perlu disampaikan, termasuk keinginan mendapatkan rasa nyaman dengan mendapatkan perlindungan dirinya sendiri. Namun, dalam jumlah masyarakat yang luas dan tersebar semakin besar, tidak akan mungkin menyampaikan setiap aspirasi tersebut satu persatu. Untuk kepentingan itulah setiap manusia bersama dengan manusia-manusia lain membentuk kehidupan social bernama "masyarakat" (*society*). Kehadiran komunitas social bernama "masyarakat" itu dibentuk berdasarkan perjanjian bersama.

John Locke, dalam bukunya "Two Treatise On Government" yang terbit tahun 1690, melihat kekuasaan "masyarakat" sebagai *supreme of power*. Manusia-manusia menyerahkan kekuasaan kepada "masyarakat", namun manusia-manusia bisa menarik perjanjian yang disepakati apabila terjadi pelanggaran. Artinya kekuasaan tertinggi masih terletak pada rakyat secara keseluruhan, karenanya dibuatlah undang-undang/hukum untuk mengawasi tugas "masyarakat". Setiap anggota "masyarakat" terikat oleh ketentuan-ketentuan yang melarangnya berbuat sewenang-wenang dan tidak boleh menyerahkan hak legislatif yang diperolehnya dari rakyat keseluruhan kepada pihak lain.

Kekuasaan politik yang diwakilkan rakyat kepada *supreme of power* (masyarakat) adalah berdasarkan kepada kepercayaan (*trust*), basis utamanya adalah kepercayaan rakyat terhadap penguasa untuk melindungi rakyat. Kemungkinan munculnya *absolutisme* akan dapat dihindari apabila "masyarakat" dan konstitusi membuat batasan kewenangan yang dimiliki oleh penguasa politik, karena pada hakekatnya kekuasaan adalah suatu perjanjian sosial. Teori pemisahan kekuasaan ini untuk pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke seorang filosof berkebangsaan Inggris.



Gambar 6: John Locke 1632-1704

John Locke melihat sistem perwakilan politik lewat pembagian kekuasaan (*separation of power*) dalam Negara untuk mencapai keseimbangan. Kekuasaan tersebut, yaitu: kekuasaan legislative untuk membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif yakni melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan *federative* yakni mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.

Pemikiran John Locke lahir sebagai reaksi terhadap absolutisme untuk membatasi kekuasaan politik raja. John Locke, berpendapat bahwa "social contract" adalah jalan penting bagi setiap manusia untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan, dan hak untuk memiliki. Sebagai perwakilan dari masyarakat, John Locke membedakan fungsi negara ke dalam: *pertama*, pembentukan undang-undang (legislating)

yang dinamainya dengan "legislative powers". *Kedua*, fungsi membuat keputusan (*the function of judging*) yang dianggapnya bukan sebagai kekuasaan (power) sehingga tidak perlu melebihi lebihkan kewenangan tersebut sebagai sebuah keputusan (*the powers of judging*) karena fungsi ini merupakan fungsi negara tradisional. *Ketiga*, menggunakan kekuatan secara internal dalam melaksanakan undang-undang (*employing forces internally in the execution of the laws*). Fungsi ini dinamakan dengan "executive powers". *Keempat*, fungsi menggunakan kekuatan-kekuatan terhadap pihak luar negeri dalam membela masyarakat (*federative powers*) yang meliputi kekuasaan perang dan damai, serta kekuasaan luar negeri.

**c. Montesquieu (1689-1755)**

Montesquieu menuliskan pemikiran sistem keterwakilan politiknya dalam bukunya "*Del L'esprit Des Lois*". Kekuasaan itu berfungsi untuk menampung, membicarakan dan memperjuangkan keterwakilan kepentingan rakyat banyak serta merumuskan peraturan dalam Lembaga bernama "legislatif". Maka mutlak perlu dibentuk legislatif sebagai perwakilan rakyat agar pembicaraan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak akan bisa dipenuhi, tanpa perwakilan, maka yang terjadi adalah "suara minoritas (*minority sounds*) hal yang mudah ditaklukkan oleh mayoritas kekuasaan.

Dewan rakyat (legislatif) merupakan mediator antara rakyat dan penguasa, menjadi komunikator dan agregator aspirasi dan kepentingan rakyat banyak. Realitanya, masyarakat terdiri atas kelas utama yaitu rakyat pada umumnya dan kaum bangsawan. Karenanya dalam lembaga perwakilan harus dibagi dalam dua kamar (*chamber*) yaitu rakyat umum dan kaum bangsawan. Masing-masing mempunyai hak veto yang dibuat tiap kamar. Prinsipnya, masing-masing kekuasaan politik haruslah dibuat terpisah (*trias politica*) dan masing-masing memiliki wewenang untuk saling mengawasi. Kekuasaan itu tidak berada di satu tangan, tetapi berada di lembaga lembaga yang terpisah dan mandiri dan setia lembaga memiliki kewenangannya masing-masing yang terpisah dari kewenangan lembaga lain.

Montesquieu menganggap sifat alamiah manusia adalah bersikap adil namun karena situasi sosial tertentu, manusia mulai memilih untuk bersikap adil atau tidak adil. Montesquieu menggambarkan prinsip keadilan dalam kisah kaum Troglodit. Kaum Troglodit, suku kecil di negeri Arab, hidup dengan begitu jahat dan buas serta di antara mereka tiada prinsip persamaan dan kesetaraan. Mereka memiliki seorang raja yang memperlakukan mereka dengan sangat keras. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki sifat buruk mereka. Lewat pengalaman panjang, kelak mereka memupuk rasa kemanusiaan, keadilan, dan kebajikan. Mereka terus memupuk anak-anaknya dengan kepentingan pribadi harus diletakkan di tengah-tengah kepentingan umum. Keinginan untuk melepaskan diri dari hal itu akan membawa masyarakat pada kehancuran. Kebajikan sama sekali tidak dipaksakan dan bukanlah suatu latihan yang melelahkan. Keadilan untuk orang lain adalah kedermawanan kita.



Gambar 7: Charles de Montesquieu (1689-1755)

Keadilan akan terjamin dengan adanya hukum. Hukum tersebut harus disesuaikan dengan situasi konkret sebuah bangsa. Montesquieu berpendapat bahwa sebuah hukum harus disesuaikan dengan perilaku khas orang-orang yang dituju oleh si pembuat hukum. Suatu hal yang

mustahil apabila hukum suatu bangsa akan cocok bagi bangsa lainnya. Bagi Montesquieu, hukum adalah akal pikiran Manusia.

Dalam prinsip *trias politica*, Montesquieu memperkenalkan kekuasaan yudikatif sebagai pengganti dari kekuasaan federatif Locke. Montesquieu merasa kekuasaan hakim harus berdaulat, artinya pemimpin negara tidak berhak campur tangan dalam bidang ini. Prinsip kedaulatan kekuasaan yudikatif sangat mendorong perkembangan negara hukum. Kesewenangan hukum pada dasarnya terjadi karena ketiadaan pemisahan kekuasaan yang jelas. Mereka yang membuat undang-undang adalah mereka yang menjalankan roda pemerintahan. Apa yang mereka kehendaki menjadi hukum yang ditaati oleh rakyat. Apabila kekuasaan kehakiman bersatu dengan kedua kekuasaan yang lain maka hakim akan bertindak dengan keras dan menindas.

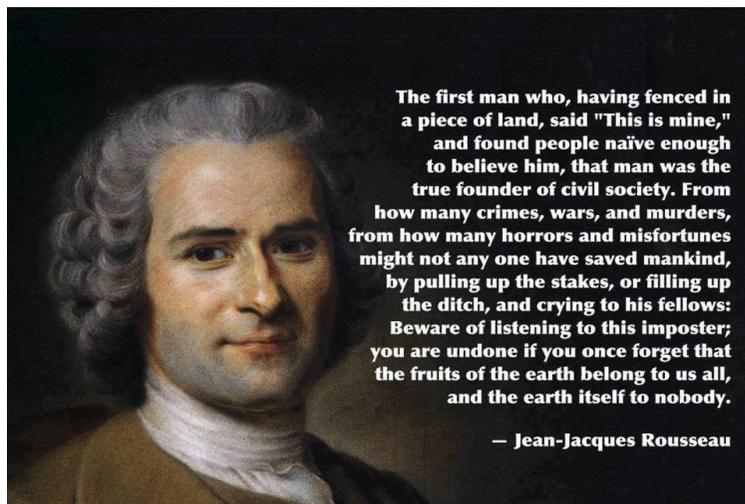
Keadaan di Prancis menggambarkan kekuasaan yang korup dan mempermainkan rakyat. Bagi Montesquieu, rakyat Prancis tak ubahnya menjadi objek permainan sulap raja dan paus. Raja Prancis membeli gelar-gelar kebangsawanan dan kehormatan istana. Montesquieu berujar “manusia dapat melakukan ketidakadilan karena ia berkepentingan untuk melakukannya dan karena ia lebih memikirkan diri sendiri daripada kepuasan orang lain”.

#### **d. Jean Jacques Rousseau (1712-1778)**

JJ.Rousseau menuliskan pemikiran Sistem Keterwakilan Politik dalam bukunya “The Social Contract”. Pemikiran dasarnya dimulai dengan paham bahwa manusia pada awalnya berada dalam situasi Keadaan alami (*State of Nature*). Dalam keadaan alamiah, manusia memiliki kebebasan mutlak bebas melakukan apapun yang dikehendakinya. Kebebasan adalah determinan yang membuat manusia menjadi manusia alami. Keadaan alami menurut Rousseau: Manusia memiliki kebebasan mutlak, mereka bebas melakukan apapun yang dikehendakinya, terlepas apakah hal itu akan menyebabkan pertikaian dengan manusia lainnya. Kebebasan merupakan determinan yang membuat manusia menjadi manusia alamiah. Ia hidup dengan polos dan mencintai diri secara spontan, ia tahu melakukan apa yang terbaik untuk dirinya, dia tahu apa yang terbaik itu adalah untuk dirinya dan terbaik

untuk dirinya itu adalah juga terbaik untuk orang lain, ia bebas dari segala wewenang orang lain dan karena itu secara hakiki sama kedudukannya.

Pikiran Rousseau tentang masyarakat dan negara menggambarkan semangat kembali ke alam. Kebebasan sipil dan soal milik dalam persekutuan ini dijamin oleh kemauan bersama. Negara berdaulat karena mandate dari rakyat, negara diberi mandate oleh rakyat untuk mengatur, mengayomi dan menjaga keamanan maupun harta benda. Negara harus selalu mewujudkan *Volonte Generaale* atau *General Will* (Kehendak Umum). Kehendak Umum setiap individu masyarakat yang merupakan subyek harus dilihat sebagai suatu entitas individu, bukan sebagai entitas kolektif. Kehendak Umum adalah kehendak bersama semua individu yang mengarah kepada kepentingan bersama, kepentingan umum. Kehendak Umum (*Volonte Generaale*) tidak bisa salah karena merupakan standar hak sebenarnya kontrak Sosial.



Gambar 8: Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

Dalam *Volonte Generaale* (Kehendak Umum) kita menemukan sumber tertinggi kekuasaan yang berdaulat dan kriteria yang tertinggi dari otoritas kedaulatan itu. Kehendak umum disaring dari kehendak semua melalui pemungutan suara. Dalam pemungutan suara kepentingan khusus yang bertentangan satu sama lain saling meniadakan

sehingga akhirnya tinggal *Volonte Generaale* (Kehendak Umum) yang dikehendaki oleh semua. Jika negara sebagai ungkapan *Volonte Generaale* (Kehendak Umum) para warganya, maka kehendak negara adalah kehendak mereka, dalam menaati negara mereka menaati diri mereka sendiri. Negara betul-betul menjadi *res publica* (republik =urusan umum), negara tidak lagi sesuatu yang asing karena tidak lagi milik raja, tidak milik sekelompok orang, tapi milik semua. Jadi, rakyat seluruhnya merupakan sumber hukum yang senantiasa harus didasarkan pada bersamanya, bukan diperuntukkan bagi seseorang atau sekelompok orang tertentu saja.

Maka bagi Rousseau, bentuk negara ideal adalah republik karena negara diperintah dengan hukum. Loyalitas harus diberikan orang-orang kepada negara, oleh karena itu Rousseau tidak membenarkan persekutuan lain, kumpulan lain, termasuk partai. Hubungan rakyat dan negara harus langsung tidak diantarai oleh badan apapun, oleh karena itu penyertaan rakyat dalam legislatif harus pula langsung. Sistem perwakilan dianggap oleh Rousseau sebagai sistem yang terbit dari kemalasan orang untuk menaruh perhatian terhadap masalah bersama dan juga nafsu akan uang. Penyertaan rakyat dalam pemerintahan harus langsung, tidak diwakilkan dan ini merupakan bakti sewajarnya dari manusia merdeka, manusia yang berupa tuan. Negara yang sah adalah Republik, yang terungkap dalam ajaran Rousseau tentang kedaulatan rakyat: rakyat itu berdaulat dan karena itu negara harus menjadi urusan seluruh rakyat. *Volonte Generaale* (Kehendak Umum) itu berasal dari makna setiap orang memikirkan yang baik dan setiap pemikiran yang baik dari setiap orang itu adalah menjadi pemikiran negara dan menjadi negara itu sendiri. Maka tidak perlu ada perwakilan, setiap orang langsung berurusan dengan negara.

Paham kedaulatan rakyat mengimplikasikan: a) Penolakan terhadap segala wewenang di atas rakyat yang tidak dari rakyat; b) tuntutan agar segala kekuatan yang ada mesti identik dengan kehendak rakyat. Jadi negara tidak berhak untuk meletakkan kewajiban atau pembatasan apapun pada rakyat. Rakyat berwenang penuh untuk menentukan dirinya sendiri, maka tidak ada pihak apapun yang punya wewenang terhadap rakyat. Adanya identitas antara rakyat dan negara

berarti bahwa manusia memasukkan diri seluruhnya ke dalam negara. Rousseau bicara tentang pelepasan diri total manusia kedalam negara. Paham kedaulatan rakyat total adalah negara adalah rakyat itu sendiri, pelanggaran tidak mungkin terjadi karena negara identik dengan rakyat. Maka dalam negara Rousseau tidak perlu ada institusi, mengingat negara sebagai *Volonte Generaale* (Kehendak Umum), hanya dapat menghendaki apa yang dikehendaki semua, tidak mungkin hak warga negara dilanggar oleh negara.

Rousseau menolak adanya lembaga perwakilan rakyat, kedaulatan rakyat tidak dapat diwakilkan. Setiap perwakilan sudah mencampuri identitas antara rakyat dengan kehendak negara dan dengan demikian merupakan keterasingan. Rousseau merupakan pendukung demokrasi langsung. Hubungan rakyat dan negara harus langsung, tidak diantarai oleh badan apapun, demikian juga penyertaan rakyat dalam bidang legislative harus pula langsung tidak diwakilkan, ini merupakan bakti sewajarnya dari manusia merdeka, manusia yang berupa tuan, negara tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Kekuasaan legislatif harus di tangan rakyat, sementara itu eksekutif bergantung pada kemauan bersama rakyat. Badan eksekutif hanyalah pegawai saja dari yang berdaulat yaitu rakyat. Demokrasi langsung berpangkal pada manusia yang baik yang memang terus menerus bersedia dan berkesempatan untuk melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Maka Rousseau mengecam usaha dagang dan industri, usaha yang berpangkal pada pencarian laba yang menyebabkan manusia kembali kepada kedudukannya sebagai budak. Karena perdaganganlah yang membuat manusia menjadi budak. Sistem perbudakan justru muncul dari perdagangan ketika ada orang mengumpul kekayaannya dan ada pihak lain yang diperas tenaga dan fisiknya. Itulah perbudakan.

**Masalah Minoritas:** *Volonte Generaale* (Kehendak Umum) muncul dalam kehendak mayoritas, minoritas yang tidak sekehendak berarti pihak itu belum dapat membedakan antara kepentingan egois sendiri dan *Volonte Generaale* (Kehendak Umum) yang sebenarnya juga kepentingan mereka dan karena itu sebetulnya juga mereka kehendaki. Minoritas memiliki mental yang belum memadai, mereka kurang rasional dan belum matang dalam kesadaran sebagai warga negara.

Rousseau mengikat bahwa kehendak umum adalah kehendak mayoritas. Bilamana individu berbeda dengan pendapat masyarakat setempat atau komunitas, maka itu adalah urusan pribadi, salah dan diperbudak. Bilamana kehendak pribadinya bersatu dengan kehendak masyarakat setempat, maka itu menjadi urusan umum, maka ia bersikap benar dan merdeka. Kepada minoritas yang belum menunjukkan kesadaran perlu diberi penerangan, penyuluhan. Siapa yang menolak untuk taat kepada *Volonte Generaale* (Kehendak Umum) akan dipaksa oleh seluruh masyarakat.

Pemikiran keempat filsuf politik di atas mempengaruhi hingga saat ini format sistem perwakilan yang berkembang hampir di seluruh dunia dalam sistem politik bernama demokrasi.

#### **4. Rangkuman**

Pemikiran keempat tokoh, khususnya John Locke dan Montesquieu menjadi landasan format bernegara dalam bentuk pilihan politik demokratis hingga saat ini hampir di seluruh dunia. Pembagian kekuasaan antara tiga Lembaga (eksekutif, legislative, dan yudikatif) menjadi corak yang dipakai di seluruh dunia bagi negara-negara penganut atau yang memilih demokrasi sebagai bentuk negaranya.

Hubungan antara parlemen dan lembaga eksekutif di negara demokratis dapat dibedakan menjadi sistem parlementer dan sistem presidensial. Memang sejumlah negara mencoba mengkombinasikan keduanya, seperti sistem semi presidensial di Perancis. Sistem pemerintahan Inggris dan AS sering dijadikan referensi perbedaan mendasar sistem parlementer dan sistem presidensial.

#### **5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek**

##### **a. Latihan**

Untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa akan pemikiran keempat tokoh/filsuf politik diatas, maka mahasiswa diminta untuk menemukan contoh kasus yang berkaitan dengan masing-masing pokok pikiran dengan melihat fakta-fakta riil yang

sedang terjadi saat ini diseluruh belahan dunia. Pokok pikiran dari keempat filsuf tersebut sangat relevan untuk direfleksikan ulang saat ini karena masih terjadi di sejumlah negara di dunia walaupun sudah mengakui bahwa demokrasi adalah sistem perwakilan negara paling bermartabat di seluruh dunia.

Tugas latihan ini dibuat dalam bentuk makalah yang menjadi tugas dari setiap mahasiswa sesuai pokok pikiran masing-masing yang telah ditunjuk sejak awal, dan dipaparkan pada salah satu pertemuan menjelang ujian akhir kelak dan menjadi Tugas Akhir dari setiap mahasiswa.

### **b. Lembar Kerja Praktik**

Mahasiswa silahkan menjelaskan pemikiran setiap tokoh pada keempat pendekatan dalam Modul ini.

No.	Nama Tokoh	Pokok Pikirannya
1.		
2.		
3.		

### **6. Evaluasi Pembelajaran**

Proses evaluasi pembelajaran dilakukan melalui tingkatan pemahaman akan contoh kasus yang dikemukakan serta rencana penelitian dari keempat pemikir politik sebagaimana sudah dijelaskan di atas.

### **7. Umpan Balik**

Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan seluruh pokok pikiran dari keempat pemikir politik dimaksud dengan sebaik baiknya, dan dalam diskusi tanya jawab diberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk menjelaskan ulang apa yang sudah dijelaskan oleh dosen, dengan menggunakan kalimat sendiri dari para mahasiswa itu sendiri. Umpan balik lagi adalah meminta penjelasan dari salah seorang mahasiswa terkait dengan pokok materi yang sudah diajarkan untuk dijelaskan ulang sesuai dengan kalimat sendiri dari mahasiswa itu sendiri. Umpan balik dari dosen adalah memperjelas ulang pokok-pokok

bahasan terkait dengan pemikiran keempat pemikir politik tersebut di atas.

## **B.2. KEGIATAN PEMBELAJARAN-2**

### **1. Judul Kegiatan Pembelajaran:**

#### **STRUKTUR SISTEM PERWAKILAN MODERN ”**

### **2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

Mahasiswa/i diharapkan mampu memahami perkembangan politik dalam konteks pikiran keempat pemikir/filsuf politik yang meletakkan dasar-dasar utama yang hingga kini menjadi rujukan terpokok dalam bidang ilmu politik. Termasuk dalam hal ini adalah pemikiran keempat filsuf tersebut dalam bidang Sistem Perwakilan Politik dengan berbagai kekhasan pikiran masing masing. Empat filsuf politik tersebut adalah Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan JJ. Rousseau.

### **3. Uraian, Pokok Pikiran, dan Fakta Riil**

#### **a. Sistem Perwakilan Modern**

Pemikiran keempat tokoh, khususnya John Locke dan Montesquieu menjadi landasan format bernegara dalam bentuk pilihan politik demokratis hingga saat ini hampir di seluruh dunia. Pembagian kekuasaan antara tiga Lembaga (eksekutif, legislative, dan yudikatif) menjadi corak yang dipakai di seluruh dunia bagi negara-negara penganut atau yang memilih demokrasi sebagai bentuk negaranya. Hubungan antara parlemen dan lembaga eksekutif di negara demokratis dapat dibedakan menjadi sistem parlementer dan sistem presidensial. Memang sejumlah negara mencoba mengkombinasikan keduanya, seperti sistem semi presidensial di Perancis. Sistem pemerintahan Inggris dan Amerika Serikat sering dijadikan referensi perbedaan mendasar sistem parlementer dan sistem presidensial.

Sementara sistem Presidensial yang ideal sering melihat Amerika Serikat (AS) yang menekankan pentingnya keserasian

hubungan antara pemerintah dan hak asasi manusia. Pendiri negara Amerika sangat yakin bahwa hanya pemerintahan yang benar-benar adil dan bebas, yang membuat rakyat berada terbebas dari godaan besarnya kekuasaan dan kemampuan penggunaan paksaan oleh kekuasaan itu sendiri. James Madison dan *founding fathers* Amerika lainnya sepakat bahwa pemisahan kekuasaan adalah jawabannya yakni legislative (Kongres), eksekutif (Presiden), dan yudikatif (Mahkamah Agung). Persis seperti pemikiran John Locke sebagaimana dijelaskan di bagian terdahulu buku ini. Indonesia, Filipina, Meksiko, Kolombia, Kostarika, dan sejumlah negara Amerika Latin juga memilih sistem pemerintahan presidensial.

Sementara terkait legislative/ parlemen, terdapat dua sistem parlemen, yaitu sistem unikameral (unicameralism) dan sistem bikameral (bicameralism). Sistem unikameral menempatkan kekuasaan terkonsentrasi pada satu unit pusat, sementara sistem bicameral meletakkan kekuasaan lembaga perwakilan dijalankan oleh dua kamar yakni: majelis rendah (lower house) dan majelis tinggi (upper house). Pilihan pada unikameralisme didasarkan pada alasan meminimalisir manuver-manuver politik yang mengganggu pengambilan keputusan yang dapat ‘menghambat’ pemerintahan. Sementara sistem bicameral melihat perlunya checks and balances internal di lembaga perwakilan.

Anggota majelis rendah bersifat proporsional yakni jumlah wakil sebanding dengan jumlah warga negara yang diwakili. Sementara majelis tinggi berdasarkan jenis keturunan, seperti di Inggris, atau berdasarkan pembagian wilayah, seperti di AS. Anggota parlemen untuk majelis rendah diperoleh melalui proses pemilihan umum. Sementara untuk pengisian majelis tinggi ada yang diperoleh dari pemilihan langsung oleh rakyat, penunjukan oleh pemerintah, pemilihan tidak langsung oleh pemerintah daerah atau tingkat local, atau pewarisan.

## **b. Struktur kelembagaan Perwakilan Rakyat**

Menurut Rod Haag dkk., ada tiga aspek utama yang terkait dengan struktur parlemen dunia: ukuran atau jumlah anggota lembaga, jumlah parlemen dan sistem komite. Pertama, ukuran lembaga perwakilan umumnya berkorelasi positif dengan populasi dalam hal ukuran. Negara kecil dan jarang penduduknya seperti tuvalu di pasifik selatan cenderung memiliki lebih sedikit parlemen. Di negara berpenduduk 8.624 jiwa, jumlah anggota parlemen hanya 12 orang. Di China, dengan populasi lebih dari 1 miliar, ada 3.000 anggota kongres rakyat China.

Kedua, sistem komite parlementer. Secara umum ada tiga jenis komite: komite tetap, komite peninjau, dan komite gabungan. Komite tetap adalah badan permanen yang memenuhi fungsi legislatif parlemen di bidang-bidang penting dan dianggap fundamental. Sebuah komite seleksi dibentuk untuk melakukan pengawasan negara dan tugas investigasi, dan sebuah komite bersama dibentuk di legislatif bikameral untuk menyamakan perbedaan antara kedua majelis. Komite-komite ini lebih penting di negara-negara non-partai, seperti Amerika Serikat.

Ketiga, dua sistem yang digunakan saat ini berkaitan dengan jumlah komposisi: sistem bilik tunggal (*single-chamber system*) dan sistem dua bilik (*two-chamber system*). Dalam sistem unikameral, kekuasaan terkonsentrasi di unit pusat sedangkan dalam sistem bikameral, kekuasaan badan perwakilan dilakukan oleh dua parlemen, umumnya dikenal sebagai majelis rendah dan senat. Salah satu alasan dipilihnya sistem unikameral adalah model ini meminimalisir terjadinya manuver politik yang menghambat pengambilan keputusan, sehingga dapat 'menghalangi' pemerintah.

Pendukung sistem bikameral umumnya menyatakan perlunya kontrol internal dan pertimbangan dalam lembaga perwakilan. Senat harus melindungi kepentingan individu, kolektif atau lokal dari kemungkinan pemaksaan terhadap kehendak atau kepentingan mayoritas legislatif. Jumlah anggota house of representatives umumnya proporsional sedangkan jumlah anggota house of representatives sebanding dengan jumlah warga negara yang mereka wakili sedangkan senat sebagian didasarkan pada keturunan (misalnya

Inggris Raya dan beberapa mencerminkan pembagian teritorial). Di Amerika Serikat. Dengan beberapa pengecualian, sistem unikameral sebagian besar digunakan di negara-negara yang secara geografis kecil, homogen dan jarang penduduknya dan biasanya memiliki kurang dari 10 juta penduduk. Di sisi lain, sistem bikameral biasanya diterapkan di negara-negara dengan sistem federal.

**Tabel 1:**  
**Struktur Legislatif di Negara Kesatuan dan Federal**

Struktur legislatif	Kesatuan	Federal	Jumlah
Unikameral	54	1	55
Bikameral	12	16	28
Jumlah	66	17	83

*Sumber: IPEM4323/MODUL 1*

Secara umum, masa jabatan majelis tinggi lebih lama dibandingkan masa jabatan majelis rendah. Contohnya, AS, di mana pemilihan anggota Senat AS dilakukan setiap enam tahun sekali, sedangkan anggota *House of Representative* dipilih setiap dua tahun. Secara umum, masa jabatan Senat lebih lama dari masa jabatan DPR. Misalnya Amerika Serikat, di mana Senat Amerika Serikat dipilih setiap enam tahun sedangkan House of Representatives dipilih setiap dua tahun.

**Tabel 2:** Beberapa Struktur Legislatif di Beberapa Negara

No.	Negara	Majelis Rendah	Majelis Tinggi
1.	Amerika Serikat	<i>House of Representative</i> (sekitar 435 orang, masa jabatan 2 tahun)	<i>Senate</i> (100 orang, 6 tahun)
2.	Australia	<i>House of Representative</i> (150 orang, 3 tahun)	<i>Senate</i> (76 orang)
3.	Filipina	<i>National Assembly</i> (104 orang, 4 tahun)	<i>Senate</i> (24 orang, 6 tahun)
4.	Inggris	<i>House of Commons</i> (646 orang, 5 tahun)	<i>House of Lords</i> (847 orang, berdasarkan keturunan dan sebagian seumur hidup)
5.	India	<i>Lok Sabha</i> (530-552 orang, 5 tahun)	<i>Rajya Sabha</i> (sekitar 250 orang, 6 tahun)

Sumber: Budiardjo, (hlm. 320-322).

Dalam prakteknya, struktur dua kamar dapat dibagi menjadi dua, yaitu struktur dua kamar yang lemah dan struktur dua kamar yang kuat. Pembagian ini didasarkan pada hubungan antara dua kamar parlemen. Jika kedua majelis memiliki kekuasaan yang kurang lebih sama, kita berbicara tentang parlemen bikameral yang kuat atau keras. Misalnya, ada kekuasaan yang berbeda dalam hal atau bidang tertentu, pedoman Kongres AS yang berbeda berkaitan dengan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat; sedangkan legislatif bikameral yang lemah atau lunak dicirikan oleh dominasi House of Commons atas House of Lords seperti House of Commons atas House of Lords di Inggris.

### **c. Posisi Perwakilan**

Dalam proses representasi politik, setiap perwakilan harus menentukan posisinya vis-à-vis perwakilan pada masalah pengambilan keputusan. Pentingnya menentukan posisi seseorang, justru karena sikap dan pilihannya sendiri terhadap alternatif solusi atau prioritas, merupakan dasar pemecahan masalah atas nama pendapat, aspirasi dan

kepentingan yang diwakili adalah esensi dari representasi politik itu sendiri.

Ada dua teori klasik yang terkenal tentang sifat hubungan perwakilan-perwakilan, yaitu teori mandat dan teori kebebasan. Dalam teori mandat, perwakilan dipandang sebagai pemegang mandat dalam rangka mewujudkan kekuasaan perwakilan dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, perwakilan harus selalu mengungkapkan pandangan, berperilaku, dan bertindak sesuai dengan amanatnya. Pandangan para wakil secara pribadi tidak boleh digunakan dalam kualifikasi mereka sebagai wakil. Bagi perwakilan, teori ini lebih menguntungkan karena representasi dapat terus dikontrol. Ketidaksepakatan antara perwakilan dan perwakilan dapat menyebabkan penurunan reputasi perwakilan. Di sisi lain, perwakilan yang berafiliasi seperti itu dicegah untuk mengembangkan kreativitas dan kelincahan politik mereka. Mungkin suatu saat sales rep akan merasa seperti robot.

Dalam teori kebebasan, perwakilan dianggap perlu untuk merumuskan sikap dan pandangan terhadap masalah yang dihadapi, tanpa terikat secara ketat kepada perwakilan. Lagi pula, perwakilan itu memercayainya sebagai perwakilan. Oleh karena itu, pertimbangan pribadi perwakilan, yang memperhitungkan semua aspek masalah yang dihadapi, menentukan keputusan dan sikap perwakilan. Berbeda dengan teori mandat, logika teori kebebasan perwakilan lebih berorientasi pada operasionalisasi tugas perwakilan itu sendiri, mungkin saja perwakilan merasa tidak terwakili pada beberapa atau lebih isu, karena dalam teori ini tidak dapat dihindari untuk tidak setuju dengan perwakilan. Namun, ini tidak berarti bahwa hak agen untuk mengontrol tindakan agennya tidak berfungsi. Hanya saja pengendaliannya tidak kontinyu. Dalam hal ini, perwakilan masih dapat menghukum perwakilannya dengan menarik dukungannya pada pemilihan federal berikutnya dan tindakan terakhir dari perwakilan teoritis mandat.

Karena pengakuan atas kebebasan perwakilan dalam melaksanakan tugasnya, mereka disebut juga sebagai perwakilan dari tipe wali dan sebaliknya, menurut teori mandat, perwakilan disebut sebagai perwakilan dari tipe utusan. Kedua tipe klasik ini tentu saja ideal karena perwakilan memiliki pilihan untuk mengikuti tipe sesuai dengan

kebutuhan atau kekhawatiran mereka. Itulah sebabnya Heinz Eulau melihat dua jenis peran representasional dalam bukunya Mikro - Analisis Politik Makro sebagai dua ujung yang terhubung dalam keseimbangan dengan kombinasi yang berbeda. Jenis kombinasi wali / utusan ini dikenal sebagai tipe Politico.

Selain perhatian (fokus representasi) perwakilan terhadap perwakilan dan posisinya (gaya representasi) dalam berurusan dengan perwakilan, setiap perwakilan memperhitungkan tanggapannya terhadap masalah yang diwakili dan masalah seluruh rakyat. . Jawaban pengganti ini penting karena berkaitan dengan fokus dan gaya penyajian yang berkaitan dengan simbol.

Jawaban yang berkaitan dengan politik, berkaitan dengan hubungan antara perwakilan dan perwakilan, dalam kaitannya dengan keputusan politik yang dibuat oleh perwakilan. Di sana tuntutan atau keinginan wakil berkaitan dengan perilaku resmi wakil. Respon agen terhadap layanan berkaitan dengan apa yang dapat diberikan agen kepada agen. Untuk itu, perwakilan harus mengetahui keinginan perwakilan tersebut dan oleh karena itu menghubungi mereka secara langsung dan tidak langsung. Kontak untuk informasi tentang perwakilan dimaksudkan sebagai tanggapan perwakilan dalam bentuk layanan.

Bentuk penugasan dalam jawaban perwakilan tersebut merupakan hasil dari keuntungan yang dapat diperoleh perwakilan dari keputusan perwakilan tersebut. Manfaat ini biasanya diwujudkan melalui penerapan kebijakan perwakilan seperti pertanian, perdagangan, pendidikan, industri, dll. Tentu ada manfaat yang bisa dinikmati secara pribadi dan ada yang dinikmati bersama. Dan reaksi perwakilan dalam bentuk simbol harus memastikan bahwa perwakilan merasakan representasi politik mereka melalui perwakilan keyakinan mereka. Hubungan psikologis representatif-representatif ini berguna untuk memperkuat dan mengembangkan keakraban antara dua komponen representasi politik ini. Oleh karena itu, terlepas dari fokus representasi yang dikembangkannya, perwakilan berusaha menunjukkan hubungan simbolis antara sikap dan keputusannya dengan perwakilannya.

Tentu saja, keempat bentuk tanggapan representatif tersebut tidak dipisahkan secara jelas. Artinya sikap atau keputusan masing-masing

wakil dapat memuat keempat komponen tersebut sekaligus. Hanya saja bobot masing-masing komponen sangat mungkin tidak seimbang dalam setiap keputusan atau sikap agen. Tergantung pada situasi yang mendasari hubungan agen-agen, komponen tertentu ditekankan. Padahal, keputusan agen untuk menonjolkan komponen respon dipengaruhi oleh komunikasi atau kontak antara agen dan agen. Kesepakatan antara kedua belah pihak tentang kebutuhan agen dan ketersediaan kemampuan agen untuk memenuhi kebutuhan tersebut jelas memiliki pengaruh langsung pada respon yang harus diberikan agen. Tanpa komunikasi yang memadai, kedua belah pihak tidak akan saling memahami, yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan atau kesenjangan dalam representasi.

Kontak, suatu proses hubungan antara dua komponen representasi politik, tidak terlepas dari pengaruh arah dan gaya representasi. Persepsi operasional tentang siapa yang menjadi pusat perhatian para wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya menentukan apakah wakil-wakil itu merujuk pada individu, masyarakat pada umumnya, kelompok atau partai politik. Sedangkan model perwakilan yang disepakati antara agen dan agen menentukan derajat independensi atau ketergantungan agen dalam menentukan sikap dan keputusan. Pembentukan kontak dibatasi oleh fakta bahwa perwakilan melihat dirinya sebagai wali dari orang yang diwakili. Di sisi lain, aktivitas komunikasi antara kedua belah pihak tinggi ketika perwakilan mengambil posisi perwakilan atau delegasi. Sementara itu, terdapat ketidakberesan frekuensi komunikasi dalam hal disepakati bahwa posisi kedua wakil tersebut didelegasikan secara bebas. Terakhir, combat strength atau kekuatan tempur wakil juga menentukan pilihannya terhadap komponen jawaban yang harus diberikan terhadap masalah wakil tersebut. Pemilihan tidak hanya ditentukan oleh daya juang para wakil dalam lembaga perwakilan, tetapi juga oleh daya juang mereka dalam masyarakat dan arena politik secara keseluruhan.

Keseluruhan hubungan antara perwakilan dan perwakilan menentukan di satu sisi keberhasilan perwakilan dalam memenuhi tugasnya. Jika tugas-tugas ini dilakukan secara memuaskan untuk semua pihak, perwakilan politik dianggap fungsional. Fungsi perwakilan politik juga mencakup kepuasan pihak-pihak yang diwakili dalam arti

kepentingan, pendapat, dan tuntutan mereka dilayani oleh anggota parlemen melalui jawaban yang mereka buat melalui sikap dan keputusan mereka atas pertanyaan perwakilan. melayani. Dari sudut pandang perwakilan, sistem representasi politik seperti itu telah menghasilkan representasi politik yang memadai.

#### **d. Peran Perwakilan Politik/Parlemen**

Menurut Rod Haag dkk, system perwakilan atau parlemen modern memenuhi sejumlah fungsi utama, yaitu fungsi perwakilan, fungsi nasihat, dan fungsi legislasi. Selain itu, beberapa parlemen memiliki fungsi lain, yaitu membentuk pemerintahan, menyetujui anggaran, mengawasi eksekutif, dan menyediakan sumber daya untuk rekrutmen dan sosialisasi elit.

Pertama fungsi perwakilan. Parlemen hanya dilihat sebagai mikrokosmos masyarakat. Hal ini diyakini mewakili kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Tapi sering ilustrasi ini dianggap terlalu utopis. Kenyataannya, anggota parlemen berada di persimpangan antara kepentingan partai, pemilih di daerah pemilihan, dan kepentingan rakyat. Dalam hal ini, sistem pemilu dan sistem kepartaian merupakan dua hal penting yang menentukan kecenderungan loyalitas seorang Anggota DPR.

Kedua, fungsi musyawarah. Inti dari fungsi ini adalah penyebaran informasi melalui diskusi publik tentang isu-isu nasional yang muncul di DPR. Fungsi ini tidak dapat dipisahkan dari fungsi representatif. Namun, bagian dari proses pengiring ini lebih bersifat teatral. Sekalipun publik memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan politik di lembaga parlemen, seringkali tidak berpengaruh terhadap keputusan atau politik parlemen. Oleh karena itu, perlu adanya perluasan dan pendalaman partisipasi masyarakat dalam pembentukan berbagai kebijakan publik, baik berupa kesepakatan yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, serta mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh. Berkaitan dengan itu, beberapa negara di Amerika Latin telah melangkah lebih jauh dengan memperkenalkan demokrasi deliberatif, khususnya di bidang

penganggaran di tingkat lokal. Terobosan tersebut selama ini berdampak positif bagi pencapaian *good governance* di negara-negara tersebut.

Namun, pentingnya partisipasi warga negara bertumpu pada “keterbatasan” demokrasi perwakilan saat ini. Di hampir semua negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan sistem demokrasi perwakilan, masyarakat yang terpilih sebagai wakil cenderung merupakan kelompok elit yang seringkali tidak memiliki hubungan langsung dengan konstituennya. Proses ini sering disebut sebagai penculikan demokrasi oleh kelompok elit. Selain itu, mekanisme demokrasi perwakilan juga memiliki kelemahan ketika terjadi kesenjangan yang besar antara satu pemilu dengan pemilu berikutnya, yaitu rata-rata antara 4 dan 5 tahun. Jarak yang jauh ini membuat para wakil rakyat yang terpilih melupakan janji-janji yang telah mereka buat selama kampanye pemilu. Instrumen kelembagaan yang memungkinkan partisipasi langsung bukanlah pengganti demokrasi perwakilan, melainkan instrumen pendalaman demokrasi.

Ketiga, peran legislasi. Sebagian besar konstitusi dunia secara eksplisit mendefinisikan peran legislatif parlemen. Demokrasi liberal yang menolak kekuasaan absolut eksekutif memberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang. Di negara-negara dengan sistem presidensial, otonomi parlementer dalam undang-undang relatif lebih besar daripada di negara-negara dengan sistem parlementer. Namun, peran legislatif parlemen saat ini sedang menurun, karena proses legislasi dalam praktiknya didominasi oleh eksekutif, terutama dalam hal penyusunan undang-undang.

Keempat, fungsi penganggaran. Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi pertama Lembaga legislatif sebagai perwakilan politik. Seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam artikel ini, kehadiran parlemen di Eropa muncul dari kebutuhan kerajaan akan dukungan finansial dari kaum bangsawan. Mereka menggugat raja sebelum memberikan apa yang diminta raja. Seperti halnya fungsi legislatif, rancangan anggaran yang akan diadopsi biasanya berasal dari eksekutif. Namun, rancangan anggaran biasanya memerlukan persetujuan parlemen atas rancangan yang diajukan oleh universitas.

Kelima, fungsi pengawasan. Fungsi ini adalah salah satu fungsi parlemen modern yang paling berguna. Posisi ini memungkinkan parlemen untuk mengawasi kegiatan pemerintah dan mengawasi kualitas pemerintahan. Fungsi pengawasan ini menekankan pada pemisahan kekuasaan yang harus dipimpin oleh eksekutif, bukan parlemen. Parlemen umumnya memiliki sejumlah sumber daya dasar untuk menjalankan fungsi ini, termasuk mengajukan pertanyaan dan interpelasi, mengadakan debat dan melakukan investigasi.

Keenam, fungsi pembentukan pemerintahan. Dalam sistem parlementer, pembentukan atau penggulingan suatu pemerintahan ditentukan oleh dinamika politik di parlemen. Kekuasaan membentuk kabinet diberikan kepada fraksi mayoritas di parlemen, yang terdiri dari partai multipartai atau koalisi. Meskipun kabinet memiliki masa jabatan normal tertentu, kabinet dapat dibubarkan kapan saja jika tidak lagi memiliki mayoritas di parlemen.

Ketujuh, fungsi rekrutmen dan sosialisasi elit. Parlemen adalah tempat di mana bakat pembuat keputusan masa depan terbentuk. Fungsi ini menjadi nyata di negara-negara dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana jabatan menteri dan fungsi penting lainnya di cabang eksekutif harus diisi oleh anggota parlemen. Anggota kelompok oposisi di parlemen (Backbenchers) juga membentuk karir dan reputasi mereka untuk mempersiapkan kejatuhan pemerintahan saat ini.

Miriam Budiardjo menilai lembaga legislatif memiliki dua fungsi utama. Pertama menentukan politik dan membuat undang-undang (fungsi legislatif). Untuk memenuhi fungsi tersebut, legislatif diberikan hak inisiatif, hak untuk mengubah rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah, khususnya di bidang anggaran. Kedua, periksa lembaga eksekutif. Untuk menjalankan kekuasaan ini, legislatif memiliki sejumlah hak, termasuk hak untuk bertanya, hak untuk bertanya atau memperoleh informasi, hak untuk menyelidiki atau menyelidiki, dan hak atas kebebasan bergerak.

#### **e. Keanggotaan di Perwakilan Politik/Parlemen**

Anggota parlemen di dunia pada umumnya, terutama untuk majelis rendah di negara-negara bikameral, mengisi posisinya melalui proses pemilihan. Saat ini ada beberapa opsi untuk mengisi kursi di House of Lords, termasuk (1) pemungutan suara langsung; (2) Pemerintah ditunjuk, kadang-kadang seumur hidup; (3) pemilihan tidak langsung oleh pemerintah daerah atau di tingkat lokal; dan (4) warisan. Beginilah cara para anggota House of Lords dipilih di beberapa negara.

Ranney mengambil dua perspektif yang berbeda tentang hubungan antara anggota parlemen sebagai wakil dan pemilih sebagai wakil, yaitu teori kebebasan dan teori mandat. Pertama, teori kebebasan melihat bahwa wakil dipilih karena diasumsikan bahwa ia adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan kepentingan orang yang diwakili. Oleh karena itu, perwakilan diberikan kepercayaan untuk mengambil tindakan apa pun yang menurutnya terbaik dan tidak perlu membicarakan semua hal dengan perwakilan. Wakil dapat bersikap dan bertindak tanpa terikat secara ketat kepada wakil karena wakil telah menaruh kepercayaannya kepada wakil.

Kedua, teori mandat mengasumsikan bahwa kekuasaan perwakilan ada karena mandat perwakilan. Tindakannya di Parlemen karena itu harus sesuai dengan keinginan anggota parlemen. Dalam hal ini, konsultasi dengan konstituen menjadi penting. Parlemen tidak pernah benar-benar "memerintah", bahkan di negara-negara dengan sistem presidensial di mana tidak ada hubungan "dekat" antara legislatif dan eksekutif, seperti halnya dengan sistem parlementer. Bahkan, hal ini terjadi dalam fungsi legislatif, yang ide awalnya menjadi alasan keberadaan lembaga parlementer. Saat ini desain yang diusulkan hukum secara keseluruhan terutama berasal dari eksekutif. Haag dkk. ternyata persentasenya mencapai 90%. DPR lebih berperan untuk membahas usulan eksekutif.

**Tabel 3: Cara Pemilihan Legislatif di Beberapa Negara**

<b>Negara</b>	<b>Majelis Tinggi</b>	<b>Jml Anggota</b>	<b>Cara Pemilihan</b>
AS	<i>Senate</i>	100 orang	Pemilihan langsung dengan suara terbanyak sederhana ( <i>plurality system</i> ), 2 anggota untuk masing-masing negara bagian.
Australia	<i>Senate</i>	76 orang	Pemilihan langsung oleh lembaga perwakilan di masing-masing negara bagian.
India	<i>Rajya Sabha (Council of States)</i>	245 orang	Pemilihan tidak langsung melalui parlemen negara bagian, kecuali untuk 12 orang ditunjuk berdasarkan keahlian.
Inggris	<i>House of Lords</i>	847 orang (tahun 2007)	Campuran antara pewarisan dan pemilihan oleh pemerintah
Jepang	<i>House of Councillors</i>	252 orang	Dipilih langsung dengan <i>mixed member system</i> .
Jerman	<i>Bundesrat</i>	69 orang	Dipilih oleh pemerintah negara bagian.
Kanada	<i>Senate</i>	104 orang	Dipilih oleh perdana menteri.
Perancis	<i>Senate</i>	321 orang	Pemilihan tidak langsung melalui departemen-departemen.

*Sumber: Hague (hlm. 187)*

Di satu sisi, dominasi eksekutif dalam penyusunan peraturan dapat dipahami dengan mempertimbangkan posisi dan peran lembaga eksekutif. Dimanapun lembaga eksekutif di dunia memainkan peran langsung dalam menangani kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, dengan struktur kelembagaan yang lebih kompleks dari pusat hingga unit terkecil di daerah, diberkahi sejumlah tenaga terampil. Ini memberi manajer lebih banyak informasi yang memungkinkan dia untuk merumuskan rancangan peraturan atau pedoman. Namun di sisi lain,

situasi ini masih menimbulkan pertanyaan tentang masa depan dan relevansi keberadaan DPR. Apakah keberadaan lembaga parlemen menjadi tidak relevan?

Alan Balls dan B. Guy Peters berpendapat bahwa parlemen akan tetap relevan dalam politik modern. Sebesar apapun peran pemerintah, lembaga ini membutuhkan dewan perwakilan untuk memastikan legitimasinya, terutama dalam hal kebijakan yang sulit dan mendasar. Pemotongan manfaat sosial dan penyatuan ekonomi dan moneter di negara-negara Eropa Barat adalah contoh kebijakan yang sangat membutuhkan legitimasi legislatif. Hague juga setuju bahwa parlemen akan tetap penting, terutama karena fungsinya sebagai simbol representasi rakyat dalam struktur hukum kekuasaan negara. Legislatif terus menjalankan berbagai fungsi sebagai sarana rekrutmen. Jadi peran legislatif tidak hilang, tapi berubah.

#### **4. Rangkuman**

Sistem parlementer bercorak khas ketika fungsi eksekutif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dijalankan oleh dua lembaga. Kepala pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri, sementara fungsi kepala negara dijalankan oleh presiden atau di negara monarki oleh raja/ratu. Sistem pemerintahan ini teraksana di Inggris, Jepang, India, negara-negara Eropa Barat dan Skandinavia, negara-negara persemakmuran, dan negara-negara lain.

Beberapa fungsi utama yang terdapat di hampir semua parlemen di dunia, yaitu fungsi perwakilan, nasehat dan legislasi dan beberapa fungsi lainnya yang ditemukan dalam sistem pemerintahan tertentu di parlemen. Ada berbagai cara untuk memilih anggota parlemen, baik untuk parlemen dengan sistem satu kamar maupun untuk majelis rendah dan tinggi dengan sistem dua kamar. Kegiatan pembelajaran ini memaparkan beberapa contoh praktik pengisian jabatan parlemen di dunia. Kegiatan pembelajaran ini juga menjelaskan perdebatan antara teori mandat dan teori independen, yang menjelaskan hubungan antara anggota parlemen dan pemilih

## 5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek

### a. Latihan

Untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa akan Struktur sistem perwakilan modern, diatas, maka mahasiswa diminta untuk menemukan contoh kasus yang berkaitan dengan masing-masing pokok pikiran dengan melihat fakta-fakta riil yang sedang terjadi saat ini diseluruh belahan dunia. Pokok pikiran dari penjelasan akan system perwakilandi atas sangat relevan untuk direfleksikan ulang saat ini karena masih terjdi di sejumlah negara di dunia walaupun sudah mengakui bahwa demokrasi adalah sistem perwakilan negara paling bermartabat di seluruh dunia.

Tugas latihan ini dibuat dalam bentuk makalah yang menjadi tugas dari setiap mahasiswa sesuai pokok pikiran masing-masing yang telah ditunjuk sejak awal, dan dipaparkan pada salah satu pertemuan menjelang ujian akhir kelak dan menjadi Tugas Akhir dari setiap mahasiswa.

### b. Lembar Kerja Praktik

Mahasiswa silahkan menjelaskan pemikiran setiap tokoh pada keempat pendekatan dalam Modul ini.

No.	Sistem Perwakilan Modern	Refeksi Sistem  Parlemen saat ini
1.		
2.		
3.		

### c. Evaluasi Pembelajaran

Proses evaluasi pembelajaran dilakukan melalui tingkatan pemahaman akan contoh kasus yang dikemukakan serta rencana penelitian dari pokok-pokok pikiran terhadap system dan strukrut system perwakilan modern sebagaimana sudah dijelaskan di atas.

#### **d. Umpan Balik**

Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan seluruh pokok pikiran dari struktur dan system perwakilan modern dimaksud dengan sebaik baiknya, dan dalam diskusi tanya jawab diberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk menjelaskan ulang apa yang sudah dijelaskan oleh dosen, dengan menggunakan kalimat sendiri dari para mahasiswa itu sendiri. Umpan balik lagi adalah meminta penjelasan dari salah seorang mahasiswa terkait dengan pokok materi yang sudah diajarkan untuk dijelaskan ulang sesuai dengan kalimat sendiri dari mahasiswa itu sendiri. Umpan balik dari dosen adalah memperjelas ulang pokok- pokok bahasan terkait dengan pemikiran struktur dan system perwakilan atau parlemen tersebut di atas.

### **C. PENUTUP**

#### **1. Rangkuman**

Semua pemahaman tentang sistem politik di atas dalam konteks Sistem Perwakilan Politik mendapat wujud yang semakin kompleks dalam sistem perwakilan dewasa ini, khususnya ketika isu ideologi partai yang menjadi satu-satunya ukuran perwakilan politik di masa-masa awal Abad ke-20, ternyata perlahan-lahan semakin ditinggalkan oleh pemilih. Dalam pemikiran politik Sistem Keterwakilan Politik yang digagas oleh Alan Ware berikut ini menggambarkan bagaimana ideologi yang diusung oleh partai politik semakin redup dan ditinggalkan oleh pemilihnya.

Lalu bagaimana keterwakilan politik warga di era modern sekarang ini jika ideologi partai politik tidak lagi menarik bagi para pemilih? Modul-3 berikut akan menguraikannya dari sudut pandang ideologi politik, program partai politik, dan kehadiran figure politik.

## 2. Daftar Istilah

Istilah	Pengertian
Leviatan	Pemikiran Hobbes mengenai negara terdapat di dalam karya besarnya yang berjudul "Leviathan". Leviathan adalah nama binatang di dalam mitologi Timur Tengah yang amat buas. Di dalam filsafat Hobbes, Leviathan merupakan simbol suatu sistem negara. Seperti Leviathan, negara haruslah berkuasa mutlak dan ditakuti oleh semua rakyatnya, karena hanya dengan cara inilah manusia-manusia dapat mengalami ketertiban dan kebahagiaan.
<i>Heredity Power</i>	Adalah kekuasaan bersifat turunan atau Monarki yang bentuk pemerintahan dan suksesi kekuasaan/tahta berpindah dari satu anggota keluarga yang berkuasa ke anggota lain dari keluarga yang sama. Serangkaian penguasa dari keluarga yang sama akan membentuk sebuah dinasti. Secara historis, ini adalah jenis monarki yang paling umum dan tetap menjadi bentuk dominan di monarki yang masih ada.
<i>Homo Lupus Homini</i>	adalah sebuah kalimat bahasa latin yang berarti "Manusia adalah serigala bagi sesama manusianya". Istilah tersebut pertama kali dicetuskan dalam karya Plautus berjudul <i>Asinaria</i> (195 SM <i>lupus est homo homini</i> ). Istilah tersebut juga dapat diterjemahkan sebagai manusia adalah serigalanya manusia yang diinterpretasi berarti manusia sering menikam sesama manusia lainnya. Istilah itu sering muncul dalam diskusi-diskusi mengenai kekejaman yang dapat dilakukan manusia bagi sesamanya. Sebagai perlawanan dari istilah itu munculah istilah <i>Homo Homini Socius</i> yang berarti manusia adalah teman bagi sesama manusianya, atau

<b>Istilah</b>	<b>Pengertian</b>
	manusia adalah sesuatu yang sakral bagi sesamanya yang dicetuskan oleh Seneca.
<i>Bellum omnium contra omnes</i>	adalah sebuah ungkapan Bahasa Latin yang berarti sebuah perang antar segala melawan semuanya, ungkapan tersebut terutama diasosiasikan dengan diskripsi Thomas Hobbes terhadap keadaan manusia.
<i>Supreme of power</i>	Otoritas tertinggi di suatu negara, semua kekuatan lain di dalamnya lebih rendah daripadanya.
Kontrak Sosial	sebuah perjanjian antara rakyat dengan para pemimpinnya, atau antara manusia-manusia yang tergabung di dalam komunitas tertentu. Secara tradisional, istilah kontrak sosial digunakan di dalam argumentasi yang berupaya menjelaskan hakikat dari kegiatan berpolitik atau menjelaskan tanggung jawab dari pemimpin kepada rakyat. Beberapa filsuf yang memakai teori kontrak sosial adalah Plato, Hobbes, Locke, Rousseau, dan Kant.
<i>Volonte Generale</i>	Dalam filsafat politik, kehendak umum (bahasa Prancis: <i>volonté générale</i> ) adalah kehendak rakyat secara keseluruhan. Istilah ini dipopulerkan oleh filsuf Jenewa abad ke-18 Jean-Jacques Rousseau.
Majelis Rendah	Senat Amerika Serikat (bahasa Inggris: <i>United States Senate</i> ) adalah majelis tinggi pada Kongres Amerika Serikat yang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (majelis rendah) membentuk lembaga legislatif Amerika Serikat.
Majelis Tinggi	Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat adalah majelis rendah pada Kongres Amerika

Istilah	Pengertian
	Serikat yang bersama-sama dengan Senat Amerika Serikat (bahasa Inggris: United States Senate) sebagai majelis tinggi membentuk lembaga legislatif Amerika Serikat.

### 3. Daftar Referensi:

- Ball, Alan R. and B. Guy Peters. *Modern Politics and Government*. London: MacMilan Press Ltd., 2000.
- Cipto, Bambang. *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Eppler, E. *Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal*. Jakarta: Friedrich-Ebert Stiftung, 2010.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Thomas\\_Hobbes#Empirisme](https://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes#Empirisme), diunduh pada Agustus 2021.
- Ichwanuddin, Wawan. “Konsep Perwakilan Politik” dalam *IPEM4323/MODUL-1*. [tanpa penerbit dan tanpa tahun].
- Jogiyanto, H. M. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: ANDI, 1999.
- Lengkong, Johny Peter. *Mata Kuliah Sistem Perwakilan Politik*. Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2019.
- Lijphart, Arend. *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- MacAndrews, M. M. *Perbandingan Sistem Politik*. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Magnis-Suseno, Franz. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Montesquieu. *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. Bandung: Nusamedia, 2015.
- Perry, M. *Peradaban Barat: Dari Revolusi Prancis sampai Zaman Global*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2014
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

- Suparto. *Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam*. Jurnal Hukum Islam, Vol XIX No. 1 Juni 2019.
- Wawan Ichwanuddin. *Konsep Perwakilan Politik*. Banten: Sultan Ageng Tirtayasa, <http://repository.ut.ac.id>
- Wijaya, D.N. *Montesquieu dan Makna Sebuah Keadilan*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 1, Nomor 2, Desember 2016.
- Wirjono, P. *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta Timur:Dian Rakjat, 1983.

## **MODUL 3**

### **SISTEM PERWAKILAN POLITIK MODERN: Figur Politik, Kedalaman Penetrasi, dan Seleksi Kandidat**

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **1. Deskripsi Singkat**

Perbedaan mendasar dari sistem keterwakilan politik dalam dua puluh tahun terakhir dibandingkan dengan masa-masa awal Abad ke-20 adalah kebebasan masyarakat sipil untuk menentukan pilihannya karena pilihan politik semakin banyak tersedia. Masyarakat tidak lagi sekedar terpaku pada isu-isu primordial seperti suku, ras, agama, asal muasal, budaya, adat istiadat dan lain lain yang menjadi patokan pilihan politiknya, tetapi tersedia kemungkinan lain yang lebih menjanjikan bagi para pemilih. Pemilih tidak lagi sekedar berkuat pada isu-isu primordial seperti disebut di atas, tetapi sudah membuka diri dengan sejumlah kemungkinan pilihan yang tersedia.

Dua yang paling pokok diantaranya adalah pilihan warga ditentukan oleh kehadiran dan peran figure politik dan bagaimana partai mengemas program partai yang mampu mengundang simpatik para pemilih, selain tentu saja masih terdapat isu-isu ideologi partai untuk menentukan keterpilihan. Tiga pokok ini tetap menjadi alasan pemilih di seluruh dunia untuk menentukan pilihan politik bagi keterpilihan sebuah partai.

##### **2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

Capaian pembelajaran dari Modul 3 ini adalah:

- a.** Mahasiswa/i diharapkan mampu memahami perkembangan Format sistem Perwakilan Politik Modern yakni menyangkut: Kehadiran Figur Politik dan Bagaimana Kedalaman Penetrasi Partai Politik
- b.** Mampu menguasai Teori Sistem Perwakilan Politik sebagai dasar analisis fenomenapolitik baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negaramaupun tugas sebagai mahasiswa politik.
- c.** Terbentuknya kesadaran sosial akan persoalan politik bangsa berdasarkan pemahaman akan Teori Sistem Perwakilan Politik serta

menemukan solusi atas fenomena politik berdasarkan konsep dan teori yang dipelajari;

### **3. Kemampuan Akhir**

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari Modul 3 ini adalah:

- a. Mahasiswa/I mampu memahami dan menjelaskan bentuk, sumber, dan penggunaan karakteristik dalam Sistem Perwakilan Politik
- b. Mahasiswa/i diharapkan mampu memahami perkembangan Format sistem Perwakilan Politik Modern yakni menyangkut Kehadiran Figur Politik sebagai sesuatu yang baru
- c. Terbentuknya pemahaman mahasiswa terkait dengan sistem perwakilan modern dalam memahami bagaimana Kedalaman Penetrasi Partai Politik menjadi sangat menentukan.
- d. Mahasiswa/i mampu memahami dan menjelaskan bagaimana Partai Politik melakukan seleksi terhadap para kandidatnya sebagai ukuran dari figur yang dapat diterima oleh publik secara luas sebagai pertimbangan utama partai menempatkan para kandidat atau calonnya.

### **4. Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)**

### **5. Kegunaan Modul 3**

Membantu mahasiswa memahami bentuk sistem perwakilan politik yang mengutamakan pentingnya kehadiran figure politik yang kuat untuk keterpilihan dan bagaimana penetrasi politik yang kuat masuk dan merasuk ke tengah masyarakat luas sebagai penentu yang sangat berpengaruh untuk ingatan publik dalam menentukan pilihan terhadap sosok seseorang, termasuk dalam hal ini seleksi kandidat sangat ditentukan oleh penetrasi tersebut.

### **6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

Materi Pokok bahasan modul:

- Format Sistem Perwakilan Modern

Sub Materi Pokok dalam modul ini adalah:

- a. Figur Politik
- b. Program Partai Politik
- c. Ideologi Partai Politik
- d. Penetrasi Calon Legislatif
- e. Seleksi kandidat partai politik

## **B. KEGIATAN PEMBELAJARAN**

### **B1. KEGIATAN PEMBELAJARAN 1:**

#### **1. Judul Kegiatan Pembelajaran:**

**“FORMAT SISTEM PERWAKILAN MODERN: Kehadiran Figur Politik dan Kedalaman Penetrasi Partai Politik”**

#### **2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

KA pada kegiatan pembelajaran ini adalah:

- a. Mahasiswa/i mampu memahami dan menjelaskan bentuk, sumber, dan penggunaan karakteristik dalam Sistem Perwakilan Politik
- b. Mahasiswa/i diharapkan mampu memahami perkembangan Format sistem Perwakilan Politik Modern yakni menyangkut Kehadiran Figur Politik sebagai sesuatu yang baru
- c. Terbentuknya pemahaman mahasiswa terkait dengan system perwakilan modern dalam memahami bagaimana Kedalaman Penetrasi Partai Politik menjadi sangat menentukan.

#### **3. Pemikiran, Penjelasan dan Contoh**

##### **a. Kehadiran Figur/Sosok Politik**

Penentuan pilihan politik bagi seluruh masyarakat pemilih hampir di seluruh dunia dewasa ini sudah mulai ditentukan oleh kehadiran sosok atau figure calon dalam politik. Terdapat pergeseran pemilihan dewasa ini untuk menentukan pilihan partai politik bagi para pemilih sebagaimana misalnya diutarakan oleh Alan Ware.

Menurut Alan Ware,<sup>1</sup> dalam konteks kepartaian saat ini tidak cukup hanya mengandalkan kebesaran nama sebuah partai, tetapi justru mengandalkan kandidat yang dikenal oleh publik dan yang bisa diterima oleh publik secara luas. Bahkan, ideologi yang selama ini menjadi andalan dari partai sering terpinggirkan oleh kualitas dari pelaksanaan konkrit atas program partai yang kemudian menjadi penilaian penting dari pemilih. Pada tataran penempatan kader, sering terbuka ruang untuk terjadinya perbedaan fenomena politik yang melatarbelakangi dan menentukan keputusan hasil akhirnya yang memungkinkan terjadinya perbedaan dan adanya unsur kesamaan terkait peranan elit partai. Kemungkinan terjadinya variasi dalam proses penempatan calon legislative sebuah partai misalnya, tentu tidak bisa terlepas dari adanya faksi-faksi yang berkembang di organisasi partai. Bahkan dalam tataran lebih tinggi, tidak sedikit penentuan lokasi dan daerah pemilihan calon partai menjadi pertimbangan sangat serius bagi setiap partai politik. Terdapat kebutuhan bagi elit dalam mengendalikan jalannya organisasi partai dengan alasan kestabilan internal dan menghindarkan terjadinya perpecahan.<sup>2</sup>

Terkait dengan proses pencalonan kandidat-kandidat, Alan Ware menjelaskan bahwa ketika potensi individu yang layak jual ke tengah pemilih dan dianggap mampu menaikkan suara partai politik ditempatkan sebagai prioritas, maka peranan partai tidak lagi menjadi dominan.<sup>3</sup> Memang tetap perlu bagi partai untuk mensosialisasikan dirinya, tetapi yang paling utama adalah bagaimana calon yang bersangkutan mampu memperkenalkan dirinya ke masyarakat bahwa dirinya layak untuk dipilih. Ketika kandidat tersebut sudah mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat maka tugas partai bisa melihat sebesar apa tingkat penerimaan masyarakat itu terhadap diri seorang calon. Artinya, selama tidak ada riak-riak penolakan entah melalui media atau ada kelompok masyarakat yang berusaha menolak

---

<sup>1</sup> Alan Ware, *Political Parties and Party Systems* (United States, New York: Oxford University Press Inc., 1996), hlm. 21-27, 150-162, 258-267.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

calon dimaksud, maka calon tersebut tetap dimajukan oleh partai dan orang bersangkutan tidak terlalu direpotkan oleh kendala-kendala.

Alasan partai politik menempatkan calon-calon di daerah pemilihan tertentu didasarkan oleh pertimbangan bahwa partai sudah sangat yakin kandidatnya dikenal dan mampu meraih dukungan pemilih secara maksimal. Persoalan partai untuk mensosialisasikan dirinya supaya pemilih memilih partai tersebut menjadi sangat minimal. Alan Ware menjelaskan adanya riset yang menemukan bahwa ideologi partai itu tidak begitu penting lagi, tapi lebih penting adalah bagaimana partai itu bisa terpresentasikan untuk mampu mendapatkan orang-orang terpilih, lalu program-program yang diusung oleh orang-orang yang terpilih tersebut. Alan Ware melihat bahwa ideologi partai itu tidak begitu penting lagi sekarang, yang penting adalah bagaimana partai bisa mendapatkan orang-orang yang bisa menyumbangkan suara untuk partai, dan itu biasanya melalui program-program. Tentu saja dalam hal ini adalah orang-orang yang bisa menaikkan suara partai untuk mendapatkan kursi di legislative.



Gambar 9: Memilih dalam Pemilihan Umum adalah hak setiap warganegara yang bertanggungjawab terhadap bangsanya

Ada dua hal yang saling terkait mengenai masalah ideologi yang sudah mulai bergeser tersebut. *Perbedaan pertama* sebagaimana dikemukakan Alan Ware adalah bahwa partai-partai membuat perbedaan-perbedaan yang kontradiksi dimana partai-partai saling bertentangan yang tampak pada pemilih yang terkotak-kotak oleh

ideologi menjadi sebuah pembeda yang sangat jelas. Alan Ware menjelaskan demikian,<sup>4</sup>

*“The problems in trying to reduce the analysis of these parties ideologies to the spatial representation of their programmes are twofold. The parties may make quite different, and contradictory, appeals to different groups of supporters. The Peronist Party in Argentina, for example, had quite distinct left and right wings; its ideology could not be reduce to a single position on a spectrum.”*

[“Persoalan dalam upaya mereduksi analisa tentang ideologi-ideologi partai ini terkait keterwakilan spasial dari program-program ini bersifat ganda. Partai-partai mungkin menjadi sungguh berbeda dan berkontradiksi, menarik ke arah kelompok-kelompok yang berbeda. Partai Peronist di Argentina sebagai contoh, memiliki distingsi sayap yang sangat berbeda antara kiri dan kanan; ideologinya tidak dapat dikurangi terhadap suatu posisi tunggal pada suatu spektrum.”]

Penjelasan di atas menunjukkan ada perbedaan dari kelompok masyarakat atas adanya perbedaan ideologi yang diusung oleh partai. Ideologi berperan menjadi sesuatu yang menciptakan perbedaan. Contoh di Argentina dimana Partai Peronist memiliki perbedaan yang cukup kuat antara sayap kiri dan sayap kanannya. Ideologinya tidak bisa diminimalisasi untuk menempati satu posisi tunggal.

Tetapi walaupun perbedaan ideologi tersebut sudah mengakar dalam masyarakat, namun Alan Ware tetap mengikuti pandangan Arend Lijhpart tentang politik partai di negara berkembang, dimana diulangi lagi bahwa memang ideologi itu dalam inter relasi antar partai tidak kuat. *Perbedaan kedua* yang ditegaskan oleh Alan Ware terkait ideologi adalah bahwa berbeda dengan spectrum kiri dan kanan, dimensi lain adalah dimensi populisme dan dimensi nasionalis sebagai dimensi yang jauh berbeda dan bisa menjadi kabur dan tidak kelihatan. Alan Ware menjelaskannya demikian,<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

*“Unlike the classic left/right spectrum, populism and nationalism are dimensions that are far more likely to be revealed by a party’s reaction to events than in any formal statement of intentions. The analysis of party programmes is necessarily that is biased towards uncovering the left/right dimension rather than other ones.”*

[“Tidak seperti spectrum kiri atau kanan klasik, populisme dan nasionalisme adalah dimensi-dimensi yang jauh lebih penting untuk ditampakkan melalui penyikapan partai terhadap peristiwa-peristiwa dari pada sekedar statemen formal apapun terkait dengan maksud partai. Analisa tentang program-program partai cukup penting yang bisake arah dimensi kiri/kanan yang tak tertutupi lebih dari pada hal yang lain.”]

Maksud dari uraian di atas adalah bahwa ideologi ini bisa tidak tampak, tetapi populisme dan sifat nasionalisme partai jauh lebih penting yang diwujudkan dalam program partai. Bukan lagi penonjolan terhadap ideologi antara kiri dan kanan yang terutama, tetapi sejauh mana reaksi partai dalam program konkritnya tanggap terhadap praktek-praktek politik yang kena langsung dengan masyarakat yang terlihat dari program-programnya yang populis dan berciri nasionalis. Sebaliknya program individu jauh lebih penting untuk meraih suara. Reaksi partai yang demikian ini sangat berbeda dengan spektrum kiri dan kanan yang disampaikan di penjelasan awal di atas. Karakter ini bisa menghapus dimensi sayap kiri dan sayap kanan, yang bahkan dalam konteks kajian ini dianalogikan adanya dimensi antar yang berbeda suku atau berbeda agama untuk sebuah keterpilihan.

Dalam konteks ini program partai dan ideologi menjadi dua hal sangat penting ketika menggunakan partai yang menentukan keterpilihan dari kandidat-kandidat yang diusulkan. Memang dalam sistem pemilihan umum tertutup, posisi dan pengenalan terhadap partai politik menjadi sangat penting karena partai menempatkan orang-orangnya.

## **b. Kedalaman Penetrasi Partai Politik**

Teori kedua dari Alan Ware adalah terkait penetrasi dari partai-partai untuk masuk dan dikenal oleh masyarakat luas yang menjadi pemilihnya. Terkait dengan itu, Alan Ware menjelaskan bahwa penetrasi partai politik dalam masyarakat, yakni bagaimana partai memasuki masyarakat itu untuk turut mempengaruhi tingkat kompetisi partai politik di masyarakat.

Ada dua jenis penetrasi yang dimiliki oleh partai terhadap masyarakat, yakni penetrasi yang berciri lemah atau kurang kuat dan satu lagi penetrasi yang sangat mendalam masuk ke pengenalan luas dari masyarakat terhadap partai tersebut. Alan Ware menjelaskannya demikian,<sup>6</sup>

*“In general, party penetration of society affects competition between parties in two ways. The less penetration there is, the easier it will be for new parties to emerge and compete with existing parties. One of the factors which made it easy for new parties to develop in Eastern and Central Europe in the early 1990s was the absence of voter links to existing parties-with the exception of the former Communist Parties. Anyone could start up a new party with some hope of winning converts simply because existing parties were themselves struggling to generate loyalty from their electorates. Of course, there are many institutional factors that restrict the opportunities for potential new entrants in established liberal democracies (such as aspects of the electoral rules), but undoubtedly party penetration of society contributes to limiting these opportunities.”*

[Secara umum, penetrasi partai atas warga mempengaruhi kompetisi di antara partai-partai dalam dua cara. Penetrasi yang lemah tentu saja lebih gampang berlaku bagi partai-partai baru untuk menampakkan diri dan bersaing dengan partai-partai mapan. Salah satu faktor yang membuat partai baru gampang bertumbuh di Eropa Timur dan Eropa Tengah pada permulaan 1990 an adalah ketidakhadiran jaringan pemilih untuk mendukung partai-partai mapan dengan keberatan dari mantan partai-partai komunis. Setiap orang dapat membentuk partai

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

baru dengan harapan akan bertukar kemenangan dengan gampang karena partai mapan sedang berjuang meregenerasikan loyalitas dari para pemilih mereka. Tentu saja ada banyak faktor institusional yang membatasi kesempatan bagi peserta-peserta baru yang potensial dalam membangun demokrasi liberal (sebagai aspek hukum Pemilu) tetapi dengan memastikan bahwa penetrasi partai atas masyarakat berkontribusi untuk membatasi kesempatan-kesempatan ini.]

*Jalan pertama* dari partai-partai untuk bersaing adalah jika penetrasi dari sebuah partai kurang (*the less penetration*) memasuki kehidupan masyarakat, maka hal ini dikaitkan bukan lagi hanya terhadap partai tetapi justru terhadap individu. Maka akan lebih mudah bagi partai yang baru untuk memasuki kehidupan masyarakat itu dan berkompetisi dengan partai lama. Untuk mencari perbandingan terkait konteks pandangan Alan Ware di atas, maka menjadi penting juga mengetahui apakah ada partai-partai baru yang menang di basis pemilihan tersebut dan apakah mereka bisa bersaing dengan partai besar? Dari data dalam penelitian sejumlah studi (termasuk studi disertasi doktoral penulis sendiri) ditemukan fakta bahwa ternyata partai-partai kecil di daerah pemilihan justru tidak bisa bersaing secara signifikan.

Dalam konteks Pemilihan Umum Legislatif Indonesia di Era Reformasi, setidaknya dalam Pemilu Tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 lalu, terlihat bahwa partai partai tertentu khususnya yang masih baru tidak cukup mampu bersaing dengan partai-partai yang sudah mapan. Kita sebut misalnya, PDI Perjuangan dan Partai Golkar menjadi dua partai yang sangat menonjol di Subang dan Sumedang dibandingkan partai-partai lain dan seterusnya setidaknya dalam Pemilu Legislatif 2004, 2009, 2014 dan 2019 dibandingkan partai partai lain, apalagi dibandingkan dengan partai partai kecil yang baru lahir. Fakta fakta sedemikian menunjukkan bahwa penetrasi kedua partai ini sudah begitu mendalam, sehingga bagi partai-partai baru kompetisi partai yang baru berdiri menjadi sangat kecil, sehingga kompetensi bagi partai baru menjadi sangat kecil. Perbandingan ini bisa sekilas dilihat dari

perolehan kursi partai-partai di basis pemilihan yang menjadi kajian dalam penelitian ini.



Gambar 10: Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 karena keunggulan figure politiknya.

Dalam pemilihan umum terbaru misalnya sejak Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan 2019, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) termasuk partai yang perlahan lahan semakin ditinggalkan orang padahal partai ini sudah lahir sejak masa awal lahirnya pemerintahan Orde baru persisnya lahir pada tahun 1973 ketika terjadinya fusi-fusi sepuluh partai politik. Sangat berbeda dengan Partai Demokrat yang baru lahir pada tahun 2003 untuk menjadi peserta pemilu tahun 2004, partai ini malah langsung masuk mengusung calon presiden dan terpilih sebagai Presiden yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pemilu pertama yang diikutinya tahun 2004. Bahkan pada Pemilu Legislatif tahun 2009, Partai Demokrat menjadi pemenang pemilu nasional mengalahkan Partai Golkar dan PDI Perjuangan, dan Kembali Presiden SBY terpilih menjadi Presiden untuk kedua kalinya pada tahun 2009. Untuk konteks lain, PDI Perjuangan di Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat selalu menang dalam 25 tahun terakhir walaupun politik identitas atas nama Agama Islam sangat kuat dengan basis utamanya di Jawa Barat termasuk dalam pemilu 2014 dan 2019 lalu. Sesuatu yang berbanding terbalik dengan perolehan suara partai-partai lain seperti PPP, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan sejumlah partai lain.

**Jalan kedua** terkait penetrasi partai menyangkut persaingan partai di tengah masyarakat yakni bahwa semakin besar penetrasi partai terhadap masyarakat maka partai itu semakin kuat untuk ingin berkonsentrasi dalam merebut dukungan suara dari pemilih setianya. Alan Ware menjelaskannya demikian,<sup>7</sup>

*“The greater the social penetration of parties, of more they are tempted to concentrated on retaining the support of their loyalists. And the more parties there are in a ‘highly penetrated’ system, the more all will tend to focus on retaining the support of loyalists. In these circumstances, they have little incentive to act as “catch-all” parties seeking votes from a wide range of groups in society. The consociational system in the Netherlands (1917-late1960s) was an example of extensive party penetration by all the major parties. It was a highly stable party system, arguably not in spite of but because of the highly partisan appeals made by parties to voters.”*

[“Penetrasi social yang lebih besar dari partai yang lebih banyak mereka usahakan adalah mencoba berkonsentrasi mempertahankan dukungan para loyalis mereka. Dan lebih banyak partai berada dalam sebuah sistem ‘penetrasi tinggi’, selebihnya semua bermaksud berfokus pada sisa-sisa dukungan para loyalist mereka. Dalam lingkaran ini, mereka memiliki sedikit insentif untuk bertindak sebagai partai yang terbuka untuk semua (*catch-all*) yang mencari pemilih dari rentang yang luas kelompok masyarakat. Dalam sistem konsosiasional di Belanda (1917 hingga akhir 1960an) merupakan contoh dari penetrasi partai yang luas oleh semua partai besar. Itu semua adalah sistem partai yang sangat stabil, tidak ada perdebaan apapun apapun keculai jika karena permohonan tertinggi dari pengikut setia yang dibuat oleh partai-partai terhadap pemilih.”]

---

<sup>7</sup> *Ibid.*



Gambar 11]: Setelah selesai Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk para Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

Uraian di atas menunjukkan bahwa jalan persaingan kedua adalah adanya upaya dari partai-partai untuk melakukan penetrasi yang besar ke tengah masyarakat untuk meraih dukungan pemilih, entah berdasarkan agama, suku, atau program partai yang lain. Mereka menciptakan pemilih-pemilihnya yang sudah sangat loyalist terhadap partai bersangkutan. Penetrasi partai yang sudah sedemikian besar memungkinkan partai tersebut bahkan memenangkan seluruh kursi dari sebuah daerah yang berkemungkinan merupakan pemilih loyalist terhadap sebuah partai tertentu.

Penciptaan dari penetrasi yang besar terhadap pemilih membuat partai memiliki pemilih loyalist di sejumlah daerah. Situasi bahwa partai memiliki pemilih loyalist tersebut memungkinkan partai mendapatkan seluruh (*catch-all*) kursi dalam sebuah daerah. Dan sebaliknya, persaingan yang besar dari partai-partai terhadap para pemilih loyalistnya membuat partai-partai tidak bisa mendapatkan pemilih yang lain untuk menjadi pemilihnya sebagaimana partai itu maksudkan karena sejumlah pemilih yang lain juga merupakan pemilih loyalistnya. Masing-masing caleg diciptakan untuk bersaing yakni menyangkut kemampuan *capital/modal*, *jaringan/networking*, kemampuan kampanye (*campaign*), dan berbagai hal lain untuk

memenangkan suara. Posisi partai politik menjadi nomor dua untuk upaya kemenangan tersebut. Jadi ini bisa dihubungkan, bahwa sistem penetrasi ini sudah dilakukan oleh partai masing-masing. Memang partai-partai sudah melakukan upaya penetrasi ini baik yang berciri lemah maupun yang berciri kuat.

Bahkan demi sebuah penetrasi, partai politik pun tidak sungkan untuk mengubah diri dari yang sebelumnya sangat eksklusif menjadi partai yang inklusif. Ciri inklusifitas yang merangkul semua pihak menjadi pembeda serius partai politik dari yang sebelumnya menjadi corong yang sangat eksklusif. Salah satu contoh partai yang sangat terlihat dalam Pemilu Era Reformasi Indonesia adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagaimana disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Februari 2008, bahwa kelompok keagamaan yang berbenturan dengan pluralitas akan hancur. Digambarkan bahwa keputusan Musyawarah Nasional II PKS 2008 sebagai partai terbuka menjadi memesonakan. Peneguhan itu adalah penampakan (fenomena) yang mengentak kesadaran publik, yang selama ini menganggap PKS sebagai partai yang militan, eksklusif, dan berpaham Islam konservatif, tegas menyatakan sebagai partai inklusif.

Alasannya tentu saja bahwa PKS melihat kesetiaan primordial saling memotong (*cross cutting affiliation*) memustahilkan garis primordial menjadi instrumen politik yang efektif. Ikatan primordial semakin menjadi tidak relevan sebagai basis konstituensi partai politik. Sejarah telah membuktikan bahwa partai politik yang melulu mendasarkan diri pada solidaritas primordial semakin pudar pamornya. Hasilnya, PKS satu-satunya partai primordial atas nama agama yang meraih hasil bagus sejak Pemilu 2009 selalu di kisaran perolehan suara sekitar 7,8%, bahkan dalam Pemilu 2019, PKS meraih suara tertingginya di angka 8,1%, angka yang belum pernah diraih di pemilu-pemilu sebelumnya. Ini bukti penetrasi yang digagas oleh PKS benar-benar bisa diterima oleh pemilihnya.

Lalu bagaimana dengan seleksi kandidat dipahami oleh Alan Ware? Materi Pembelajaran berikutnya akan menjelaskannya dengan mendalam. Seleksi kandidat menjadi salah satu substansi dasar akan keterpilihan seseorang kandidat.

#### 4. Rangkuman

Pembahasan pada modul ini dapat dirangkum dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Dalam konteks kepartaian saat ini tidak cukup hanya mengandalkan kebesaran nama sebuah partai, tetapi justru mengandalkan kandidat yang dikenal oleh publik dan yang bisa diterima oleh publik secara luas. Bahkan, ideologi yang selama ini menjadi andalan dari partai sering terpinggirkan oleh kualitas dari pelaksanaan konkrit atas program partai yang kemudian menjadi penilaian penting dari pemilih. Pada tataran penempatan kader, sering terbuka ruang untuk terjadinya perbedaan fenomena politik yang melatarbelakangi dan menentukan keputusan hasil akhirnya yang memungkinkan terjadinya perbedaan dan adanya unsur kesamaan terkait peranan elit partai.
- b. Ideologi ini bisa tidak tampak kasat mata, tetapi populisme dan sifat nasionalisme partai jauh lebih penting yang diwujudkan dalam program partai. Bukan lagi penonjolan terhadap ideologi antara kiri dan kanan yang terutama, tetapi sejauh mana reaksi partai dalam program konkritnya tanggap terhadap praktek-praktek politik yang kena langsung dengan masyarakat yang terlihat dari program-programnya yang populis dan berciri nasionalis. Sebaliknya program individu jauh lebih penting untuk meraih suara.
- c. Ada dua jenis penetrasi yang dimiliki oleh partai terhadap masyarakat, yakni penetrasi yang berciri lemah atau kurang kuat dan satu lagi penetrasi yang sangat mendalam masuk ke pengenalan luas dari masyarakat terhadap partai tersebut. Jalan pertama dari partai-partai untuk bersaing adalah jika penetrasi dari sebuah partai kurang (*the less penetration*) memasuki kehidupan masyarakat, maka hal ini dikaitkan bukan lagi hanya terhadap partai tetapi justru terhadap individu.
- d. Jalan kedua terkait penetrasi partai menyangkut persaingan partai di tengah masyarakat yakni bahwa semakin besar penetrasi partai terhadap masyarakat maka partai itu semakin kuat untuk ingin berkonsentrasi dalam merebut dukungan suara dari pemilih setianya. Bahkan demi sebuah penetrasi, partai politik pun tidak sungkan untuk mengubah diri dari yang sebelumnya sangat eksklusif menjadi partai

yang inklusif. Ciri inklusifitas yang merangkul semua pihak menjadi pembeda serius partai politik dari yang sebelumnya menjadi corong yang sangat eksklusif.

## 5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek

### a. Latihan

Mahasiswa diberi kesempatan untuk menjelaskan praktek kekuasaan, kewenangan, dan pola distribusi kekuasaan yang ditemukan di lingkungan tempattinggalnya. Dengan didasarkan pada konsep dan teori yang telah dijelaskan

### b. Lembar Kerja Praktik

Mahasiswa silahkan menjelaskan Sistem keterwakilan terkait dengan Figur atau sosok politik, Program partai Politik, Ideologi Partai Politik dan Penetrasi Partai Politik dalam keterpilihan seorang calon perwakilan politik.

No	Sistem Perwakilan Modern	Apa pentingnya untuk keterpilihan
1.	Figur/Sosok Politik	
2.	Program Kerja parpol	
3.	Ideologi Parpol	
4.	Penetrasi kandidat parpol	

## 6. Evaluasi Pembelajaran

Mahasiswa memberikan tanggapan reflektif atas sistem perwakilan politik di era modern ini menyangkut empat pokok sistem perwakilan di atas.

## 7. Umpan Balik

Dosen memberikan penjelasan lebih lengkap dan menjadi kesimpulan akhir untuk dipegang oleh mahasiswa terhadap semua pandangan dan pengertian yang disampaikan oleh mahasiswa sebelumnya.

## **B2. KEGIATAN PEMBELAJARAN 2:**

### **1. Judul Kegiatan Pembelajaran:**

**“Seleksi Kandidat Partai Politik Dan Penerimaan Publik Atas Kader”**

### **2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

KA pada kegiatan pembelajaran ini adalah:

- a. Mahasiswa/i mampu memahami dan menjelaskan bagaimana Partai Politik melakukan seleksi terhadap para kandidatnya sebagai ukuran dari figur yang dapat diterima oleh publik secara luas
- b. Mahasiswa/i memahami bahwa penerimaan publik atas sosok kandidat dimaksud sebagai pertimbangan utama partai menempatkan para kandidat atau calonnya.
- c. Mahasiswa/i mampu memahami dan menjelaskan bentuk, sumber, dan penggunaan seleksi kandidat sebagai karakteristik dalam Sistem Perwakilan Politik

### **3. Uraian, Kutipan, Penjelasan, Dan Contoh**

#### **a) Seleksi Kandidat Partai dan Penerimaan Publik atas Kader**

Terkait dengan seleksi kandidat dan kepemimpinan, Alan Ware menjelaskan bahwa kepemimpinan di internal partai tidak terlepas dalam proses menentukan salah satu seleksi untuk pencalonan. Namun seleksi tersebut, walaupun mengedepankan kepemimpinan seorang calon di tingkat kepengurusan partai, tetap harus mempertimbangkan sejauh mana calon dimaksud mendapat tingkat penerimaan ketika dijual di tengah pemilih untuk dipilih oleh masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Alan Ware menjelaskannya demikian,<sup>8</sup>

*“Those who aspired to the highest reaches of party leadership would now have careers that embraced both high profile elected publik office and, often but not invariably, positions within the party organization. With no experience in elective public office, the would-be leader could not convince those responsible for selection that he or she had the credentials to appeal to mass electorates.”*

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 258.

[“Orang-orang yang teraspirasi untuk pencapaian tertinggi kepemimpinan partai sekarang ini memiliki karier yang dicakup baik profil tinggi yang dipilih dari pegawai publik maupun selalu terkait posisi dengan organisasi partai tetapi tanpa bervariasi. Dengan tanpa pengalaman di kantor-kantor publik terpilih, pemimpin masa depan tidak dapat meyakinkan orang-orang yang dapat dipersalahkan untuk pemilihan sehingga setiap orang memiliki kepercayaan untuk menarik perhatian massa pemilih.”]

Terkait dengan seleksi terhadap kandidat dan kepemimpinan di atas, Alan Ware memberikan argumentasi bagaimana seleksi yang dilakukan untuk keterpilihan yakni untuk dipilih masyarakat terkait alasan mengapa partai memilih orang-orang tertentu untuk duduk pada kursi-kursi pemilihan itu. Ketika bicara partai politik terkait kandidat untuk duduk di kursi legislatif, menurut Alan Ware, partai politik akan menempatkan orang-orangnya yang mempunyai tingkat tertinggi dalam kepemimpinan. Dan juga mempunyai tingkat tertinggi dalam hal elektabilitas dalam pemilihan. Ini juga terkait dengan posisinya dalam partai politik, jika tidak ada pengalaman dalam pemilihan politik (*public office*), maka posisi *leader* ini tidak cukup diyakinkan pada proses pemilihan.

Jadi partai juga pada intinya menjadi rasional kalau seseorang tidak punya latar belakang (*back ground*) kepemimpinan atau kemungkinan besar untuk terpilih, partai juga tidak akan menempatkan dia pada posisi nomor urut yang sangat besar seperti nomor urut 1, 2, atau 3. Karena sebuah partai sama halnya bersikap bunuh diri bila dalam penentuan calon menempatkan sosok yang tidak layak jual di tengah masyarakat pemilih. Terkait penentuan kandidat yang akan diusung, maka partai melakukan seleksi yang tersentral yakni mengikuti hukum umum sebagaimana diatur oleh partai secara detail. Selain itu ada juga seleksi yang tidak tersentral yang merupakan kebijakan dari partai yang tidak tersurat secara jelas.



Gambar 12: Sejumlah 14 Partai politik sebagai peserta Dalam Pemilu Nasional Tahun 2019

Kemungkinan ada peluang bagi calon-calon yang diunggulkan atau calon-calon yang maju tidak mengikuti hukum yang umum tetapi merupakan pertimbangan saja dari pengambil kebijakan untuk penentuan calon tersebut. Terkait dengan hal ini, Alan Ware menjelaskannya demikian,<sup>9</sup>

*“However, even in parties where the direct role of the center in selecting candidates is insignificant, the centre may establish rules and procedures that, indirectly, are extremely important in deciding what kinds of candidate will be selected. [...] That there is a party policy on quotas for women or for other social groups – is important in setting the agenda for local parties when it undertakes candidate selection even when the centre cannot overturn the decisions of these parties.”*

[“Namun bahkan ketika partai-partai dimana peranan langsung dari pusat dalam menyeleksi kandidat menjadi tidak signifikan, maka pusat mungkin membangun hukum dan prosedur, yang secara tidak langsung, sangat penting dalam memutuskan jenis kandidat apa yang akan diseleksi. [...] sehingga ada kebijakan partai tentang kuota perempuan atau bagi kelompok social yang lain – menjadi penting dalam mengatur agenda bagi partai-partai

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 263.

local ketika hal itu membenarkan seleksi kandidat bahkan ketika pusat tidak dapat mengubah keputusan atas partai-partai ini.”]

Alan Ware menyebutkan bahwa meskipun dalam partai sendiri ada peran langsung dan terpusat dalam menyeleksi kandidat yang penting, pihak pengurus pusat (*centre*) bisa juga menetapkan peraturan atau prosedur secara tidak langsung tetapi sangat penting dalam memutuskan kandidat seperti apa yang harus dipilih. Alasannya tentu saja karena bagaimanapun partai akan sangat berkepentingan menempatkan orang yang satu etnik dengan pemilih, yang satu agama dengan pemilih. Namun mungkin ada peraturan di internal partai bahwa hal itu tidak menjadi pilihan baku sepanjang seseorang itu bisa diterima, bisa mewakili partai, dan tingkat penerimaan pemilih terhadap yang bersangkutan bisa menjadi cukup besar. Maka menjadi penting bahwa partai memiliki peraturan sendiri yang menempatkan seseorang secara langsung walaupun tidak sesuai dengan hukum umum yang berlaku di partai tersebut.

Mestinya partai menempatkan orang yang diharapkan memperoleh suara besar karena ternyata orang bersangkutan memang bisa diterima. Mungkin ada peraturan yang tidak langsung karena melihat individunya, tidak mengikuti paham yang umum itu. Terkait dengan rekrutmen politik oleh partai sebagaimana diungkapkan oleh Alan Ware menjelaskan bahwa fungsi rekrutmen politik menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik.<sup>10</sup> Ia menjadi monopoli dan fungsi abadi partai politik.

#### **b) Dominasi Partai Politik Konteks Indonesia**

Pemilukada sebagai ajang demokrasi di tingkat lokal memberi peluang bagi setiap individu untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Setiap perhelatan Pemilukada cenderung menimbulkan fenomena baru, salah satunya adalah munculnya calon tunggal. Kuatnya dominasi Dewan Pimpinan Pusat

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal 5-10. Lihat juga Sigit Pamungkas, *Partai Politik: teori dan praktek di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011), hlm. 89-90.

(DPP) partai politik dalam menentukan calon kepala daerah, tidak jarang aspirasi dari kader ditingkat DPC dan DPD diabaikan sebagai calon, karena dinilai tidak memiliki kualitas, finansial dan juga popularitas. Dominasi elit parpol ditingkat pusat terlihat cukup signifikan, sehingga semua calon yang memiliki kursi di DPRD terpaksa mendukung satu calon, meskipun mereka juga memiliki keinginan mendukung calon lain sebagai penantang untuk berkompetisi.

Penelitian dari Herri Junius Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Tanjungpura, Pontianak berjudul "Oligarki Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah" patut untuk disimak.<sup>11</sup> Munculnya calon tunggal dalam pemilukada di beberapa daerah mengindikasikan bahwa Undang-Undang Pemilukada yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, masih memiliki celah yang tidak mengantisipasi lahirnya calon tunggal.

Penelitian Herri Junius menemukan bahwa manuver politik ditingkat pusat pada akhirnya berhasil menyepakati untuk mendukung satu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilukada Kabupaten Landak periode 2017-2022. Koalisi 9 (Sembilan) partai, yaitu PDIP, Gerindra, Nasdem, Golkar, Demokrat, PKB, PKPI, Hanura dan PAN hanya mengusung satu pasangan calon saja. Fenomena ini, memberikan gambaran bahwa dalam proses penentuan kepala daerah dan wakil kepala daerah, masih didominasi oleh elit partai ditingkat pusat. Munculnya calon tunggal pada Pemilukada Kabupaten Landak memberikan indikasi bahwa dalam proses penentuan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, masih didominasi oleh elit partai ditingkat pusat. Struktur partai yang berada di tingkat bawah, tidak bisa berbuat banyak untuk menentukan calon yang mereka nilai memiliki peluang untuk menang dalam Pemilukada. Berangkat dari seluruh

---

<sup>11</sup> Herri Junius (Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Tanjungpura, Pontianak), "Oligarki Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah" dalam *Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 1 - Februari 2018*, hlm. 69-78.

penjelasan di atas, oligarki sebagai suatu konsep yang kuno yang dalam perjalanannya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat ternyata di era demokrasi saat ini justru dipergunakan untuk memperoleh kekuasaan.

Munculnya calon tunggal menjadi fenomena baru, yang menjadi ancaman bagi kehidupan demokrasi. Demokrasi yang senyatanya mengedepankan kedaulatan rakyat, dengan hak dan kebebasan untuk berpartisipasi menjadi semu manakala secara realitas keputusan dalam proses pencalonan berada ditangan segelintir elit (oligarki). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui penyebab oligarki partai yang berdampak pada munculnya calon tunggal pada pemilukada sebagaimana misalnya dialami oleh salah satu kabupaten yakni Kabupaten Landak tahun 2017, yaitu: Kekuasaan Berdasarkan Hak Politik Formal. Kekuasaan berdasarkan hak politik formal menekankan bahwa seseorang atau kelompok yang menduduki suatu jabatan politik bukan hasil dari sebuah proses yang dipaksakan atau inskonstitusional, tetapi hasil dari sebuah proses politik yang mendapatkan legitimasi dari pemilik suara partai melalui proses pemilihan kepengurusan.

Hak politik formal yang dimiliki oleh partai politik ini secara otomatis memberikan kekuasaan penuh kepada pemilik hak politik sesuai dengan struktur dan kewenangannya untuk menggunakan kekuasaan mengatur kehidupan partai. Kondisi ini terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para kader, sehingga sering terjadi dinamika, meskipun pada akhirnya keputusan tertinggalah yang memiliki peran untuk memutuskan hal penting dalam kehidupan partai politik. Dukungan partai politik pada pemilukada ini berdampak terhadap munculnya satu pasangan calon berimplikasi terhadap kehidupan demokrasi di internal partai. Partai politik pada akhirnya turut mempraktekkan budaya oligarki yang pada dasarnya bertolak belakang dengan demokrasi.



Gambar 13: Penentuan final calon/kandidat peserta Pilkada politik diputuskan oleh DPP Partai

Kekuasaan berdasarkan hak politik formal yang dimiliki oleh partai memaksa mereka untuk mengikuti hal-hal yang berbau pragmatis untuk memutuskan hal-hal krusial dalam kehidupan partai, seperti penentuan calon kepala daerah. Terkait dengan hak politik formal yang diperoleh Ketua Umum Partai dengan kekuasaan yang sangat besar, Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Landak memberikan penjelasan bahwa: "... dalam struktur kepengurusan partai, ketua umum mendapatkan jabatan resmi dari partai, apalagi di partai Gerindra yang ketua umumnya sekaligus pendiri partai, maka hak politik formal yang melekat sangat besar bahkan struktur partai di bawah sangat bergantung dengan ketua umum, dan berhutang budi dengan ketua umum".<sup>12</sup>

Penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa ketua umum memiliki posisi yang istimewa dibandingkan dengan posisi lainnya dalam struktur kepartaian, sehingga tidak mengherankan apabila dimata kader partai posisi ketua umum yang secara formal memiliki hak istimewa mendapatkan posisi penting dan strategis di internal partai. Hak formal yang dimiliki menjadi kekuatan untuk menggerakkan mesin partai dan mengatur jalannya kehidupan partai, sekalipun untuk beberapa hal struktur partai ditingkat bawah diberikan kewenangan tersendiri tanpa keterlibatan ketua umum secara langsung. Dalam konteks munculnya

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

calon tunggal pada pemilukada, kekuasaan berdasarkan hak politik formal yang dimiliki ketua umum partai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan partai politik ditingkat lokal gagal menghadirkan para calon untuk berkompetisi dalam perhelatan pemilukada.

Apapun alasan yang diberikan oleh partai terhadap keputusan memberikan rekomendasi kepada pasangan yang diinginkan, menunjukkan bahwa hak politik ketua umum partai turut menjadi pengaruh munculnya calon tunggal tersebut. Secara normatif, tidak ada partai yang mau mengorbankan partainya untuk keuntungan partai lain, namun dalam hal ini menunjukkan bahwasannya di dalam internal partai sekalipun merupakan pilar demokrasi, fenomena oligarki masih tetap ada, bahkan cenderung menjadi kebiasaan untuk memperkuat legitimasi ketua umum partai, sebagai pendiri partai dan dapat juga dikatakan sebagai pemilik partai. Namun akhirnya keputusan final penentuan calon yang akan diusung oleh partai politik ditentukan oleh DPP Partai. Tidak jarang hak politik formal DPP partai dalam memberikan surat rekomendasi dukungan kepada calon kandidat pada pemilukada dilatarbelakangi oleh usulan dari struktur partai ditingkat bawah yang gagal mengambil keputusan tentang sosok yang akan diusung, sehingga baik DPC maupun DPP menyerahkan sepenuhnya keputusan di tangan DPP, dan mereka siap dan wajib patuh terhadap keputusan yang sudah diambil.

Jabatan Resmi dalam Organisasi di struktur kepartaian terdapat jabatan-jabatan resmi berdasarkan jenjang hirarki masing-masing mulai dari tingkat atas (DPP) sampai tingkat bawah (Ranting). Jabatan yang disusun secara hirarki memiliki satu garis komando, yaitu posisi jabatan tertinggi memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur jabatan yang berada di bawah. Ketua Umum Partai yang merupakan jabatan resmi di dalam organisasi partai dan sebagai pemimpin tertinggi partai, adalah jabatan resmi yang tidak hanya diputuskan oleh internal partai, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Artinya secara legal formal jabatan resmi partai tersebut kepengurusannya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga mereka diberikan hak untuk melaksanakan fungsi partai sesuai dengan AD/ART masing-masing partai.

Tahapan umum penjaringan dan penyaringan kandidat setiap partai adalah setiap calon akan dilakukan penjaringan lagi oleh DPC untuk selanjutnya diajukan ke DPD dan DPP, untuk mendapatkan rekomendasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa secara struktur, jabatan partai yang dimiliki oleh DPC dalam proses rekrutmen memiliki posisi yang sentral dan strategis untuk menentukan calon yang akan diusung dalam perhelatan pemilukada. Posisi strategis ini karena mereka lebih mengetahui kondisi politik lokal dan figure yang lebih tepat untuk menentukan siapa yang layak untuk dicalonkan. Lebih dari itu, dengan adanya struktur dan pembagian kerja, akan memudahkan posisi partai politik dalam mempersiapkan kader terbaik dan figur lokal untuk dijadikan calon kandidat, yang tentu saja akan semakin meramaikan calon peserta pemilukada, yang artinya masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menentukan calon kepala daerahnya. Kondisi ideal inilah yang harusnya hadir dalam demokrasi seperti pemilukada sehingga memenuhi aspek “kompetisi” sebagai salah satu ciri demokrasi.

Namun kewenangan resmi dimiliki oleh DPP menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa peran DPP dalam menentukan calon yang akan diusung dalam pemilukada. Keputusan mutlak ada pada DPP, sehingga struktur partai di tingkat bawah hanya mengikuti instruksi dari DPP, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa posisi partai ditingkat lebih rendah tunduk dengan keputusan DPP partai yang diberi wewenang formal untuk menentukan siapa yang akan didukung. Dalam arti yang lebih spesifik bisa dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh DPP partai politik bisa memiliki kekuatan dan kekuasaan pemaksaan/koersif. Alasannya karena sumber daya yang dimiliki oleh segelintir elit dalam partai politik memberikan dampak terhadap pemusatan kekuasaan dan pengaruh pada elit tersebut. Dengan sumber daya yang dimiliki, mereka dapat dengan mudah melakukan tindakan sesuai yang mereka kehendaki, termasuk memaksa apabila terdapat pihak yang tidak patuh atau tidak sependapat dengan apa yang diinginkan partai pengusung.

Di konteks kepartaian di Negara Indonesia, orang-orang yang duduk di struktur atas partai memiliki posisi yang strategis dan penting dalam menentukan arah dan tujuan partai baik itu untuk kepentingan ideologis dan visi partai atau hanya untuk kepentingan jangka pendek. Kekuasaan memaksa tersebut diikuti dengan adanya ancaman berupa pemberian sanksi manakala kader partai di tingkat bahwa tidak melaksanakan keputusan DPP ataupun menolak keputusan tersebut. Sanksi yang paling berat adalah dikeluarkan dari keanggotaan partai. Dapat dibayangkan jika kader tersebut merupakan anggota DPRD, secara otomatis apabila ia menentang keputusan DPP, maka akibat dari kehilangan keanggotaan partai, posisi sebagai anggota DPRD pun akan terancam diganti (PAW). Termasuk apabila kader tersebut menempati posisi puncak (ketua DPC atau DPD) Partai, akan terancam diganti, karena dianggap tidak loyal dengan partai.

Kekuasaan pemaksaan oleh elit partai di tingkat pusat, dikemukakan oleh Sekretaris Gerindra Kabupaten Landak, yang memberikan keterangan sebagai berikut: "... awalnya Gerindra mengajukan saudara Vincensius sebagai calon Bupati Landak pada pemilukada tahun 2017, hal ini sudah didukung sepenuhnya oleh DPC dan DPD, namun kemudian DPP mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon Karolin dan Heriadi. Adapun di dalam SK Rekomendasi juga diikuti dengan adanya perintah untuk melaksanakan kebijakan partai serta akibat apabila tidak melaksanakan kebijakan partai".<sup>13</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa elit partai di tingkat pusat memiliki kekuasaan tidak saja untuk menggerakkan struktur partai di tingkat bahwa melalui sebuah instruksi. Namun lebih dari itu, mereka juga dapat memaksa kader partai ditingkat bahwa untuk mengikuti ketentuan partai ditingkat pusat melalui sebuah ancaman pemecatan. Secara rasional kader partai ini akan memilih posisi yang aman dan loyal kepada keputusan partai.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 74.



Gambar 14: Pemilukada sarana pembuktian martabat politik warganegara

Penjelasan tersebut juga menunjukkan bahwa DPC terpaksa melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dari DPP untuk mendukung calon yang telah ditetapkan oleh DPP. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa tidak terdapat partisipasi dari kader partai ditingkat bawah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan mereka, karena aspirasi tidak mendapatkan persetujuan dari DPP. Loyalitas kader partai terhadap keputusan elit partai di tingkat pusat lebih disebabkan oleh faktor keterpaksaan, karena tidak ada individu atau kelompok yang bersedia melaksanakan suatu keputusan yang bertentangan dengan keinginan mereka. Apalagi mereka sebagai kader yang menginginkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Namun demikian, pada saat yang bersamaan mereka juga terpaksa melaksanakan kebijakan partai yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, setidaknya pilihan antara keinginan dan keputusan partai harus ada yang dirioritaskan. Kembali pada pilihan rasional, mereka yang masih menduduki jabatan strategis baik di struktur partai maupun di lembaga legislative akan berfikir 2 (dua) kali untuk tidak melaksanakan keputusan partai walaupun dalam keadaan terpaksa.

Tidak hanya itu, bagi mereka yang sudah menjadi anggota partai dan hendak mencalonkan diri sebagai calon legislative pada pemilu selanjutnya tentu tetap akan mengamankan posisi agar lebih mudah diusung partai. Kondisi yang sama juga diungkap oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Landak terkait dengan kekuasaan memaksa yang dimiliki oleh elit DPP Partai, sebagai berikut : “dalam kehidupan organisasi, tentu saja kita harus patuh dengan ketentuan yang mengingat sebagai kader,

demikian pula dalam penentuan SK rekomendasi, tentu kita akan laksanakan karena ada konsekuensi apabila menolak”. Keterangan yang disampaikan oleh kader PKB tersebut menunjukkan bahwa struktur partai di tingkat bahwa tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk tidak melaksanakan keputusan DPP, apalagi mereka yang selama ini telah mendapatkan manfaat pribadi dari keikutsertannya dalam partai tersebut. Kekuasaan memaksa yang dimiliki oleh DPP Partai tidak saja dari hak politik formal yang legal, tetapi juga kekuasaan memaksa itu bisa bersumber dari pengaruh dan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar. Tentu saja dalam kehidupan organisasi, struktur organisasi, kode etik, dan juga statute, atau AD/ART sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan organisasi dan perpecahan di tumbuh organisasi partai.

Kebebasan yang diberikan kepada anggota partai tidak berarti mereka bebas menentukan pilihan yang diluar keputusan partai. Hanya saja dalam beberapa kasus, seperti di PemiluKada Kabupaten Landak, keinginan kader untuk mengusung calon lain diluar calon DPIP bukan karena mereka ingin melawan atau memberontak, tetapi atas dasar pertimbangan yang rasional dan aspiratif. Partai politik tentu saja menginginkan adanya calon alternative yang dapat bersaing dalam kontestasi pemiluKada, bukan hanya satu partai saja. Lebih jauh, penjelasan tersebut memberikan gambaran kuatnya kewenangan DPP dalam memutuskan calon, serta tidak berdayanya DPC apabila DPP telah menetapkan pilihan yang berbeda dengan keinginan partai ditingkat bahwa.

#### **4. Rangkuman**

Pembahasan pada modul ini dapat dirangkum dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan di internal partai tidak terlepas dalam proses menentukan salah satu seleksi untuk pencalonan. Namun seleksi tersebut, walaupun mengedepankan kepemimpinan seorang calon di tingkat kepengurusan partai.
- b. Meskipun dalam partai sendiri ada peran langsung dan terpusat dalam menyeleksi kandidat yang penting, pihak pengurus pusat

(*centre*) bisa juga menetapkan peraturan atau prosedur secara tidak langsung tetapi sangat penting dalam memutuskan kandidat seperti apa yang harus dipilih. Alasannya tentu saja karena bagaimanapun partai akan sangat berkepentingan menempatkan orang yang satu etnik dengan pemilih, yang satu agama dengan pemilih.

- c. Fungsi rekrutmen politik menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik. Ia menjadi monopoli dan fungsi abadi partai politik. Maka dalam konteks keterpilihan caleg-caleg Kristen, misalnya ketika dilihat bagaimana mereka terpilih dari daerah berbasis Islam seperti Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan sejumlah daerah lain,

## 5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek

### a. Latihan

Mahasiswa diberi kesempatan untuk menjelaskan praktek kekuasaan, kewenangan, dan pola distribusi kekuasaan yang ditemukan di lingkungan tempattinggalnya. Dengan didasarkan pada konsep dan teori yang telah dijelaskan

### b. Lembar Kerja Praktik

Mahasiswa silahkan menjelaskan Sistem keterwakilan terkait dengan kandidat dengan figur atau sosok politik dan seleksi kandidat oleh Partai Politik, pertimbangan dan kewenangan pengurus pusat

No	Sistem Perwakilan Modern	Apa pentingnya untuk Seleksi
1.	Kandidat Politik Figur/Sosok Politik	
2.	Seleski Kandidat oleh Parpol	
3.	Kewenangan Pengurus Pusat parpol	

### **c. Evaluasi Pembelajaran**

Mahasiswa memberikan tanggapan reflektif atas sistem perwakilan politik di era modern ini menyangkut pokok-pokok sistem perwakilan di atas.

### **d. Umpan Balik**

Dosen memberikan penjelasan lebih lengkap dan menjadi kesimpulan akhir untuk dipegang oleh mahasiswa terhadap semua pandangan dan pengertian yang disampaikan oleh mahasiswa sebelumnya.

## **C.PENUTUP**

### **1.Rangkuman**

Ketiga level pengaruh tersebut sebagaimana dimaksudkan Alan Ware ternyata menunjukkan hasil dalam sebuah penelitian yang sudah teruji dalam sebuah disertasi oleh penulis sendiri bahwa ketiga faktor yakni: ideologi partai politik, program partai politik, dan kehadiran sosok atau figure yang teruji dan terpuji menjadi menentukan. Dari ketiga faktor tersebut, yang pernah diteliti oleh penulis, faktor yang memiliki pengaruh paling dominan adalah faktor kehadiran sosok atau figure yang teruji dan terpuji.

Faktor ini sangat terlihat jelas ketika faktor sosok atau figure merekalah yang paling dominan yang menentukan keterpilihan caleg-caleg Kristen tersebut bila dikaitkan dengan teori Alan Ware di atas. Alasannya sangat jelas, yakni karena calon legislatif yang bersangkutan sering-sering hadir ke tengah publik secara langsung di saat masyarakat sangat membutuhkan kehadiran mereka khususnya untuk urusan urusan kepentingan public. Atau juga karena sosok mereka menjadi figure publik yang sering muncul di media massa dan elektronik dan tidak memiliki catatan dan latar belakang yang buruk di mata pemilih.

## 2. Daftar Istilah

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
Ideologi	Kata Ideologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis Destutt de Tracy pada tahun 1796. Kata ini berasal dari bahasa Prancis <i>idéologie</i> , merupakan gabungan 2 kata yaitu, <i>idéo</i> yang mengacu kepada gagasan dan <i>logie</i> yang mengacu kepada logos, kata dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan logika dan rasio. Destutt de Tracy menggunakan kata ini dalam pengertian etimologinya, sebagai "ilmu yang meliputi kajian tentang asal usul dan hakikat ide atau gagasan".
Program parpol	Adalah agenda atau jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah partai politik yang kelak akan menghadirkan tanggapan entah positif atau negative dari masyarakat luas khususnya masyarakat yang menjadi pemilih partai politik tersebut
Figur Politik	Tokoh atau pelaku politik yang sudah dikenal sangat luas oleh masyarakat baik masyarakat lingkup nasional, daerah provinsi atau kelompok yang lebih local yakni di daerah pemilihan tertentu dari mana si calon sudah dikenal dengan sangat luas.
Penetrasi Kandidat	Adalah penerobosan, upaya maksimal yang dilakukan oleh seorang kandidat kepada masyarakat pemilihnya untuk memperkenalkan dirinya dari perbuatan dan Tindakan yang selama ini sudah dilakukannya. Penetrasi seorang kandidat dalam wilayah politik akan diukur dari seberapa besar pengenalan dan penerimaan masyarakat luas terhadap diri seorang kandidat. Semakin mendalam penetrasi seorang kandidat merasuk dan dikenal masyarakat luas dengan penerimaan yang baik maka akan semakin berpeluang pula kehadiran dirinya untuk terpilih sebagai perwakilan dari masyarakat pemilihnya.

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
Kandidat Politik	Adalah calon-calon yang mendaftarkan diri untuk bertarung dalam sebuah ajang politik, dimana seluruh calon saling menantang calon yang lain yang hasil akhirnya ditentukan oleh pemenang hasil pilihan rakyat. Kandidat politik dicalonkan oleh partai politik yang oleh partai politik telah melakukan penjurangan terhadap semua yang berminat, lalu melakukan penyaringan para calon hingga keluar kandidat-kandidat politik.
Kader Politik	Adalah orang atau pihak yang mau belajar dan mengikuti sebuah paham dan ideologi sebuah partai politik, yang dalam proses berjalan mengalami pembinaan dan proses Pendidikan internal partai hingga kelak kemudian dalam batas wajar yang normal para kader politik mencapai puncak karier politik masing masing sesuai level dan jenjang yang diikutinya secara bertingkat.
<i>Catch-All Party</i>	Sesuai dengan namanya, catch-all party adalah partai yang berusaha untuk meraih atau memiliki massa yang sebanyak-banyaknya. Untuk mencapai tersebut maka partai ini tidak hanya berusaha mendekati massa yang berasal dari kelompok, etnis atau agama tertentu laiknya partai massa. Tetapi juga berusaha memiliki massa dari pelbagai macam kelompok dan agama. Partai <i>catch-all</i> sadar akan hal itu dan berusaha merangkul sebanyak-banyaknya pemilih tanpa ada pembedaan satu sama lain.
<i>Cross Cutting</i>	Hubungan potong memotong, atau yang lebih dikenal dengan cross cutting relationships, prinsip hubungan potong memotong menyatakan sesuatu yang memotong. Dalam politik berarti kebijakan partai politik yang memotong kebijakan terdahulu, sehingga terkesan partai yang menjadi berbeda dari

Istilah	Arti
	sebelumnya, misalnya partai agama yang sebelumnya sangat tertutup ideologinya kemudian menjadi partai yang lebih terbuka dan menerima agama lain pun menjadi anggota atau calon/kandidat politik.

### 3. Daftar Referensi

- Almond, Gabriel dan G. Bigham Powell, Jr. *Comparative Politics, System, Process and Policy*, second edition, Boston: Little Brown and Company, 1978
- Anderson, Benedict dan Audrey Kahin (eds), *Interpreting Indonesia Politics: Thirteen Contributions to the Debate*, Cornell Modern Indonesia Project, Ithaca, New York, 1982.
- Budiardjo, M. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia, 2000.
- Carlton, Clymer Rodee et al. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Ebenstein, W. *Isme-isme Yang Mengguncang Dunia*. Yogyakarta: Narasi, 2006.
- Haboddin, M. Jejak Pemikiran: Dari Tradisionalis keBehavioralis. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7 (1), Maret 2016.  
<https://www.tribunnews.com/nasional/2010/06/29/fenomena-pks-menjadi-partai-terbuka>.
- J.T. Ishiyama, & M. *21st Political Science: A Reference Handbook*. LosAngels, London, New Delhi: Sage Publications, 2011.
- Jurnal Academia Praja, Volume 1 Nomor1-Februari 2018*, IlmuPolitik FISIP Universitas Tanjungpura, Pontianak
- Lijphart, Arend. *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Magnis-Suseno. *Franz. Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Pamungkas, Sigit. *Partai Politik: teori dan praktek di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011.

- Rauf, M. *Pendekatan-pendekatan Dalam Ilmu Politik Sebuah Studi Penjajagan*. *Jurnal Ilmu Budaya*, 7, 524-535, April 1991.
- Samosir, Osbin. *Keterwakilan Politik Kristen di Basis Islam yang Kuat*. Jakarta: UKIPress, 2017.
- Suhelmi, A. *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Syam, N. *Model Analisis Teori Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Ware, Alan. *Political Parties and Party Systems* (United States, New York: Oxford University Press Inc., 1996.
- Yoyo, Rohaniah, D.E. *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing, 2015.

## **MODUL 4**

### **POLITIK KEHADIRAN SEBAGAI BENTUK PERWAKILAN POLITIK**

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **1. Deskripsi Singkat**

Pada modul ini, mahasiswa akan mempelajari pemikiran Anne Philips, seorang tokoh perempuan yang sangat memperhatikan keterlibatan kalangan minoritas (perempuan) dalam politik. Pemikirannya yang sangat terkenal yakni *Politics of Presence* (politik kehadiran) menjadi pemikiran terbesar Anne Philips sebagai jawaban untuk menjembatani bagaimana kesulitan besar dari kalangan minoritas, yang dalam pemikiran Philips untuk melihat kalangan perempuan, tetapi sesungguhnya berlaku bagi seluruh kalangan minoritas. Dalam prinsip paling umum diketahui bahwa semua kalangan minoritas mengalami kesulitan besar entah dalam bentuk apapun di seluruh lembaga negara dan urusan pemerintahan.

Menurut Philips, fondasi dasar bagi *politics of presence* (politik kehadiran) disandarkan pada dua hal, yakni: pertama, pengakuan kesetaraan politik seluruh masyarakat, dan kedua, adanya kontrol publik yang kuat terhadap keberlangsungan politik. Keterwakilan politik yang dimaksudkan Anne Philips menggunakan kategori minoritas perempuan dalam politik, tetapi teori ini setidaknya membantu melihat seluruh keterwakilan kelompok minoritas secara umum. Salah satu kelompok minoritas politik dalam konteks Indonesia misalnya bisa kita sebut adalah keterwakilan politik dalam bidang agama Kristen dalam keterpilihannya sebagai anggota DPR RI yang akan disinggung juga dalam salah satu modul dari Buku Materi Pembelajaran ini.

## 2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran dari Modul 4 ini adalah:

- a. Agar mahasiswa/i mampu memahami dan menjelaskan bagaimana Politik Kehadiran Sebagai Bentuk Perwakilan Politik baik dalam bentuk *Politics of Presence* sebagai Pengakuan Kesetaraan, maupun dalam
- b. Kontrol Publik dan Persamaan Politik sebagai model sistem perwakilan di era modern
- c. Mampu menguasai Teori Sistem Perwakilan Politik sebagai dasar analisis fenomenapolitik baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negaramaupun tugas sebagai mahasiswa politik.
- d. Terbentuknya kesadaran sosial akan persoalan politik bangsa berdasarkan pemahaman akan Teori Sistem Perwakilan Politik
- e. Mampu menemukan solusi atas fenomena politik berdasarkan konsep dan teori yang dipelajari;
- f. Menganalisis fenomena politik berdasarkan pembelajaran student *center learning* melalui praktek penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

## 3. Kemampuan Akhir

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari Modul 4 ini adalah:

- a. Agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pemikiran Anne Philips bagaimana Politik Kehadiran sebagai Bentuk Perwakilan Politik baik dalam bentuk *Politics of Presence* sebagai Pengakuan Kesetaraan.
- b. Agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pemikiran Anne Philips tentang Kontrol Publik dan Persamaan Politik sebagai model sistem perwakilan di era sistem politik negara modern.
- c. Agar mahasiswa/i mampu memahami dan menjelaskan bentuk, sumber, dan penggunaan kekuasaan dalam sistem sosial dan politik.

4. **Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)**

5. **Kegunaan Modul 4**

Modul ini mampu membantu mahasiswa memahami pemikiran dan kritikan Anne Philips terkait dengan sistem perwakilan politik yang sering tidak terjangkau dari kalangan minoritas yang tidak memiliki akses kepada kekuasaan. Maka Anne Philips memberikan jembatan solusi akan pentingnya *politics of presence* yakni kehadiran langsung politik dari kalangan minoritas itu sendiri sebagai jawaban atas lemahnya kalangan minoritas ke dalam akses-akses politik bernegara.

6. **Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

Materi pokok dalam pemikiran ini antara lain:

- a. Politik Kehadiran:
  - 1) Perwakilan Politik
  - 2) Pengakuan Kesetaraan
- b. Kontrol Publik Dan Persamaan Politik
  - 1) Pentingnya control public
  - 2) Pengakuan akan persamaan politik

**B. KEGIATAN PEMBELAJARAN**

1. **Judul Kegiatan Pembelajaran:**

**“POLITIK KEHADIRAN: Perwakilan Politik dan Kontrol Publik”**

2. **Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan pemikiran Anne Philips bagaimana Politik Kehadiran sebagai Bentuk Perwakilan Politik baik dalam bentuk *Politics of Presence* sebagai Pengakuan Kesetaraan.
- b. Mahasiswa mampu memahami pemikiran Anne Philips tentang Kontrol Publik dan Persamaan Politik sebagai model sistem perwakilan di era sistem politik negara modern.

- c. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bentuk, sumber, dan penggunaan kekuasaan dalam sistem sosial dan politik.

### 3. Pemikiran, Penjelasan, dan Contoh

#### a.) *Politics of Presence* sebagai Pengakuan Kesetaraan

Bila merujuk bagaimana sistem perwakilan politik melalui keterpilihan calon legislatif yang mengutamakan kehadiran sosok atau figur dari kandidat sebagaimana disampaikan Alan Ware dalam Modul 3 sebelumnya, maka menjadi sangat penting untuk merefleksikan ulang pandangan Anne Philips tentang sisi lain dari sistem keterwakilan politik. Anne Philips berfokus pada bagaimana setiap wakil dimaksud bisa hadir secara politik realitas, bukan karena diwakilkan atau digantikan oleh pihak yang lain. Maka Anne Philips sangat mengutamakan bahwa sistem perwakilan politik harus bersandar pada prinsip *politics of presence* (politik kehadiran).

Menurut Philips, fondasi dasar bagi *politics of presence* (politik kehadiran) disandarkan pada dua hal, yakni: *pertama*, pengakuan kesetaraan politik seluruh masyarakat, dan *kedua*, adanya kontrol publik yang kuat terhadap keberlangsungan politik. Dua prinsip ini menjadi dasar penting bagi politik keterwakilan sehingga menuntut perlunya hadir keterwakilan secara langsung kalangan minoritas dalam lembaga-lembaga negara. Philips mengatakan,<sup>14</sup>

*“On the face of it, at least, these two principles of popular control and political equality provide a good basis for the politics of presence. Control is just a pious aspiration unless people are actually there; equality is hardly achieved when some groups have so much more leverage than others. [...] These two principles certainly set the framework for any politics of presence, [...].”*

[“Sekurang-kurangnya ada dua prinsip terpenting yakni kontrol publik dan kesetaraan politik sebagai dasar bagi politik kehadiran. Kontrol dibutuhkan ketika aspirasi warga tidak diaktualisasikan, sementara kesetaraan sungguh

---

<sup>14</sup>Anne Philips, *The Politics Of Presence* (Oxford: Clarendon Press, 1995), hal 30-31.

dibutuhkan ketika ada sejumlah kelompok yang lebih berkuasa dibandingkan yang lain. Dua prinsip ini merupakan bingkai bagi setiap politik kehadiran.”]



Gambar 15: Pentingnya kesetaraan politik untuk semua pihak.

Bagi Philips, satu-satunya yang bisa memastikan sistem keterwakilan politik setiap pihak atau kelompok entah berdasarkan apapun seperti ras, jenis kelamin, organisasi buruh, persatuan para nelayan, kelompok agama, perhimpunan suku, dan kelompok kepentingan lain-lain, semua harus bersandar pada prinsip *politics of presence*. Keterwakilan itu tidak bisa dititipkan kepada pihak lain yang tidak setara dan tidak sejenis dengan pihak atau kelompok yang diwakilkan. Alasannya, kepentingan mendasar dari pihak yang akan diwakili hanya dipahami dan diketahui persis oleh anggota atau persekutuan kelompok tersebut. Maka tidak relevan untuk menitipkan kepentingan satu pihak atau sekelompok rumpun tertentu kepada pihak lain yang tidak serumpun atau sejenis. Sebab jika hanya diwakili oleh pihak lain yang tidak serumpun atau tidak sejenis maka harapan dan cita-cita yang digagas oleh wakil tersebut bisa sangat berbeda originilitasnya dengan maksud yang sesungguhnya diharapkan dan dicita-citakan oleh pihak yang diwakilinya.

## b.) Kontrol Publik dan Persamaan Politik

Maka sekurang-kurangnya ada dua prinsip dalam politik kehadiran yakni kontrol masyarakat, dan persamaan politik untuk menyediakan fondasi yang baik bagi politik kehadiran (*politics of presence*). Bagi Philips,<sup>15</sup>

*“On the face of it, at least, these two principles of popular control and political equality provide a good basis for the politics of presence. Control is just a pious aspiration unless people are actually there; equality is hardly achieved when some groups have so much more leverage than others.”*

[“Terhadap hal itu, sekurang-kurangnya dua prinsip tentang kontrol publik dan kesetaraan politik menyediakan sebuah basis yang baik bagi politik kehadiran. Kontrol hanya aspirasi pokok jika orang-orang yang mewakili tidak ada di sana secara actual; kesetaraan hanya sungguh dibutuhkan bila ada beberapa kelompok memiliki pengaruh luar biasa dibandingkan kelompok-kelompok lain.”]

Kontrol menjadi sangat penting ketika para wakil tidak mampu membawa aspirasi yang diwakili secara actual; sementara kesetaraan hanya akan sungguh dibutuhkan bila terdapat adanya beberapa kelompok yang berpengaruh luar biasa dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Ini memaknai bahwa semua warga negara harus memiliki kewenangan yang setara atas hasil yang diperoleh. Kata Anne Philips,<sup>16</sup>

*“Political equality does not specify just one kind of treatment. It can be taken to mean that all citizens should have equal power over outcomes, that all political preferences should be given equal weight, or (somewhat less plausibly) that all citizens should have an equal chance of voting for a winning candidate.”*

[“Kesetaraan itu tidak spesifik hanya merupakan suatu jenis penanganan. Itu dapat dimaksudkan bahwa semua warga Negara harus memiliki kesetaraan kekuasaan atas hasil

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 36.

(*outcomes*) sehingga semua preferensi politik harus dianggap memiliki beban yang setara sehingga semua warga negara memiliki kesempatan yang sama menentukan pilihan untuk kandidat yang menang.”]

Keterwakilan politik yang dimaksudkan Anne Philips menggunakan kategori minoritas perempuan dalam politik, tetapi teori ini setidaknya membantu melihat seluruh keterwakilan kelompok minoritas secara umum. Salah satu kelompok minoritas politik dalam konteks Indonesia misalnya bisa kita sebut adalah keterwakilan politik dalam bidang agama Kristen dalam keterpilihannya sebagai anggota DPR RI.

Menurut Philips, hanya kelompok itu sendiri yang tahu persis apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana sejarah dan asal muasal proses terjadinya dari gagasan perubahan dan kehendak mendasar bagi diri mereka masing-masing. Persis seperti kepentingan kelompok pembela kesetaraan hak-hak perempuan misalnya, sesungguhnya hanya bisa dirasakan secara jujur oleh kalangan perempuan itu sendiri walaupun sejumlah laki-laki sangat paham apa yang dimaksud oleh kesetaraan gender/jenis kelamin. Maka yang mestinya mewakili kesetaraan dan perjuangan gender itu seharusnya oleh kalangan perempuan, bukan diwakilkan ke kalangan pria yang walaupun sangat paham dengan maksud dan gagasan perjuangan gender.

Sayangnya, kata Philips, persoalan terbesar di kalangan pemilih adalah kesulitan besar bagi para pemilih untuk persis mengenali calon-calon atau kandidat yang akan dipilih, entah karena berbagai alasan. Sangat mungkin pemilih tidak memiliki informasi yang cukup luas tentang para kandidat, sangat mungkin para pemilih tidak begitu peduli dengan para kandidat karena selama ini para wakil terpilih tidak jujur menjadi wakil dari para pemilih. Atau sebaliknya dari pihak kalangan kandidat sangat mungkin tidak memiliki rekam jejak yang bersih dan tidak patut diberi apresiasi, atau kandidat tidak memiliki kesempatan yang cukup memadai untuk membuktikan rekam jejak dirinya yang mampu menarik simpati dan apresiasi dari pemilih. Sangat mungkin para kandidat tidak memiliki upaya serius menghadirkan dirinya ke para pemilih yang lebih luas, sehingga ruang

pengenalan terhadap diri para kandidat hanya di daerah-daerah atau lingkup kecil tertentu.

Akibatnya kata Philips, kebanyakan pemilih hanya memiliki pemahaman sangat terbatas atau bahkan tidak peduli menyangkut kemampuan atau talenta-talenta para kandidat yang mestinya menjadi dasar bagi penentuan pilihan politik pemilih. Philips mengatakan,<sup>17</sup>

*“Most voters know too little about the candidates to make their talents or virtues the basis for political choice. Most voters, indeed, would query whether these should be a central concern. We might all wish to be represented by people we regard as wiser or more able than ourselves, but, faced with a choice between someone or more competent and someone whose views we can share, we usually feel safer in giving our support to the latter. The political party provides us with the necessary shorthand for making our political choice: we look at the label rather than the person, and hope we will not be let down.”*

[“Kebanyakan pemilih memiliki pengetahuan yang sangat sedikit tentang kandidat baik tentang talenta mereka maupun tentang kebijakan-kebijakan mereka untuk menjadi dasar bagi pilihan politik bagi pemilih. Karena itu kebanyakan pemilih akan mempertanyakan bahwa hal ini seharusnya menjadi sebuah perhatian utama. Kita semua mungkin mengharapkan untuk diwakili oleh orang yang kita anggap lebih bijaksana atau memiliki kemampuan yang lebih daripada diri kita sendiri tetapi berhadapan dengan pilihan diantara sejumlah atau yang lebih berkompeten dengan sejumlah orang yang memiliki pandangan yang dapat kita bagikan, kita biasanya merasa lebih tenang dalam memberikan dukungan kita kepada yang terakhir. Partai politik menyediakan kepada kita kepentingan-kepentingan jangka pendek bagi pilihan-pilihan politik kita: kita cenderung lebih memperhatikan label daripada sosok, dan berharap kita tidak dikecewakan.”]

Anne Philips berpatokan pada pencerminan atau keterwakilan deskriptif dimana penting mempertanyakan apa yang perwakilan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

sudah lakukan untuk pemilihnya lebih dari sekedar mengetahui siapa yang terpilih menjadi anggota legislative.<sup>18</sup> Tindakan realita yang sudah dilakukan secara riil ke tengah publik jauh lebih penting dari sekedar memperoleh hasil dari nama-nama yang terpilih. Realitas Tindakan (*reality of actions*) menjadi sangat penting bagi masyarakat pemilih sebab yang dibutuhkan oleh rakyat adalah tindakan-tindakan konkrit dari legislative terpilih, bukan janji-janji atau sekedar pajangan nama-nama yang menghiasi papan pengumuman pemenang para kandidat yang terpilih.

Menurut Anne Phillips, landasan dasar politik representasi adalah pengakuan kesetaraan politik seluruh masyarakat dan adanya kontrol opini publik yang kuat tentang keberlanjutan politik, sehingga perlu untuk representasi langsung dari minoritas tentu saja termasuk kalangan perempuan dan kalangan yang termarginalkan di lembaga negara. Anne Phillips memulai dengan persoalan mendasar terkait keterwakilan perempuan dalam parlemen dipahami bahwa anggota parlemen yang disusun berdasarkan kesetaraan partai politik yang dipilih melalui pemilu, mampu mewakili dan bersedia memperjuangkan kepentingan perempuan.

Ide demokrasi perwakilan dengan lembaga perwakilan yang memiliki hak sebagai delegasi hak politik warga negara idealnya mengharuskan parlemen selalu mengakomodasi beragam kepentingan yang ada dalam masyarakat, terutama kepentingan perempuan. Tetapi di sisi lain, Anne Phillips memiliki pendapat yang buruk dalam hal keterwakilan kalangan terpinggirkan atau sebut saja misalnya keterwakilan perempuan di parlemen. Terdapat sejumlah sebab mengapa terjadi demikian, pertama-tama disebabkan oleh faktor-faktor sistem struktural yang meliputi sistem pemilu dan dominasi laki-laki. Kedua, ada faktor budaya seperti stereotip negatif bahwa perempuan tidak mampu atau layak untuk berpartisipasi dalam dunia

---

<sup>18</sup> Pandangan ini pada awalnya disampaikan oleh Hanna Pitkins, yang kemudian diikuti oleh Anne Phillips untuk menegaskan argumentasinya tentang pencerminan keterwakilan. Lihat, H. Pitkin, *The Concept of Representation* (Berkeley, 1967) dalam *Ibid.*, hlm. 4.

politik, beratnya pembagian kerja secara seksual mendukung stereotip negatif dan memakan waktu dan pemikirannya untuk dapat berperan dalam dunia publik.

Ketidaksamaan atas apa yang terjadi di parlemen tidak hanya merugikan kalangan perempuan dan kalangan yang terjinakan tentu saja, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kepedulian wanita untuk masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, perjuangan melawan Kekerasan dan lingkungan bisa menjadi kebijakan jika perempuan dilibatkan. langsung. Diskriminasi politik akan terjadi jika anggota parlemen laki-laki tidak memperjuangkan kepentingan perempuan. Untuk mengatasi hal tersebut, harus ada perlakuan khusus sementara (*affirmative*) aksi) untuk memfasilitasi partisipasi perempuan dalam proses politik. Peningkatan keterwakilan kalangan termarginalkan baik perempuan maupun kelompok lain yang dianggap terlupakan di parlemen ini akan meningkatkan kepercayaan danantisipasi perempuan dalam politik.

### c.) Politik Gagasan Para Kandidat

Salah satu yang paling diharapkan dari setiap kandidat adalah lahirnya politik gagasan dari apa yang lahir dan bertumbuh di benak setiap kandidat. Maka menjadi sangat penting politik gagasan (*politics of ideas*) dari setiap kandidat atau anggota legislative terpilih dimana sangat sering terdapat sekelompok masyarakat mengalami ketidaksetaraan terhadap sekelompok pengambil kebijakan dan yang terjadi adanya perilaku entah kentara atau tersembunyi menjadi alasan bagi pengucilan sekelompok masyarakat secara politik.<sup>19</sup> Kelompok-kelompok yang tidak setara entah karena alasan kepemilikan yang sedikit atau kalangan miskin, alasan pengetahuan yang sederhana terhadap kalangan terdidik, atau ketertutupan akses kepada kekuasaan membuat sekelompok masyarakat menjadi terkucil.

Anne Philips menegaskan bahwa perbedaan mestinya diterima dalam kaitan berbagai pengalaman dan identitas orang-orang yang dapat mendasari (*constitute*) berbagai jenis kelompok yang berbeda.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Perbedaan antar kelompok kepentingan seperti: kelompok suku, kelompok agama, golongan pekerjaan entah organisasi buruh atau paguyuban para nelayan yang merasa kepentingan dan kebutuhan mendasar mereka terabaikan oleh negara mestinya tidak terjadi. Perjuangan untuk memenuhi harapan setiap kelompok tersebut maka mestinya setiap kelompok memiliki perwakilan langsung dalam lembaga-lembaga negara pengambil kebijakan secara riil, entah di legislative, di eksekutif atau di lembaga-lembaga negara lain yang kepentingan mereka bisa diakomodir. Kepentingan setiap kelompok itu tidak tepat jika sekedar diwakilkan kepada pihak lain, bahkan termasuk pihak partai apalagi jika partai itu sangat mungkin tidak pernah mengurus bidang-bidang spesifik dari setiap kelompok kepentingan tersebut. Sehingga sangat mungkin partai-partai politik yang tidak memiliki konsentrasi dan kepentingan terhadap apa yang dipikirkan oleh salah satu kelompok kepentingan malah mungkin tidak mengerti atau bahkan lebih memprihatinkan lagi memberi gagasan berbeda dari apa yang dibutuhkan oleh kelompok kepentingan yakni para petani, buruh, nelayan, ras, agama dan kelompok kepentingan lain.

Di era kontemporer, kehadiran politik sering muncul dari gerakan social baru (*new social movement*) sebagai refleksi ketidaksetaraan kelas social antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain, yakni sepanjang kelas social terdapat ketidaksetaraan (*the pre-eminent group of inequality*). Gerakan social baru muncul dari perjuangan atas ketidaksetaraan yang dirasakan sebagai sebuah ketidakadilan perilaku negara terhadap sejumlah masyarakat tertentu. Kerap negara tidak menyadari ketimpangan perilaku dan kebijakannya, yang dirasakan sekelompok masyarakat yang terabaikan dibanding sekelompok masyarakat lain yang diberi kemudahan dan pelayanan lebih baik entah disadari atau tidak memunculkan rasa ketidakadilan public. Ketidakadilan itu memunculkan upaya untuk memperjuangkan niat-niat dan kebutuhan mendasar mereka atas ketidakadilan yang jika masih terus menerus diabaikan maka pada ujungnya melahirkan gerakan social baru di tengah masyarakat.



Gambar 16: Keterwakilan politik semua pihak harus terakomodir dalam demokrasi

Perjuangan atas ketidaksetaraan melahirkan kalangan liberalis yang menegaskan tidak adanya perbedaan dan posisi sosialis yang menekankan pada pengeliminasian. Menurut Philips,<sup>20</sup>

*“Contemporary demands for political presence have often arisen out of the politics of new social movements, and they all reflect inequalities other than social class. This is an important point of distinction, for as long as social class was regarded as the pre-eminent group inequality, arguments could divide relatively neatly between the liberal position, which sought to discount difference (we should be equal regardless of difference), and the socialist position, which aimed at elimination (we cannot be equal until the class difference has gone).”*

[“Permintaan kontemporer bagi kehadiran politik sering muncul dari gerakan social baru, dan mereka merefleksikan ketidaksetaraan kelas social antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Inilah poin penting tentang perbedaan sepanjang kelas social dianggap sebagai ketidak-setaraan kelompok yang paling unggul, argument dapat terbagi secara relative rapi diantara posisi liberal yang tampaknya memotong perbedaan (kita

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

seharusnya setara tanpa ada perbedaan), dan posisi kalangan sosialis yang bertujuan mengeliminasi (kita tidak mungkin setara selama perbedaan kelas masih ada).”]

Refleksi atas ketidaksetaraan itu melahirkan gagasan entah perlunya campur tangan pemerintah yang semakin luas dan langsung mengenai kebutuhan konkrit dan riil masyarakat, tentu saja dengan batasan-batasan yang wajar sebagaimana dipikirkan oleh kalangan sosialis. Secara sederhana kalangan sosialis bisa dikatakan mengharapkan adanya pengaruh negara bahkan campur tangan negara lebih jauh termasuk dalam persoalan-persoalan teknis untuk kepentingan lebih luas masyarakat. Negara perlu campur tangan, misalnya: penentuan harga-harga bahan pangan pokok, menentukan harga-harga minyak bumi yang lebih setara antara daerah pegunungan dengan daerah perkotaan, penentuan harga-harga pupuk di daerah pertanian di wilayah perkotaan supaya tidak terlalu jauh perbedaan harganya dengan pertanian di desa-desa terpencil dan pegunungan yang akses lokasinya sangat sulit dan sulit terjangkau. Bagi aliran sosialis (sosialisme), campur tangan negara sangat dibutuhkan untuk urusan-urusan riil sehari-hari masyarakat luas tentu dalam batasan-batasan dan kualitasnya yang berbeda.

Refleksi lain dari ketidaksetaraan juga memunculkan lahirnya keinginan untuk menggagas pemberian kebebasan dan penentuan diri secara bebas yang lebih jauh kepada setiap individu dari urusan campur tangan negara. Secara sederhana dan dalam batas-batas yang wajar, kalangan liberalis dengan model-model pembaharuannya secara umum melihat bahwa kebebasan menjadi prinsip dari hak-hak asasi manusia untuk setiap orang. Prinsip kebebasan (liberal) itu menjadi dasar bagi setiap orang menentukan raihan cita-cita dan penentuan dirinya mendapatkan seluas-luasnya apapun gagasan dan mimpi yang tertanam mendalam di sanubarinya. Aspek kebebasan menjadi prinsip dasar kalangan liberalis yang dalam liberalis ekstrim mengagungkan kebebasan setiap orang.

Gagasan aliran liberalisme muncul dari ketidaksetaraan atau ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Eropah dan Amerika di abad-abad ke-19 dan abad ke-20. Kalangan liberalis menuntut sebuah

pemberian kebebasan kepada setiap orang untuk menentukan dirinya sesuai dengan talenta dan kemampuannya yang diberikan Tuhan kepada diri setiap orang. Kebebasan menjadi kunci mendasar walaupun kalangan neo-liberalisme menuntut perlunya campur tangan negara dalam porsi yang wajar sehingga tidak mutlak membiarkan kebebasan berlebihan setiap orang menentukan dirinya. Bagi kalangan liberalis, pembatasan-pembatasan membuat setiap orang tidak bisa memaksimalkan pencapaian dan perjuangan diri mereka masing-masing untuk menemukan makna hidup dan kualitas diri sesuai talenta yang mereka dapatkan dari Tuhan Sang Pencipta.

Menempatkan diri secara berlebihan dalam campur tangan pemerintah sebagaimana dipikirkan oleh kalangan sosialis, dan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya sebagaimana dipikirkan oleh kalangan liberalis, justru juga akan menciptakan ketidakadilan baru. Dua gagasan itu harus terus menerus dikoreksi dan mendapat keseimbangannya antara kebebasan yang wajar dan sepatutnya dengan norma-norma yang terukur di satu pihak. Sementara di lain pihak perlu campur tangan pemerintah untuk kebutuhan publik yang lebih luas dalam batas-batasnya yang wajar tanpa menghilangkan kebebasan dan pengakuan terhadap marabat individu.

#### **d.) *Politics of Presence* dalam Pemerintahan Mayoritas**

Terhadap kemungkinan ketidakadilan sistem perwakilan di atas, maka jalan terbaik untuk sistem perwakilan menurut Philips dengan mengutip literatur ilmu politik Arendt Lijphart, adalah pentingnya menempatkan ide-ide dan gagasan terkait penekanan kehadiran politik (*political presence*). Teori Lijphart tentang keterwakilan politik tanpa perbedaan kelas sangat berpengaruh dengan teori demokrasi persekutuan atau consensus (*theory of consociational or consensual democracy*) yang berfokus pada pembagian masyarakat menyangkut agama atau budaya, atau kedua-duanya sekaligus.

Lijphart berargumen: “*majority rule is not only undemocratic but also dangerous, because minorities that are continually denied access to power will feel excluded and discriminated against and will*

*lose their allegiance to the regime*".<sup>21</sup> Pemerintahan mayoritas tidak hanya bermakna tidak demokratis, tetapi juga berbahaya, karena minoritas yang terus ditolak mendapatkan akses terhadap kekuasaan akan selalu merasa tersingkirkan dan menjadi lawan yang terdiskriminasi dan mereka kehilangan peluang terhadap kekuasaan.

Philips mengutip definisi demokrasi yang disumbangkan *Democratic Audit of the UK* yang mengidentifikasi kontrol publik dan kesetaraan politik sebagai dua kunci prinsip demokrasi. Philips katakan,<sup>22</sup>

*"A more useful definition is that supplied by the Democratic Audit of the UK, which identifies popular control and political equality as the two key principles of democracy, and takes these as the benchmark against which to evaluate contemporary democracy. No system can claim to be democratic if it does not recognize the legitimacy of these two goals; and democracies can be located along a continuum depending on how well these principles are realized in their practice."*

[“Definisi yang lebih bermanfaat ditawarkan oleh *Democratic Audit* dari Inggris, yang mengidentifikasi kontrol publik dan kesetaraan politik sebagai dua kunci prinsip demokrasi, dan mengambil keduanya sebagai patokan perlawanan untuk mengevaluasi demokrasi kontemporer. Tidak ada sistem yang dapat mengklaim untuk menjadi demokratis jika tidak mengenal legitimasi dari dua tujuan ini; dan demokrasi dapat ditempatkan sepanjang ketergantungan terus menerus tentang bagaimana prinsip ini direalisasikan dalam prakteknya.”]

Dalam kerangka kerja demokrasi langsung, kontrol adalah sebuah fungsi kehadiran; karena kapasitas untuk mempengaruhi keputusan politik secara sederhana tergantung pada kehadiran dalam pertemuan-pertemuan yang relevan, dan

---

<sup>21</sup> Arend Lijphart, *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-one Countries* (New Haven, 1984), hlm. 22-23.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

orang-orang yang tidak hadir dalam pertemuan kehilangan kesempatan mereka memberikan kontrol. Bersandar pada pertanyaan Charles Beitz apakah kesetaraan individual berdampak pada perluasan kesetaraan diantara kelompok social termasuk kemungkinan pemilih memiliki pengaruh yang sejajar dalam komposisi pemerintahan yang dipilih, Philips berargumen bahwa alasan bagi kehadiran politik tidak dapat dipandang sekedar pengambilan kesimpulan transparan (*transparent deduction*) baik dari kontrol publik maupun kesetaraan politik.



Gambar 17: Pemilihan Umum untuk kesejahteraan semua

Kesetaraan kehadiran (*equality of presence*) sudah implisit dalam partisipasi politik, namun hal itu tidak serta merta implisit dalam keterwakilan politik. Philips mengatakan,<sup>23</sup>

*“The first issue is best approached by considering the differences between political participation and political representation, for, while equality of presence is already implicit in the former, it is not so obviously implicit in the latter. The literature on democracy and participations takes as its starting point the notion that political equality involves some degree of equality in participation, and it treats the sistematic*

---

<sup>23</sup> C.R. Beitz, *Political Equality: An Essay in Democratic Theory* (Princeton, 1989), hlm. 127-128. Pandangan ini juga ditemukan dalam Anne Philips, *The Politics Of Presence* (Oxford: Clarendon Press, 1995), hlm. 30-31.

*absence of particular social groups as a self evident failing of democracy.”*

[“Isu pertama sangat baik didekati dengan menganggap perbedaan antara partisipasi politik dengan keterwakilan politik, karena, sementara kesetaraan kehadiran sudah implisit dalam yang terdahulu (partisipasi politik), namun hal itu tidak serta merta implisit dalam yang terakhir (keterwakilan politik). Literature demokrasi dan partisipasi mengambil hal itu sebagai titik berangkat ide-ide sehingga kesetaraan politik meliputi derajat kesetaraan dalam partisipasi, dan hal itu mendorong ketidakhadiran yang sistemik kelompok sosial yang khusus sebagai sebuah kegagalan dari demokrasi dalam dirinya sendiri secara terang benderang.”]

Literature demokrasi dan partisipasi mengambil hal itu sebagai titik berangkat ide-ide sehingga kesetaraan politik meliputi derajat kesetaraan dalam partisipasi, dan hal itu mendorong ketidakhadiran yang sistemik kelompok sosial yang khusus sebagai sebuah kegagalan dalam dirinya sendiri secara terang benderang dari demokrasi.

#### **e.) Catatan untuk Kehadiran Politik konteks Indonesia**

Dalam konteks Indonesia, kehadiran politik yang sangat ditentukan oleh keberadaan dan kewenangan partai politik telah lama menjadi perhatian yang sangat serius. Partai politik (parpol) harus lebih dekat dengan publik. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, dari menjadi sukarelawan hingga “dipaksa” oleh sistem. Partai harus lebih hadir di masyarakat. Setidaknya ada beberapa cara atau upaya yang bisa dilakukan, yaitu: pertama, menunggu hati nurani dan kesukarelaan partai politik. Partai politik harus memperhatikan publik secara teratur, terutama ketika mereka memenangkan kursi di tingkat legislatif dan eksekutif. Tentu saja, jalan ke depan adalah melalui kebijakan-kebijakan yang menyelesaikan masalah rakyat, meskipun pada saat ini kami ragu bahwa kami mengharapkan partai politik untuk menjadi sukarela. Pasalnya, orientasi yang muncul cenderung jangka pendek karena alasan elektoral atau elektoral.

Cara kedua adalah dengan melakukan upaya atau tindakan 'memaksa' partai politik untuk hadir melalui rekayasa kelembagaan. Langkah yang harus dilakukan adalah mengubah sistem pemilu agar tidak menjadi event lima tahunan. Dalam lima tahun, pemilihan presiden dan legislatif bertepatan, jadi fokusnya adalah pada pemilihan nasional. Upaya berulang dengan sistem pemilihan lima tahun kurang ideal karena masalah di daerah dan legislatif tenggelam. Partai politik akan sibuk memenangkan pemilu di tingkat nasional.

Maka muncullah sederet pemikiran di kalangan akademisi dan pemerhati untuk mengejar sederet gagasan, beberapa di antaranya mengusulkan pemisahan pilkada nasional dari pilkada guna mengurangi beban di tingkat nasional. Sementara itu, pilkada fokus pada 507 kabupaten/kota ditambah 34 provinsi. Pilkada terbagi menjadi pilkada provinsi dan pilkada kabupaten/kota. Waktu pelaksanaan membutuhkan interval dua tahun antara pemilihan nasional dan lokal. Kemudian pemilihan provinsi dan kabupaten/kota memiliki selang waktu satu tahun. Jika pilkada nasional 2024, pilkada provinsi 2026, dan pilkada kabupaten/kota 2027. Karena itu, parpol 'dipaksa' hadir bukan hanya lima tahun tapi lebih untuk rakyat.



Gambar 18: Komisi Pemilihan Umum menjadi tahapan terakhir penentu hadirnya sebuah partai dalam pemilihan umum

Partai politik harus menjadi bagian dari solusi atas permasalahan yang dihadapi warga secara langsung. Hal ini perlu

disikapi dengan kemajuan-kemajuan terbaru yang harus dilakukan oleh partai politik saat ini. Pengurus partai khususnya di tingkat bawah membutuhkan respon yang cepat terhadap kondisi riil yang terjadi di masyarakat luas, terutama masyarakat dimana partai berada secara lokal dan dekat dengan lingkungan sekitar. Kehadiran ini merupakan upaya partai untuk merespon hal tersebut dengan memaksimalkan kebijakan kehadiran. Oleh karena itu, tidak perlu berkecil hati, kecewa atau marah jika ada penilaian publik bahwa partai politik ada dan tidak ada, mereka datang dan pergi, mereka datang dan pergi. Partai politik ada dan seringkali hanya hadir pada saat perayaan demokrasi, seperti pemilihan presiden, legislatif, atau daerah.

Partai politik juga hadir dalam hiruk-pikuk kampanye politik berkala, pada saat-saat seperti itu. Sisanya tampaknya telah menghilang ke bumi. Atau muncul ketika ada anggota yang tersangkut kasus korupsi. Di parlemen, partai politik muncul ketika anggotanya melanggar etika atau kaget saat membahas RUU. Dimana parpol ketika rakyat bawah menuntut keadilan dengan cara menjahit mulut, menjepit, berdemonstrasi, atau di tengah perselisihan dengan korporasi? Orang-orang tampaknya dibiarkan sendiri, diabaikan, dibiarkan hidup dengan masalah mereka dan menyelesaikannya sendiri. Partai politik menjadi elitis dan menangani isu-isu elit di level tertinggi karena di situlah partai politik bisa hidup. Bagaimana orang-orang? Cukup bertemu orang nanti sebelum pemilu, lagipula memori publiknya pendek. Masyarakat cepat lupa dan parpol memanfaatkannya dengan tepat agar tidak terlalu melelahkan. Kualitas moral-intelektual ini tidak memungkiri bahwa ada parpol yang benar-benar terpuruk. Partai politik ini sebenarnya hadir setiap hari di tengah-tengah masyarakat, mendengarkan keluhan dan permasalahan mereka yang semakin hari semakin parah.

Partai-partai politik ini prihatin dengan nasib rakyat dan terlibat dalam menghubungkan suara mereka dengan parlemen dan pemerintah. Oleh karena itu, tidak heran jika akar rumput parpol ini juga cukup kuat. Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda. Daftarkan email Umumnya kader parpol ini biasa bertemu dan saling membantu. Ketika kader parpol ini berhasil duduk di parlemen, ia tidak melupakan dirinya sendiri. Ingatlah selalu pesan konstituen Anda untuk terus

menjaga mereka. Berbeda dengan kader yang masuk parpol, mereka tidak pernah kotor dengan orang sebelumnya. Anda masuk partai politik tidak melalui seleksi ketat atau prosedur standar. Dia masuk karena dia memiliki pundi-pundi keuangan yang besar (pengusaha) dan popularitas (misalnya, pengalaman sebagai artis). Tujuannya jelas: untuk mendukung partai politik secara finansial dan menarik massa melalui artis yang sudah populer, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang pekerjaan.

Saat ini, orang juga cenderung memilih orang dari partai politik yang mereka kenal, seringkali di layar televisi sebagai bintang film, iklan, atau hal lainnya. Artis populer pun tidak perlu khawatir bergabung dengan partai politik, juga tidak harus sulit belajar politik, parlemen, atau administrasi kekuasaan. Cukup popularitasnya sebagai modal utama. Pada akhirnya, partai politik secara harfiah penuh dengan orang-orang yang hanya tahu tentang kekuasaan (dan uang, tentu saja), tetapi tidak mengerti untuk apa. Karena itu, mereka sering menjadi anggota partai politik yang kuat dan fanatik, dan kemudian menjadi objek pertikaian dan konflik. Jika ada celah yang harus diambil, itu akan dimasukkan, berapa pun biayanya. Padahal, kekuasaan hanyalah alat dan instrumen, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Karena itu sangat penting partai politik diisi oleh orang-orang yang berkualitas, baik secara intelektual maupun moral-spiritual. Kualitas intelektual penting bagi Anda untuk memahami pengelolaan kekuasaan dan bagaimana mengelolanya untuk kebaikan bersama. Kualitas moral-spiritual juga penting agar Anda dapat menahan diri dari keinginan dan godaan politik yang semata-mata berorientasi pada kekuasaan dan uang. Akan sangat berbahaya jika jiwanya kosong meskipun daya intelektualnya tinggi. Anda akan mudah teralihkan dan kemudian terlibat korupsi, misalnya, atau penyuapan karena kekuasaan Anda penuh dengan uang yang menggiurkan. Para agen sosial partai politik bukanlah tempat mencari uang dan materi. Bukan pula bukit atau batu loncatan untuk mencari uang dan materi di pusat-pusat kekuasaan (eksekutif dan legislatif).

Partai politik merupakan entitas politik yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Ini harus dipahami oleh anggota partai politik. Partai politik merupakan agen sosial yang diharapkan memiliki kapasitas untuk mewujudkan ide dan gagasan inovatifnya di masyarakat. Dengan kata lain, partai politik adalah rumah pelayanan publik. Sebuah tugas yang benar-benar mulia karena melayani kebaikan masyarakat. Jadi, mau tidak mau, parpol dengan kader terbaiknya harus hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya untuk datang dan menunjukkan eksistensinya, tetapi untuk melayani mereka. Karena pada hakikatnya partai politik lahir dari rakyat.



Gambar 19: Partai Politik hadir untuk kepentingan dan martabat warga negara

Rakyat adalah jiwa dan semangat sebuah partai politik. Menjadi pelayan masyarakat berarti keberadaan partai politik dimaksudkan untuk melayani kepentingan masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya. Hal-hal yang dilakukan partai politik seharusnya ditujukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan tidak hanya fokus pada apa yang dianggap benar oleh partai politik. Menjadi pelayan publik berarti partai politik adalah rumah bagi setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan. Jika kehadiran partai politik dalam masyarakat signifikan, maka akan tercipta hubungan dua arah yang kuat, efektif dan efisien. Dengan menggunakan pendekatan Gioia dan Chittipeddi, hubungan antara partai politik dan masyarakat bersifat interaktif. Kedua belah pihak terlibat dalam membangun pemahaman bersama. Pada akhirnya,

masyarakat akan sangat diuntungkan dengan kehadiran dan keberadaan partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Sikap apatis masyarakat terhadap partai politik perlahan-lahan akan terkikis dengan sendirinya dan harapan besar masyarakat akan perbaikan kondisi tersebut.

Partai politik adalah kuncinya. Jangan sampai parpol selalu muncul di ruang publik dan diamati oleh masyarakat luas, yaitu sisi negatifnya, yakni seni politik yang membosankan dan cenderung menjijikan karena sarat dengan gimmick politik yang berkualitas buruk. atau penuh lelucon yang tidak lucu seperti badut. Partai politik harus benar-benar menampilkan diri sebagai juru bicara orang-orang yang berwibawa, berprestasi, kharismatik, amanah, dan amanah. Sebagaimana teolog Juan Calvino, yang dikutip Sabam Sirait dalam bukunya *Politics is holy* (2013), politisi adalah posisi yang sakral dan sakral. Politisi dalam berbagai aksinya sebagai figur publik memiliki tugas penting untuk menerangi kegelapan.

Kehadiran partai politik di negara demokrasi merupakan hal yang fundamental, karena keberadaannya merupakan salah satu instrumen utama demokrasi. Partai politik merupakan wadah penyalur aspirasi dan partisipasi politik masyarakat dan diharapkan menjadi pengendali pemerintah dalam mengatur hubungan masyarakat dengan pemerintah. Dalam bukunya *Ilmu Politik* Miriam Budiardjo, pengertian partai politik adalah suatu organisasi kegiatan politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintah dan memenangkan dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu kelompok atau kelompok lain yang berbeda pandangan. . jam tangan. jam tangan. Partai politik pada hakikatnya merupakan suprastruktur yang harus dimiliki oleh suatu sistem pemerintahan agar dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang demokratis.

Untuk memaksimalkan fungsinya sebagai bangunan yang mendukung pemerintahan yang demokratis, sebuah Partai harus dilembagakan. Institusionalisasi partai politik yang dimaksud adalah proses penguatan sikap dan perilaku partai politik yang terstruktur atau sistemik untuk membentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi. Fenomena partai politik di Indonesia memiliki

sejarah yang panjang dan alasan kehadirannya berbeda-beda dari waktu ke waktu. Ada empat fase penting kehadiran partai politik di Indonesia. Pertama, fase pra-kemerdekaan dan awal kemerdekaan. Kedua, fase demokrasi terpimpin. Ketiga, fase reordering. Terakhir, fase reformasi.

Di setiap fase, partai politik tumbuh dan tenggelam, bermetamorfosis, dan bertahan. Menarik untuk dicatat bahwa Partai yang selalu tumbuh dan mendominasi, yaitu Partai Golkar dalam skala nasional bahkan lokal, telah melewati masa-masa sulit tetapi dengan segala upaya untuk bertahan dengan sekuat tenaga dari waktu ke waktu. Dinamika partai politik sangat dinamis dan telah mengalami banyak perubahan, di antara tiga partai politik yang ada pada masa Orde Baru, Partai Golkar yang menjadi partai penguasa atau dominan, menjadi partai yang menghadapi masa-masa terberat dalam sejarah setelah masa Orde Baru. yang sebelumnya. yang. bertahun-tahun. menikmati semua kemewahan politik.

Ada beberapa alasan mengapa Partai Golkar terhambat oleh masa-masa sulit. Pertama, sentimen anti-Golkar yang tinggi. Pada Pemilu 1999, kampanye Golkar terbengkalai karena terus-menerus mendapat ancaman dan intimidasi dari berbagai partai anti-Golkar, seperti yang terjadi di beberapa daerah. Kedua, Golkar berada di bawah tekanan publik untuk membubarkan atau Orde Baru adalah era di mana penguasa membangun partai politik sedemikian rupa sehingga mereka melayani orientasi pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi. Pelan tapi pasti, peran partai politik dibatasi dalam kehidupan politik dan kemudian dikuasai oleh negara. Partai-partai politik lama yang berakar pada kemerdekaan, demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin secara sistematis dihilangkan seiring negara membangun kekuatan politik baru menuju era "dua partai, satu Golkar". . setuju. . sistem. beku. Ketiga, selain tekanan politik, Golkar juga terancam dibekukan akibat terbitnya Keppres Abdul Rahman Wahid yang memerintahkan pembekuan Golkar.

Keempat, Golkar terisolir dari jalur pendukung yaitu ABRI dan birokrasi. Kelima, adanya perpecahan di lingkungan Golkar, terutama ormas pendukungnya. Selanjutnya perpecahan ini melahirkan partai-partai yang kemudian menjadi rival politik pada Pemilu 1999, seperti

PKP, PMKGR, PKPB, dan Partai Patriot. Akibatnya, pada Pemilu 1999, perolehan suara Golkar turun menjadi 22 persen. Pada Pemilu 2009, perolehan suara Golkar turun menjadi 14 persen setelah Pemilu 2004 naik menjadi 24 persen.

Upaya Golkar bertahan di tengah serangan politik yang menerpa dirinya. Seperti diketahui, bersama Golkar, ABRI, dan Birokarsi yang dulu bernama ABG, mereka adalah pilar kekuasaan otoriter Orde Baru. Golkar dituding sebagai aktor yang paling bertanggung jawab atas krisis yang melanda Indonesia saat itu. Dalam pengakuannya, Akbar Tandjung, Ketua Umum Partai, menjelaskan bahwa dalam pidatonya di Musyawarah Nasional Golkar tahun 1998, ia mengakui bahwa dulu Golkar adalah partai yang menjadi mesin politik yang berkuasa, sebagai alat pengumpul suara dalam pemilu dan hanya alat untuk melegitimasi penguasa otoriter.

Setelah menjalani sejarah panjang dominasi di era Orde Baru dan tantangan yang dihadirkan Partai Golkar, setelah mengkaji uraian sebelumnya, maka tidak salah untuk memberi penilaian bahwa pada pemilu 1999 terjadi kisruh di parpol dan melemahnya kekuatan politik. Namun jika kita melihat di tingkat lokal, dalam hal ini peneliti akan mengulas Partai Golkar di Sumatera Barat, dimana Sumatera Barat merupakan daerah yang termasuk dalam kemenangan Partai Golkar dalam kontes pemilihan umum untuk berbagai periode.

#### **4. Rangkuman**

Seluruh pikiran akan pentingnya *politics of presence* (politik kehadiran) hadir langsung di tengah kekuatan mayoritas untuk mewujudkan ksetaraan lewat control publik sebagaimana digagas oleh Anne Philips di atas. Gagasan *politicsof presence* akan mendapat catatan kritis lain Ketika sistem perwakilan politik mengandalkan isu-isu primordial. Clifford Geertz, seorang Indonesianis yang meneliti politik keterwakilan di Indonesia justru melihat Indonesia dari sudut pandang kuatnya politik primordialisme yang kemudian diperhadapkan dengan tantangan akan nasionalisme.

Modul berikutnya akan membahas pemikiran dan gagasan Clifford Geertz terkait sistem keterwaklan politik di Indonesia yang mengusung politik priordialisme dan tuntutan akan nasionalisme.

## **5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek**

### **a. Latihan**

Mahasiswa melakukan pendalaman materi dengan membaca dan merespon materi yang disampaikan tentang keseluruhan pemikiran Anne Philips tentang *Politics of Presence*.

### **b. Lembar Kerja Praktik**

Mahasiswa merumuskan dan menjelaskan bagian-bagian pokok pemikiran Anne Philips.

### **c. Evaluasi Pembelajaran**

Mahasiswa memberikan respon dalam diskusi di kelas dan hasil dari pengerjaan lembar kerja praktik.

### **d. Umpan Balik**

## **C. PENUTUP**

### **1. Rangkuman**

Pemikiran Anne Philips tentang politik Keterwakilan dengan pemikirannya yang terkenal dengan "*Politics of Presence*" menjadi salah satu jawaban baru dalam menjembatani ketidakmampuan kalangan minoritas untuk sampai bersentuhan dengan akses kekuasaan. Maka politik kehadiran secara riil menjadi jawaban bahwa setiap kalangan minoritas mestinya memiliki perwakilan langsung yang hadir secara riil di lembaga-lembaga pemerintahan. Kehadiran secara langsung dengan politik kehadiran akan memberikan kesempatan langsung bagi seluruh kalangan minoritas untuk memberikan dan membela apa yang menjadi kebijakan paling tepat bagi setiap kalangan minoritas. Politik Kehadiran menjadi lambing dari kesetaraan juga yang digagas oleh para calon-calon terkait. Persaingan menjadi muncul karena calon-calon menjadi lebih dikenal dibanding sebelumnya adalah para calon yang sama sekali tidak diketahui.

Kehadiran langsung kalangan minoritas berarti bahwa sistem perwakilan dimaksud tidak diberikan kesempatan kepada wakil yang bukan berasal dari kalangannya, tetapi harus riil dan konkrit berasal dari kalangan minoritas itu sendiri. Sebab dengan memberikan apa yang langsung menjadi wakil dari kalangan minoritas itu akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk secara riil tahu lebih baik dan lebih tepat apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sangat berbeda misalnya dengan sistem perwakilan yang wakilnya berasal dari kelompok lain atau yang mengklaim diri sebagai wakil dari kalangan minoritas padahal dia sendiri tidak pernah hidup dan tinggal dalam lingkungan minoritas itu. Akibatnya apa yang diperjuangkan oleh wakil yang tidak berasal dari anggota langsung kalangan minoritas itu akan cenderung berbeda dan tidak sejajar dengan yang diperjuangkan dan yang menjadi kebutuhan riil masyarakat itu sendiri.

## 2. Daftar Istilah

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
Keterwakilan	Keterwakilan berasal dari kata dasar wakil. Keterwakilan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keterwakilan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Keterwakilan dalam politik berarti adanya wakil dari para rakyat yang menjadi pembawa suara atau gagasan di Lembaga pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyat baik di legislative maupun eksekutif untuk mengusung ide dan melaksanakan apa yang diharapkan oleh rakyat.
<i>Politics of Presence</i>	Adalah judul buku karya Anne Philips yang menegaskan politik kehadiran secara riil dari kalangan minoritas itu sendiri menjadi tuntutan mendasar ketika perwakilan yang tidak berasal dari kalangan minoritas cenderung tidak

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
	mengusung apa yang menjadi kepentingan minoritas
Minoritas	Sekelompok kecil rombongan atau kaum yang dari segi jumlah tergolong sangat kecil atau sedikit dibandingkan kelompok lain dalam suatu komunitas atau masyarakat. Perbandingannya selalu dalam jenis atau penggolongan yang sama, misalnya: antar suku, antar agama, antar daerah asal, dll. Dalam pengertian politik modern, isu minoritas tidak sekedar menyangkut jumlah atau kuantitas, tetap kerap juga yang jumlahnya secara kuantitas sangat mayoritas tetapi dalam pengaruh selalu merasa diri minoritas yang memunculkan kecemburuan, karena kalangan minoritas secara jumlah justru yang paling berpengaruh dan mungkin memegang peranan sangat penting di suatu negara atau daerah.
Kontrol Publik	Adalah pengelolaan dan campur tangan masyarakat luas terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan atas nama negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah/local. Kehadiran masyarakat menjadi salah satu ukuran dari partisipasi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, karena masyarakat hadir untuk mengetahui apakah program, agenda dan keputusan pemerintah sejalan dengan harapan masyarakat
Kesetaraan	Adalah tingkatan yang sejajar antara para pihak yang berbeda entah karena perbedaan jenis kelamin, perbedaan golongan, jenis suku, ras dan jenis apapun. Kesejajaran itu baik dalam hak-hak politik maupun dalam hak-hak di bidang hukum

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
	tanpa ada seorang pun yang lebih mendapatkan hak lebih unggul dari orang lain.
Persamaan politik	Adalah perlakuan yang sama kepada setiap masyarakat secara politik tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, maupun identitas lain. Derajat setiap orang dihadapan hak-hak politik misalnya dalam memberikan suara dalam setiap pemilu sepanjang memiliki seluruh persyaratan, setiap orang memiliki hak dan suara yang sama dan nilai hasil pilihannya juga dihitung satu suara sama seperti orang lain
Masyarakat pemilih	Adalah masyarakat yang sudah sah memiliki hak dan kewenangan untuk memilih dan ikut dalam setiap pemilihan, baik pemilihan nasional maupun pemilihan local sesuai lokasi Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.
Ketidaksetaraan	Adalah pemberlakuan yang tidak sama dan tidak seimbang terhadap hak hak politik setiap warga negara, entah karena perbedaan jenis kelamin, agama, suku, asal daerah, lokasi tinggal dan lain lain. Ketidaksetaraan ini adalah musuh terbesar demokrasi karena demokrasi memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk berpartisipasi secara setara secara politik.
Liberal	Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Dalam

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
	<p>Liberalisme Klasik, keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah diagungkan. Setiap individu memiliki kebebasan berpikir masing-masing – yang akan menghasilkan paham baru. Keberadaan Negara itu akan dibatasi oleh individu sehingga kekuasaan Negara menjadi terbatas – hanya sebagai “penjaga malam” atau hanya bertindak sebagai penetralisasi konflik.</p>
<p>Konsensus</p>	<p>Adalah kesepakatan yang diambil dari hasil diskusi bersama antara sejumlah pihak. Consensus menjadi kesimpulan yang diambil dari hasil pembicaraan yang kemudian menuntut untuk dilakukan Tindakan atasnya.</p>

### 3. Daftar Referensi

- Beitz, C.R. *Political Equality: An Essay in Democratic Theory*. Princeton, 1989.
- Carlton Clymer Rodee et al. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali, 2002.
- Chilcote, R. H. *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm*. Colorado: Westview Press, 1981.
- Geertz, Clifford. *Old Societies and New States. The Quest for Modernity in Asia and Afrika*. New York: The Free Press, 1963.
- Gerald F, G. *Public and Private Interest in Liberal Political Economy, Old and New*. New York: St Martin's, 1983.
- Haboddin, M. "Jejak Pemikiran: Dari Tradisionalis ke Behavioralis" dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 17-29, Maret 2016.
- Lijphart, Arend. *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-one Countries*. New Haven, 1984.
- Philips, Anne. *The Politics Of Presence*. Oxford: Clarendon Press, 1995.
- Pitkin, H. *The Concept of Representation*. Berkeley, [tanpa penerbit], 1967.
- Rosidi, S. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sudarsono, Juwono (editor). *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik* Jakarta: Gramedia, 1981.
- Suhino. *Ilmu Negara*. Jogjakarta: Liberty, 1980.

## **MODUL 5**

### **IKATAN PRIMORDIAL DALAM PERWAKILAN POLITIK**

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **1. Deskripsi Singkat**

Pada modul ini mahasiswa akan mempelajari ikatan primordial yang sering muncul dalam praktek politik praktis sebagaimana sejak sangat awal sudah muncul dalam peta politik Indonesia. Sudut lain yang menarik ditelisik terkait sistem perwakilan politik adalah lahirnya ikatan primordial dalam politik, selain keterpilihan kandidat menjadi wakil politik warga ditentukan oleh seberapa besar dan seberapa terang benderang bagi publik kehadiran sosok atau figure politik untuk dipilih tanpa ragu oleh pemilih sebagaimana disampaikan oleh Alan Ware. Ikatan primordial ini berbeda dari maksud *politics of presence* (politik kehadiran sebagaimana dimaksudkan oleh Anne Philips walaupun politik kehadiran merupakan perwakilan politik dari sekelompok masyarakat yang merasa diabaikan atau tidak mendapatkan perhatian oleh negara, dan bahkan mungkin ditinggalkan oleh para wakil terpilih.

Ikatan primordial menjadi unsur pembeda dalam politik yang membuat hiruk pikuk politik menjadi sangat ramai bahkan cenderung bertensi panas seperti dialami oleh Indonesia setidaknya dalam tiga kali pemilu terakhir di Era Reformasi. Setidaknya dalam tiga kali masa pemilu terakhir yakni Pemilu Presiden tahun 2014, Pemilu Kda Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, dan Pemilu Presiden tahun 2019 adalah tiga contoh pemilihan umum yang memiliki tensi sangat tinggi dan panas oleh kehadiran politik identitas.

##### **2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

Capaian pembelajaran dari Modul 5 ini adalah:

- a. Mampu memahami dan menjelaskan bagaimana lahirnya kepentingan primordial

- b. Mampu menjelaskan dan bagaimana Sifat Alami Kelompok Primordial yang masih menghantui peta politik di seluruh dunia termasuk dalam konteks Indonesia
- c. Terbentuknya kesadaran sosial akan persoalan politik bangsa berdasarkan pemahaman akan Teori Sistem Perwakilan Politik
- d. Mampu menemukan solusi atas fenomena politik berdasarkan konsep dan teori yang dipelajari.

### **3. Kemampuan Akhir**

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari Modul 5 ini adalah:

- a) Mahasiswa/i mampu memahami dan menjelaskan bagaimana lahirnya kepentingan primordial
- b) Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana kepentingan primordial itu muncul dalam politik identitas
- c) Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana politik identitas dipraktikkan dalam politik praktis

### **4. Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)**

### **5. Kegunaan Modul 5**

Modul ini akan membantu mahasiswa memahami dan menjelaskan bagaimana lahirnya kepentingan primordial, apa itu politik identitas dan bagaimana politik identitas dipraktikkan dalam sistem politik praktis.

### **6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

Materi pokok: ikatan primordial dalam perwakilan politik

Sub Materi Pokok:

- 1) Ikatan Primordial dalam Perwakilan Politik,
- 2) Sifat Alami Kelompok Primordial

## **B. KEGIATAN PEMBELAJARAN**

### **1. Judul Kegiatan Pembelajaran:**

**“IKATAN PRIMORDIAL DALAM PERWAKILAN POLITIK”**

### **2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan Ikatan Primordial Dalam Perwakilan Politik khususnya terkait dengan Lahirnya Kepentingan Politik Primordial
- b. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan, dan bagaimana Sifat Alami Kelompok Primordial yang masih menghantui peta politik diseluruh dunia termasuk dalam konteks Indonesia.

### **3. Uraian, Pokok Pikiran, dan Refleksi Kontekstual**

#### **a. Lahirnya Kepentingan Politik Primordial**

Ikatan primordial menjadi unsur pembeda dalam politik yang membuat hiruk pikuk politik menjadi sangat ramai bahkan cenderung bertensi panas seperti dialami oleh Indonesia setidaknya dalam tiga kali pemilu terakhir di Era Reformasi. Setidaknya dalam tiga kali masa pemilu terakhir yakni Pemilu Presiden tahun 2014, Pemilu Kda Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, dan Pemilu Presiden tahun 2019 adalah tiga contoh pemilihan umum yang memiliki tensi sangat tinggi dan panas oleh kehadiran politik identitas. Namun politik identitas yang sama justru tidak mengakar kuat dalam pemilihan legislative setidaknya jika kita melihat bagaimana kandidat-kandidat partai politik beragama Nasrani justru memenangkan suara besar di daerah-daerah pemilihan berbasis Islam seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Riau, Sulawesi Selatan, dan sejumlah daerah lain sepanjang Pemilihan Umum di Era Reformasi tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Bagaimana munculnya politik primordial? Mengapa politik primordial kerap dipakai dan muncul dalam politik untuk memenangkan sebuah pertarungan politik untuk penentuan kemenangan perwakilan politik tertentu? Menurut Clifford Geertz, seorang antropologist Amerika yang banyak meneliti tentang situasi

social dan politik Indonesia, dominasi kelompok kepentingan politik tertentu terhadap kepentingan yang lebih lemah cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik yang bersifat primordial. Artinya, setiap kepentingan politik tergantung dari seberapa besar adanya dominasi politik dari sekelompok masyarakat terhadap kelompok yang lebih lemah. Dominasi itu sendiri cenderung berciri primordial. Ketika kepentingan kelompok yang lebih lemah terabaikan dan tersingkirkan dari kehadiran kelompok yang lebih dominan, dan jika dibiarkan terus menerus dan terabaikan, maka perlahan-lahan akan tumbuh kehendak politik berciri primordial baru lagi, dan demikian seterusnya.



Gambar 20: Primordialisme seadanya bisa membanggakan dan menjadi berbahaya jika dimaksudkan merendahkan kelompok lain

Bahkan dalam fakta-fakta paling umum, lahirnya konflik politik di negara-negara berkembang cenderung justru disebabkan oleh adanya perbedaan dan pertentangan yang didasarkan pada ikatan-ikatan primordial. Ikatan-ikatan primordial bisa menjadi sangat sensitive yang kerap tidak terhindarkan kemunculannya jika tidak dikelola dengan baik menjadi bara api besar untuk sebuah perpecahan jika isu-isu primordial bercampur dan masuk ke dalam wilayah politik. Isu primordial menjadi sangat mudah untuk tersulut menjadi nyala api besar yang tak terpadamkan khususnya bagi negara-negara

yang baru merdeka dari tangan kolonialisme, termasuk di negara-negara berkembang. Isu primordialisme menjadi sangat laku dan bertumbuh subur di kalangan masyarakat yang tertinggal, miskin, kurang terdidik yang memudahkan warga lebih menggunakan rasa perasaan menghadapi situasi politik daripada menggandakan akal budi atau nalar sehat. Isu primordial menjadi mudah tersulut api kecil karena memang ikatan primordial sangat merekatkan sesama warga dan kelompok masyarakat atas dasar daerah asal, garis keturunan, dan iman kepercayaannya.

Menurut Clifford Geertz, ikatan primordial adalah keterikatan seseorang terhadap kelompoknya yang didasarkan atas nilai-nilai yang *given* (yang telah terbentuk dan diterima sebagaimana adanya tanpa campur tangan orang bersangkutan) yang disebabkan hubungan darah dan persamaan dalam hal agama, suku, bahasa, asal daerah, dan adat istiadat. Ikatan primordial bersifat alami karena diterima oleh seseorang yang disebabkan oleh keberadaannya dalam kelompok primordial tertentu, sehingga ikatan primordial tidak dihasilkan oleh hubungan sosial yang dilakukan oleh orang bersangkutan dengan orang lain.<sup>24</sup> Artinya, ikatan primordial itu bukan muncul kemudian sebagai hasil karya dan ciptaan seseorang sesudah dia lahir sebagai manusia, tetapi *in se* dalam dirinya sudah terbawa sejak sebelum ia lahir dan hanya menerimanya disaat kelahirannya tanpa ada kewenangan untuk memilih hal sebaliknya atau pilihan lain yang dikehendakinya kemudian setelah seseorang dewasa.

Menurut Maswadi Rauf, seorang Mahaguru Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, analisis Clifford Geertz mengenai konflik politik dan stabilitas politik di negara-negara yang baru terbentuk, ditinjau dari kesetiaan primordial dan kelompok primordial, memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara tersebut. Terkait dengan studi

---

<sup>24</sup> Clifford Geertz, *Old Societies and New States. The Quest for Modernity in Asia and Afrika*, (New York: The Free Press, 1963), hlm. 105-157.

Clifford Geertz mengenai sentimen primordial di negara-negara berkembang yang mempunyai pengaruh luas, Maswadi mengatakan,<sup>25</sup>

“Geertz mempelajarinya dari sudut keterikatan anggota-anggota masyarakat terhadap kelompok primordial mereka masing-masing. Dengan mempelajari kelompok-kelompok primordial dan kesetiaan warga masyarakat terhadap kelompok-kelompok primordial, terbukalah sebuah cakrawala baru dalam konflik politik di Negara-negara berkembang, yang untuk konteks Indonesia pada dasawarsa 1950an dan 1960an.”

Fakta-fakta sangat kuat dalam sepuluh hingga dua puluh tahun pertama sejak kemerdekaan Indonesia sangat terlihat jelas bagaimana ikatan-ikatan primordial tersebut sangat kuat dan mengakar. Fakta itu bisa terlihat misalnya dari jatuh bangunnya pemerintahan parlementer Indonesia di tahun 1950 an. Saat itu, pemerintahan kabinet-kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri hanya berusia sangat singkat oleh jatuh bangunnya antara kabinet yang satu terhadap kabinet yang lain oleh pertikaian politik primordial masing-masing partai. Bahkan dalam Pemilu pertama tahun 1955, pemenang pemilu dalam sepuluh besar mayoritas diisi oleh partai-partai berbasiskan primordial, mulai dari Masyumi, Nahdlatul Ulama, hingga Parkindo, dan Partai Katolik. Sangat kuatnya isu-isu primordial membuat perjalanan negara menapaki daratan kemerdekaannya tidak semudah seperti dicita-citakan para *founding fathers* ketika mereka merumuskan ideologi negara Pancasila dan susunan/tatanan hirarki lainnya kenegaraan Indonesia sejak Mei hingga Agustus 1945.

---

<sup>25</sup>Maswadi Rauf, Guru Besar Fisip UI, *Konsensus Politik. Sebuah penjajagan teoritis* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional, 2000), hlm. 58.



Gambar 21: Betapa berbahayanya ketika primordialisme ras, etnis dan agama masuk dalam wilayah politik

Maswadi Rauf menjelaskan bahwa kelompok primordial memainkan peranan penting dalam teori konflik Geertz karena teori tersebut dibangun atas konsep primordial. Istilah itu menghasilkan beberapa istilah lain yang berhubungan erat, seperti ikatan primordial, sentimen primordial, dan kesetiaan primordial. Ikatan primordial membuat sekelompok masyarakat menjadi satu kesatuan primordial yang terikat oleh hubungan darah, agama yang sama, atau asal muasal daerah, dan lain-lain. Sentiment primordial melahirkan rasa perasan ikut terusik atau terluka ketika salah seorang atau sejumlah anggota dari ikatan primordial tersakiti atau terluka atau penting mendapatkan perhatian serius. Sementara kesetiaan primordial merupakan ungkapan hati untuk menerima dan melaksanakan apapun yang menjadi kesepakatan bersama kelompok, yang ketaatan itu muncul bukan terutama karena topik atau materi yang disepakati, tetapi lebih karena ada ikatan-ikatan yang *given* diantara sesama anggota yang tak akan pernah bisa dihilangkan.

Mengikuti pandangan Sonny dan Soeharso, dapat dilihat bahwa sebagai sentimen kesukuan yang dilebih-lebihkan, primordialisme dapat dipahami sebagai ikatan seseorang dengan kelompok 'pertama' dengan segala nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi dan internalisasi. Primordialisme memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk sikap primordial seseorang, yaitu sikap yang menganggap bahwa segala sesuatu yang berasal dari

kelompoknya (suku atau agama) adalah satu-satunya yang “terbaik” dan “benar”. nomor dua.

Sikap primordial di satu sisi memiliki fungsi melestarikan budaya kelompok. Namun di sisi lain, sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap etnosentris, yaitu sikap yang cenderung subjektif ketika melihat budaya orang lain. Kelompok akan selalu melihat budaya orang lain dari sudut pandang budaya mereka sendiri. Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang telah disosialisasikan sejak kecil sudah menjadi nilai-nilai yang terinternalisasi dan sangat sulit untuk diubah dan cenderung dipertahankan jika nilai-nilai tersebut sangat bermanfaat bagi diri sendiri/kelompok/suku atau agama.

Dalam konteks etnisitas, perasaan primordial ini memanifestasikan dirinya dalam bentuk etnosentrisme dan entrosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk melihat dunia melalui filter budaya sendiri. Istilah ini sering dipandang negatif, didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk melihat orang lain dengan cara di luar latar belakang budaya seseorang. Sedangkan etnosentrisme adalah paham yang cenderung menilai orang dari kelompok, masyarakat, atau gaya hidup lain menurut standar kelompok atau budayanya sendiri; mereka sering memandang kelompok lain sebagai inferior (Healey, 1998; Noel, 1968).

Ada dua jenis etnosentrisme. Pertama, etnosentrisme yang tidak fleksibel, yaitu sikap yang cenderung subjektif dan melihat ke dalam untuk melihat budaya atau perilaku orang lain. Kedua, etnosentrisme fleksibel, yaitu sikap yang cenderung menilai perilaku orang lain tidak hanya dari sudut pandang budaya sendiri, tetapi juga dari sudut pandang budaya lain. Primordial tidak selalu salah dalam berpikir, bertindak dan bertindak. Namun, adalah mungkin untuk mempercayai sesuatu yang harus dipertahankan sampai mati sebagai satu-satunya warisan "sejati". Dari sudut pengajaran (ritual), misalnya, perilaku primordial merupakan unsur terpenting dalam konstruksi ajaran fundamentalnya.

Primordialisme juga dapat ditelusuri secara filosofis melalui ide-ide Romantisisme Jerman, terutama dalam karya-karya Johann

Gottlieb Fichte dan Johann Gottfried Herder. Bagi Herder, bangsa identik dengan kelompok bahasa. Dalam pandangan Herder, bahasa identik dengan pemikiran, dan karena setiap bahasa dipelajari dalam masyarakat, orang “dipaksa” untuk memiliki cara berpikir yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap kelompok masyarakat, mereka masih mempertahankan sifat dasarnya dari waktu ke waktu.

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, dan ribuan bahasa daerah sebenarnya merupakan “sarang” primordialisme itu sendiri. Sifat dan sikap primordial ini masih ada dan hidup dalam masyarakat kita hingga saat ini. Belajar dari pengalaman Pilpres 2014 dan Pilkada 2017 yang bertujuan memenangkan sengketa politik, baik di tingkat nasional maupun lokal (daerah), ternyata latar belakang isu para calon (presiden/gubernur/bupati) dipolitisasi dan dirancang dan ada perpecahan di tengah. masyarakat berdasarkan di dalam kelompok vs di luar kelompok.

Secara psikologis, politisasi primer juga meninggalkan residu pada pihak yang kalah, sebagai akibat dari “trauma mental” yang berkepanjangan akibat teror, intimidasi, dan jasa lainnya dari kubu “lawan politik”. Sebaliknya, kelompok yang menang akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendapatkan 'kue' pembangunan tanpa menyisakan apapun untuk kelompok yang kalah (pemenang mengambil semua). Hal ini diharapkan tidak terjadi lagi pada pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan pemilihan presiden dan legislatif 2019 mendatang, karena alih-alih menikmati pesta demokrasi, yang terjadi adalah penderitaan psikologis dan trauma yang dapat mengganggu "Indonesia" kita.

Dalam konteks pemilihan presiden dan legislatif di Indonesia, misalnya, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Tujuan akhir dari sebuah pesta demokrasi sejati tidak hanya untuk memenangkan perlombaan dan kontes, tetapi untuk membenarkan segala cara. Ada tujuan yang lebih mulia, yaitu mengemban misi bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah rakyat, bangsa

Indonesia dan berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai visi bersama mewujudkan masyarakat yang mandiri, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dengan mempromosikan kesejahteraan umum yang disebutkan di atas, itu tidak hanya memenuhi kebutuhan materi tetapi juga kesejahteraan psikologis semua warga negara. Pilkada seharusnya menjadi ajang kompetisi untuk memperebutkan ide/gagasan bagaimana berkompetisi untuk mewujudkan visi dan misi kemerdekaan lima tahun ke depan. Di sisi lain, jangan “menghancurkan” lawan politik yang sebenarnya adalah anak bangsa dan negara itu sendiri, menyebarkan isu SARA di ruang publik dan di media sosial, sebagai cara “kuat” untuk memenangkan sengketa politik. . . , karena ada beberapa ide cemerlang. Akibatnya, bukan hanya karakter lawan politik yang “dibunuh”, tetapi juga rentan dan tergerusnya tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia dan jati diri bangsa sebagai bangsa Indonesia.

Kehadiran primordialisme dalam politik tentu akan menyebabkan melemahnya identitas nasional. Indonesia dibangun oleh para founding fathers dan ibu bangsa yang berlatar belakang nasionalis, tokoh agama, intelektual, dll, tanpa mengandalkan persamaan suku, kesamaan sosial budaya, atau agama primordial. Presiden pertama Indonesia Soekarno tegas menyatakan: "Kami ingin mendirikan negara, semua untuk semua, bukan negara untuk satu orang, bukan negara untuk sekelompok, bahkan jika ada orang kaya. Tapi kami membangun keseluruhan untuk semua.- 44 PDI-P di Jakarta (10/1/2017) Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi berdirinya 'Rumah Nasional untuk Indonesia Raya' yang dinilai sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.

Dari perspektif keamanan nasional, kita menyadari bahwa di era globalisasi ini, konstelasi geopolitik dan geostrategis Indonesia menghadapi tantangan, keresahan dan hambatan yang semakin meningkat, serta memperjuangkan kepentingan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. . Upaya penguatan kebangsaan, kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian bangsa tidak serta merta membuat

semuanya berjalan mulus. Ada pihak-pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, yang tidak menginginkan Indonesia lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sukses.

Mengapa ini terjadi? Salah satu titik lemah (G point) kebangsaan kita adalah tidak stabilnya konstruksi masyarakat nasional Indonesia kita sebagai “identitas baru” dalam platform politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bangsa multikultural, kita harus mengembangkan budaya dan struktur kognitif "kita", bukan "aku" dan "kita"; namun dalam kehidupan sehari-hari kita secara sadar mempraktekkan budaya “monokultural”.

Kita cenderung merasa lebih nyaman dan diterima ketika kami berada di komunitas utama kami. Keterikatan nasional kita pada identitas nasional tidak sekuat keterikatan kita pada pengalaman "pertama" kita sebagai milik kelompok etnis atau agama tertentu. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa DNA tersebut bukan asli Indonesia, melainkan DNA campuran (fusion). Bahkan agama-agama yang ada saat ini “diimpor” dari negara lain dan telah berinkulturasi dengan budaya dan agama lokal. Dalam konteks pilkada, kita seringkali “terjebak” dalam pemilu yang justru memperkuat identitas primer kita. Kita lebih nyaman memilih pemimpin yang memiliki karakteristik dasar yang sama dengan kita dalam hal suku, budaya, dan agama.

Sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan negara-negara bekas jajahan dalam membangun bangsanya sendiri, salah satunya tergantung pada apakah mereka mampu mengatasi dan mengelola primordialisme lokal ini. Para pendiri bangsa atas nama Soekarno-Hatta sangat menyadari hal ini. Dengan demikian, rumusan ideologi nasional Pancasila yang digali dari budaya multiprimordial nusantara terbukti mampu mengatasi dan mengelola keragaman partikularisme.

Pancasila selain sebagai ideologi, dasar negara, juga merupakan way of life bagi bangsa dan budaya Indonesia, secara psikologis merupakan kemajuan kreatif yang sangat relevan dan mampu menata serta mengelola berbagai asal-usul yang partikularistik. Pancasila dapat beradaptasi dengan keragaman ini tanpa ada yang merasa lebih unggul dari yang lain. Bahkan ketika para

pemuda mengambil sumpah dalam "Soempa Pemoeda" pada tanggal 28 Oktober 1928, mereka tidak mempersoalkan latar belakang pemimpinnya, kata-kata "mayoritas" dan "minoritas" tidak ada, apalagi mayoritas menguasai tirani rakyat. pemerintah. minoritas, bukan dalam sejarah perjuangan bangsa.

Jika pada saat itu ada sikap etnosentris masyarakat Jawa, tentu bahasa yang kita gunakan saat ini adalah bahasa Jawa. Namun pada kenyataannya tidak demikian, untuk sikap toleransi dan empati, serta untuk kepentingan "bangsa" pada umumnya, akhirnya disepakati untuk menggunakan bahasa Melayu kecil yang tidak asing lagi bagi masyarakat yang berada di pulau-pulau nusantara pada waktu itu untuk menjadi orang Indonesia.

#### **b. Sifat Alami Kelompok Primordial**

Bentuk kelompok primordial bisa dikategorikan secara sederhana sebagai kelompok yang lebih besar dari keluarga namun ia lebih kecil dari bangsa yang didasarkan atas ikatan primordial. Terkait dengan itu, Maswadi menjelaskan<sup>26</sup>

“Yang dimaksud dengan ikatan primordial adalah keterikatan seseorang terhadap kelompoknya yang didasarkan atas nilai-nilai yang *given* (yang telah terbentuk dan diterima sebagaimana adanya tanpa campur tangan orang bersangkutan) yang disebabkan hubungan darah dan persamaan dalam hal agama, suku, bahasa, asal daerah, dan adat istiadat.”

Penjelasan Maswadi di atas semakin menegaskan bahwa memang ikatan primordial itu bukan karena diciptakan dan diperoleh dari proses berjalannya kehidupan setiap orang, tetapi lebih karena memang diterima begitu saja dari generasi yang lebih dewasa yang kemudian diturunkan ke dalam diri setiap orang.

Ikatan primordial itu bisa dalam bentuk keyakinan karena agama, ikatan daerah karena suku yang sama, juga karena daerah asal yang sama dengan bahasa dan adat istiadat yang serupa. Semua butir

---

<sup>26</sup> Rauf, *op.cit.*,\_ hlm. 62

-butir dasarnya itu menjadi prinsip yang mengikat erat setiap kelompok primordial. Terkait sumber ikatan primordial sebagaimana disampaikan di atas dipertegas lagi oleh Maswadi,<sup>27</sup>

“Ikatan primordial bersifat alami karena diterima oleh seseorang disebabkan keberadaannya dalam kelompok primordial tertentu. Jadi ikatan primordial tidak dihasilkan oleh hubungan sosial yang dilakukan oleh orang bersangkutan dengan orang lain. [...] kelompok primordial didasarkan atas persamaan beberapa nilai budaya yang dapat dikategorikan secara umum menjadi dua, yakni ras/suku dan agama. Sebuah kelompok yang keanggotaannya didasarkan atas persamaan ras/suku dan/atau agama dapat dikategorikan sebagai kelompok primordial.”



Gambar 22: Primordialisme sangat berpotensi melecehkan kelompok lain

Terkait dengan hal tersebut di atas, Maswadi menjelaskan juga bahwa orang yang berasal dari suku tertentu umpamanya akan mempunyai bahasa dan adat istiadat yang sama, meskipun tidak persis selalu sama, ada kemungkinan mereka juga berasal dari daerah yang sama. Kelahiran seseorang dalam kelompok ras atau suku tertentu sudah jelas bukanlah pilihan orang bersangkutan karena ia menerima kenyataan itu sebagaimana adanya. Ia dilahirkan oleh orang tua yang tidak bisa dipilih oleh orang yang bersangkutan sehingga ia tidak berperan dalam menentukan dimana ia dilahirkan. Kita tidak bisa

---

<sup>27</sup> Geertz, *op.cit.*, hal 109-110.

memilih dalam suku apa kita dilahirkan. Sebagaimana dikatakan oleh Maswadi,<sup>28</sup> inilah yang dimaksudkan oleh Geertz sebagai sifat alamiah dari kelompok primordial.

Berbeda dengan primordialisme suku atau ras, primordialisme agama justru tidak sesuatu yang harus tetap tapi bisa berubah. Primordialisme agama tergantung dari pilihan yang bersangkutan kelak terhadap agama yang menurutnya patut untuk dipegangnya. Lebih jauh tentang primordialisme agama, Maswadi menjelaskan,<sup>29</sup>

”Nilai primordial yang terkandung dalam agama sebenarnya sedikit berbeda dari ras/suku. Memang benar seseorang tidak bisa memilih agama dari keluarga dimana ia dilahirkan. Tapi seorang pemeluk agama tertentu bisa saja berpindah agama sehingga ia beralih atas dasar pilihannya sendiri dari sebuah kelompok primordial atas dasar agama tertentu ke kelompok primordial atas dasar agama yang lain. Dalam hal suku atau ras, seseorang tentu saja tidak bisa berpindah ras atau suku karena statusnya sebagai anggota kelompok ras atau suku tertentu tetapi melekat pada dirinya meskipun ia tidak mau mengakuinya.”

Kelompok primordial didasarkan atas persamaan beberapa nilai dapat dikategorikan secara umum menjadi dua, yakni ras/suku dan agama. Persamaan rasa atau suku akan menghasilkan persamaan-persamaan kultural lainnya seperti persamaan bahasa, adat istiadat, dan kedaerahan. Sehingga orang-orang yang berasal dari suku tertentu mempunyai bahasa dan adat istiadat yang sama.

Pandangan Maswadi di atas menunjukkan bahwa primordialisme agama dan suku adalah dua hal terpokok yang pertama sekali menyentuh kehidupan manusia. Dalam fakta sosial politik Indonesia, kedua isu politik agama dan politik suku menjadi teramat sensitive hingga saat ini. Lahirnya kelompok-kelompok garis keras atas nama agama seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Front Pembela Islam (FPI), termasuk bom bunuh diri atas nama agama, adalah gambaran dari betapa sangat sensitifnya isu-isu primordial

---

<sup>28</sup> Rauf, *op.cit.*.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 62-63.

dalam peta sosial politik Indonesia dewasa ini. Isu primordial dalam tataran sosial politik sudah muncul dalam sejarah Indonesia jauh sebelum kemerdekaan, sebagaimana terjadi misalnya dalam sidang-sidang Volksraad seperti dialami oleh IJ Kasimo, seorang politisi Katolik dalam sidang Volksraad tahun 1933 terhadap tuduhan anggota Volksraad sebangsanya sebagai antek antek asing hanya karena Kasimo seorang Nasrani.

Bagi Clifford Geertz, unsur primordialisme, entah suku, agama atau antar golongan “tidak hanya memainkan peranan yang integratif dan menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat, tetapi juga memainkan peranan memecah dan dengan begitu mencerminkan perimbangan antara kekuatan integratif dan disintegratif.”<sup>30</sup> Fakta Indonesia dimasa-masa awal kemerdekaan setidaknya hingga lima belas tahun pertama kemerdekaan (1945-1960 an) oleh jatuh banggunya kabinet, sidang konstituante penentuan Undang-Undang Dasar Indonesia yang berlarut-larut sejak November 1956 s/d 5 Juli 1959 dan berakhir gagal, dan banyaknya pemberontakan lokal, menunjukkan upaya-upaya disintegrasi tersebut.

Fakta-fakta yang sama dalam masa-masa awal Reformasi sejak kejatuhan Presiden Soeharto Mei 1998, upaya disintegrasi itu sangat menguat di masa masa sepuluh tahun pertama lahirnya Era Reformasi oleh kebebasan publik yang sangat dominan ditengah-tengah sangat lemahnya kewenangan dan keberadaan Lembaga eksekutif, sesuatu yang sangat berkebalikan 180 derajat dengan hegemoni kewenangan eksekutif yang otoriter dimasa pemerintahan Presiden Soeharto Orde Baru.

Primordialisme adalah perasaan yang dimiliki seseorang yang utamanya memelihara ikatan sosial berupa nilai, norma, dan kebiasaan yang berasal dari suku, ras, tradisi, dan budaya yang muncul sejak lahirnya individu baru. Primordialisme dapat ditelusuri secara filosofis kembali ke ide-ide Romantisisme Jerman, terutama dalam karya-karya Johann Gottlieb Fichte dan Johann Gottfried Herder. Bagi Herder, bangsa identik dengan kelompok bahasa. Dalam pemikiran Herder, bahasa identik dengan pemikiran, dan karena

---

<sup>30</sup> Geertz, *op.cit.*, hlm. 475.

semua bahasa telah dipelajari dalam masyarakat, setiap masyarakat harus berpikir secara berbeda. Ini juga menunjukkan bahwa orang menjaga alam mereka dari waktu ke waktu.

Secara etimologis dapat dijelaskan bahwa Primordial atau Primordialisme berasal dari kata latin primus yang berarti pertama dan ordiri yang berarti jaringan atau penyatuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), primordialisme adalah sentimen kesukuan yang berlebihan. Ikatan seseorang dari kelompok pertama dengan segala nilai yang diperoleh melalui sosialisasi akan berperan dalam pembentukan sikap primordial. Di satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi melestarikan budaya kelompok. Namun di sisi lain, sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap etnosentris, yaitu sikap yang cenderung subjektif ketika melihat budaya orang lain. Mereka akan selalu melihat budaya orang lain dari sudut pandang budaya mereka sendiri. Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang telah disosialisasikan sejak kecil sudah menjadi nilai-nilai yang terinternalisasi dan sangat sulit untuk diubah dan cenderung dipertahankan jika nilai-nilai tersebut sangat menguntungkan baginya.

Ada dua jenis etnosentrisme, yaitu: 1). Etnosentrisme tidak fleksibel, yaitu sikap yang cenderung subjektif ketika melihat budaya atau perilaku orang lain, 2). Etnosentrisme fleksibel, yaitu sikap yang cenderung menilai perilaku orang lain. sisanya. sisanya. tidak hanya dari sudut pandang budaya sendiri tetapi juga dari sudut pandang budaya sendiri. sudut pandang budaya lain. Primordial tidak selalu merupakan tindakan yang salah. Namun, itu bisa dinilai sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dalam hal pengajaran (ritual), misalnya. Perilaku primordial adalah elemen terpenting dalam membangun ajaran dasar Anda. Primordialisme, dalam kaitannya dengan etnis, berpendapat bahwa "kelompok etnis dan kebangsaan ada karena tradisi kepercayaan dan tindakan terhadap objek primordial seperti faktor biologis dan terutama lokasi teritorial."

Argumen ini didasarkan pada konsep kekerabatan, di mana anggota suatu kelompok etnis merasa memiliki sifat, asal usul, atau bahkan kerabat darah. Dilihat dari suku Igbo di Nigeria, setelah apa

yang mereka rasakan adalah asal usul mereka sebagai keturunan Yahudi. Primordialisme menganggap identitas etnik sebagai sesuatu yang tetap, setelah mapan. Sekarang perlu membahas primordialisme sebagai paradigma dalam studi etnis, dalam konteks Rwanda. Genosida Rwanda 1994 mengakibatkan kematian sekitar 800.000 orang Rwanda dalam rentang waktu tiga bulan. Kekerasan ini, seperti yang dialami dalam Perang Saudara Nigeria 1967, kemungkinan besar disebabkan oleh persaingan etnis dan antar etnis. Kelompok etnis Hutu yang dominan di Rwanda merasa terdorong untuk membunuh tetangga Tutsi mereka, karena perbedaan tersebut didasarkan pada identitas etnis mereka. Sejarawan Sandra Joireman berpendapat bahwa “jenis penjelasan untuk genosida dan kekerasan yang mengerikan di Rwanda, dengan penekanan pada kausalitas karena perbedaan kekerabatan dan kepercayaan kedua kelompok etnis, adalah ide mendasar.



Gambar 23: Efek dari primordialisme berlebihan adalah adalah keresahan social yang bisa berujung pada perang fisik antar kelompok

Sebagian besar ini disebabkan oleh keyakinan pada argumen utama tentang kekerabatan, tradisi sejarah, dan tanah air, kelompok etnis, yang membuat orang Hutu merasa bahwa tindakan mereka dibenarkan. Meskipun banyak kritik akademis terhadap primordialisme dan perkembangan teori etnis lain seperti konstruktivisme dan instrumentalisme, primordialisme

"mempengaruhi identifikasi kekuatan ikatan etnis yang bertahan lama dan komitmen anggotanya terhadapnya." Misalnya, beberapa ahli berpendapat bahwa perang dingin memengaruhi dan memicu kepercayaan ini pada konflik etnis dan etnis. Namun, primordialisme tidak setuju dan mempertahankan bahwa etnisitas ada secara historis, jauh sebelum Perang Dingin, yang hanya memberi jalan pada masalah ideologis.

Lebih jauh, argumen primordialis "menunjukkan bahwa perbedaan yang tidak dapat didamaikan karena perbedaan budaya menyebabkan ketakutan dan konflik yang menghasilkan kekerasan." [8] Meskipun studi sejarah yang lebih baru telah mengakui bahwa genosida 1994 di Rwanda adalah hasil dari perbedaan kekuasaan dan kekayaan antara Tutsi dan Hutu, primordialis berpendapat bahwa Hutu dan Tutsi berkembang sepenuhnya dalam budaya yang terpisah dan oleh karena itu, mereka pasti datang ke konflik. . dengan satu sama lain. lainnya. . Karena kelompok etnis primordial itu kuno, "tetap dan tidak berubah", kemungkinan asimilasi budaya di Rwanda disajikan sebagai suatu kemustahilan.

### **c. Dampak Riil Primordialisme Politik dan Sosial**

Kajian Sidik R. Usop terkait dengan primordialisme dan proses integrasi di Kalimantan Tengah setidaknya akan membantu untuk melihat bagaimana primordialisme memasuki wilayah sosial dan politik itu memang sangat penting untuk diberi catatan serius. Kajian primordialisme politik dalam konteks Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemikiran Geertz tentang konsep revolusi inklusif, yaitu penguatan kelompok primordial dalam masyarakat dan perluasannya ke seluruh bangsa (Liddle, 1970: 57). Di satu sisi, Liddle mengusulkan tatanan sosial di negara bagian. menghidupi dan mengintegrasikan unsur-unsur tatanan sosial Unsur-unsur primordial dalam ideologi partai. Di sisi lain, Kirana dan Hefner melihat bahwa ikatan primer adalah ikatan yang sudah ada dan diperkuat ketika kepentingan mereka terganggu oleh kekuatan di luar ikatan primer mereka.

Studi kasus sering menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang lebih kompleks, perbedaan agama dan etnis (etnis) diperparah oleh disparitas pembangunan, persaingan ekonomi, dan perebutan kekuasaan di tingkat elit, yang mendorong terjadinya kekerasan sosial. . . dan kekerasan. . Kasus Situbondo pada tahun 1966 dimulai dengan penghinaan terhadap Islam. Massa tidak senang dengan keputusan jaksa dan aksi kekerasan aparat keamanan dalam mengusir massa, termasuk seorang anggota aparat keamanan yang memukul kepala anak kecil yang hendak menyaksikan persidangan hingga berdarah.

Di balik kejadian itu (Haryanto (1998: 12-3) mengutip hasil investigasi dan wawancara, ia menegaskan bahwa ada beberapa masalah yang menindas masyarakat Situbondo yang kuat dalam mempertahankan identitas model pendidikan Pesantren, pertama masalah publik. Kekecewaan PPP kalah dari Golkar dalam Pilkada) 1987 dan 1992. Warga Situbondo menganggap PPP sebagai partai Islam yang harus didukung. Kompensasi tanah. Masalah dan relokasi warga yang tidak memenuhi harapan kesetiaan Santri kepada kiai Por, maka menghina Islam berarti menghina kiai. Kasus Tasik Malaya tahun 1996 dan peristiwa 14-15 Mei di Jakarta adalah yang paling keras terhadap etnis Tionghoa.

Yusuf Liem, dalam bukunya yang berjudul *Prasangka Terhadap Warga Etnis Tionghoa*, menyebutkan bahwa faktor pertama penyebab terjadinya kekerasan adalah kesenjangan ekonomi yang sangat mencolok antara kelas atas dan kelas bawah. Kedua, Aliansi Totok Tionghoa (konglomerasi) dengan birokrasi militer yang sangat berpengaruh dalam tatanan politik Indonesia pada masa rezim Suharto. Liem (200:77), mengacu pada pendapat Jenkin dan Robinson, melihat fenomena ini sebagai *melting pot* elit politik dan ekonomi di era Suharto. Peran kelompok ini menjadi sangat jelas ketika badai krisis ekonomi dibantai sebagai “kambing hitam” di pentas rezim Suharto, yakni antara tahun 1966 hingga Mei 1998.

Khusus mengenai konflik etnis Dayak dan Madura, Sudagung (2001) dalam bukunya *Mengurai Konflik Etnis di Kalimantan Barat* menyoroiti perselisihan tersebut sebagai konflik budaya. Ciri-ciri suku

Maduro diuraikan di bawah ini: Pertama, masyarakatnya ulet dan bekerja keras, karena sulitnya hidup di daerah asalnya dan dorongan yang kuat untuk memperbaiki nasibnya. Kedua, kuatnya solidaritas suku Maduro merupakan tradisi yang dibawa kembali dari tempat asalnya yaitu sistem tanean lanjang, dan dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Ketiga, budaya bos, yaitu berkelahi dengan senjata tajam yang disampaikan secara individu atau kelompok. Keadaan ini tersirat dalam kalimat “ango'an potea, please e tebang pot mate” yang artinya putih tulang lebih baik dari mata, lebih baik dari malu. Dengan demikian, dalam budaya carok terdapat karakter agresif suku Maduro. Menurut Sudagung, salah satu faktor pembeda utama antara orang Madura dan orang Dayak adalah kepatuhan orang Dayak terhadap hukum dan adat istiadat untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dan diskriminasi yang lebih parah.

Dilihat dari fokus wacana yang berkembang di masyarakat tentang sengketa etnis di Kalimantan Barat, ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya konflik etnis. Syarif Ibrahim Al Qadri, sosiolog dan profesor di FISIP Unair (D&R, XXVIII / 18 Januari 1997) mengemukakan bahwa hutan tidak hanya memiliki fungsi ekonomi tetapi juga memiliki makna budaya dan ritual. Oleh karena itu, masyarakat Dayak sangat prihatin dan terpukul ketika HPH memetakan hutan sehingga membatasi akses ke hutan. Ruang gerak yang sempit, terganggunya sistem mata pencaharian dan sistem ritual, menjadikan Maturase sebagai sasaran terdekat yang diyakini telah mengubah cara hidup masyarakat Dayak. Nasikun, sosiolog Universitas Gadjah Mada (Adil, No. 15 thn 65, 15-21 Januari 1997) merujuk pada konflik Dayak-Madura pada masa Orde Baru. Saat itu terjadi pembersihan birokrasi dari oknum-oknum yang dituduh “kiri” yang ternyata kebanyakan orang Dayak.

Definisi ini menunjukkan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang dinamis dan dapat berubah dalam arti bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang dapat dibentuk, suatu konstruksi sosial yang erat kaitannya dengan kepentingan dan kekuasaan para pelakunya. Dalam kerangka konstruksi sosial, budaya merupakan proses pelebagaan pengetahuan (institusionalisasi) dalam masyarakat melalui dinamika

dan kreativitas para aktor yang merupakan bagian dari realitas sosial. Pemikiran yang menempatkan aktor sebagai aktor aktif dan kreatif dalam dunia sehari-hari berasal dari pemikiran Weber bahwa tindakan manusia menjadi hubungan yang rasional ketika manusia memberikan makna atau makna tertentu atas tindakannya dan manusia lain memahami tindakan tersebut sebagai sesuatu yang bermakna (Ritzer, 2007).

Tindakan yang berarti bagi Schultz dianggap sebagai "realitas paling penting" dalam pengalaman manusia. Realitas tertinggi adalah bahwa dunia kehidupan sehari-hari, seperti yang dihadapi orang, menjadi tempat tindakan dan melaluinya mereka hidup (Geertz: 152). Pemikiran Schutz menempatkan pengalaman individu sebagai realitas dan kekhasan (tipifikasi). Dengan demikian, suatu kelompok sosial tertentu dipahami dan dihadapi sebagai sesuatu yang ditempatkan dalam kategori generalis yang "khas" dan meninggalkan pengalaman hidup sebagai data dasar dari sebuah realitas. Realitas sosial dalam pemikiran Berger dan Luckman diterima sebagai realitas ganda, yaitu realitas dalam dimensi objektif (masyarakat sebagai realitas objektif) dan dimensi subjektif (masyarakat sebagai realitas subjektif). Realitas dalam dimensi objektif dipahami sebagai proses institusional yang menggambarkan hubungan dialektis antara individu dan masyarakat melalui proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi (Berger dan Luckmann, 1990: 87).

Eksternalisasi mengacu pada aktivitas kreatif manusia dalam melihat dunia luar; Objektifikasi mengacu pada proses dimana realitas eksternal menjadi bagian dari kesadaran subjektif individu menjadi senyawa yang mendefinisikan individu sebagai tujuan, dan internalisasi mengacu pada proses dimana realitas eksternal menjadi bagian dari realitas objektif realitas. realitas. realitas. kesadaran. subjektif dari individu. Berangkat dari pemahaman tentang hubungan dialektis antara individu dan masyarakat, ada tiga tahapan dialektika dalam realitas sosial, yaitu masyarakat sebagai produk manusia (society is a human product); masyarakat sebagai realitas objektif (society as a objective reality) dan manusia adalah produk masyarakat (man is a social product). Realitas dalam dimensi subjektif dipahami

sebagai proses internalisasi, yaitu proses difusi pengetahuan kepada individu sebagai anggota masyarakat. Proses internalisasi melibatkan peran orang-orang berpengaruh dalam kehidupan individu dan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi dan representasi realitas untuk secara efektif mempertahankan realitas subjektif.

Selanjutnya, realitas subjektif selalu bergantung pada struktur logis tertentu. Ini berarti bahwa basis sosial dari proses sosial tertentu diperlakukan untuk mempertahankan realitas subjektif (Berger dan Luckmann, 1990). Budaya betang yang merupakan salah satu budaya Dayak dalam kerangka konstruksi sosial yang terkandung dalam realitas objektif, dipahami oleh masyarakat Dayak sebagai media pemersatu (*symbolic universe*) dalam masyarakat yang berbeda agama, suku dan komunitas. Kehidupan sehari-hari mereka diwarnai dengan kegiatan ritual seperti upacara Pantan (upacara penyambutan tamu yang menggambarkan pembukaan masyarakat Dayak), upacara Tiwah Besar, yaitu upacara mengangkat tulang belulang orang yang sudah meninggal ke *lewo tatau* (surga). Maka untuk membuat keinginan dan membayar kebutuhan seseorang, upacara *Memparaih Lewo* (mengusir roh jahat) dan upacara pernikahan adat yang menampilkan acara seni sastra lisan dilakukan sebagai sarana peningkatan kesadaran masyarakat.

Serangkaian kegiatan ritual dipahami sebagai proses untuk memelihara alam semesta simbolik yang dikenal dengan *Concept Machineries of Universe Maintenance (CMUM)*. Selain itu, ada juga konsep terapeutik untuk mencegah konflik, yaitu perjanjian pertemuan damai *Tumbang Anoi* tahun 1894 yang melarang orang Kayau, pengayauan (berselisih dengan pemenggalan kepala), dan kekerasan terhadap kekuatan lemah. Kegiatan ini melibatkan peran tokoh masyarakat yang kreatif dan dinamis untuk menciptakan dunia keseharian yang memperkuat pemahaman tentang budaya betang. Dunia sehari-hari dalam realitas subjektif yang dipahami sebagai proses difusi pengetahuan tidak pernah mengalami kesempurnaan karena individu selalu menghadapi proses pemahaman yang berkesinambungan dalam diri individu tentang kehidupan dunia luar dan sekaligus individu sebagai bagian dari kehidupan dunia realitas.

Pembangunan sebagai mekanisme perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak berpihak pada masyarakat Dayak, bahkan cenderung meminggirkannya. Tatanan sosial yang diwarnai kegiatan ritual jarang dilakukan dan berkuat dengan kesulitan ekonomi yang mereka hadapi saat ini. Situasi ini menyebabkan perlambatan sejarah, karena sarana untuk mempertahankan proses integrasi telah kehilangan maknanya dan tidak dapat lagi dijelaskan oleh perubahan Pertemuan Perdamaian Musim Gugur Anoi. Selanjutnya, hubungan sosial juga telah melalui proses material (reifikasi) yang selalu memperhitungkan kelebihan dan kekurangan. Meningkatnya mobilitas penduduk pendatang ke Kalimantan Tengah ditambah dengan dibukanya trans Kalimantan dan krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda masyarakat Indonesia menambah ketegangan masyarakat Dayak, karena dikhawatirkan kedatangan mereka akan menempatkan mereka pada posisi yang terpinggirkan.

Oleh karena itu, konflik antara Dayak dan Madura menjadi pertikaian antaretnis yang melegitimasi tindakan kekerasan dan pembantaian dengan menggunakan simbol-simbol agama dan budaya, hasil interpretasi dari pengalaman subjektif melihat dunia luar dan pengetahuan. Uraian singkat di atas bertujuan untuk menjelaskan kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak pada masa integrasi dan disintegrasi yang akan mengarah pada masa reintegrasi, yaitu suatu konsep integrasi berdasarkan pengetahuan masyarakat Dayak dalam kerangka pemahaman sosial yang dikonstruksi oleh P. Beger dan Thomas Luckmann. Penjelasan singkat ini merupakan awal dari penjelasan yang lebih detail (deskripsi dicetak tebal) atau suatu makna. Makna Integrasi Berdasarkan Pemikiran Masyarakat Dayak Konflik antar etnis di Kalimantan Tengah telah mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak yang selama ini terpinggirkan oleh proses pembangunan.

Momentum ini menjadi kebangkitan bagi masyarakat Dayak untuk memperjuangkan masa depan yang berpihak pada wilayah pedalaman dan hulu DAS Dayak. Integrasi bagi masyarakat Dayak dipahami sebagai: pertama, integrasi budaya, dimana budaya Dayak

dominan dalam proses integrasi. Kondisi ini dimaksudkan sebagai cara untuk mempromosikan identitas orang Dayak; kedua, perjuangan melawan ketidakadilan dan kesejahteraan masyarakat Dayak, yang merupakan reflektivitas anggota masyarakat untuk meningkatkan perannya sebagai aktor dalam proses pembangunan. Dalam proses peradaban di Kalimantan Tengah, peristiwa bersejarah Temu Damai Tumbang Anoi tahun 1894 di sebuah rumah Betang (rumah panjang), merupakan tonggak sejarah peradaban baru dan munculnya masyarakat Dayak.

Peristiwa ini tidak hanya berhasil menghentikan hahunu (saling membunuh), hakayau (pemenggalan kepala), hajipen (saling bertunangan), serta penerapan hukum adat sebagai alat untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat. publik. Sejak kejadian itu, perselisihan antar anggota masyarakat selalu diselesaikan melalui hukum adat, yang sejalan dengan pengembangan “Budaya Beang” sebagai wahana pemersatu dan pedoman tindakan masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak memahami budaya berang-berang sebagai tindakan kolektif untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, seperti kegiatan pertanian dan pencarian hasil hutan. Dalam hal ini, nilai kepercayaan (trust) menjadi unsur utama dalam interaksi antar warga Dayak, meskipun semangat bersaing cenderung kurang pada masyarakat Dayak. Oleh karena itu, sifat ulet dan agresif orang Madura yang menguasai kota Saampit menjadi ancaman bagi orang Dayak. Ancaman ini berubah menjadi konflik terbuka ketika permasalahan yang berkembang telah mencoreng harga diri yang dianggap identik dengan masuknya roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan warga Dayak, maka dimulailah aksi Mangariyau. Oke. tubuh manusia, sehingga orang yang sedang kesurupan mengalami kesurupan.

Mereka segera mulai berkelahi, disertai dengan suara lapar (menangis perang) dan adu padi (menanam padi). Sebelumnya, perselisihan antara Dayak dan Madura, dari tahun 1982 hingga 2000, tercatat sepuluh kali (Banjarmasin Pos, Februari 2001) tetapi tidak ada tindakan kekerasan masyarakat. Asimilasi juga terjadi secara alami melalui pernikahan yang lama dan banyak orang dewasa yang tidak

mengetahui mengapa ada konflik dengan orang Dayak, seperti masalah yang menimpa mereka. Selain itu, kepatuhan masyarakat Dayak terhadap hukum adat mencegah mereka melakukan kejahatan sewenang-wenang. Ted Gurr (1995) dalam bukunya *Minorities At Risk, A Global View Ethnopolitical Conflict*, menegaskan bahwa kekerasan dilakukan oleh kekuatan politik melalui mobilisasi kelompok (*primordialisme*) yang berada dalam kondisi lemah dan malaise (*Grivances*) akibat masalah keuangan sebagai factor yang menentukan dan kerap dipakai sebagai instrument untuk tekanan politik.

Stresor dan kondisi sosial yang lemah, didukung oleh perasaan kelompok yang kuat, sangat mudah untuk mengekspresikan emosi secara spontan, meskipun tekanan eksternal sangat kecil. Seperti orang kulit hitam di Afrika Selatan dan orang Kurdi di Irak. Kekuatan gerakan politik dan konflik yang sedang berlangsung yang dikendalikan dan diarahkan oleh pemimpin kelompok memberikan pernyataan yang adil tentang identitas kelompok yang sedang mengalami kecemasan dan sulit menyalurkan aspirasinya. Merujuk pada pendapat Ted Gurr, konflik etnis ini telah menjadi alat untuk kepentingan kelompok tertentu yang merugikan dan menyiksa masyarakat yang bertikai. Proses integrasi antar suku yang bertikai mengarah pada integrasi budaya, dimana budaya Betang yang menekankan kesetaraan (*inklusi*) dan hukum adat yang menitikberatkan pada cara kompromi seperti hukuman *daha* (*saling minum darah*) dan *jipen* (*denda*), telah dibuka. . untuk menciptakan peluang perdamaian antara Madura. dan Madura. Meningkatkan. desa Dayak.

Oleh karena itu, budaya khas Madura seperti budaya Corok harus dibangun kembali agar sesuai dengan budaya Betang. Selain itu, Budaya Betang juga harus berkembang agar memiliki kebebasan bagi budaya etnis lain. 17 Hasil Musyawarah Rakyat Kalteng tanggal 4-7 Juni 2001 antara lain setuju menerima dengan syarat perempuan dewasa ingin kembali ke Limamantan Tengah dan mentaati hukum adat yang berlaku di masing-masing kabupaten/kota dan mereka

adalah pusat pemerintahan. sebagai perantara dalam prosesnya. perdamaian.

#### **4. Rangkuman**

Sentiment primordial melahirkan rasa perasan ikut terusik atau terluka ketika salah seorang atau sejumlah anggota dari ikatan primordial tersakiti atau terluka atau penting mendapatkan perhatian serius. Sementara kesetiaan primordial merupakan ungkapan hati untuk menerima dan melaksanakan apapun yang menjadi kesepakatan bersama kelompok, yang ketaatan itu muncul bukan terutama karena topik atau materi yang disepakati, tetapi lebih karena ada ikatan-ikatan yang given diantara sesama anggota yang tak akan pernah bisa dihilangkan.

#### **5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek**

##### **a. Latihan**

- i. Berdasarkan acuan konsep implementasi teori primordialisme politik di atas mahasiswa bisa menggunakannya untuk melihat perilaku politik baik individu atau nama partai politik atau organisasi kemasyarakatan atau negara pada masa kini.
- ii. Mahasiswa akan menemukan meski tidak menerapkan keseluruhan ide dari konsep primordialisme politik entah atas nama agama atau atas nama suku untuk menjadi refleksi bagi kehidupan bernegara secara keseluruhan khususnya dalam praktek politik di Pemilihan Umum baik Legislatif maupun eksekutif.

##### **b. Lembar Kerja Praktik**

##### **c. Evaluasi Pembelajaran**

Tanggapan reflektif dari hasil identifikasi dan analisis lapangan berdasarkan konsep kelompok primordial.

##### **d. Umpan Balik**

## C. PENUTUP

### 1. Rangkuman

Modul ini membahas Teori Primordialisme Politik baik dari primordialisme unsur suku maupun primordialisme unsur agama. Keduanya adalah isu politik identitas yang dalam pengertian politik menjadi sangat berpengaruh besar ketika masuk dalam dunia politik praktis. Pandangan Clifford Geertz dan Maswadi Rauf di atas tersebut membawa kita untuk merefleksikan ulang apakah situasi politik nasional Indonesia dalam penentuan presiden, para kepala daerah dan anggota legislative sejak Pemilu 1999 hingga saat ini masih tetap akan mengusung isu-isu primordialisme politik? Mungkin setiap orang akan mulai berargumentasi bahwa isu-isu primordialisme politik dalam bungkus politik identitas kelak akan hilang dengan sendirinya sesuai usia kematangan masyarakat berdemokrasi. Sangat mungkin kita mengatakan bahwa isu primordialisme dalam politik Indonesia ke depan tidak cukup kuat lagi, atau malah justru peta politik Indonesia ke depan masih akan terus dicampur dengan isu-isu primordial khususnya atas nama agama dan suku.

### 2. Daftar Istilah

Istilah	Arti
Primordialisme	Primordil atau Primordialisme berasal dari kata bahasa Latin primus yang artinya pertama dan ordiri yang artinya tenunan atau ikatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Primordialisme sangat menjunjung tinggi bahkan secara berlebihan ikatan sosial yang berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi dan kebudayaan yang dibawa sejak seorang individu baru dilahirkan. Ikatan seseorang pada kelompok yang pertama dengan segala nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi akan berperan

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
	dalam membentuk sikap primordial. Di satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompoknya. Namun, di sisi lain sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subyektif dalam memandang budaya orang lain. Mereka akan selalu memandang budaya orang lain dari kacamata budayanya.
Politik Primordial	Ikatan politik yang berlebihan yang didasarkan atas nilai-nilai primordial entah etnik, ras, tradisi, kebudayaan dan lain-lain yang membuat politik menjadi sangat tidak sehat jika semakin kuat pengaruh primordialisme dalam politik
Primordialisme suku	Ikatan sosial yang berlebihan didasarkan pada kesesamaan suku yang sama yang mengikat salah satu kelompok tertentu dalam masyarakat
Primordialisme agama	Ikatan sosial dalam suatu masyarakat yang didasarkan pada ikatan kesamaan agama yang dianut. Ikatan sosial ini menjadi semakin kental dan sangat kuat bahkan semakin berlebihan jika primordialisme atau ikatan tersebut atas nama agama semakin kental dan berperan kuat. Perpecahan dan konflik sosial sangat mungkin terjadi di tengah masyarakat yang terlalu mengagungkan berlebihan melihat ikatan primordialisme agamanya karena melihat agama-agama yang lain sebagai buruk bahkan jika sampai berpikir agama lain harus disingkirkan.
Ikatan Primordial	Adalah ikatan yang tercipta dalam anggota masyarakat yang memiliki kesesamaan ikatan

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
	primordial, misalnya jenis suku yang sama, atau penganut agama yang sama, atau jenis asal daerah yang sama, atau jenis fam/marga yang sama. Kesamaan dan ikatan yang serupa itulah yang membuat seseorang menjadi terikat secara kuat atau primordial
<i>Given</i> Primordial	Adalah ikatan primordial yang tidak bisa dipilih sejak sangat awal, sudah diberikan dan diterima begitu saja sebagaimana adanya dan tidak bisa lagi diubah entah. Artinya ikatan primordial ini sudah diterima dan didapat sejak seseorang lahir dan membuatnya tidak bisa menghindari dari fakta dan latar belakang primordial tertentu, misalnya: primordialisme suku atau jenis kelamin atau asal daerah kelahiran.
Sentimen Primordial	Adalah perasaan kuat bahkan berlebihan yang muncul dalam diri seseorang yang merasa terikat dalam lingkup kelompok tertentu menggunakan perasaan dengan suatu komunitas tertentu. Sentiment primordial selalu menyangkut perasaan yang diikat oleh kesamaan jenis ikatan social tertentu. Semakin tinggi sentiment primordial makin rapuh toleransi sosial dalam masyarakat plural, dan sebaliknya semakin rendah sentiment primordial maka semakin tinggi pula solidaritas bersama dalam masyarakat plural atau masyarakat yang majemuk.
Solidaritas primordial	Adalah rasa senasib dari anggota kelompok terhadap nasib kelompok atau salah seorang atau sebahagian anggota kelompoknya yang mungkin mengalami kesulitan atau dianggap butuh untuk dibantu. Semakin tinggi solidaritas atas nama primordialisme akan menciptakan ikatan kesatuan

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
	<p>primordial semakin kental dan mudah tersulut oleh suatu isu sensitif. Dan sebaliknya, semakin rendah solidaritas yang mengatas namakan ikatan primordialisme tertentu akan semakin cair hubungan intra social dalam masyarakat plural dan tidak mudah tersulut oleh suatu isu sensitif</p>
<p>Kesetiaan primordial</p>	<p>Kesetiaan primordial menunjuk pada kerelaan hati dan perasaan seseorang untuk mengorbankan apapun yang mungkin dilakukannya untuk kepentingan ikatan sosialnya atas nama primordial. Kesetiaan primordial tidak perlu dituntut karena hadir secara otomatis tergantung dari seberapa melekat dan mendalam atau sebaliknya seberapa cair dan tipisnya perasaan primordial itu dirasakan dan dihayati seseorang dalam hidupnya.</p>
<p>Politik Praktis primordial</p>	<p>Adalah praktek politik yang sudah didasarkan pada ikatan-ikatan primordial. Isu-isu primordial entah isu atas nama agama tertentu, atau isu atas nama suku tertentu dan lain-lain dijual kepada masyarakat pemilih untuk menarik simpati. Maka hampir bisa dipastikan basis utama pendukung partai politik atau sosok personal tertentu dalam politik partaktis primordial adalah masyarakat yang sama ikatan primordialnya dengan partai atau sosok personal tertentu. Dalam konteks Indonesia, isu primordial semakin lama semakin ditinggalkan oleh pemilih.</p>

### 3. Daftar Referensi

- Geertz, Clifford. *Old Societies and New States. The Quest for Modernity in Asia and Afrika*. New York: The Free Press, 1963.
- Lijphart, Arend. *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-one Countries*. New Haven, 1984.
- Magnis-Suseno SJ, Franz. *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Mas'ood, Mohta dan Colin MacAndrews (eds.), *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000,
- Philips, Anne. *The Politics Of Presence*. Oxford: Clarendon Press, 1995.
- Rauf, Maswadi, Guru Besar Fisip UI. *Konsensus Politik. Sebuah penjajagan teoritis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional, 2000.
- Samosir, Osbin. *Keterwakilan Politik Kristen di Basis Islam yang Kuat*. Jakarta: UKIPress, 2017.
- Syam, N. *Model Analisis Teori Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Gabriel Almond and James S, C. *The Politics of Developing Area*. Princeton: Princeton University Press, 1960.
- Huda, N. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Saragi, M. K. *Ilmu Negara*. Jakarta: Perintis Press, 1985.
- Seran, T. S. *Diskursus Teori-Teori Kritis: Kritik atas Kapitalisme Klasik, Modern dan Kontemporer*. Jakarta: Kompas, 2016.
- Soeharso, Sonny Y. "Politik Primordial vs Penguatan Identitas Nasional" dalam *Kompasiana.com*, 29 April 2019.

# **MODUL 6**

## **MENOLAK PRIMORDIALISME DALAM POLITIK PRAKTIS**

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1. Deskripsi Singkat**

Pada modul ini mahasiswa akan mempelajari bagaimana kuatnya ikatan primordial dalam praktek politik sehingga sering menjadi batu sandungan sangat serius bagi proses bertumbuhnya demokrasi. Ikatan demokrasi yang demikian kuat sering membuat demokrasi tidak bertumbuh dengan baik karena ikatan primordialisme politik yang mengikat sangat erat hanya sekelompok tertentu tanpa melihat kebebasan setiap individu untuk memilih calon atau kandidat yang terbaik.

Efek langsung dari sistem perwakilan jika mengandalkan primordialisme politik berarti melupakan kualitas setiap individu kandidat yang maju untuk bersaing, tetapi dengan tanpa melihat kualitas setiap kelompok yang mengandalkan primordialisme akan memilih dengan mata buta terhadap teman satu suku dan teman sesamanya atau teman se asal atau sederaahnya. Maka primordialisme politik sewajarnya harus ditolak karena tidak sesuai dengan tatanan demokrasi yang sedang digagas, termasuk dalam konteks Indonesia yang sedang berupaya menumbuhkan demokrasi dengan segala perangkat dan aturan demokrasi yang sedang dipraktekkan.

#### **2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

Capaian pembelajaran dari Modul 5 ini adalah:

- a. Mampu memahami dan menjelaskan betapa kuatnya Ikatan Primordial Dalam Perwakilan Politik,
- b. Mampu menjelaskan dan bagaimana sifat kuat ikatan primordial dalam politik telah merusak tatanan demokrasi yang sedang diperjuangkan diseluruh dunia termasuk Indonesia.
- c. Terbentuknya kesadaran sosial akan persoalan politik bangsa yang rusak oleh tatanan politik primordial sehingga harus ditlak dan sewajarnya dihindari.

### **3. Kemampuan Akhir**

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari Modul 6 ini adalah:

- a). Mahasiswa/i mampu memahami dan menjelaskan bagaimana kuatnya ikatan politik primordial jika dipraktekkan dalam politik praktis
- b) Mahasiswa mengerti bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh kehadiran Kelompok Primordialisme.
- c.) Mahasiswa memiliki pemahaman dan tekad bahwa praktek politik semua pihak harus menolak isu primordial dalam Politik Praktis karena dampaknya teramat berbahaya.

### **4. Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)**

### **5. Kegunaan Modul 6**

Modul ini akan membantu mahasiswa memahami dan menjelaskan apa itu politik identitas, dampak yang ditimbulkan oleh kehadiran Kelompok Primordialisme, dan mengerti bahwa praktek politik primordialisme atas nama apapun harus ditolak.

### **6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

Materi pokok: Ikatan primordial dalam perwakilan politik

Sub Materi Pokok:

- 1) Ikatan Primordial Dalam Perwakilan Politik,
- 2) Sifat Alami Kelompok Primordial,
- 3) Menolak Isu Primordial dalam Politik Praktis

## **B. KEGIATAN PEMBELAJARAN**

### **1. Judul Kegiatan Pembelajaran:**

**“MENOLAK IKATAN PRIMORDIALISME DALAM POLITIK PRAKTIS”**

### **2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

- i. Mahasiswa mampu menjelaskan Ikatan Primordial Dalam Perwakilan Politik khususnya terkait dengan Lahirnya Kepentingan Politik Primordial
- ii. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan, dan bagaimana Sifat Alami Kelompok Primordial yang masih menghantui peta politik diseluruh dunia termasuk dalam konteks Indonesia.

### **3. Uraian, Pokok Pikiran, dan Refleksi Kontekstual**

#### **a. Dampak Kelompok Primordialisme**

Terkait dengan loyalitas diantara dua primordialisme sebagaimana sudah disebutkan di atas, terdapat perbedaan masing masing primordialisme baik agama maupun suku. Terkait dengan perbedaan dimaksud, Maswadi menjelaskannya demikian,<sup>31</sup>

“Meskipun Geertz tidak membedakan sifat-sifat alamiah dari ikatan ras/suku dari sifat-sifat alamiah dari ikatan agama, sebenarnya ada perbedaan antara keduanya dalam hal sumber kesetiaan/loyalitas. Yang tercermin dari tulisan Geertz adalah bahwa kedua ikatan primordial tersebut membentuk sentimen dan loyalitas primordial yang menghasilkan solidaritas yang kuat antara sesama anggota kelompok.”

Geertz mengakui bahwa kedua sentiment ikatan primordial atas nama agama dan atas nama suku menciptakan sentiment dan loyalitas primordial. Terkait solidaritas primordial atas dasar suku, Geertz menjelaskannya demikian:<sup>32</sup>

“Solidaritas dalam kelompok primordial atas dasar ras/suku ditimbulkan oleh adanya persamaan nilai-nilai budaya [...] yang membuat mereka mempunyai cara hidup, pola pikir, dan

---

<sup>31</sup> Maswadi, *op.cit.*, hlm. 63.

<sup>32</sup> *Ibid.*

kepentingan yang sama. Semua persamaan ini menghasilkan solidaritas yang amat kuat diantara anggota-anggota yang membuat mereka bersedia membela kelompok mereka dengan pengorbanan apapun.”



Gambar 24: Primordialisme harus ditolak karena membuat pemisahan yang tajam antar kelompok masyarakat

Berbeda dari sumber solidaritas primordial atas nama suku atau etnis, sumber solidaritas primordial atas nama agama ditimbulkan oleh persamaan keimanan kepada wujud Tertinggi, Sang Ilahi, atau Tuhan sesuai dengan kebenaran ajaran ajarannya. Dan ikatan primordial atas nama agama bisa berubah sesuai dengan kematangan kesadaran dari setiap orang atas iman yang diyakininya sampai setiap orang benar-benar yakin bahwa pilihan imannya adalah pilihan iman paling tepat dalam hidupnya. Terhadap solidaritas primordial atas nama agama Geertz menjelaskannya demikian:<sup>33</sup>

“Dalam kelompok primordial atas dasar agama, solidaritas ditimbulkan oleh persamaan keimanan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh agama. Keyakinan akan kebenaran ajaran-ajaran agama menghasilkan solidaritas diantara penganut agama bersangkutan yang menimbulkan kerelaan untuk membela agama tersebut dari ancaman kelompok lain dengan pengorbanan apapun. Di samping itu, persamaan kepentingan dan kegiatan sehari-hari karena persamaan agama menambah kuat solidaritas antara anggota-anggota kelompok primordial

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

agama. Sebagai contoh, keinginan beribadah atau memperingati hari besar agama merupakan unsur penting dalam memperkuat solidaritas diantara pemeluk agama yang sama.”

Nilai primordial yang terkandung dalam agama sedikit berbeda dari ras/suku. Seseorang tidak bisa bebas memilih suku dari keluarga dimana ia dilahirkan. Kelahiran karena darah tetap melekat dalam dirinya sebagai keturunan dari suku tertentu dan tak bisa diubah atau diganti-ganti. Tetapi seorang pemeluk agama tertentu masih bisa berpindah agama atas dasar pilihannya sendiri dari sebuah kelompok primordial agama tertentu ke kelompok primordial agama yang lain. Sementara dalam hal suku atau ras, seseorang tidak bisa berpindah ras atau suku karena statusnya sebagai anggota kelompok ras atau suku tertentu tetap melekat meskipun ia tidak mau mengakuinya.

Kedua ikatan primordial tersebut akan membentuk sentimen dan loyalitas primordial yang menghasilkan solidaritas yang kuat diantara sesama anggota kelompok. Solidaritas primordial dalam kelompok ras/suku ditimbulkan oleh adanya persamaan nilai-nilai budaya yang membuat mereka mempunyai cara hidup, pola pikir, dan kepentingan yang sama. Persamaan-persamaan ini membuat mereka bersedia membela kelompoknya dengan pengorbanan apapun. Dalam kelompok primordial atas dasar agama, solidaritas ditimbulkan oleh persamaan keimanan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh agama. Keyakinan akan ajaran-ajaran agama menghasilkan solidaritas diantara penganut agama bersangkutan yang menimbulkan kerelaaan untuk membela agama tersebut dari ancaman kelompok lain dengan pengorbanan apapun.

Untuk mempertajam pemahaman terkait kedua primordialisme tersebut, Maswadi memberikan catatan bahwa primordialisme agama sangat berbeda dengan primordialisme budaya atau suku. Perbedaan mendasar antara kedua primordialisme tersebut disampaikan Maswadi demikian,<sup>34</sup>

“Juga perlu diberikan catatan di sini bahwa nilai-nilai agama tidaklah sepenuhnya sama dengan nilai-nilai budaya meskipun

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 62-63.

dalam agama ada unsur-unsur budaya. Karena dalam nilai-nilai agama terkandung unsur-unsur ilahiah yakni nilai-nilai yang berasal dari Tuhan yang tidak dihasilkan oleh interaksi sosial. Padahal nilai-nilai budaya adalah produk manusia dalam berinteraksi dengan sejumlah manusia lainnya dalam masyarakat.”

Peranan ikatan primordial sangat kuat sehingga Geertz menyatakan bahwa kesetiaan primordial lebih kuat dari pada kesetiaan politik. Maswadi Rauf menguraikannya secara rinci bahwa kesetiaan politik adalah kesetiaan yang relative tidak kekal. Kesetiaan terhadap partai politik atau pemimpin politik seharusnya didasarkan atas kinerja (*performance*) yang ditunjukkan oleh mereka. Seseorang bisa saja mendukung partai politik atau pemimpin politik mana saja. Bila orang menganggap bahwa partai dan pemimpin politik tidak mampu membela dan memperjuangkan kepentingannya, dia berhak menarik dukung terhadap partai politik atau pemimpin politik tadi lalu mengalihkannya kepada partai politik dan pemimpin politik lainnya. Jadi kesetiaan politik bersifat pragmatis yakni berdasarkan kenyataan yang terjadi yakni apa yang dilakukan oleh partai politik atau pemimpin politik.

Kekhawatiran yang paling besar dalam konteks Indoensia sebagaimana diungkapka oleh Sri Budi Eko Wardani dari Universitas Indonesia adalah kampanye pemilu masih sering dinodai oleh hal-hal yang mengarah pada sikap eksklusif yang mengutamakan kesetaraan etnis dan etnis. dan agama. mengancam dan membahayakan keragaman sebagai suatu bangsa. Masalah seperti ditemukannya konten yang mengandung unsur SARA yang sering terjadi dalam Pilkada atau pemilihan umum sudah mendekati level serius yang dapat mempengaruhi indeks kerawanan pemilu di berbagai daerah dan memicu tren kerawanan dalam tindak kerawanan .

Selain itu, banyak tinjauan pilkada langsung yang perlu dievaluasi, termasuk perspektif pilkada dari perspektif penggunaan dana yang menaungi partisipasi politik yang tumbuh saat ini. Tujuan pilkada langsung ada dua, yang pertama untuk membangun tata kelola politik yang lebih demokratis, yang mengacu pada hubungan antara calon dan pemilih pada periode pra-pemilihan-pasca-pemilu sehingga

terbangun akuntabilitas politik. Dan kedua, perubahan tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang demokratis. Di sisi lain, ada juga isu krusial yang berpengaruh besar terhadap praktik kampanye yang didominasi oleh kepentingan kandidat yang sporadis dan transaksional. Salah satu saran paling mendasar adalah adanya pendidikan politik oleh Penyelenggara Pemilihan dalam memaksimalkan kegiatan kampanye pilkada yang lebih partisipatif.

Dalam hal kelembagaan partai politik dan pemantauan pemilu, aktor pemerintah seringkali dipandang sebagai instrumen penting dalam menentukan perkembangan dan inovasi pemerintah daerah. Untuk itu, menurut dia, dalam proses pemilihan calon kepala daerah diperlukan regulasi pemilu yang lebih ketat dan parpol lebih profesional dan selektif dalam merekrut calon pengurus dan kader partai. Apakah parpol terbuka untuk diseleksi dan melakukan rekrutmen parpol sesuai peran dan fungsi kaderisasi merupakan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pemerhati pemilu dan demokrasi?

Ferry Liando dari Universitas Sam Ratulangi Manado pada suatu kesempatan, misalnya, merekomendasikan beberapa catatan, termasuk revisi UU Parpol. “Revisi materiil UU Parpol dalam hal ini lebih menekankan peran parpol dan penerapan sanksi bagi parpol yang tidak menjalankan fungsi parpol.” Dia menjelaskan. Ia juga menyarankan pembenahan dan penguatan kelembagaan parpol, melaksanakan program akreditasi parpol untuk memastikan kinerjanya dan, jika memungkinkan, UU Parpol dapat diintegrasikan ke dalam UU Pilkada.

Isu elevasi seperti identitas diperkirakan akan terus muncul dalam kontestasi politik elektoral pemilihan kepala daerah (PilKaDa) 2020. Konten yang Anda kecualikan, baik atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), akan terus ditafsirkan oleh sebagian elit politik, untuk mendapatkan dukungan dan menarik perhatian calon pemilih.

Ancaman penggunaan politik identitas tetap menjadi momok yang harus diwaspadai dan digali oleh aktor-aktor yang berwenang, karena politik identitas akan melepaskan polarisasi masyarakat, terutama sebelum, selama, dan bahkan setelah penyelenggaraan pesta

demokrasi. Kehadiran politik primordialisme menawarkan berbagai bentuk tren dalam kehidupan sosial, yang mengarah pada berbagai konteks konflik sosial. Primordialisme menciptakan sikap tertutup dan terisolasi untuk membuka diri dan berempati dengan realitas kehidupan manusia yang sangat kaya akan keanekaragaman.

Hal-hal seperti itu dapat menimbulkan sikap diskriminatif terhadap anggota kelompok tertentu. Rasisme, terhadap ras tertentu, Fanatisme identitas, merasa bahwa kelompoknya benar, melakukan kejahatan terhadap kelompok identitas yang berbeda. Sikap polusi, perasaan enggan bergaul dengan manusia dari status sosial tertentu. Konservatisme adalah mempertahankan nilai-nilai tradisional sehingga kelompok hidup secara rahasia. Etnosentrisme, merasa bahwa budaya kelompoknya lebih unggul dan dibandingkan dengan budaya kelompok lain.

Kehadiran primordialisme ini juga mencoba memecah belah manusia dalam bentuk kumpulan potongan-potongan kecil. Aktor politik yang memaknai sentimen dominan muncul dari kurangnya kompetisi, kurangnya ide, inovasi, dan kreativitas dalam menghadapi lawan politik. Tema primordialisme adalah virus mematikan yang dapat melepaskan konflik horizontal kapan saja. Cara ini sama sekali menolak akal, karena yang diukur adalah keselarasan identitas kelompok. Subyek klaim identitas kelompok jelas berbahaya, karena sangat rentan untuk saling berhadapan. Mereka yang puas dengan masalah identitas ini mudah terpancing emosinya untuk menjaga kepentingan kelompoknya tetap nyaman.

Masyarakat yang akan merayakan Pilkada kemarin harus bercermin dan belajar dari Pilkada Jakarta 2017. Tema politik identitas menunjukkan semakin brutalnya tuntutan kepentingan pihak tertentu. Pendapat yang menyesatkan menyebar seperti virus yang siap menyerang kewarasan. Sisi manusia dicabut untuk mencapai keinginan kelompok. Dinamika yang terjadi di ibu kota dapat dijadikan contoh bahwa politik identitas dapat merusak hubungan persaudaraan dan mengubah keutuhan bangsa Indonesia. Jika bentrokan identitas primordial ini dibiarkan berlanjut, maka demokrasi kita seperti gurun pasir, di mana yang kuat akan menyerang yang lemah.

Dorongan Pilkada harus dimaknai sebagai keinginan seorang pemimpin atau kepala daerah yang amanah, berintegritas, memiliki komitmen tinggi, dipercaya masyarakat, dan mampu melakukan perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pemilukada juga membutuhkan proses pemilu yang adil, merata, dan terbuka, jauh dari praktik konfrontasi, fitnah, intimidasi, atau cara-cara kotor lainnya serta bertentangan dengan moralitas sosial, termasuk isu primordialisme.

Sudah sepantasnya dalam pemilu yang telah ditentukan akan ada perjuangan untuk menjual visi dan misi, ide dan gagasan para calon untuk kemaslahatan masyarakat dalam lima tahun ke depan. Kita harus ingat bahwa demokrasi bukan hanya soal menang dan kalah. Apalagi dalam politik, yang hanya terjadi setiap lima tahun sekali. Terlalu mahal jika kita, sebagai anak bangsa, berjuang dan berjuang di antara kita sendiri, hanya demi identitas kita sendiri dengan mengorbankan identitas orang lain.



Gambar 25: Solidaritas tanpa sekat adalah kunci kemajuan sebuah bangsa

Cara berpolitik yang menggunakan isu-isu primordial menjadi salah satu penyebab utama runtuhnya kohesi sosial. Hal ini karena negara yang pluralistik seperti Indonesia memiliki beberapa perbedaan yang dengan mudah dapat menjadi penyebab jarak dalam hubungan sosial. Retakan dalam kohesi sosial sangat rentan di negara yang pluralistik. Jika isu sentimen dominan seperti SARA menjadi gerakan politik, sangat berbahaya, kata peneliti CSIS J Kristiadi. Menurutnya, cara berpolitik yang baik adalah dengan menggunakan topik yang rasional, yaitu untuk menarik hati masyarakat melalui topik yang akan

menjadi politik. Misalnya, partai harus menjelaskan kepentingannya di bidang pendidikan, pertanian, kelautan, atau pertahanan. Harus dijelaskan agar orang diajari memilih berdasarkan rasionalitas.

Namun, jika pertanyaan tentang identitas primordial alam dan kepercayaan pada alam dimunculkan, perpecahan akan terjadi. Di sisi lain, itu akan menjadi emosional dan berbahaya. Banyak negara hancur karena persaingan rasional menjadi irasional, yang berujung pada penyebaran kebencian. Namun, kami percaya bahwa kesenjangan baru-baru ini dalam kohesi sosial dapat segera diperbaiki. Menurutnya, Indonesia pandai menutupi konflik identitas meski masif. Semoga pilkada dan pilkada mendatang nyata, sehingga tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum lebih tegas dalam menindak pihak-pihak yang memanfaatkan sentimen luas untuk menyebarkan kebencian. Penyebab lain retaknya kohesi sosial dalam masyarakat adalah mereka yang belum dewasa dalam berdemokrasi. Kita terus menghadapi kebutaan demokrasi. Nilai-nilai menghormati perbedaan tidak mendarah daging. Pendidikan politik juga harus terus dilakukan, terutama oleh partai politik itu sendiri. Kebijakan tanpa mahar juga merupakan bagian dari pendidikan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Assidqie memperkirakan politik memecah belah kemungkinan besar akan terjadi lagi pada pemilihan umum 2019, dan ternyata benar. Para pemangku kepentingan dalam pemilu harus mengantisipasi kondisi tersebut dengan cermat. Penyelenggara pemilu mulai dari KPU, Bawaslu, hingga aparat keamanan harus bersikap dan bertindak profesional serta tidak memihak calon tertentu. Jimly menilai suasana Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017 akan terulang pada Pilkada 2019. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan harus mengantisipasi agar tidak terjadi konflik di masyarakat.

#### **b. Menolak Isu Primordial dalam Politik Praktis**

Hakekat kesetiaan primordial berbeda dari kesetiaan politik. Kesetiaan primordial bersifat alami sehingga sangat kuat dan tidak mudah tergoyahkan. Dalam kesetiaan ini, dukungan kepada anggota-anggota kelompok dan nilai-nilai kelompok tidak didasarkan atas pertimbangan rasional (seperti penilaian terhadap kinerja) tetapi pada

pertimbangan emosional dan perasaan. Lalu bagaimana kalau primordialisme memasuki ranah politik? Bukankah fanatisme politik akan terjadi karena ia dipengaruhi oleh kesetiaan primordial?

Menurut Geertz,<sup>35</sup> penggunaan nilai-nilai primordial dalam politik harus dihindari. Geertz menginginkan agar kesetiaan politik dengan kesetiaan primordial tidak dicampurkan karena merupakan dua hal yang berbeda. Terkait dengan bahaya primordialisme dalam politik, Maswadi menjelaskannya demikian,<sup>36</sup>

“Solidaritas dalam kelompok primordial menghasilkan fanatisme yakni kesetiaan yang amat kuat kepada kelompok dan anggota-anggota kelompok serta penghormatan yang tinggi terhadap nilai budaya kelompok. Fanatisme ini memperkuat integrasi kelompok, namun, sebaliknya mempermudah terjadinya konflik dengan orang lain di luar kelompok primordial. Bila konflik dengan kelompok lain terjadi, para anggota kelompok primordial akan membela kelompok dan anggota kelompok dengan sepenuh hati, bahkan tanpa menghiraukan keselamatan diri sendiri. Oleh karena itu pengorbanan, baik harta benda maupun nyawa dapat saja terjadi. Itu dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan.”

Maswadi Rauf melihat ada tiga dampak penting dari penggabungan kesetiaan politik dan kesetiaan primordial. *Pertama*, penggabungan tersebut menghasilkan perubahan dalam kesetiaan politik karena kesetiaan politik menjadi fanatic dan tidak bisa berubah. Pemimpin politik yang didukung oleh kesetiaan politik fanatic seperti itu akan mempersulit pengawasan terhadap pemimpin, yang membuat sang pemimpin cenderung melakukan tindakan-tindakan politik menurut keinginan sendiri. Biasanya pemimpin yang mengandalkan dukungan politik fanatic merasa dirinya selalu benar karena pendukungnya selalu menganggap ia benar. Pemimpin seperti itu selalu menganggap dirinya benar karena para pendukungnya tidak mau

---

<sup>35</sup>Geertz dalam Juwono Sudarsono “Ikatan-ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan di Negara-negara Baru” dalam Juwono (editor) *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik* (Jakarta: Gramedia, 1981), hal 110.

<sup>36</sup> Maswadi *op.cit.*, hlm. 64.

memberikan kritik dan tidak berani menyampaikan masukan dan saran. Jelas bahwa pencampur-adukan kesetiaan politik dan kesetiaan primordial menghasilkan suasana yang tidak kondusif bagi berkembangnya demokrasi.

*Kedua*, pencampur-adukan kesetiaan primordial dan kesetiaan politik menyebabkan pencampur-adukan isu politik dan isu primordial. Kritik terhadap pemerintah karena ketidak-mampuan pemerintah adalah semata-mata isu politik. Tapi di negara-negara baru, isu politik itu sudah diwarnai oleh isu primordial karena beberapa politisi oposisi menyebutkan adanya diskriminasi terhadap suku atau agama tertentu oleh pemerintah, terjadinya ketidak-adilan terhadap daerah-daerah oleh pemerintah, atau pemanfaatan kekuasaan politik oleh suku tertentu untuk kepentingan suku bersangkutan yang menimbulkan penderitaan bagi semua rakyat. Tidak mengherankan bila isu politik dengan segera mendapat reaksi dan dukungan dari kelompok primordial yang merasa dirugikan dengan mengadakan gerakan-gerakan politik menentang pemerintah, bahkan menentang Negara-bangsa.

*Ketiga*, penggabungan tuntutan politik dan tuntutan primordial adalah mudahnya dilakukan manipulasi dukungan kelompok primordial oleh para pemimpin politik untuk kepentingan politik. Dukungan terhadap isu-isu primordial adalah alamiah karena solidaritas dan ikatan primordial itu sendiri bersifat alamiah. Isu politik berwarna oleh isu primordial akan menghasilkan dukungan fanatic dari kelompok primordial bersangkutan yang dapat digunakan oleh pemimpin politik memperkuat dukungan politik terhadap mereka. Salah satu persoalan utama dalam politik adalah bagaimana caranya memperbesar dukungan dari rakyat. Ikatan primordial merupakan alat yang ampuh untuk menarik dukungan dari anggota kelompok primordial. Mereka lebih tertarik pada usaha-usaha untuk membela kepentingan primordial, daripada usaha-usaha mewujudkan kepentingan politik. Namun dalam kenyataannya, kedua hal tersebut sulit dibedakan sehingga dengan mudah dapat dimanfaatkan oleh pemimpin politik.

Pandangan Clifford Geertz dan Maswadi Rauf tersebut membawa kita untuk merefleksikan ulang apakah situasi politik

nasional Indonesia dalam penentuan presiden, para kepala daerah dan anggota legislative sejak Pemilu 1999 hingga saat ini masih tetap akan mengusng-isu-isu primordialisme politik? Mungkin setiap orang akan mulai berargumentasi bahwa isu-isu primordialisme politik dalam bungkus politik identitas kelak akan hilang dengan sednirinya sesuai usia kematangan masyarakat berdemokrasi. Dalam konteks politik Indonesia, isu politik primordial bukanlah hal baru tetapi sudah terjadi sejak jauh sebelum kemerdekaan.

Garis Kuasa Mayoritas atas Minoritas berwajah Tirani Spiritualisme pun mengemuka. Howertz mengasumsikan bahwa mereka yang minoritas akan cenderung dijadikan sebagai alat menguntungkan kelompok mayoritas dan kategori tersebut disusun berdasarkan kepentingan kategorik para elit politik. Kemunculan sejumlah wacana politik ‘Jakarta harus dipimpin oleh Gubernur mayoritas’. Dalam penjelasan Muhtar Haboddin, menyangkut relasi dibalik munculnya politik identitas, bahwa politik identitas sengaja dibangun oleh oleh para elit lokal untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh mereka dalam arena politik lokal, sekaligus wujud dari powersharing kekuasaan yang dibangun berdasarkan latar belakang identitas.

Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan bagi mereka “orang pendatang” harus melepaskan kekuasaan. Konstruksi batas mayoritas dan minoritas ini dibangun secara tajam dalam polarisasi pilkada DKI. Ilmuwan politik Rousseau melakukan pembacaan yang tajam, bahwa terbentuknya korps politik ini, dibangun dengan semangat integrasi yang dibawa ke dalam suatu komunitas politik yang terorganisir dengan menggunakan prosedur demokrasi. Pemanfaatan demokrasi sebagai sarana mempertegas batas segregasi antara mayoritas dan minoritas inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok politik yang menolak Ahok. Hal yang juga disadari oleh Rousseau bahwa akses keadilan yang dijangkau oleh minoritas semakin sulit.

Jika kita lihat pada Pilkada Jakarta, kelas minoritas terpaksa menjadi objek ideologi dari mayoritas. Sebutlah kelompok Front

Pembela Islam (FPI), subjek dominasi yang berdiri paling depan untuk memaksa agar minoritas Kristen Jakarta tunduk pada kehendak mayoritas. Dengan dasar bahwa definisi mayoritas merujuk pada statistik agama. Situasi ini dapat kita pahami sebagai upaya dari kuasa mayoritas untuk menghegemoni struktur, pikiran dan perilaku politik masyarakat. Ruang public bahkan terdeterminasi oleh system simbolik dan doktrin agama yang berusaha membangun propaganda berbasis solidaritas mayoritas.

Sementara kita tentu sadar bahwa Jakarta merupakan kota dengan penduduk yang beragam sehingga model strategi ideologi yang memakai power agama tertentu bisa diterjemahkan sebagai sebuah tindakan pelegitimasi kekerasan atau pemaksaan. Pertengkaran mayoritas dan minoritas ini memang tidak dapat kita lepaskan dari permainan kepentingan politik. Spirit religius yang coba dibungkuskan ke pelbagai dimensi kehidupan politik tak lain sekadar sebuah upaya akumulasi kepentingan jika menggunakan pandangan konstruktivisme.

Kelompok-kelompok yang menjadikan semangat agama sebagai garis demarkasi dalam aktivitas politik sebenarnya telah terjebak pada bentuk tirani spiritualisme dengan cara mengubah spiritualisme sebagai sebuah komoditas di dalam politik. Muaranya masih sama yakni power oriented, bukan mengejar politik berkemanusiaan di dalam negara ini. Elit agama Indonesia di dalam politik, meminjam logika Michel Foucault, sekedar melakukan reproduksi kekuasaan. Sesungguhnya yang terjadi pada pilkada Jakarta adalah agama sedang menjaga eksistensi kekuasannya demi mempertahankan dominasi mayoritas atas minoritas.

Maka melihat Pilkada Jakarta tahun 2017 misalnya sebagaimana diuraikan di atas dengan sangat mendalam dan luas oleh Endang Sari, terlihat kebangkitan politik identitas Islam digunakan dengan melalui upaya pembangunan citra diri sebagai sesama Muslim harus memilih mereka yang seagama dan seiman. Upaya ini dijalankan melalui berbagai konvensi gubernur Muslim untuk Jakarta dan Saya Muslim harus memilih Anies-Sandi pada putaran kedua. Representasi ayat Al-Qur'an, fatwa ulama digunakan sebagai cara mengalang dukungan pemilih untuk memilih gubernur Muslim, hal ini merupakan

upaya membangun solidaritas identitas bersama sebagai sesama Muslim yang harus bersatu.

Dan dalam konteks Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 misalnya, banyak kalangan kemudian menarik kesimpulan, bahwa Indonesia sedang mengalami potensi konflik baru yakni antara negara dan agama, utamanya jika berkaca pada tingginya tensi politik pada pemilihan gubernur Jakarta yang baru saja selesai. Relasi kuasa politik identitas agama dan negara di Indonesia sebenarnya bukanlah tema yang baru. Sejarah telah mencatat ketegangan ini sudah mulai terasa pada empat babakan era kenegaraan kita. Mulai dari masa sebelum kemerdekaan, orde baru dan pasca reformasi yang ditunjukkan hadirnya gerakan yang berbasis Islam dan upaya penegakan politik aliran.

Dalam tulisan Endang Sari dosen Ilmu Politik dari Universitas Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan dalam tulisannya berjudul “Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta” di Jurnal KRITIS, dikatakan bahwa terkait Pilkada DKI Jakarta 2017 ditemukan bahwa hasil Lembaga Survei Indometrik menyampaikan kesimpulan sebesar 60 % pemilih menjadikan faktor agama sebagai alasan dalam memilih gubernur. Tidak jauh berbeda dengan laporan Survei Indometrik, ulasan Majalah Tempo juga menguraikan kesimpulan Survei Polmark Indonesia yang dipimpin oleh Eep Saifulah Fatah yang memberikan penjelasan bahwa sebesar 67,7 % pemilih Jakarta menyetujui memilih pemimpin Muslim. Besarnya peran alasan agama dibalik kemenangan Anies-Sandi, mengingatkan kita pada thesis lama Clifford Geertz (1960) dan Afan Gaffar (1992), memberi ilustrasi adanya keterkaitan antara aliran dan perilaku politik seseorang.

Menariknya, mengapa Jakarta yang dinilai sebagai lambang rasionalitas publik juga tidak berdaya menghadapi gaya berpikir politik aliran tersebut? Berangkat pada pandangan Barth, bahwa identitas dianggap penting sebab sangat terkait dengan citra diri (self image) dan harga diri (self esteem) baik sebagai individu maupun kelompok. Meskipun pada dasarnya seseorang memiliki banyak sisi dalam hal pengungkapan identitasnya, namun menurut Barth identitas ke-etnikan dan agama seseorang selalu menjadi hal utama untuk membangun

kategori pembeda. Slogan “Saya Muslim Saya Memilih AniesSandi” sebagai Citra Diri dan Harga Diri yang ditampilkan.

Di antara sekian banyak identitas seseorang yang akan ditampilkan, sesungguhnya identitas etnik dan agama akan selalu mendapat ruang atau tempat dalam diri seseorang. Konsep identitas situasional menjelaskan bahwa setiap individu akan melakukan proses komunikasi politik, melalui pertukaran simbol, pembentukan makna, dan setting bertujuan dalam keseharian mereka sesuai situasi, kondisi dan tujuan yang ingin dicapai. Demikian pula identitas budaya yang dominan atau budaya pribumi yang biasa mempengaruhi budaya minoritas atau budaya pendatang, serta mayoritas dan minoritas. Selanjutnya kelompok minoritas terpengaruh oleh budaya yang dominan akibat dari tekanan-tekanan lingkungan sendiri.

Kajian Sidik R. Usop terkait dengan primordialisme dan proses integrasi di Kalimantan Tengah setidaknya akan membantu untuk melihat bagaimana primordialisme memasuki wilayah sosial dan politik itu memang harus ditolak. Melihat peristiwa-peristiwa aktual dalam berbangsa dan bernegara kita, seringkali kita berpikir bahwa integrasi nasional dan regional berada dalam tekanan ketika bangsa Indonesia mulai memasuki era demokratisasi. Beberapa kasus yang menonjol di tanah air adalah kasus Aceh, Papua dan Riau yang menuntut pemisahan diri dari NKRI, di samping berbagai konflik etnis dan agama seperti Maluku, Sambas, Poso dan Sampit. Bangsa Indonesia yang dilandasi oleh “keberagaman” yaitu perbedaan agama, suku, bahasa, ras, seolah-olah sedang mencari makna baru dalam hubungan antar bangsa dan negara. Dalam kasus di atas, Clifford Geertz menyebutnya sebagai upaya untuk menonjolkan identitas aprimordialisme dan dorongan kuat untuk membangun inisiatif dan tanggung jawab lokal. Primordialisme dan aktivitas pembangunan merupakan faktor pemicu (mendorong) terjadinya kekerasan.

Primordialisme sebagai faktor bawaan (diberikan) dan hasil pewarisan seperti agama, kekerasan, suku, bahasa dan budaya. Identitas primordial ini akan menjadi sentimen primordial (*Sentiment of Primordialism*), ketika kelompok agama atau suku (suku) diperlakukan tidak adil, sehingga memupuk terciptanya ketegangan yang dapat

berujung pada konflik. Meminjam istilah Dahrendorf, ketegangan yang terjadi di masyarakat akibat distribusi kekuasaan yang tidak merata dan persaingan memperebutkan sumber daya yang langka. Mengenai masalah ini, Lewis Caser melihatnya dari perspektif fungsional, yaitu sebagai sesuatu yang positif, bagaimana konflik dapat berkontribusi pada ketahanan dan adaptasi kelompok, interaksi dan sistem sosial. Oleh karena itu, dalam setiap interaksi selalu ada konflik dan kompromi. Konflik yang bersumber dari unsur primordial seperti agama dan etnisitas sejalan dengan ketidakadilan karena proses pembangunan (instrumen) akan menimbulkan konflik yang akan berujung pada kekerasan yang lebih keras dalam waktu yang lebih lama. Myron Wiener menulis tentang topik ini: Kebijakan Preferensi menyatakan bahwa, pertama, perbedaan antara kelompok etnis sering dilihat sebagai indikasi perbedaan kesempatan.

Bukti bahwa masyarakat telah mengalokasikan saluran untuk pendidikan dan pekerjaan secara tidak setara dan bahwa kelompok dominan menggunakan posisi mereka untuk membatasi kelompok lain meningkatkan mobilitas mereka. Kedua, jika perbedaan etnis menyebabkan konflik, akibatnya seringkali lebih banyak kematian, penggusuran paksa, genosida, perang saudara dan kerusakan yang berbenturan dengan kelompok etnis. Dalam dunia internasional abad 21, Samuel P. Huntington (2000: 9) dalam bukunya *The Clash of Civilizations and the Future of World Politics*, menegaskan bahwa persaingan antar negara adidaya digantikan oleh benturan antar peradaban. Mengutip pendapat Henry Kissinger, Huntington menjelaskan bahwa ada enam kekuatan besar yang memiliki peradaban berbeda, yaitu Amerika Serikat, Eropa, China, Jepang, dan negara-negara Islam yang memiliki wilayah strategis, populasi besar, dan sumber daya minyak yang sangat berpengaruh. pada ekonomi dunia.

Konflik yang berbahaya di masa depan disebabkan oleh faktor budaya, yaitu persaingan antar peradaban yang dapat menyebar ke negara lain. Dalam konflik Yugoslavia, Rusia memberikan dukungan diplomatik kepada Serbia, sedangkan dalam konflik Bosnia, Arab Saudi, Iran, Turki, dan Libya memberikan bantuan keuangan dan senjata. Kasus-kasus kekerasan di berbagai wilayah Indonesia

Beberapa kajian di bawah ini menunjukkan bahwa unsur-unsur primordial dapat menjadi sumber integrasi, yaitu fungsional bagi tatanan sosial dan sumber konflik disfungsional akibat perbedaan yang dapat menimbulkan konflik dan manifestasi laten. William Liddle (1970:206) dalam penelitiannya tentang integrasi nasional yang memilih kasus Simalungun dan Pemantang Siantar di Sumatera Utara, dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa hambatan integrasi di Indonesia adalah perpecahan horizontal yang berakar pada etnisitas, ras, agama, dan geografi.

Kedua, pemekaran vertikal merupakan masalah yang disebabkan oleh semakin melebarnya kesenjangan antara elit dan massa, antara lain terkait dengan tingkat pendidikan di perkotaan, yang membedakan elit dengan massa dengan pandangan tradisional dan pedesaan. Hasil penyelidikannya menunjukkan bahwa kelompok utama berafiliasi dengan partai politik. Partai-partai yang masuk elemen pusat banyak mendapat suara yaitu PNI yang mendapat suara etnis Jawa, Batak Tapanuli dan Batak Simalungun, Mayumi dengan suara dari belakang pikirannya, Liddle melihat dimensi vertikal sebagai integrasi politik, yaitu penciptaan. Loyalitas etnis kepada elit nasional terakumulasi melalui partisipasi mereka dalam sistem demokrasi liberal yang berlaku saat itu. Sedangkan dimensi horizontal dikenal sebagai perpaduan antara loyalitas etnis terhadap partai politik dan organisasi keagamaan yang memiliki nafas yang sama.

Unsur-unsur utama tersebut juga dapat digunakan sebagai sarana mobilisasi masyarakat yang berpihak pada kepentingan elit tertentu. Penelitian Candra Kirana (1988: 18-20) tentang aktivitas politik etnis di Sumatera Utara dilatarbelakangi oleh pemikiran Geertz bahwa sesuatu yang primordial adalah realitas malang yang terjadi secara alami dan bukan sebagai proses produksi sejarah. Selain itu, juga diklaim bahwa logika politik primordial dianggap tidak rasional, terbentuk secara alami, dan mengandung struktur kewajiban dan hak yang memaksa. Cara seorang individu mengukur posisinya vis-a-vis individu lain dalam struktur sosial ini adalah proses yang tidak rasional.

Dengan menggunakan metode sejarah, Chandra Kirana menyimpulkan bahwa gerakan pembentukan Negara Sumatera Timur

(NST) pada tahun 1948 adalah gerakan yang dipimpin oleh para bangsawan daerah yang mencari dukungan politik, terutama dari masyarakat adat yang disebut “Orang Asli”. Salah satu faktor yang memicu munculnya gerakan ini adalah peran migran yang lebih luas, terutama dalam penguasaan tanah. Berdasarkan hasil penyelidikannya, Chandra Kirana mengkritik Geertz. Ia berpendapat bahwa secara historis dan struktural, politik berbasis etnis dapat dilihat sebagai rasional, yaitu motif pembentukan dukungan massa berdasarkan kepentingan yang diperhitungkan dan pertimbangan rasional.



Gambar 26: Betapa indahny kebersamaan antar suku, antar agama, antar ras dan antar golongan membangun Indonesia

Kajian Hefner (1999: 369) tentang masyarakat Tengger dengan topik: Identitas sosial dan politik: kekerasan 1965-1966 dan dampak negatifnya menunjukkan bahwa organisasi politik Indonesia didasarkan pada loyalitas terhadap agama dan komunitas yang ada, yaitu Islam tradisional dan Kejawen. Perbedaan penduduk garis Islam dan Kejawen dalam setting yang lebih umum dikenal dengan politik identitas. Islam tradisional adalah NU, yang menempati bagian bawah Pegunungan Tengger, dan komunitas sekte Kejawen, yang menempati bagian atas Pegunungan Tengger. Pembantaian orang-orang dari Kejawen yang bersekutu dengan PKI dilakukan oleh warga PBB yang dimobilisasi oleh militer dan elit lokal yang ditunjuk oleh program Landreform PKI.

### **c. Primordialisme dalam Pemilu Era Reformasi Indonesia**

Politik primordialisme dalam konteks Indonesia tentu menjadi pengalaman yang tidak murah. Sejarahnya bisa ditelusuri dalam perjalanan politik bangsa ini bahkan sejak era sebelum kemerdekaan. Bahkan dalam era modern dewasa ini pun, maraknya isu-isu primordialisme dalam praktek politik nasional dalam pemilihan presiden termasuk juga dalam politik politik berskala lokal dalam pemilihan kepala daerah telah menjadi kecemasan dari sejumlah pihak. Pengalaman pahit akan primordialisme politik sejak Pemilihan Umum Nasional 2014 dalam Pemilihan Presiden dan terulang lagi dalam pemilihan yang sama lima tahun berikutnya yakni pada pemilihan Presiden 2019 adalah pengalaman sangat berharga bagi pertumbuhan demokrasi di negeri ini.

Jika kita misalnya merujuk pada pendapat Agus Suntoro seorang staf senior Komisi Nasional Hak-hak Asasi manusia (Komnas HAM) yang giat menekuni isu HAM dengan tema pemilu, terorisme, konflik sumber daya alam dan hukum, kita setidaknya bisa melihat bagaimana kecemasan itu muncul. Menurut Agus Suntoro, mestinya momentum penyelenggaraan Pilkada 2018 misalnya mestinya merupakan tahap ketiga yang diadakan serentak di Indonesia, dimulai pada tahun 2015 dan 2017. Kali ini, kontes mencakup wilayah yang sangat luas dan melibatkan populasi pemilih yang besar. Pilkada dilaksanakan di 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota. Menurut data Daftar Penduduk Kemungkinan Pemilih Tetap (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU), saat ini terdapat 160.756.143 warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai calon pemilih, dan hasil sinkronisasi pemilih tetap. pemilu terakhir adalah 163.346.802 pemilih.

KPU mencatat hingga 569 calon kepala daerah telah mendaftar, 128 orang maju melalui jalur perseorangan dan 441 dengan dukungan parpol. Khusus pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, ada 116 orang yang mendaftar dan bertarung di 17 provinsi. Melalui perangkat daerah, KPU saat ini sedang melakukan tahap pendataan pemilih, segera menentukan pasangan calon kepala daerah yang akan mengikuti

kompetisi dan memasuki masa kampanye panjang mulai 12 Februari hingga 23 Juni 2018.

Jika menelaah pilkada Jakarta, sentimen atas citra diri dan harga diri kelompok inilah yang terbangun mengapa politik identitas agama menjadi begitu berpengaruh pada arena pemilihan gubernur Jakarta. Sentimen yang terbangun dari dua hal. Pertama, citra diri (*self image*) yang merasa terhina oleh ucapan Ahok dikepulauan seribu yang berujung aksi 411 dan 212. Sentimen citra diri sebagai muslim yang terluka inilah yang dimunculkan dan dijadikan sebagai sarana untuk menyerang Ahok. Apalagi, kasus penistaan agama tersebut mendapatkan legitimasi dari lembaga ke-agamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Demikian pula pada akhirnya, ketika kasus Ahok dibawa ke Lembaga peradilan yang mendakwa Ahok sebagai tersangka penista agama. Dua kondisi inilah yang kemudian membentuk citra diri dan identitas sebagai sesama muslim menguat. Perasaan solidaritas sebagai sesama muslim dibangun dan membangun dalam bingkai propaganda identitas yang sama. Sesuatu yang menyulut kesadaran kolektif untuk memperjuangkan korps kebersamaan sebagai sesama muslim yang harus bersatu menjadi menguat. Kedua, harga diri (*self esteem*) yang membentuk solidaritas kelompok akibat tajamnya polarisasi pilkada Jakarta dalam dua pilihan muslim atau non muslim. Dua kondisi ini menjadi alasan utama mengapa slogan ‘Saya Muslim, Saya Memilih Anies-Sandi’ menjadi mengemuka. Sesuatu yang berhasil dibangun oleh kelompok penekan yang menolak Ahok sejak awal. Dengan menggunakan pandangan konstruktivis yang dikemukakan oleh Fredric Barth kita bisa melihat bahwa hal ini merupakan bagian dari konstruksi elit politik yang digunakan sebagai senjata untuk melawan mereka yang berbeda.

Harga diri sebagai muslim yang terluka telah dibangkitkan apalagi dengan posisi Basuki Tjahaya Purnama yang terjebak oleh kasus penistaan agama yang mendorong kebangkitan harga diri muslim menjadi meluas dan melintasi batas daerah dan wilayah. Solidaritas atas nama kebersamaan sebagai sesama muslim yang terlecehkan ini berhasil dikapitalisasi dalam jumlah dukungan aksi demonstrasi,

sesuatu yang menjadi alasan utama yang menjadikan isue agama semakin menguat.

Selain itu, perasaan harga diri sebagai muslim yang terhina oleh kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok menjadi senjata politik yang terus direplikasi untuk menghadapi Ahok yang dipandang sebagai penista agama. Kondisi ini dipertahankan untuk membangun psikologis sebagai mayoritas yang terluka sekaligus sebagai jalan membangun batas kuasa kepada mereka yang dipandang sebagai minoritas untuk mempertahankan demarkasi kekuasaan dan kepentingan elit politik. Fenomena kebangkitan politik identitas agama di pemilihan gubernur Jakarta berlangsung dengan dua tahap: Penonjolan citra diri sebagai sesama muslim yang dibangun lewat solidaritas “Saya Muslim Saya Memilih Anies-Sandi”. Menampilkan harga diri sebagai muslim yang terzalimi oleh penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok/Basuki Tjahya purnama dengan dalih pembenaran fatwa MUI dan dakwaan hukum yang diberikan oleh aparat kepolisian.

Penggunaan politik identitas agama dalam arena demokrasi sesungguhnya harus ditolak dan dihindari. Jika politik identitas tetap muncul, maka demokrasi baik pemilu presiden atau pilkada langsung hanya bisa dihadapi dengan membangun semangat asimilasi identitas yang lebih besar yakni pembangunan sprit identitas yang lebih luas, seperti semangat kebinekaan dan persatuan sebagai negara bangsa. Setiap calon harus menghindari persinggungan identitas dalam arena pilkada sebagai jalan menghindari kebangkitan dan sentimen identitas yang terjadi di Indonesia.

Pembangunan nilai-nilai kebhinnekaan sebagai pilar bangsa harus terus menerus dilakukan dalam upaya pembangunan demokrasi yang esensial di Indonesia dan menghindari terjadinya perpecahan sesama anak bangsa dan menghindari hadirnya kekuasaan politik identitas.

Perpaduan jumlah pemilih yang besar, luasnya daerah pemilihan, dan beragamnya calon kepala daerah, selain memiliki masa kampanye yang cukup panjang, sekitar lima bulan, memungkinkan kita memanfaatkan atau menarik primordialisme. dalam kontes untuk menonton. Azyumardi Azra (Kompas, 2016) menjelaskan bahwa

pengertian primordialisme adalah perasaan esensial dari kebanggaan, dedikasi dan emosi yang kuat dalam suku dan ras, agama, bahasa, sejarah dan negara asal itu sendiri. Karena bersifat intrinsik, primordialisme hampir selalu mewarnai cara pandang dan perilaku individu maupun kelompok masyarakat.

Karakteristik pilkada sangat mempengaruhi preferensi pemilih, berbagai praktik selama ini menunjukkan godaan kampanye/publikasi dengan bungkus untuk menumbuhkan perasaan terpinggirkan. Khusus untuk topik ini, umumnya menjadi mantra atau semboyan yang mewakili anak-anak setempat, suku asli, pemeluk agama tertentu, dan identitas lain yang berusaha membedakan mereka dari pasangan calon lainnya. Situasi umum lainnya yang patut mendapat perhatian semua pihak adalah praktik ujaran kebencian yang berujung pada diskriminasi suku, agama, ras, dan antargolongan, yang juga merupakan bagian dari politik primordialisme. Penggunaan media sosial dan dunia maya merupakan sarana yang paling masif dari praktik ini dan membutuhkan bukti yang akurat, baik yang melibatkan pasangan calon/tim kampanye maupun terstruktur melalui pengikut yang fanatik.

Amartya Sen (*Violence and Identity*, 2016) mengemukakan bahwa politik identitas cenderung mengarah pada agresivitas dan kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendekatan ini biasa dikenal dengan pemikiran soliter, yang menganggap bahwa manusia hanya memiliki satu identitas. Sayangnya, jika pemahaman ini terus direproduksi secara masif dan dikaitkan dengan tantangan pemilihan kepala daerah, apresiasi terhadap nilai keragaman cenderung berkurang dan potensi konflik sulit dikelola.

Konsep formal demokrasi menyoroti dua aspek utama, yaitu kesetaraan politik warga negara dan gagasan pemerintahan yang baik (*Diskursus Politik Lokal*, 2015). Kesetaraan politik tidak hanya terbatas pada kesetaraan kesempatan dan ruang untuk mengekspresikan pilihan politik, tetapi juga perlindungan politik sebagai mekanisme utama yang dikembangkan dan harus selalu diperjuangkan, serta keyakinan bahwa kelompok minoritas harus dilindungi dalam segala hal. ekspresi politik.

Untuk memastikan demokrasi berfungsi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mencerminkan aspek kesetaraan politik, ada

beberapa strategi yang harus dilakukan untuk mengurangi override politik. Pertama, aspek regulasi. Sebagai negara beradab, demokrasi yang dikembangkan Indonesia harus sesuai dengan Standar Hak Asasi Manusia (HAM) yang memberikan tanggung jawab kepada Negara untuk menjamin perlindungan hak memilih dan dipilih tanpa diskriminasi.

Apapun alasannya, baik itu ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya, diskriminasi tidak dibenarkan. Penguatan norma pemilu, baik melalui undang-undang maupun regulasi teknis oleh penyelenggara, diharapkan akan membawa kesegaran dan dapat mengurangi tindakan diskriminasi, termasuk perumusan sanksi yang paling tepat.

Kedua, penerapan hukum. Tidak kalah pentingnya adalah penerapan hukum yang objektif dan tidak memihak dengan jebakan KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjuangan melawan politik primordialisme yang diwujudkan dalam aksi aktif menyebarkan paham diskriminasi, tidak hanya menjadi domain pengawas pemilu, tetapi juga membutuhkan sinergi dan peran lembaga negara lain yang memiliki mandat untuk mengawasi.

Ketiga, kampanye cerdas. Tanggung jawab pendidikan politik ada pada pemerintah dan partai politik, termasuk pasangan calon yang akan mengikuti kompetisi. Program kerja dan brainstorming harus disampaikan oleh pasangan calon kepala daerah atau tim suksesnya. Visi dan misi yang disampaikan merupakan komitmen, sekaligus parameter arah pembangunan yang akan dilakukan jika terpilih. Warga terlibat aktif dalam menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan, sekaligus melakukan pemantauan.

Keempat, merayakan keragaman. Keberagaman Indonesia harus didorong untuk menjadi episentrum penguatan ikatan dan persatuan sebagai bangsa, bukan sebagai “bahan bakar” yang terus diproduksi untuk menciptakan politik primordial. Keberagaman perlu didorong untuk hadir dan menjadi kenyataan dalam praktik sehari-hari,

tidak hanya sebagai momentum pemilihan kepala daerah, tetapi juga sebagai semangat persatuan dan partisipasi dalam peran. Manifesto tersebut dihadirkan sebagai implementasi dari prinsip-prinsip kesetaraan, saling ketergantungan, universalitas dan non-diskriminasi. Dengan pendekatan di atas, diharapkan Pilkada Serentak tahap ketiga 2018 dan Pilkada yang lain serta semua jenis pemilihan apapun akan berlalu dengan bahagia dan mencerminkan perayaan kebhinekaan, tanpa merendahkan martabat manusia, hanya untuk memegang jabatan publik.

#### **4. Rangkuman**

Ciri mendasar dari primordialisme entah primordialisme suku, primordialisme agama, maupun primordialisme apapun selalu menghasilkan ikatan sangat kuat diantara kelompok anggotanya. Dengan primordialisme yang kuat maka akan terpatir di benak seluruh anggota kelompoknya akan ikatan kuat dan kesesamaan nasib diantara mereka sebagai kelompok. Khususnya jika kelompok itu merasa terusik atau tersingkir atau tertinggal atau telupakan dibandingkan dari kelompok lain. Karena itu dampak politik praktis penggunaan primordialisme politik harus ditolak karena kecenderungannya untuk menolak prinsip-prinsip demokrasi akan kesesamaan martabat manusia, dan membutuhkan diri pada kepemimpinan yang diharapkan akan sulit terpenuhi.

#### **5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek**

##### **a. Latihan**

- 1.) Berdasarkan acuan konsep implementasi teori primordialisme politik di atas mahasiswa bisa menggunakannya untuk melihat perilakupolitik baik individu atau nama partai politik atau organisasi kemasyarakatan atau negara pada masa kini.
- 2.) Mahasiswa akan menemukan meski tidak menerapkan keseluruhan ide dari konsep primordialisme politik entah atas nama agama atau atas nama suku untuk menjadi refleksi bagi kehidupan bernegara secara keseluruhan khususnya dalam praktek politik di Pemilihan Umum baik Legislatif maupun Eksekutif.

**b. Lembar Kerja Praktik**

**c. Evaluasi Pembelajaran**

Tanggapan reflektif dari hasil identifikasi dan analisis lapangan berdasarkan konsep primordialisme politik.

**d. Umpan Balik**

**C. PENUTUP**

**1. Rangkuman**

Modul ini membahas dampak dari ikatan sangat kuat primordialisme politik baik dari primordialisme unsur suku maupun primordialisme unsur agama. Kesadaran akan identitasnya yang primordial akan semakin kuat jika berhadapan atau ada musuh politik bersama yang harus dihadapi dari luar. Ikatan primordial telah melahirkan kekuatan lekat internal kelompok, tak peduli kelompok itu berjumlah sedikit atau berjumlah banyak. Ini terjadi sepanjang kelompok itu merasa ada isu politik identitas yang harus dihadapi, entah karena kesesamaan suku atau kesesamaan agama, kesesamaan asal daerah atau isu primordial apapun.

Karena itu, jika ikatan primordial yang sangat kuat itu memasuki dan menjadi dominasi teramat kuat dalam wilayah politik praktis maka yang muncul adalah rusaknya tatanan demokrasi karena isu-isu demokrasi dikalahkan dan tertinggal oleh isu primordial. Kesulitan lain yang pasti muncul adalah sifat hati, pikiran dan batin yang buta atau tidak mampu melihat secara jernih lagi kualitas dan kemampuan calon atau kandidat lain yang ditawarkan di luar kelompoknya. Akibatnya dengan membutakan diri dalam primordialisme politik akan melahirkan kecenderungan terpilihnya kandidat yang jauh dari kualitas mumpuni seperti dibayangkan karena tidak membuka peluang terhadap perbandingan dengan kualitas kandidat yang ditawarkan di luar kelompoknya.

## 2. Daftar Istilah

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
Politik Sentimen	Sentimen bisa diartikan sebagai pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebih-lebihan terhadap sesuatu (bertentangan dengan pertimbangan pikiran) sehingga keputusan yang dihasilkan akan tidak adil jika disertai rasa sentimen pribadi. Maka politik sentiment adalah politik yang pertimbangannya didasarkan pada perasaan pribadi, antara suka dengan tidak suka, senang dengan tidak senang, politik yang tidak mendasarkan akal budi sebagai basis penentuan politiknya.
Loyalitas primordial	Loyalitas itu adalah ketaan seseorang terhadap sesuatu atau seseorang karena kesamaan pandangan dan ideologi atau karena ada hubungan atasan dan bawahan yang sama sama diuntungkan. Maka loyalitas primordial artinya ketaatan seseorang yang dilandaskan pada ikatan ikatan primordial, seseorang menjadi taat mungkin karena sama-sama dari agama yang sama, atau dari suku yang sama atau dari ras yang sama atau dari golongan kekayaan yang sama atau dari daerah asal yang sama.
Primordialisme ras	Ras diartikan sebagai golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik; rumpun bangsa sehingga ras merupakan kategori individu yang secara turun temurun mempunyai ciri-ciri fisik dan biologis tertentu yang sama. Maka bisa dikatakan ras merupakan suatu kelompok/golongan yang digolongkan berdasarkan beberapa faktor, di antaranya seperti faktor ciri-ciri fisik, rumpun bangsa, dan biologis. Mak primordialism ras merupakan ikatan orang per orang yang didasarkan pada kesamaan ras yang sama yang membedakannya dari ras yang berbeda.

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
Primordialisme suku	Kelompok etnik, etnis atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis. Maka primordialisme suku adalah iaktan primordial yang dicirikan oleh kesamaan satu golongan manusia berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama
Politik Pragmatis	Pragatisme beranjak kepada realitas sosial yang ada, kepentingan dan kondisi yang dialami oleh masyarakat, berbeda dengan politik yang berpijak kepada kebenaran, kepatutan, kejujuran, dan nilai - nilai etika politik yang lain. Oleh karena itu, maka pragmatisme dapat menimbulkan politik saudagar yang memberlakukan hukum pasar dalam politik yang dapat dicapai cepat. Dalam aliran pragmatis, Pragmatisme dipandang sebagai tradisi filosofis yang menganggap kata-kata dan pemikiran sebagai alat dan instrumen untuk prediksi, pemecahan masalah, dan tindakan, dan menolak gagasan bahwa fungsi pemikiran adalah untuk menggambarkan, mewakili, atau mencerminkan realitas.
Emosional politik	Adalah pertimbangan yang dilakukan berdasarkan rasa perasaan atau sensitifitas perasaan seseorang dalam menentukan suatu sikap menghadapi suatu hal entah masalah atau seseorang. Maka emosional politik adalah pertimbangan yang dipakai dalam menentukan pilihan politik atau dukungan politik didasarkan pada rasa perasaan semata, buka berdasarkan rasionalitas yang dapat diterima oleh akal budi atau yang bersifat factual.

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
Fanatisme politik	<p>Fanatisme adalah paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Filsuf George Santayana mendefinisikan fanatisme sebagai, "melipatgandakan usaha Anda ketika Anda lupa tujuan Anda"; dan menurut Winston Churchill, "Seseorang fanatisme tidak akan bisa mengubah pola pikir dan tidak akan mengubah haluannya". Bisa dikatakan seseorang yang fanatik memiliki standar yang ketat dalam pola pikirnya dan cenderung tidak mau mendengarkan opini maupun ide yang dianggapnya bertentangan. Maka jika fanatisme masuk dalam wilayah politik berarti ketertarikan berlebihan terhadap salah satu pihak politik tanpa mampu melihat bahwa di partai atau figure politik lain ada sesuatu yang lebih menjanjikan gagasannya atau program partainya.</p>

### 3. Daftar Referensi

- Beitz, C.R. *Political Equality: An Essay in Democratic Theory*. Princeton, 1989.
- Geertz, Clifford. *Old Societies and New States. The Quest for Modernity in Asia and Afrika*. New York: The Free Press, 1963.
- Goodman, D. J. *Teori Sosiologi Modren*. Jakarta: Kencana, 2004.
- J.T. Ishiyama, & M. *21st Political Science: A Reference Handbook*. Los Angels, London, New Delhi: Sage Publications, 2011.
- Jurnal KRITIS, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar* Volume 2 No. 2 Desember 2016.
- Kukathas, G. F. *Handbook Teori Politik, terjemahan Derta Sri Widowatie*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016.
- Magnis-Suseno SJ, Franz. “Cita-Cita Kenegaraan Bung Hatta”, makalah dalam *seminar nasional tentang Membedah Pemikiran Perjuangan Bung Hatta*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 14 Agustus 2002.
- Pitkin, H. *The Concept of Representation*. Berkeley. [tanpa penerbit], 1967.
- Rauf, M. Pendekatan-pendekatan Dalam Ilmu Politik Sebuah Studi Penjajagan. *Jurnal Ilmu Budaya*, 7, 524-535, April 1991.
- Rauf, Maswadi, Guru Besar Fisip UI. *Konsensus Politik. Sebuah penjajagan teoritis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional, 2000.
- Samosir, Osbin. *Keterwakilan Politik Kristen di Basis Islam yang Kuat*. Jakarta: UKIPress, 2017.
- Sigit, S. *Pengantar Metodologi Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Suntoro, Agus. “Merayakan Keragaman, Melawan Politik Primordialisme” (kolom) dalam – *detikNews* Selasa, 20 Feb 2018
- Usop, Sidik R. *Primordialisme Dan Proses Integrasi Di Kalimantan Tengah*. Disajikan untuk forum Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-2 di Padang tgl 18 – 21 Juli 2001

# **MODUL 7**

## **POLITIK ALIRAN DAN PRINSIP NASIONALISME**

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1. Deskripsi Singkat**

Pada modul ini mahasiswa akan mempelajari tentang politik aliran yang sering menjadi momok politik praktis di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Uraian tentang primordialisme politik yang dipikirkan oleh Clifford Geertz dan Maswadi Rauf membawa kita pada pemahaman akan menguatnya aliran-aliran politik yang sesungguhnya telah terjadi di Indonesia. Dalam bahasa sederhana Affan Gaffar yang telah melakukan penelitian tentang para pemilih di Pulau Jawa di masa pemerintahan Orde Baru telah membuktikan bahwa politik aliran di Indonesia sangat berpengaruh untuk penentuan keterwakilan politik. Penelitian Affan Gaffar di Pulau Jawa di masa Orde Baru akan menjadi pokok bahasan berikut yakni bagaimana politik aliran dan ketaatan pada figure pemimpin telah menjadi sangat menentukan dalam paham keterwakilan politik di Indonesia.

#### **2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

Capaian pembelajaran dari Modul 7 ini adalah:

- a. Mampu menguraikan berbagai macam konsep sistem Perwakilan politik dalam bidang Politik Aliran, Figur Pemimpin dan Nasionalisme,
- b. Mampu memahami Prinsip Determinan Sosial, Agama, dan Budaya sebagai aspek yang masih berpengaruh dalam politik perwakilan.
- c. Mampu menguasai pentingnya prinsip nasionalisme dalam menjalankan praktek politik aliran.
- d. Terbentuknya kesadaran sosial akan persoalan politik bangsa berdasarkan pemahaman akan Teori Sistem Perwakilan Politik

### **3. Kemampuan Akhir**

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari Modul 7 ini adalah:

- a. Mahasiswa memiliki kualitas analisis, sistematis, dan substansi analisis yang didukung oleh data objektif
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan implementasi Politik Aliran, Figur Pemimpin dan Nasionalisme, dan Prinsip Determinan Sosial, Agama, dan Budaya
- c. Mahasiswa memahami arti penting fondasi nasionalisme dalam menghadapi politik aliran

### **4. Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)**

### **5. Kegunaan Modul 7**

Modul ini akan menolong dan membantu untuk mampu menguraikan berbagai macam konsep sistem Perwakilan politik dalam bidang Politik Aliran, Figur Pemimpin Dan Nasionalisme. Juga modul ini membantu memahami Prinsip Determinan Sosial, Agama, dan Budaya sebagai aspek yang masih berpengaruh dalam politik perwakilan. Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan..

### **6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

- a. Politik Aliran
- b. Figur Pemimpin dan Nasionalisme
- c. Prinsip Determinan Sosial, Agama, dan Budaya
- d. Fondasi Nasionalisme

## **B. KEGIATAN PEMBELAJARAN**

### **B.1. KEGIATAN PEMBELAJARAN-1**

#### **1. Judul Kegiatan Pembelajaran:**

**“POLITIK ALIRAN”**

#### **2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

Mahasiswa/i diharapkan mampu menguraikan berbagai macam konsep sistem Perwakilan politik dalam dua bidang, yakni: Politik Aliran, Figur Pemimpin Dan Nasionalisme, dan Prinsip Determinan Sosial, Agama, dan Budaya sebagai aspek yang masih berpengaruh dalam politik perwakilan.

#### **3. Uraian, Pemikiran, Penjelasan, dan Fakta Politik**

##### **a. Prinsip Determinan Sosial, Agama, Dan Budaya**

Pokok pikiran yang disampaikan oleh Alan Ware tentang pentingnya kehadiran figur atau sosok politik yang mampu menarik simpatik publik yang akan menjadi andalan setiap partai untuk meraup suara pemilih, ternyata dalam peta politik Indonesia di masa lalu kehadiran figure pemimpin karismatik menjadi penentu keterpilihan seseorang. Tentu dari kacamata Anne Philips yang melihat bahwa kehadiran politik secara riil di Lembaga-lembaga negara dari pihak-pihak yang merasa diri terpinggirkan atau terkucil selama ini sebagai bentuk politics of presence tanpa perlu diwakilkan ke pihak-pihak yang tidak berasal dari rumpun yang sama semakin menguatkan bahwa politik aliran dalam koteks Indonesia pun tidak berbeda jauh dari maksud Anne Philips akan pentingnya politics of presence. Kekuatan-kekuatan politik dalam setiap aliran akan sangat menentukan seberapa kuat dan seberapa berdampak kehadiran aliran-aliran politik mampu menghasilkan figure atau keterwakilan politiknya.

Bila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Affan Gaffar tentang keterpilihan calon legislative (caleg) dalam pemilu di Pulau Jawa di masa Orde Baru, keterpilihan caleg dalam Pemilu di Indonesia ternyata cenderung dipengaruhi oleh dua aspek, yakni pengaruh kuat politik aliran dan ketaatan pada figure pemimpin.

Penelitian Affan Gaffar di Kecamatan Brobanti Yogyakarta, yang berfokus di tiga desa yakni: Sukaramai, Sukadamai, dan Sukamulya membuat hipotesis bahwa politik aliran masih sangat dominan dalam penentuan pilihan politik bagi masyarakat di desa-desa Pulau Jawa. Gaffar menjelaskannya demikian,<sup>37</sup>

*“The principle working hypothesis in this is that social religio-cultural belief are the principal determinant in explain electoral behavior in Javanese villages. The religio-cultural beliefs are inculcated and are transmitted from generation to generation through the process of political socialization, which eventually lead to the establishment of an individual’s identification with a certain political party and social organization. Santri people will identify with a political party that promotes Islamic values and norms, while the Abangan will identify with a secular or non-Islamic party.”*

[“Prinsip bekerjanya hipotesis di sini adalah bahwa keyakinan socio religio kultural merupakan prinsip determinan dalam menjelaskan perilaku pemilih. Keyakinan religio kultural sudah mendarah daging dan diwariskan turun temurun melalui proses sosialisasi politik yang kemudian memperkuat identifikasi individu dengan partai politik dan organisasi social tertentu. Orang-orang Santri akan mengidentifikasi diri dengan sebuah partai politik yang mempromosikan nilai-nilai dan norma Islam, sementara Abangan akan mengidentifikasi diri dengan partai secular atau partai non Islam.”]

Gaffar menunjukkan pola hubungan bahwa perspektif aliran sangat berpengaruh dalam penggunaan pilihan politik di pedesaan Jawa. Gaffar mengutip pandangan Clifford Geertz bahwa desa di Jawa kebanyakan terbentuk dalam pola aliran. Aliran terdiri dari parpol yang dikelilingi oleh organisasi-organisasi yang secara formal atau informal terhubung dengannya dan memiliki arah dan pendirian ideologi yang sama.

---

<sup>37</sup> Afan Gaffar, *Javanese Voters: a case study of election under a hegemonic party system* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 34.



Gambar 27: Menguatnya politik aliran di Indonesia

Temuan itu ditunjukkan oleh Gaffar lewat studinya yang melihat hubungan antara pola kepemimpinan dan perilaku pemilih. Gaffar menjelaskan, <sup>38</sup>

*“Through the analysis I have attempted to uncover the relationship between the pattern of leadership and voting behavior in Brobanti. One important contribution of the finding in this chapter, I believe, is the empirical analysis that supports Geertz’s earlier notion that leadership has its own political and social constituency based on socio-religious orientation. The followers will be inclined to engage in political affairs based on the concordance of their attitudes with the leader. [...] My data clearly indicate that religion, as ideology, is the most critical linkage between the leader and its followers. [...] This study also indicates that villagers do not blindly follow their leaders instruction, order, advice, or suggestion. In Sukaramai village, for example, the majority of respondents have a strong attachment to a religious leader voter for Golkar, the government party.”*

[“Melalui analisis itu, saya harus mencoba relasi yang tidak tertutupi diantara pola kepemimpinan dan perilaku pemilih di Brobanti. Satu kontribusi penting dari temuan dalam bab ini, saya percaya, analisis empiris yang mendukung gagasan terbaru Geertz bahwa kepemimpinan memiliki konstituen

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 156-157.

social dan politiknya sendiri yang didasarkan pada orientasi social religius. Para pengikut akan cenderung untuk ikut dalam urusan politik didasarkan pada rekomendasi dari pertimbangan para pemimpinnya. [...] Dataku dengan jelas mengindikasikan bahwa agama, sebagai ideologi, adalah jaringan yang paling kritis diantara pemimpin dan para pengikutnya. [...] Studi ini juga mengindikasikan bahwa orang-orang desa tidak dengan buta mengikuti instruksi, perintah, kebijakan atau pengandaian pemimpin mereka. Di desa Sukaramai, misalnya, mayoritas responden memiliki lampiran/pertimbangan yang kuat terhadap pilihan pemimpin agama bagi Golkar, partai pemerintah.”]

Aliran lebih daripada parpol atau sekadar ideologi. Ia sudah menjadi suatu pola integrasi sosial. Konsep aliran mengacu pada cara berpikir orang Jawa khususnya yang didasarkan pada pola religius-kultural yang dinyatakan dalam aspek trikotomi Santri, Abangan, dan Priayi. Betapa kuatnya peranan politik aliran agama dalam penentuan pilihan dijelaskan oleh Gaffar demikian,<sup>39</sup>

*“From the analysis, one can see that there is a close relationship between individual socio-religious orientation and voting preference. The data from Brobanti indeed support the notion that people are inclined to vote according to their socio-religious orientation. Thus, Santri will be inclined to vote for the Islamic party, while Abangan will tend to support a secular party in the elections. The stability of the pattern of voting preference is clear in the analysis. The Santri voters seem to be more ideological in making the voting decision than the Abangan. What is interesting is that quite a number of them also voted for Golkar. Nevertheless, other variables have also to be taken into account, such as the pattern of leadership and class. The following chapters will explore those variables in relation to voting in Javanese villages such as in Brobanti.”*

[“Dari analisis itu, seseorang dapat melihat bahwa ada hubungan yang sangat dekat diantara orientasi sosio religius

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 130. Argumentasi yang sama bisa juga ditelusuri dalam East Vlesenthal - Abraham Bridgestahl, *Politic Behaviour* vol 7 no 4, tahun 1997 hal 321.

individu dengan preferensi pilihan. Data dari Brobanti termasuk mendukung gagasan bahwa warga tertarik untuk memilih tergantung orientasi sosio religious mereka. Sehingga Santri akan tertarik untuk memilih partai Islam, sementara Abangan cenderung untuk mendukung partai secular dalam Pemilu. Stabilitas pola preferensi pilihan jelas dalam analisis ini. Pemilih Santri tampaknya menjadi lebih ideologis dalam membuat keputusan pilihan daripada Abangan. Yang penting adalah bahwa agaknya sejumlah dari mereka juga memilih ke Golkar. Namun demikian variable lain juga diambil kegunaannya, seperti pola kepemimpinan dan pola kelas social. Bab berikutnya akan mengeksplorasi variable itu dalam kaitan dengan pemilih di desa-desa Jawa demikian seperti di Brobanti.”]



Gambar 28: Politik aliran mendapat muaranya dalam pilihan partai politik

Pola hubungan kedua adalah pola hubungan pemimpin dan pengikut melalui otoritas tradisional dimana paternalisme merupakan fenomena umum dalam masyarakat Jawa. Menurut Gaffar konsep otoritas tradisional ialah: praktek kekuasaan personalistik yang terakumulasi melalui pengaruh masa lalu dan sekarang yang mengambil peran sebagai penyedia, pelindung, pendidik, sumber nilai, dan pemegang status yang tinggi dalam hubungan ketergantungan yang telah diciptakan. Variabel memilih di pedesaan Jawa menunjukkan bahwa keyakinan sosio-religijs jauh lebih kuat dibandingkan pola

hubungan kelas dalam penentuan pilihan politik warga. Gaffar menjelaskan,<sup>40</sup>

*“Through the analysis I have attempt to demonstrate whether class affiliation does have an important effect on voting behavior in Brobanti Villages. As indicated by the available data from the study, it is clear that class is less significant in explaining electoral behavior in those villages. Rather, it is the cultural variable that has a more significant role. The reason is that, first, in a small scale agricultural economy such as in Java in which the strong landlord does not exist as well as the relative independence of the peasant from the market economy, the non-economic factors such as religion are more prominent than class. Second, the nonexistence of interest groups that promoter farmers interest along with the unification of peasant organization to protect the interest of the corporatist state make if impossible to create “class consciousness” among the peasants in Javanese villages.”*

[“Melalui analisis itu saya sudah mencoba mendemonstrasikan entah afiliasi kelas social memiliki efek penting dalam perilaku pemilih di desa Brobanti. Sebagaimana diindikasikan oleh data tersaji dari studi itu, jelas bahwa kelas social kurang signifikan dalam menjelaskan perilaku pemilih di desa-desa itu. Agaknya variable cultural memiliki peranan lebih signifikan. Alasan bahwa, pertama, dalam ekonomi agrokultural berskala kecil seperti di Jawa dimana tuan tanah yang kuat tidak ada, sedemikian baik seperti kebebasan relative warga dari ekonomi pasar, factor-faktor non ekonomi seperti agama menjadi lebih kuat dari pada faktorkelas social. Kedua, ketidak-beradaan kelompok kepentingan yang mempromosikan kepentingan petani sepanjang kesatuan dengan organisasi petani untuk melindungi kepentingan dari korporasi pemerintah membuatnya menjadi tidak mungkin menciptakan “hati nurani yang berkelas” diantara para petani di desa-desa Jawa.”]

Penelitian Gaffar di daerah Brobanti Yogyakarta menunjukkan peran lembaga agama seperti masjid dan langgar sangat kuat di antara kaum Santri dan sebaliknya berlaku di kalangan Abangan. Lembaga

---

<sup>40</sup> Gaffar, *op.cit*, hlm. 173.

agama adalah unit paling dasar dalam pendidikan kaum Santri. Sementara kaum Abangan tidak memiliki lembaga semacam itu. Bahkan mereka enggan pergi ke pertemuan-pertemuan di langgar atau masjid karena mereka menganggap langgar sebagai milik komunitas Santri. Dalam lembaga ini terjadi ikatan yang erat antara pemimpin agama (kyai, haji) dengan ummat.

**b. Fondasi Nasionalisme dalam Keterwakilan Politik**

Fondasi nasionalisme dalam sistem perwakilan politik disampaikan oleh George McTurner Kahin dan Burhan Magenda. Dalam pemahaman Kahin, sangat penting memaknai nasionalisme sebagai perekat kuat dan menjadi fondasi dasar bagi sebuah negara bangsa terutama negara bangsa yang terdiri dari multi kultural dan multi agama seperti Indonesia. Dalam paham Burhan Djabir Magenda, nasionalisme tersebut harus menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari misi yang diusung juga oleh partai-partai politik.

Kahin menguraikan bahwa nasionalisme di zaman pergerakan nasional bersifat menyeluruh di tanah air. Nasionalisme tersebut lahir dan muncul sebagai suatu bentuk respon atau kritik akan kesadaran ketidakadilan, merasa terjajah, tertinggal dan cinta tanah air. Muncul kesadaran dan sentimen nasionalisme pada zaman pergerakan nasional karena perasaan ketertinggalan, kebodohan, tertindas, dan kemiskinan sebagai akibat dari ideologi kolonialisme Belanda. Peletakan paham dasar jiwa nasionalisme pada zaman pergerakan nasional karena semangat bersama sebagai perekat untuk mempertahankan keutuhan bangsa (bersifat integratif).

Menurut Kahin, Nasionalisme Indonesia berakar dari keadaan Indonesia mulai dari abad ke-16 sampai dengan abad ke-20. Fenomena Nasionalisme tidak lahir secara sendiri, tetapi sangat terkait dengan konsep bangsa atau negara dan kewarganegaraan atau kebangsaan, termasuk produk dari imperialisme/kolonialisme. Nasionalisme sebagai produk dari sejarah sebuah bangsa merupakan jawaban terhadap kondisi-kondisi historis, politik ekonomi dan sosial tertentu. Nasionalisme muncul sebagai reaksi terhadap kolonialisme, reaksi yang berasal dari sistem eksploitasi yang selalu menimbulkan

pertentangan kepentingan secara terus menerus. Pertentangan ini tidak hanya dalam bidang politik, tapi juga dalam bidang ekonomi, sosial dan kultural. Oleh sebab itu, suatu gerakan-gerakan yang bersifat nasional muncul menentang kolonialisme, dan berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu tersebut karena didorong oleh semangat nasionalisme.



Gambar 29: Pilkada DKI Jakarta yang sempat mengguncang tatanan sosial

Menurut Kahin, kehadiran Belanda justru memunculkan rasa patriotisme setempat menjadi satu patriotisme yang merangkul semuanya dengan cara menggalang orang-orang berbeda bahasa dan kebudayaan ke dalam satu kesatuan politis sehingga terbentuk kesadaran kelompok. Selain batas-batas politis, tradisi kejayaan masa lalu terutama keberhasilan Sriwijaya dan Majapahit dan agama Islam sebagai mayoritas di Indonesia dan penggunaan bahasa melayu pasar yang dijadikan sebagai bahasa persatuan membantu mempercepat terjadinya nasionalisme.

Perkembangan nasionalisme Indonesia muncul dalam bentuk “Gerakan Emansipasi Wanita” oleh R.A. Kartini tahun 1912, Kongres Pemuda pertama dan berdirinya Boedi Oetomo tahun 1908, Gerakan Jawa Muda (*Jong Java*) tahun 1911, Muhammadiyah tahun 1912, Gerakan Pribumi (*Inlandsche Beweging*) tahun 1914, Kongres Kebudayaan tahun 1916, dan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, dan dikemudian hari muncul organisasi lainnya yang lebih bersifat kesukuan, seperti Jong Sumatra, Jong Celebes dan lain-lainnya dan puncaknya saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

Di masa menjelang kemerdekaan yakni ketika penjajahan Jepang, puncak nasionalisme tersebut mendapat bentuknya disaat perumusan kehendak untuk merdeka dengan pembentukan BPUPKI. Di hadapan peserta sidang BPUPKI, Soekarno menunjukkan secara terang-terangan rasa anti-Jepang lewat pidatonya yang menggariskan lima prinsip dasar, *Pantja Sila* yang dianggap dapat membimbing dan memenuhi syarat sebagai dasar filsafat suatu Indonesia yang merdeka. Menurut Burhan, George McTurner Kahin mampu menjelaskan akar-akar sosial, ekonomi dan politik dari revolusi kemerdekaan Indonesia dengan pendekatan historis. Kahin melihat bahwa ideologi politik sosial demokrat juga terdapat di Indonesia.

Melanjutkan pandangan George Kahin di atas, Burhan Magenda melihat bahwa nasionalisme yang telah tertanam dengan sangat dalam sejak masa perang menuju untuk kehendak kemerdekaan itu menjadi perekat yang sangat kuat bagi berlangsungnya sebuah bangsa seperti Indonesia. Untuk konteks nasionalisme Indonesia, Burhan menjelaskan:<sup>41</sup>

*“The strength of nationalism is important for the continuity of a nation state especially for a complex nation state. In the Indonesian context, for example, nationalist ideology was said by George Kahin to begin from the start of the 20<sup>th</sup> century, leading to the Youth Pledge of 1928 and the independence revolution of 1945-1950. Some countries have chauvinistic national ideologies that they fight against each other, like the fascist ideology under Hitler in Germany, Mussolini in Italy and Tojo in Japan. Some other countries suffer internal wars, as in Biafra in Nigeria and the South Maluku Republic (RMS) and others in Indonesia.”*

[Kekuatan nasionalisme menjadi penting bagi kelangsungan sebuah Negara bangsa khususnya bagi sebuah Negara bangsa yang kompleks. Dalam konteks Indonesia, misalnya, ideology nasionalis sebagaimana dikatakan George Kahin mulai muncul di awal abad ke -20, yang diawali oleh kelahiran

---

<sup>41</sup> Burhan Djabir Magenda, “The Integration in a Complex Indonesia” dalam *Majalah TELSTRA* No 64 Januari-Februari 2001, hlm. 51.

Sumpah Pemuda 1928 dan revolusi kemerdekaan Indonesia 1945-1950. Beberapa Negara memiliki ideologi nasional yang chauvinistik sehingga mereka berperang satu sama lain, seperti ideologi fasis di bawah Hitler di Jerman, Mussolini di Italia dan Tojo di Jepang. Beberapa Negara lain yang menjadwerita perang secara internal misalnya di Biafra Nigeria dan Republik Maluku Selatan, dan pemberontakan yang lain di Indonesia.]

Dalam pandangan Burhan Magenda, di beberapa Negara Asia dan Afrika, proses pembangunan kebangsaan (*nation building*) terkait ideology nasionalis dipelopori oleh *founding fathers* seperti Soekarno-Hatta di Indonesia. Pada masa itu yang paling penting adalah *elite cooperation* dan *cohesiveness* yang pada masa pasca colonial seringkali pecah dan menimbulkan konflik. Mengutip pendapat Benedict Anderson, Burhan menegaskan bahwa nasionalisme sebagai sebuah ideology membentuk suatu masyarakat imajiner (*imagines communities*). Kehadiran partai-partai politik pun merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari penguatan nasionalisme dimaksud. Semangat itulah yang terus menerus juga harus dipegang oleh partai-partai politik hingga sekarang. Burhan Magenda menjelaskan parpol dan ormas di Indonesia sudah berdiri sejak awal abad ke 20 seperti Boedi Otemo, ISDV, Serikat Islam, Muhammadiyah, PKI, Nahdlatul Ulama, dan PNI. Ini memperlihatkan kuatnya ideologi nasionalis yang dibawa parpol.

Pada Pemilu 1955 misalnya, partai ethnic boleh dikatakan kurang berhasil ataupun gagal total., yang agak berhasil hanyalah Partai Persatuan Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan partai etnik lainnya di Jawa Barat gagal merebut kursi DPR maupun DPRD. Pada pemilu 1999 Partai Tionghoa Indonesia yang *ethnic-oriented* gagal dibandingkan Parta Bhinneka Tunggal Ika yang majemuk yang berhasil memperoleh satu kursi DPR walaupun basis pemilihnya tetap keturunan Tionghoa. Menurut Burhan, pada masa pasca colonial, partai politik berhasil dalam pendidikan, sosialisasi, dan rekrutmen politik. Rakyat menjadi melek politik dan paham terkait dengan isu-isu politik nasional.

#### **4. Rangkuman**

Melihat postur pemilu Indonesia sejak masa pemilihan umum awal tahun 1955 termasuk hingga saat ini, setidaknya ada dua postur keterpilihan calon legislatif dalam Pemilu di Indonesia. Dua kecenderungan tersebut adalah dominannya aspek pengaruh kuat politik aliran dan pengaruh lain yang tidak kalah adalah adanya ketaatan pada figure pemimpin. Dua hal ini menjadi pokok politik yang masih terasa hingga saat ini. Politik aliran memberi kecenderungan pemilih untuk menentukan apa yang menjadi pilihan politiknya sesuai yang tersedia dalam nuansa lekat alirannya di pemilihan umum.

Namun demikian, prinsip aliran tidak bisa dibiarkan berkembang menjadi lebih besar yang kelak dapat membahayakan kehidupan dan pertumbuhan demokrasi. Salah satu upaya untuk mengimbangi pertumbuhan politik aliran adalah dengan tetap memperkuat isu-isu nasionalisme yang mengutamakan isu-isu kebangsaan, cinta tanah air, kesatuan sebagai anak-anak bangsa dan senasib sepenenderitaan dalam membangun negeri bersama. Hanya dengan mencintai dan memupuk nilai-nilai nasionalisme maka demokrasi diharapkan perlahan bisa bertumbuh baik dan isu-isu politik aliran bisa diminimalisir.

#### **5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek**

##### **a. Latihan**

- i. Mahasiswa membuat tugas latihan mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana politik aliran telah bertumbuh dalam praktek politik Indonesia dewasa ini.
- ii. Mahasiswa diberi tugas untuk melihat bagaimana sifat nasionalisme menjadi sangat penting dalam menghadapi politik aliran yang semakin menguat dalam pemilu-pemilu Indonesia khususnya di Era Reformasi.
- iii. Tugas latihan ini dibuat dalam bentuk makalah.

iv. Penilaian tugas ini akan dikalkulasi sebagai tugas mandiri pada struktur penilaian yang telah ditampilkan pada RPS.

**b. Lembar Kerja Praktik**

**c. Evaluasi Pembelajaran**

- i. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui penilaian atas substansi dan kedalaman analisis makalah.
- ii. Tugas makalah dipresentasikan oleh mahasiswa dalam diskusi kelas.

**d. Umpan Balik**

**B.2. KEGIATAN PEMBELAJARAN-2**

**1. Judul Kegiatan Pembelajaran:**

**“PENGUATAN NASIONALISME DAN KEBANGSAAN”**

**2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

Mahasiswa/i diharapkan mampu menguraikan berbagai macam konsep sistem Perwakilan politik dalam dua bidang, yakni: Politik Aliran, Figur Pemimpin Dan Nasionalisme, dan Prinsip Determinan Sosial, Agama, dan Budaya sebagai aspek yang masih berpengaruh dalam politik perwakilan.

**3. Uraian, Pemikiran, Penjelasan, dan Fakta Politik**

**a. Penguatan Nasionalisme dan Kebangsaan**

Jika kita merunut pada pandangan para founding fathers dikalam mendirikan Negara Indonesia, terlihat jelas bahwa para founding fathers tahu betul bahwa Indonesia baru bukanlah negara yang dibangun di atas kesetaraan etnis, juga bukan negara yang dibangun di atas negara kebangsaan. Namun, Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku dan agama (civic nation). Ketika mengelola Indonesia sebagai negara sipil, hegemoni salah satu elemen budaya "mayoritas" atau "minoritas" tidak boleh ditekankan. Peran pejabat

negara dan politisi adalah menciptakan dan mengelola ruang publik bersama-sama untuk membangun Indonesia "baru".

Upaya membangun identitas nasional Indonesia yang baru tidak dapat dilakukan dengan pendekatan seperti era Orde Baru, yakni menekan ekspresi primordial "identitas lokal", serta menonjolkan pentingnya identitas nasional yang dipaksakan. Namun di sisi lain, politisasi primordial dalam Pilkada dengan bermain-main dengan perasaan primordial "identitas lokal" juga sangat berbahaya bagi kohesi sosial dan berlangsungnya proses pembentukan identitas nasional. Keberadaan platform politik kita yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa terganggu. Jika politisasi yang berlaku ini terus dilakukan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, maka proses identifikasi kita untuk pembentukan identitas nasional Indonesia yang "baru" akan selalu menghadapi tarikan "gravitasi" dan "turbulensi" akibat benturan nilai-nilai yang terpinggirkan. dan nilai-nilai. nasional berdasarkan Pancasila.

Jadi, ketika menghadapi masalah politik yang mengubah nilai-nilai nasionalisme menjadi kebijakan yang kurang bermartabat, seperti masalah identitas, sangat penting untuk bangga menjadi bangsa yang sangat penting. Penguatan jati diri bangsa dapat terjadi melalui proses alamiah, namun dikelola secara sistematis dan berdasarkan keragaman "identitas lokal" yang telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, keterikatan pada identitas primordial dan keterikatan pada identitas nasional harus terjalin dan saling mendukung. Politisasi primal memutuskan hubungan psikologis antara identifikasi komunitas dan identitas nasional.

Reproduksi identitas nasional dapat terjadi melalui peristiwa rutin dan dangkal (dalam arti positif) dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Wujud yang paling nyata adalah terpenuhinya hak-hak warga negara di bidang pemerintahan sipil, politik, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Misalnya, kemudahan memperoleh kartu sehat dan pelayanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit, kemudahan menyekolahkan anak, kemudahan dan kenyamanan transportasi dari dan ke tempat, kemudahan memperoleh secara langsung sertifikat kepemilikan di kelurahan.

Kebijakan Presiden Jokowi terkait pendistribusian harga BBM di Pulau Jawa dan Papua merupakan bentuk kebanggaan bagi jati diri bangsa, khususnya bagi masyarakat. Pembangunan daerah dan pintu gerbang di kawasan perbatasan, serta pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, merupakan kebanggaan bagi seluruh warga bangsa. Proses peradilan yang objektif, transparan, dan adil yang dilandasi semangat kebangsaan yang tinggi akan menciptakan kebanggaan dan ikatan emosional yang mendalam dengan jati diri bangsa kita.

Oleh karena itu, hanya dalam kerangka politik, hukum dan ekonomi yang adil dan jelas, identitas nasional yang kuat dapat diciptakan. Identitas ini bukanlah identitas yang pasif karena akan terus berkembang seiring dengan dinamika perkembangan realitas politik, hukum dan ekonomi negara, serta interaksi antar kelompok dari masa bayi hingga masa kanak-kanak. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah sesuatu yang tetap, diam dan beku dalam dimensi waktu, melainkan sesuatu yang cair, terus berkembang, berubah tetapi memiliki visi dan misi yang tetap sebagaimana diatur dalam alinea keempat UUD 1945. Dibutuhkan keseriusan dari penyelenggara negara dan hati nurani warga untuk terus berjuang untuk Indonesia, untuk mewujudkan apa yang diimpikan oleh band ternama Indonesia "Koes Plus" dalam lagu "Nusantara" dan "kolam Susu".

Jika kita ingin mengetahui dan mempelajari lebih dalam tentang karakter-karakter yang menjadi ciri Primordialisme, maka dapat dijelaskan bahwa primordialisme yang melekat pada setiap orang sangat mempengaruhi pola perilaku individu dalam hubungan sosial dan tentunya sikapnya dalam masyarakat. pemahaman tentang politik. masalah dan perkembangan. Primordialisme adalah visi yang memelihara ikatan sosial berupa nilai, norma, dan adat istiadat yang berasal dari suku, ras, tradisi, dan budaya yang dibawa sejak seseorang dilahirkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, primordialisme diartikan sebagai pandangan yang melekat pada hal-hal yang dibawa sejak masa kanak-kanak, baik tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertama.

Menurut Robuskha dan Shepsle, primordialisme adalah kesetiaan yang berlebihan terhadap suatu budaya sub-nasional, seperti suku,

agama, ras, wilayah, dan keluarga. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, primordialisme adalah hubungan seseorang dalam suatu kelompok atas dasar ikatan kekerabatan, suku, dan juga adat-istiadat sehingga menimbulkan pola tingkah laku dan cita-cita yang sama. Primordialisme tentu sangat mempengaruhi pola perilaku individu dalam hubungan sosial. Sikap ini membuat seseorang mempertahankan hasil budayanya dengan rasa loyalitas yang tinggi.

Jika seseorang tidak dapat beradaptasi dengan masyarakat multikultural, primordialisme akan memicu konflik sosial. Secara umum tentu akan menimbulkan perpecahan yang harmonis antar warga. Dikutip dari laman Al Chaidar (2017) FISIP Unimal Antropologi, menurut Clifford Geertz (1963), sebuah negara dibangun atas persamaan nasib. Sedangkan bangsa dibangun di atas sekelompok orang yang memiliki keinginan untuk bersatu dan memiliki kesamaan sejarah. Suatu bangsa terdiri dari berbagai kelompok primordial (suku, ras, agama) dengan budayanya masing-masing. Fakta ini menjadi dasar bagi suatu bangsa yang memiliki loyalitas utama (primary sentiments) untuk menghadapi kelompok-kelompok lain di luar bangsa yang disebut sebagai musuh bersama (colonial nation).



Gambar 30: Berbahaya ketika isu identitas agama menguasai politik praktis

Namun permasalahannya, ketika negara baru terbentuk, sedikit demi sedikit muncul fenomena kelompok masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan antar bangsa. Lokasi kesadaran politik

modern dalam masyarakat yang sebagian besar modern akan cenderung membangkitkan gairah politik yang masih berlandaskan ikatan primordial. Loyalitas yang berlebihan terhadap budaya lokal dapat mengancam integrasi bangsa, karena primordialisme mengurangi loyalitas warga negara terhadap budaya bangsa dan negara, sehingga mengancam kedaulatan negara. Kecenderungan ini akan menyebabkan kelompok-kelompok akan melakukan tuntutan untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya, seperti tuntutan pembagian sumber daya alam yang lebih seimbang antara pusat dan daerah.

Rencana terburuk dalam hal ini adalah jika adaptasi tidak terjadi sesuai dengan keinginan kelompok yang bersangkutan, mereka akan menjadi gerakan kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, peristiwa seperti ini sudah sering terjadi, seperti Gerakan Aceh Merdeka, Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, G30S/PKI, Republik Maluku Selatan (RMS) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Ciri-ciri primordialisme setidaknya dapat disebutkan dengan uraian sebagai berikut:

- Dibentuk sebagai identitas kelompok
- Konsekuensi dari masyarakat multikultural
- Sikap tulus untuk menjaga keutuhan kelompok.
- Melepaskan permusuhan di masyarakat.
- Nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem kepercayaan kelompok.
- Cita-cita yang sama dalam tujuan kelompok

#### **b. Tantangan ke-Indonesiaan kita**

Politik saat ini adalah politik dalam masyarakat di mana pilihan politik masih didasarkan pada sekte, agama, atau ideologi seseorang. Umumnya aliran politik ini berbentuk partai politik yang berafiliasi dengan organisasi atau lembaga massa tertentu. Afiliasi dibentuk untuk memenangkan dukungan organisasi massa. Politik sekte dimulai ketika penelitian Clifford Geertz pada tahun 1950-an membuat tesisnya *The Religion of Java* (1960) yang menyatakan bahwa masyarakat Jawa terbagi menjadi 3 golongan, yaitu: santri, abangan dan priyayi. Santri

adalah sekelompok orang yang memiliki nilai-nilai Islam yang kuat yang umumnya terbentuk dari lingkungan pesantren. Santri biasanya adalah orang yang paham agama (Islam) dan taat pada perintah agama. Kelompok ini bisa dikatakan memiliki ikatan dengan ormas Nahdlatul Ulama yang berafiliasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kelompok kedua adalah abangan, yaitu kelompok umat Islam yang cenderung memberontak dan menganggap agama hanyalah sesuatu yang sakral. Secara umum, kelompok ini juga dikenal sebagai "Kartu Tanda Penduduk Islam" dan telah mendukung aspirasi politiknya kepada partai-partai seperti PNI (Partai Nasional Indonesia) dan PKI (Partai Komunis Indonesia) di masa lalu. Kelompok ketiga adalah priyayi, yang biasanya identik dengan kerabat yang dulu berada di kerajaan atau yang sekarang menjadi kelompok resmi. Mereka cenderung menyalurkan aspirasi politiknya ke PNI atau sekarang ke partai yang berkuasa.

Pada pemilu 1955, masyarakat Indonesia tetap menjalankan kebijakan sektarian berdasarkan keyakinannya. Kelompok santri dari kelompok tradisional memilih Partai PBB, kemudian kelompok Islam modernis memilih Partai Maskhumi, dan kalangan Abangan dan Priyayi mendukung PNI. PNI, Masyumi, NU dan PKI masing-masing menempati 4 pemenang pertama pemilu. Politik mazhab ini berlanjut hingga pemilu 1999 dan terlihat arus politik kehilangan "prestise" pada pemilu 2009. Bagaimana menjelaskan pengaruh arus politik dalam upaya mengintegrasikan bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh kebijakan saat ini? dalam upaya berintegrasi ke dalam masyarakat Indonesia akibat perbedaan pilihan kebijakan berbasis aliran? mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang majemuk dan menurut saya, meskipun pilihan politik setiap individu atau kelompok berbeda-beda, tanda-tanda integrasi nasional tetap terbuka terbukti dengan semboyan bangsa Indonesia yang masih ada hingga saat ini, yaitu " Bhineka Tunggal Ika". artinya "Bhinneka Tunggal Ika", "Bhinneka Tunggal Ika", "Bhinneka Tunggal Ika". Meski berbeda, mereka tetap satu.

Mengenai keberadaan politik sektarian di Indonesia, seringkali diperlukan bagi sebagian orang karena dengan politik sektarian lebih

mudah untuk menarik pemilih massa yang merupakan penggemar partai politik yang dipilih berdasarkan pemahaman atau ideologinya. Politik mazhab ini menunjukkan identitas sebuah partai bahwa partai-partai tersebut memiliki ideologi yang berbeda. Namun seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Indonesia saat ini cenderung lebih objektif dan rasional dalam menentukan pilihan politiknya. Politik rasional harus segera diikuti oleh partai-partai yang masih menganut prinsip politik dominan jika tidak ingin kalah dengan partai modern lainnya.

Dan jika kita kembali ke sejarah bangsa Indonesia yang majemuk, tidak mungkin menghapus keberadaan politik sektarian. Alasannya sederhana, karena dalam sejarah bangsa Indonesia yang majemuk, perbedaan tetap ada, tetapi masyarakat kita toleran terhadap perbedaan. Justru karena masyarakat Indonesia yang pluralistik atau beragam, bentuk-bentuk pilihan politik muncul dari berbagai asal yang disebut politik dominan. Politik sesat tidak bisa hilang di tanah Indonesia. Karena politik aliran berangkat dari adanya ikatan primordial. Ikatan yang sudah terjalin sejak kecil. Begitu manusia dilahirkan ke dunia ini, mereka diingatkan akan banyak hal. Hubungan tersebut dapat berupa keturunan, tempat lahir, adat istiadat, suku, ras, agama, dan kepercayaan. Jadi, hasil proses belajar dari segala sesuatu yang ada di lingkungan pertama, lingkungan terdekat dan paling awal untuk tumbuh dan berkembang, berlanjut dalam dunia pendidikan.

Misalnya, nada yang hampir sama sering ditemukan di jejaring sosial, ada posting yang menarik untuk didengarkan. "Saya keturunan X, saya benci orang-orang dari garis X, saya mengutuk orang-orang dari garis X tetapi, karena pertanyaan pilihan politik, saya terus memilih X. Tolong bantu saya, saya waras." Mengapa? Pertama. Pada manusia, sejak lahir di dunia ini, persatuan/jaringan utama (primus) dan terkuat (ordiri) adalah garis keturunan (geneologi). Banyak orang mencari identitas mereka melalui asal usul silsilah mereka. Di sisi lain, ada juga yang mengaburkan (tidak berbohong) bahkan memotong identitas silsilah. Tentu ada alasannya, baik politis maupun lainnya. Namun, sulit untuk menghapus, meskipun tidak dapat disangkal, ikatan, aliran darah, aliran diri pribadi menurut garis keturunan leluhur.

Berkenaan dengan nasab, Islam secara tegas melarang penyimpangan dari asal usul nasab. Misalnya, asal usul keturunan Arab tidak bisa secara otomatis diklaim bersama dengan habaib. Karena tidak semua orang Arab adalah keturunan Habaib. Habaib dalam arti memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad. Selanjutnya mereka yang keturunan Tionghoa, meskipun karena asimilasi atau akulturasi dan telah lama tinggal di Indonesia, tidak dapat serta merta menghapus garis keturunan aslinya. Tidak diperbolehkan menghubungkan anak angkat dengan orang lain selain ayah kandungnya sendiri. Tidak diperbolehkan, karena dia membesarkan seorang anak, namanya sendiri dilekatkan sebagai ayah kandungnya. Di sisi lain, orang tua kandung dilarang mengingkari garis keturunan anak-anaknya.

Kedua. Karakter individu ditentukun oleh lingkungan kelahirannya. Bagaimana ia dibesarkan dan dibesarkan, baik kondisi lingkungan keluarga, sosial budaya, agama dan kepercayaan dan lain-lain, maupun lingkungan geografis alam. Karakter orang yang beriklim dingin umumnya berbeda dengan orang yang beriklim panas. Orang gunung cenderung berbicara dengan tenang karena dipengaruhi oleh kesunyian angin gunung. Di sisi lain, orang-orang di pantai cenderung berbicara dengan keras, karena suara mereka ditelan oleh deru ombak dan angin laut.

Ketiga. Preferensi politik juga pada dasarnya dipengaruhi oleh hasil belajar. Baik pembelajaran informal (dalam keluarga, teman bermain), formal (sekolah) maupun nonformal (masyarakat). Hasil penelitian ini mengarahkan seseorang untuk berpikir sehat dan sekaligus memiliki jantung yang sehat. Logika atau penalaran adalah jalan/hak yang umumnya ditempuh melalui pendidikan. Arus politik yang cenderung berpotensi memecah belah bangsa lebih mudah dihindari. Melalui pendidikan, kesadaran akan pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara ditanamkan. Sebuah gerakan politik muncul berdasarkan ikatan primordialisme. Ini umumnya dikenal sebagai arus politik. Artinya, aliran politik diberikan kesetaraan dengan apa yang lahir dan sekaligus mempertahankan eksistensi primordialnya sendiri.

Politik butuh identitas. Politik basis primordial identik dengan politik identitas. Seperti identitas etnik, etnik dan asal daerah. Namun yang paling menonjol, politik sektarian mengarah pada identitas agama atau sekte-sekte agama. Siapa yang akan mempertahankan eksistensi agama di Indonesia, jika para pemuka agama tidak terlibat dalam politik. Jika orang beragama tidak ikut berpolitik, maka dunia politik akan dipenuhi orang-orang yang tidak beragama bahkan anti agama. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan negara Pancasila.

Semua tunduk pada warisan. Semua terikat oleh kerinduan akan tempat asalnya dan semua dijalin oleh ilmu yang dimilikinya. Perkumpulan alumni muncul berdasarkan asal-usul mereka di sekolah. Namun, dalam hal afiliasi politik, tidak ada satu sekolah atau kampus, sebagai ruang belajar/akademik, yang berpihak pada kebijakan tertentu. Lembaga pendidikan netral dari politik praktis. Civitas akademika harus memahami dinamika politik yang terjadi dan kemudian berpartisipasi aktif dalam politik nasional. Sebuah link (aktor politik atau seseorang yang terlibat dalam politik) terlihat dan dapat dirasakan. Apakah itu kuat, terbuka atau terselubung?

Politik aliran-aliran, suka tidak suka, niscaya akan terus bertransformasi menemukan proporsinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbagai arus politik yang muncul di Indonesia akhirnya menemukan konsensus alaminya.

#### **4. Rangkuman**

Melihat postur pemilu Indonesia sejak masa pemilihan umum awal tahun 1955 termasuk hingga saat ini, setidaknya ada dua postur keterpilihan calon legislatif dalam Pemilu di Indonesia. Dua kecenderungan tersebut adalah dominannya aspek pengaruh kuat politik aliran dan pengaruh lain yang tidak kalah adalah adanya ketaatan pada figure pemimpin. Dua hal ini menjadi pokok politik yang masih terasa hingga saat ini. Politik aliran memberi kecenderungan pemilih untuk menentukan apa yang menjadi pilihan politiknya sesuai yang tersedia dalam nuansa lekat alirannya di pemilihan umum.

Namun demikian, prinsip aliran tidak bisa dibiarkan berkembang menjadi lebih besar yang kelak dapat membahayakan

kehidupan dan pertumbuhan demokrasi. Salah satu upaya untuk mengimbangi pertumbuhan politik aliran adalah dengan tetap memperkuat isu-isu nasionalisme yang mengutamakan isu-isu kebangsaan, cinta tanah air, kesatuan sebagai anak-anak bangsa dan senasib sepenenderitaan dalam membangun negeri bersama. Hanya dengan mencintai dan memupuk nilai-nilai nasionalisme maka demokrasi diharapkan perlahan bisa bertumbuh baik dan isu-isu politik aliran bisa diminimalisir.

## **5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek**

### **a. Latihan**

- 1.) Mahasiswa membuat tugas latihan mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana politik aliran telah bertumbuh dalam praktek politik Indonesia dewasa ini.
- 2.) Mahasiswa diberi tugas untuk melihat bagaimana sifat nasionalisme menjadi sangat penting dalam menghadapi politik aliran yang semakin menguat dalam pemilu-pemilu Indonesia khususnya di Era Reformasi.
- 3.) Tugas latihan ini dibuat dalam bentuk makalah.
- 4.) Penilaian tugas ini akan dikalkulasi sebagai tugas mandiri pada struktur penilaian yang telah ditampilkan pada RPS.

### **b. Lembar Kerja Praktik**

### **c. Evaluasi Pembelajaran**

- 1.) Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui penilaian atas substansi dan kedalaman analisis makalah.
- 2.) Tugas makalah dipresentasikan oleh mahasiswa dalam diskusi kelas.

### **d. Umpan Balik**

## C. PENUTUP

### 1. Rangkuman

Membaca dan mempelajari modul ini akan membantu untuk memahami konsep Politik aliran dan pentingnya prinsip Nasionalisme dalam menghadapi kekuatan politik aliran. Politik aliran telah ada sepanjang jauh sebelum kemerdekaan, dan tentu saja menjadi sesuatu yang umum dalam seluruh negara mempraktekkan politik aliran. Hanya persoalannya apakah politik aliran menjadi sangat dominan atau tidak. Jika kita merefleksikan apa yang terjadi dalam fakta-fakta pemilihan kita khususnya dimasa saat ini, maka patut untuk bertanya Bagaimana dengan praktek pemilu di Era Reformasi yang sudah dilakukan sebanyak lima kali yakni Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019? Pelajaran teramat berharga dari pemilu-pemilu sepanjang Era Reformasi ini yang mengedepankan demokrasi secara lebih baik dibandingkan sekedar formalitas demokrasi sebagaimana dipraktekkan dalam pemilu sepanjang masa Orde Baru tentu patut untuk diperhatikan.

Praktek demokrasi di masa Era Reformasi memberi gambaran akan kematangan demokrasi Indonesia yang dimasa awal tahun 1998 pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru menciptakan kebebasan yang terkesan sebeb-bebasnya. Salah satu contoh dari pembuktian kematangan itu mungkin sedikit atau banyak bisa dilihat dari sejauh mana sekelompok berbeda agama dan suku justru terpilih dari daerah pemilihan berbasis agama dan suku yang berbeda. Dalam konteks penjelasan berikut akan dilihat bagaimana belajar dari masa pemilu era reformasi ini keterpilihan sejumlah caleg beagamakristiani dari basis-basis Islam.

Setidaknya dengan melihat bagaimana salah satu sisi ini akan menguji juga apakah politik aliran sebagaimana dimaksudkan Affan Gaffar dan Clifford Geertz masih teramat dominan dalam peta politik menuju keterwakilan politik Indonesia dewasa ini. Modul 8 akan melihat bagaimana Politik aliran muncul dalam Pemilihan Umum sepanjang masa Pemerintahan Otoritarian Orde Baru. Dan di Modul 9 berikutnya nanti akan membahas bagaimana pentingnya belajar dari pemilu pemilu Era Reformasi.

## 2. Daftar Istilah

Istilah	Arti
Politik Aliran	Politik aliran adalah suatu kelompok masyarakat yang tergabung dalam ormas-ormas yang memiliki suatu pemersatu berupa partai politik dalam suatu negara, sehingga ormas tersebut dikatakan penganut partai yang memang dijadikan pemersatu dalam negara. Politik aliran adalah politik dalam suatu masyarakat yang memilih pilihan politiknya masih berdasarkan kepada aliran, agama, atau ideologi yang dianut seseorang. Biasanya politik aliran ini adalah berupa partai politik yang memiliki afiliasi dengan ormas atau lembaga tertentu. Afiliasi tersebut dibentuk untuk mendapatkan dukungan dari ormas tersebut.
Nasionalisme	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nasionalisme adalah paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal.
Determinisme	Determinisme adalah pandangan filosofis bahwa semua peristiwa ditentukan sepenuhnya oleh sebab-sebab yang ada sebelumnya. Teori deterministik sepanjang sejarah filsafat muncul dari motif dan pertimbangan yang beragam dan terkadang tumpang tindih. Kebalikan dari determinisme adalah semacam indeterminisme (atau disebut nondeterminisme) atau keacakan.

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
	<p>Determinisme sering dikontraskan dengan kehendak bebas, meskipun beberapa filsuf mengklaim bahwa keduanya cocok. Determinisme sering diartikan sebagai determinisme kausal, yang dalam fisika dikenal sebagai sebab-akibat. Ini adalah konsep bahwa peristiwa dalam paradigma tertentu terikat oleh kausalitas sedemikian rupa sehingga keadaan apa pun (dari suatu objek atau peristiwa) sepenuhnya ditentukan oleh keadaan sebelumnya. Makna ini dapat dibedakan dari varietas determinisme lain yang disebutkan di bawah ini.</p>
Hipotesis	<p>Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dalam upaya pembuktian hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja menimbulkan atau menciptakan suatu gejala. Kesengajaan ini disebut percobaan atau eksperimen. Hipotesis yang telah teruji kebenarannya disebut teori.</p>
Santri	<p>Santri secara umum adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren, biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai. Menurut bahasa, istilah santri berasal dari bahasa</p>

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
	<p>Sanskerta, "shastri" yang memiliki akar kata yang sama dengan kata sastra yang berarti kitab suci, agama dan pengetahuan. Ada pula yang mengatakan berasal dari kata cantrik yang berarti para pembantu begawan atau resi. Seorang cantrik diberi upah berupa ilmu pengetahuan oleh begawan atau resi tersebut. Tidak jauh beda dengan seorang santri yang mengabdikan di pesantren, sebagai konsekuensinya ketua pondok pesantren memberikan tunjangan kepada santri tersebut.</p>
Abangan	<p>Abangan adalah sebutan untuk golongan penduduk Jawa Muslim yang mempraktikkan Islam dalam versi yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan golongan santri yang lebih ortodoks. Istilah ini, yang berasal dari kata bahasa Jawa yang berarti merah, pertama kali digunakan oleh Clifford Geertz, tetapi saat ini maknanya telah bergeser. Abangan cenderung mengikuti sistem kepercayaan lokal yang disebut adat daripada hukum Islam murni (syariah). Dalam sistem kepercayaan tersebut terdapat tradisi-tradisi Hindu, Buddha, dan animisme. Namun beberapa sarjana berpendapat bahwa apa yang secara klasik dianggap bentuk varian Islam di Indonesia, sering kali merupakan bagian dari agama itu sendiri di negara lain. Sebagai contoh, Martin van Bruinessen mencatat adanya kesamaan antara adat dan praktik yang dilakukan dahulu kala di kalangan umat Islam di Mesir.</p>
Norma	<p>Norma merupakan kaidah atau aturan yang berlaku bagi manusia yang berisi perintah, larangan dan sanksi antar manusia dalam suatu</p>

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
	kelompok masyarakat. Norma biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Aturan norma tidak dalam bentuk tertulis, tapi secara sadar masyarakat mematuhi. Setiap masyarakat harus menaati norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.
Ideologi	Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antoine Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan "sains tentang ide". Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu (bandingkan Weltanschauung), secara umum (lihat Ideologi dalam kehidupan sehari-hari) dan beberapa arah filosofis (lihat Ideologi politis), atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit. (definisi ideologi Marxisme).
Kelas Sosial	Kelas sosial atau golongan sosial merujuk kepada perbedaan hierarkis (atau stratifikasi) antara insan atau kelompok manusia dalam masyarakat atau budaya. Biasanya kebanyakan masyarakat memiliki golongan sosial, tetapi tidak semua masyarakat memiliki jenis-jenis

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
	<p>kategori golongan sosial yang sama. Berdasarkan karakteristik stratifikasi sosial, dapat kita temukan beberapa pembagian kelas atau golongan dalam masyarakat. Beberapa masyarakat tradisional pemburu-pengumpul, tidak memiliki golongan sosial dan sering kali tidak memiliki pemimpin tetap pula. Oleh karena itu masyarakat seperti ini menghindari stratifikasi sosial. Dalam masyarakat seperti ini, semua orang biasanya mengerjakan aktivitas yang sama dan tidak ada pembagian dalam pekerjaan.</p>
Multikultural	<p>Masyarakat artinya adalah satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus menerus dan terikat oleh perasaan bersama. Multi berarti banyak atau beranekaragam. Sedangkan kultural berarti budaya. Jadi, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Disebabkan banyaknya suku bangsa yang mempunyai struktur budaya sendiri, yang berbeda dengan budaya suku bangsa lain. Pada hakikatnya, konsep masyarakat multikultural adalah masyarakat yang mempunyai banyak suku bangsa dan budaya dengan beragam adat istiadat.</p>

### 3. Daftar Referensi

*Analisis CSIS tahun ke 26 no II tahun 1997.*

Basrowi. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Bayar, Murat, 'Reconsidering Primordialism: an alternative approach to the study of ethnicity', *Ethnic and Racial Studies*, 32.9, (2009).

Dominique Jacquin-Berdal (2002) *Nationalism and Ethnicity in the Horn of Africa: A Critique of the Ethnic Interpretation* Edwin Mellen Press, ISBN 0-7734-6954-0

Gabriel A. Almond et.al. *Comparative Politics Today: a World View Eight Edition*. Delhi: Dorling Kindersley Publishing, Inc, 2004.

Gaffar, Afan. *Javanese Voters: a case study of election under a hegemonic party system*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.

\_\_\_\_\_, *Politik Indonesia: transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Mei 1999.

George McTurner Kahin. *Nationalism And Revolution In Indonesia*. Ithaca, NY: Cornel University Press, 1952.

Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princenton University Press, 1980.

Gryosby, Steven, (1994) 'The verdict of history: The inextinguishable tie of primordialityhuth – A response to Eller and Coughlan', *Ethnic and Racial Studies* 17(1).

Harnischfeger, Johannes, 'Secessionism in Nigeria', ECAS 4 conference, Uppsala, (2011) dalam <http://www.nai.uu.se/ecas-4/panels/41-60/panel-56/Johannes-Harnischfeger-Full-paper.pdf> Diarsipkan 2012-04-14 di Wayback Machine.

Jack Hayward, Brian Barry, Archie Brown. *The British Study of Politics in the Twentieth Century*. Oxford University Press, ISBN 0-19-726294-5, 2003.

James C Scott (2009). *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia*. *The American Political Science Review* Vol. 66, No. 1.

- Jefremovas, Villia, 'Acts of Human Kindness: Tutsi, Hutu and the Genocide', *A Journal of Opinion*, 23 (1995)
- Kencana, Fink. H. *Filsafat Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Magenda, Burhan Djabir. *The Integration in a Complex Indonesia*. Majalah TELSTRA No 64 Januari-Februari 2001.
- \_\_\_\_\_, *In Memoriam: Prof George McTurnan Kahin*. Harian KOMPAS, Rabu, 2 Februari 2000.
- Membina Hubungan dengan Konstituen, Seri Penguatan Legislatif*. USAID dari rakyat Amerika: Local Government Support Program (Tanpa Tahun).
- Sambanis, Nicholas, 'Do ethnic and nonethnic Civil Wars have the same causes? A theoretical and Empirical Inquiry (Part 1)', *Journal of Conflict Resolution*, 45 (2001), 259-282
- Spencer, Steve, *Race and Ethnicity: Culture, Identity and Representation* (Abingdon: Routledge, 2006)
- Uvin, Peter, 'Ethnicity and Power in Burundi and Rwanda: Different Paths to Mass Violence' dalam *Comparative Politics*, 31 (1999)
- Yehouda A. Shenhav (2006). *The Arab Jews: a postcolonial reading of nationalism, religion, and ethnicity*. Stanford University Press, ISBN 0-8047-5296-6

## **MODUL 8**

### **POLITIK ALIRAN DI PEMILU ORDE BARU: Keterwakilan Politik di Golkar, PPP, dan PDI**

#### **A. Pendahuluan**

##### **1. Deskripsi Singkat**

Dalam praktek yang sederhana, politik aliran kerap muncul dalam bentuknya yang khas walaupun dalam sistem pemerintahan otoriter, seperti dialami Indonesia dalam pemerintahan otoritarian Orde Baru. Selama sekitar 32 tahun pemerintahan Presiden Soeharto yang otoritarian, praktek politik dianggap hanya semacam formalitas tanpa makna. Demokrasi hanya sebatas gagasan dan angan-angan kosong karena semuanya diarahkan untuk mendukung pemerintahan yang berkuasa. Tetapi ternyata walaupun situasi pemerintahan sangat kuat dan otoritarian, namun ide politik aliran tetap terasa di masa Orde Baru. Tiga peserta pemilu yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tetap merasakannya dalam nuansa politik aliran sebagaimana akan dijelaskan dalam Modul 8 berikut ini.

Setidaknya masyarakat di pedesaan seperti di Pulau Jawa dan tentu saja masyarakat di pedesaan yang berada di pulau-pulau yang lain tetap memiliki aliran politik yang membedakannya dalam menentukan pilihan politik tertentu terhadap salah satu dari ketiga partai peserta pemilu Orde Baru tersebut. Jauhnya masyarakat pedesaan dari *centrum* kekuasaan di Jakarta dan kota-kota besar lain seperti Surabaya, Medan, Bandung, Semarang dan ibukota-ibukota provinsi, membuat masyarakat di daerah memiliki pilihan politik berdasarkan aliran politik mereka. Ternyata pilihan-pilihan politik masyarakat pedesaan membuat mereka lebih bebas menentukan pilihan atas salah satu peserta Pemilu di Orde Baru lebih dari sekedar formalitas sebagaimana kerap terjadi di pusat-pusat kota yang dikuasai oleh partai penguasa Orde Baru yakni Golongan Karya (Golkar). Preferensi politik seperti ini tentu saja sangat khas karena dominasi pemerintahan Orde Baru seolah memastikan

supaya semua aparaturnegara dan masyarakat di sekitarnya yang dekat dengan kekuasaan untuk memenangkan Golongan Karya. Ternyata tidak selamanya demikian dalam pilihan politik masyarakat desa.

## **2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

Capaian pembelajaran dari Modul 8 ini adalah:

- a. Mampu memahami dan mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan bagaimana format Keterwakilan Politik di masa Orde Baru
- b. Mampu memahami politik aliran di tiga peserta Pemilu yakni Golkar, PPP, dan PDI semasa Pemerintahan Orde Baru sebagai bentuk Keterwakilan Politik.
- c. Mampu menguasai Teori Sistem Perwakilan Politik sebagai dasar analisis fenomena politik baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negaramaupun tugas sebagai mahasiswa politik.
- d. Terbentuknya kesadaran sosial akan persoalan politik bangsa berdasarkan pemahaman akan Teori Sistem Perwakilan Politik

## **3. Kemampuan Akhir**

Kemampuan akhir yang akan dimiliki setelah mempelajari Modul 8 ini adalah: mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan bagaimana format Keterwakilan Politik di masa Orde Baru terhadap tiga peserta pemilu yakni: Golkar, PPP, dan PDI, serta pentingnya Fondasi Nasionalisme dalam Keterwakilan Politik.

## **4. Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)**

## **5. Kegunaan Modul 8**

Membantu memahami dan mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan bagaimana format Keterwakilan Politik di masa Orde Baru terhadap tiga peserta pemilu yakni: Golkar, PPP, dan PDI, serta pentingnya Fondasi Nasionalisme dalam Keterwakilan Politik.

## **6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

## **B. KEGIATAN PEMBELAJARAN**

### **B.1. KEGIATAN PEMBELAJARAN-1**

#### **1. Judul Kegiatan Pembelajaran:**

**“POLITIK ALIRAN DI PEMILU ORDE BARU:  
Keterwakilan Politik di Golkar, PPP, dan PDI”**

#### **2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

#### **3. Pemikiran, Uraian, Analisis, dan Contoh**

##### **a.) Politik aliran di masa Orde Baru**

Politik aliran adalah fakta yang selalu akan sering ditemukan dalam peta politik secara umum di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Maka apa yang terjadi dalam politik Indonesia yang sangat kental dengan aliran politik adalah fakta yang kerap akan muncul dalam seluruh negara berdemokrasi. Yang membedakannya adalah apakah politik aliran menjadi demikian sangat kuat mendominasi politik sehingga pertumbuhan demokrasi yang diharapkan malah menjadi tidak terwujud? Sebab semakin kuat dan deras aliran politik merasuki politik sebuah negara atau daerah akan sangat memungkinkan daerah atau negara itu jatuh pada kemungkinan pertikaian antar kelompok dan demokrasi menjadi semakin terabaikan.

Studi Affan Gaffar terutama menjelaskan bahwa di pedesaan Jawa, orang cenderung memilih berdasarkan keyakinan sosio-religius. Yakni kaum Santri lebih memilih partai Islam, dan Abangan lebih memilih partai yang tidak menganjurkan keyakinan Islam seperti PDI. Dari Pemilu 1971 dan 1977 dilaporkan kecenderungan yang sama perihal pilihan responden. Alasan memilih yang dikemukakan oleh Gaffar adalah bahwa diantara pemilih PDI, tampaknya tidak terdapat alasan ideologis yang jelas. Sekitar 32% responden memilih PDI dengan alasan karena tidak suka PPP dan Golkar. Maka ada kecenderungan di antara pemilih PDI yang anti kemapanan pemerintah dan partai Islam.



Gambar 31: Presiden Soeharto saat diambil sumpah/dilantik kembali sebagai Presiden

Alasan lainnya memilih PDI karena tekanan pertemanan, yaitu untuk melakukan hal yang sama dengan orang lain. Alasan ketiga, karena warisan kejayaan Soekarno masih populer di kalangan pemilih PDI. Alasan utama responden memilih Golkar karena citranya sebagai partai pemerintah. Gaffar menyimpulkan hasil penelitiannya demikian,<sup>42</sup>

*“What are the implications of this finding? First, this study does not seem to support earlier studies of voting behavior in western political democracy. These studies indicated that elections are in expression of class struggle. Second, this study has also contributed to the continuing debate among scholars (Indonesian specialist) whether class or culture has more explanatory power in giving an account for Indonesian or Javanese politics. This study clearly indicates that class has nothing to do with individual behavior in Javanese villages, at least when the cast their ballots in election.”*

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 173-174. Argumentasi tentang hal ini dapat juga ditelusuri dalam *Membina Hubungan dengan Konstituen, Seri Penguatan Legislatif* (USAID dari rakyat Amerika: Local Government Support Program), hal 1-2.

[“Apa implikasi dari temuan ini? Pertama, studi ini tidak perhatian untuk mendukung studi-studi terbaru tentang perilaku pemilih dalam demokrasi politik Barat. Studi-studi ini mengindikasikan bahwa pemilihan umum ada dalam ekspresi perlawanan kelas. Kedua, studi ini juga berkontribusi untuk melanjutkan debat diantara ilmuwan (khususnya Indonesia) entah kelas atau budaya memiliki kekuatan penjelasan yang lebih besar dalam memberikan sebuah kegunaan bagi politik Jawa dan Indonesia. Studi ini secara jelas mengindikasikan bahwa kelas tidak memiliki apapun terkait perilaku pemilih di desa-desa Jawa, sekurang-kurangnya ketika mereka menjatuhkan pilihan rahasia dalam Pemilu.”]

Data di Brobanti, Yogyakarta menunjukkan hampir 40% responden memilih Golkar karena mengikuti jejak pemimpin mereka, yakni lurah, kepala dukuh, dan lain-lain. Mereka ingin mengidentifikasi diri dengan pemimpin mereka. Peran kepala dukuh sangat besar dalam memobilisasi massa, sebab 22% pemilih Golkar mengatakan mereka diminta untuk itu. Golkar juga diuntungkan karena diasosiasikan dengan Sultan Yogyakarta, yang adalah ketua Golkar Yogyakarta. Pengikut partai Islam (PPP) adalah responden yang terlihat paling ideologis. Hampir 33% responden memilih PPP karena merasa memilih partai Islam merupakan keharusan selaku Muslim. Sepertiga pemilih PPP juga mengatakan mereka memilih karena diminta pemimpin mereka. Pemimpin Islam mampu meyakinkan pengikutnya bahwa memilih partai Islam itu bagian dari ibadah.

Faktor kepemimpinan dan perilaku memilih menunjukkan bahwa pemilih yang lebih terikat pada pejabat desa akan lebih memilih partai pemerintah (Golkar) daripada mereka yang terikat pada pemimpin agama yang akan mendukung partai Islam (PPP). Bila orientasi sosio-religius dijadikan faktor kontrol dalam analisis ini, sekitar 86% responden Abangan yang terikat pada pejabat desa memilih Golkar, dan hampir setengah jumlah Santri dari kategori yang sama memilih PPP. Partai pemerintah tidak pernah dapat menembus komunitas Santri di desa ini, karena itu Golkar tidak

pernah menang. Di Sukaramai yang pemimpin formal-nya kuat berpengaruh dan mendukung Golkar, partai-partai oposisi selalu kalah. Mengapa demikian, karena mayoritas pejabat desa di tiga desa ini adalah Santri juga. Jadi ideologi memainkan peran penting dalam menghubungkan perilaku antara pemimpin politik dan konstituennya.

Salah satu hal yang membedakan sistem pemerintahan demokratis dan otoriter adalah cara pergantian pemimpin. Proses pergantian pemimpin dalam demokrasi sudah jelas dan pasti, yaitu melalui pemilihan umum yang terbuka dan transparan. Namun, hasilnya sulit diprediksi. Orang hanya bisa menebak siapa yang akan menjadi pemimpin. Dalam sistem pemerintahan otoriter terjadi sebaliknya. Prosesnya tidak pasti, tertutup dan penuh kerahasiaan. Perubahan kepemimpinan hanya melibatkan segelintir orang kuat. Padahal, seperti dalam otokrasi, hanya ditentukan oleh penguasa. Namun, hasilnya sudah diketahui semua orang. Penguasa umumnya adalah orang yang sama.

Pada awal 1990-an, kita sering membahas kata "suksesi". Saat itu, masyarakat mulai mempertanyakan kapan Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 25 tahun itu akan mengundurkan diri. Orang-orang mulai membicarakan reformasi kepemimpinan nasional. Rakyat juga menuntut keterbukaan atau penyimpangan, seperti yang terjadi di Brasil pada masa transisi kekuasaan dari rezim militer ke rezim sipil pada 1980-an. Menanggapi desakan keterbukaan itu, Soeharto melakukan manuver. Dia mulai merangkul kekuatan politik Islam yang dia gunakan untuk menekan. Ia juga mulai berpartisipasi dalam politik massa yang ia hindari sejak awal Orde Baru.

Orde Baru memiliki visinya sendiri tentang apa yang disebut "rakyat". Bagi para ideolog Orde Baru, rakyat adalah massa yang mengambang. Kerumunan ini tidak memiliki ideologi atau kepercayaan, tidak ada imajinasi tentang masa depan. Massa ini tidak pernah bisa membayangkan masyarakat seperti apa yang ingin mereka capai sebagai bangsa Indonesia. Massa ini hanya tunduk pada apa yang diputuskan oleh pemerintah. Mereka tidak bisa

membela diri. Orde Baru ingin menciptakan masyarakat tanpa perbedaan ras, tanpa konflik, dan tanpa perdebatan.

Massa ini kemudian diklasifikasikan ke dalam kelompok fungsional. Artinya setiap orang memiliki perannya masing-masing dan kepentingan seseorang ditentukan oleh peran tersebut. Jika Anda seorang petani, Anda termasuk dalam kelas petani; jika Anda seorang pekerja, Anda berada di kelas pekerja; penulis, penyair, novelis akan diwakili oleh kaum intelektual, dll. Itulah sebabnya Orde Baru mendirikan banyak organisasi fungsional. Mereka adalah anggota kelompok induk organisasi (Kino) yang kemudian membentuk Pokja atau Golkar. Tentu saja, di atas segalanya, tulang punggung sebenarnya adalah militer.

Sebenarnya tidak sulit untuk memahami struktur politik seperti ini. Ini sangat mirip dengan struktur kekuasaan di negara-negara komunis. Ini agak ironis. Orde Baru adalah rezim yang dikenal sangat anti-komunis, tetapi berkuasa dengan cara yang persis sama dengan cara partai komunis mengorganisir kekuasaannya. Situasi agak berubah pada akhir 1980-an ketika Suharto mulai memfokuskan kekuasaannya padanya. Dia mulai mencari jalan keluar dari "koalisi" yang memimpin dan mendukung pemerintahannya sejak awal Orde Baru: militer, teknokrat, kelas kapitalis Cina, dan elit intelektual.

Suka atau tidak suka, Soeharto harus membangun fondasi yang besar. Dia melakukannya, pertama melalui pembentukan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Tapi itu tidak cukup. Dia melakukan penggalangan dana besar-besaran ini terutama melalui Golkar. Sejak kepemimpinan Harmoko (1993-1998), Golkar menjadi partai massa. Anda mungkin ingat ketika Harmoko, sebagai presiden Golkar, berkeliling Indonesia mengumpulkan massa. Dia melakukannya dengan kedok "safari Ramadhan" dan kemudian "kelompok melukis." Tidak ada lagi Golkar yang hanya menghimpun massa saat pemilu.



Gambar 32: Pemerintahan yang kuat Orde Baru selama 32 tahun berkuasa

Saya sudah lama mencari cerita ini untuk memahami bagaimana kedaulatan rakyat diterjemahkan pada masa Orde Baru. Jelas, pada awalnya orang adalah massa yang mengambang; kemudian mereka menjadi massa (lebih tepatnya "massa Golkar", karena mobilisasi massa di era kepemimpinan Harmoko); dan kemudian mereka menjadi "pemilih" di era pasca-Orde Baru. Orang Indonesia memiliki banyak pengalaman pemilu, terutama di tahun 1950-an, ketika polarisasi ideologis sedang akut. Beberapa juga membangkitkan kekerasan. Sebagaimana layaknya demokrasi, debat berlangsung intens dan terkadang emosional.

Apakah pemilih pasca-Orde Baru ini massa? Apakah rakyat benar-benar berdaulat dalam menentukan nasib bersama sebagai suatu bangsa? Apakah masyarakat benar-benar melakukan proses pergantian kepemimpinan secara transparan? Sayangnya, jawaban dari pertanyaan di atas adalah: tidak. Menjadi pemilih saat ini tidak jauh berbeda dengan era Orde Baru. Rezim otoriter tetap kuat meninggalkan sisa-sisanya. Bahkan dapat dikatakan bahwa politik yang kita jalani saat ini merupakan kelanjutan dari mobilisasi massa yang dimulai pada dekade terakhir Orde Baru.

#### **b.) Praktek Patron Klien**

Temuan Gaffar di atas sangat terkait dengan teori politik yang digagas oleh James Scott tentang politik patron-klien. James Scott mengemukakan bahwa dalam politik terdapat pola hubungan patron-klien yakni sekelompok figure informal yang berkuasa (patron) dan

memiliki posisi memberikan rasa aman, pengaruh, atau keduanya. Menurut Scott, seorang patron berposisi dan berfungsi sebagai pemberi terhadap kliennya, sedangkan klien berposisi sebagai penerima segala sesuatu yang diberikan oleh patronnya.<sup>43</sup>

*“Relationship in which an individual of higher socio-economis status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits or both, for a person of a lower status (client) who for his part reciprocates by offering general support and assistance, including personal service, to the person.”*

[Hubungan di mana seorang individu dengan status sosio-ekonomi yang lebih tinggi (pelindung) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya sendiri untuk memberikan perlindungan atau manfaat atau keduanya, untuk seseorang dari status yang lebih rendah (klien) yang untuk bagian tanggungjawabnya adalah membalas dengan menawarkan dukungan dan bantuan umum, termasuk layanan pribadi, kepada orang tersebut.]

Pada tahap selanjutnya, klien membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan kepada patron. Hubungan patron-klien itu sendiri bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. James Scot menjelaskan demikian,<sup>44</sup>

*“The patron-client relationship –an exchange relationship between roles- may be defined as a special case of dyadic (two person) ties involving a largely instrumental friendship in which an individual of higher socio-economic status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits, or both, for a person a lower status (client) who for his part reciprocates by offering general support and asistance, including personal services, to the patron.”*

[Hubungan patron-klien – hubungan pertukaran antara peran – dapat didefinisikan sebagai kasus khusus ikatan diadik (dua

---

<sup>43</sup> James C Scott (2009) “Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia” dalam *The American Political Science Review* Vol. 66, No. 1 (Mar., 1972), hal. 92.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 92.

orang) yang melibatkan persahabatan instrumental yang lebih besar di mana seorang individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruhnya sendiri dan sumber daya untuk memberikan perlindungan atau manfaat, atau keduanya, bagi seseorang yang statusnya lebih rendah (klien) yang kemudian menjadi tanggungjawabnya adalah membalas dengan menawarkan dukungan dan bantuan umum, termasuk layanan pribadi, kepada pelindung.]

Sebagai imbalannya, para pengikut (klien) memberikan loyalitas dan bantuan pribadi kepada patronnya dalam kondisi apapun, baik patronnya dalam keadaan benar ataupun menyimpang/salah. Lebih lanjut James Scott mengemukakan:<sup>45</sup>

*“There is an imbalance in exchange between the two partners which expresses and reflects the disparity in their relative wealth, power and status. A client in this sense is someone who has entered an unequal exchange relation in which he is unable to reciprocates fully. A debt of obligation binds him to the patron.”*

[Ada ketidakseimbangan dalam pertukaran antara kedua mitra yang mengungkapkan dan mencerminkan perbedaan dalam kekayaan, kekuasaan, dan status relatif mereka. Klien dalam pengertian ini adalah seseorang yang telah memasuki hubungan pertukaran yang tidak setara di mana ia tidak dapat membalas sepenuhnya. Hutang kewajiban mengikatnya pada pelindung.]

Scott menyebutkan tiga faktor yang menjadi penyebab tumbuh dan berkembangnya relasi patronase dalam suatu komunitas, yaitu: ketimpangan pasar yang kuat dalam penguasaan kekayaan, status dan kekuasaan yang banyak diterima sebagai sesuatu yang sah, ketiadaan jaminan fisik, status dan kedudukan yang kuat dan bersifat personal serta ketidakberdayaan kesatuan keluarga sebagai wahana yang efektif bagi keamanan dan pengembangan diri.

Scott menuturkan, sistem pemilu dan politik elektoral di Asia Tenggara dalam dekade terakhir ini berimplikasi pada perubahan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 93.

struktur dan pengaruh relasi patron-klien di tubuh parpol. Peran politik patron-klien di Asia Tenggara tersebut kemudian diperjelas Scott demikian:<sup>46</sup>

*“This pattern could be found throughout Southeast Asia in electoral situations but is most striking in the Philippines, where most patron-client ties are centered around land-holding and elections. The Filipino politician, as Wurfel points out, does favors individually rather than collectively because he wishes to create a personal obligation of clientship.”*

[Pola ini dapat ditemukan di seluruh Asia Tenggara dalam situasi pemilu tetapi yang paling mencolok terdapat di Filipina, di mana sebagian besar ikatan patron-klien berpusat di sekitar kepemilikan tanah dan pemilu. Politisi Filipina, seperti yang ditunjukkan Wurfel, lebih menyukai keterlibatan secara individu daripada secara kolektif karena dia ingin menciptakan kewajiban pribadi untuk menjadi klien.]

Sebagian besar politisi kita juga merupakan aktor politik era Orde Baru. Ada yang berpihak pada penguasa, ada pula yang berpihak pada oposisi. Namun, mereka tidak benar-benar perbedaan besar. Orde Baru runtuh, tetapi mentalitas Orde Baru tidak pernah benar-benar hilang. Faktanya, oposisi Orde Baru memiliki mentalitas yang kurang lebih sama dengan rezim yang dilawannya. Tentu saja ada sesuatu yang berbeda: sekarang kekuasaan tidak terkonsentrasi di satu tangan. Berbeda dengan Orde Baru, ketika kekuasaan hanya ada di tangan Suharto. Kronisisme yang pada masa Orde Baru berpusat pada Suharto, kini lebih terdesentralisasi. Penguasa daerah memusatkan kekuasaan mereka pada inti keluarga: istri, anak, menantu perempuan, ciuman atau menantu perempuan.

Rezim lokal yang mirip dengan Orde Baru tumbuh di daerah-daerah tersebut. Elit daerah mendukung kekuasaannya dengan berbagai organisasi yang umumnya didasarkan pada identitas agama atau etnis. Mereka juga memiliki organisasi paramiliter seperti Laskar yang siap melakukan semua pekerjaan bersih dan kotor untuk memobilisasi

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 109.

pemilih. Politisi di tingkat nasional juga senang melindungi penguasa di daerah ini. Penguasa daerah inilah yang pada akhirnya akan mengumpulkan suara jika politisi nasional membutuhkannya. Di sisi lain, otoritas lokal membutuhkan politisi nasional, terutama partai politik, untuk memberi mereka legitimasi.

Hubungan antara politisi pusat dan daerah menjadi sangat transaksional. Kami mendengar bahwa orang harus menyiapkan beberapa miliar rupee sebagai "mas kawin" hanya untuk menjadi calon gubernur atau bupati. Kami juga mendengar bahwa mendirikan partai politik sangat mahal karena partai membutuhkan masyarakat lokal untuk membayarnya. Transaksi dua arah ini membutuhkan perantara politik. Dalam situasi ini, sangat logis bahwa kebijakan moneter menjadi bagian yang sangat penting. Jika politisi lokal membayar untuk mendapatkan legitimasi dan memobilisasi pemilih, maka politisi nasional membutuhkan uang untuk membeli suara secara lokal.



Gambar 33: Salah satu kampanye politik di masa Pemilu Orde Baru

Untuk saat ini, pemilih tetap menjadi massa mengambang. Sebagian besar pemilih tidak tahu siapa yang mewakili mereka. Pemilih juga kurang peduli dengan konsekuensi menempatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam jabatan publik. Politisi juga merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan segala tindakan dan

kebijakannya kepada pemilih konstituennya. Putusnya hubungan antara pemilih dan politisi yang mewakili pemilih merupakan masalah demokrasi pasca-Orde Baru. Kalau saja masalah ini bisa diselesaikan, masalah kebijakan moneter dan korupsi bisa dikurangi.

#### **4. Rangkuman**

- a. Pemerintahan Orde baru oleh Presiden Soeharto yang otoritarian, anggapan bahwa praktek politik hanya semacam formalitas tanpa makna tidak selalu tepat dan benar. Dugaan bahwa demokrasi hanya sebatas gagasan dan angan-angan kosong karena semuanya diarahkan untuk mendukung pemerintahan yang sah, tidak selalu benar di sejumlah kecil daerah. Walaupun situasi pemerintahan sangat kuat dan otoritarian, namun ide politik aliran tetap terasa di masa Orde Baru.
- b. Tiga peserta pemilu yani Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tetap merasakan adanya aliran politik yang mempengaruhi preferensi politik mereka dalam menentukan pilihan politik lebih dari sekedar keterpaksaan atau tekanan dari pemerintah. Di sana ada kebebasan tertentu karena aliran politik yang melekat dalam sekelompok masyarakat atau kelompok tertentu lebih dari sekedar karena pemaksaan pemerintah yang berkuasa.
- c. Data di Brobanti, Yogyakarta menunjukkan responden memilih Golongan Karya karena mengikuti jejak pemimpin mereka, yakni lurah, kepala dukuh, dan lain-lain. Mereka ingin mengidentifikasi diri dengan pemimpin mereka. Peran kepala dukuh sangat besar dalam memobilisasi massa, sebab pemilih Golkar mengatakan mereka diminta untuk itu. Golkar juga diuntungkan karena diasosiasikan dengan Sultan Yogyakarta, yang adalah ketua Golkar Yogyakarta.

#### **5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek**

- a. Latihan
  - i. Setiap mahasiswa ditugaskan untuk menjelaskan praktek implementasi politik aliran dalam konteks demokrasi Indonesia

dalam Pemilu Presiden 2014 dan 2019, serta Pilada DKI Jakarta 2017. Masing- masing memilih satu jenis pemilu saja dan menjelaskan bagaimana itu terjadi.

- ii. Penjelasan implementasi politik aliran dalam salah satu pemilu di atas secara deskriptif.
- iii. Indikator penjelasan implementasi politik aliran di atas didasarkan pada nilai, prinsip, dan prinsip politik aliran sebagaimana telah dijelaskan pada modul ini.

**b. Lembar Kerja Praktik**

Dalam lembar kerja praktek ini mahasiswa menuliskan nama ketiga peserta pemilu di Orde Baru dan bagaimana politik aliran masing-masing sesuai materi di atas.

No	Peserta Pemilu Orde Baru	Praktek Politik Aliran
1	Partai Persatuan Pembangunan	
2	Golongan Karya	
3	Partai Demokrasi Indonesia	

**c. Evaluasi Pembelajaran**

**d. Umpan Balik**

## **B.2. KEGIATAN PEMBELAJARAN-2**

### **1. Judul Kegiatan Pembelajaran:**

**“Piramida Patron Klien Orde Baru Dan Kejatuhannya Kemudian”**

### **2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

### **3. Pemikiran, Uraian, Analisis, dan Contoh**

#### **a.) Piramida Patron Klien di Orde Baru**

Salah satu pengaruh yang tampak adalah munculnya piramida relasi patron-klien. Artinya, terjadi tingkatan-tingkatan patron dari pucuk pimpinan pemegang hak veto keputusan partai sampai tingkatan patron di level lokal dalam satu alur hierarki. Terkait dengan struktur piramida tersebut, Scott menjelaskan,<sup>47</sup>

*“The introduction of competitive elections in Southeast Asia increased the pressures on regimes for the downward distribution of tangible benefits. In return for votes flowing up the vertical chain of patron-client structures, each patron depended upon the downward distribution of patronage in the form of administrative favors, land grants, public employment, and so on, in order to keep his own pyramid of followers intact.”*

[Diperkenalkannya pemilihan umum yang kompetitif di Asia Tenggara meningkatkan tekanan pada rezim untuk distribusi manfaat yang nyata ke bawah. Sebagai imbalan atas suara yang mengalir ke atas rantai vertikal struktur patron-klien, setiap patron bergantung pada distribusi patronase ke bawah dalam bentuk bantuan administratif, hibah tanah, pekerjaan publik, dan sebagainya, untuk menjaga piramida pengikutnya sendiri. utuh.]

Relasi patron-klien atau yang biasa dikenal dengan ‘patronase’ (*patronage*) memaknai bahwa patron sebagai ‘seseorang yang memiliki kekuasaan (*power*), status, wewenang dan pengaruh’. Sedangkan klien berarti ‘bawahan’ atau orang yang diperintah dan yang disuruh.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 112.

Selanjutnya, pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah, dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi. Atau, dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya. Scott menjelaskannya,<sup>48</sup>

*“The basic pattern is an informal cluster consisting of a power figure who is in a position to give security, inducements, or both, and his personal followers who, in return for such benefits, contribute their loyalty and personal assistance to the patron's designs. Such vertical patterns of patron-client linkages represent an important structural principle of Southeast Asian politics.”*

[Pola dasarnya adalah kelompok informal yang terdiri dari figur kekuasaan yang berada dalam posisi memberikan keamanan, bujukan, atau keduanya, dan pengikut pribadinya yang, sebagai imbalan atas manfaat tersebut, menyumbangkan kesetiaan dan bantuan pribadi mereka pada desain patron. Pola vertikal hubungan patron-klien seperti itu mewakili prinsip struktural penting dari politik Asia Tenggara.]

Hubungan patron-klien adalah suatu hubungan yang tidak setara, terjalin secara perorangan antara seorang yang lebih kuat pengaruhnya dengan sejumlah pengikutnya. Hubungan semacam ini terjalin berdasarkan atas pertukaran jasa, dimana ketergantungan klien kepada patronnya dibayarkan atau dibalas oleh patron dengan cara memberikan perlindungan kepada kliennya. Menurut James Scott, seorang patron berposisi dan berfungsi sebagai pemberi terhadap kliennya, sedangkan klien berposisi sebagai penerima segala sesuatu yang diberikan oleh patronnya. Dalam hubungan yang bernama patron-klien, pertukaran barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya memang tidak seimbang. Inilah yang menjadi ciri khas dari sebuah hubungan patron-klien. Jika terjadi

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 92.

sebaliknya, maka hubungan yang terjalin tersebut akan putus dengan sendirinya.

Lalu bagaimana partai harus bersikap dan bagaimana sistem Pemilu yang diharapkan oleh Affan Gaffar untuk konteks Indonesia? Menurut Gaffar, proses rekrutmen anggota DPR bersifat tertutup, hal itu dapat terjadi karena peranan dari kalangan elite partai yang sangat dominan di dalam menentukan siapa yang akan direkrut untuk menjadi anggota DPR. Gaffar menjelaskannya demikian,<sup>49</sup>

“Pimpinan partai khususnya Ketua Partai Politik sangat menentukan siapa calon jadi untuk setiap pemilihan anggota DPR. Hal itu dilakukan dengan menentukan rangking mereka yang dicalonkan. Tidak jarang calon yang sangat populer di suatu daerah dan dicalonkan oleh partainya pada tingkat local diubah oleh DPP Partai dan ditempatkan pada rangking yang kiranya tidak akan mungkin terpilih. Hal itu menimbulkan konflik antara tokoh partai di daerah dengan DPP Partainya. Implikasi lanjutan dari mekanisme rekrutmen seperti itu adalah munculnya kecenderungan Jakarta Sentris seperti terlihat dalam keanggotaan DPR sekarang ini. Akibatnya, mereka kurang sensitive terhadap permasalahan di daerahnya.”

Menurut Gaffar, seorang anggota DPR yang sudah lama tinggal di Jakarta tentu saja sudah tidak banyak mengikuti perkembangan yang terjadi di daerahnya karena kesibukannya sebagai legislatif yang banyak menyita waktu; dia juga telah terokupasi dengan persoalan-persoalan yang ada di Jakarta. Bahkan, tidak mustahil dia mengalami proses “*up rooted*” karena di daerah sudah banyak sekali perubahan, sementara pola berpikir anggota DPR tersebut adalah pola berpikir Jakarta.

Menurut Gaffar, implikasi yang jelas dari proses rekrutmen yang tertutup seperti itu akan membentuk anggota DPR yang

---

<sup>49</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia: transisi menuju demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Mei 1999), hal. 289. Analisa yang kurang lebih sama bisa ditemukan dalam penelitian Moh. Nafsar. Lih. Moh Nafsar, “Perilaku Politik Pemuda Perkotaan: kasus Surabaya” dalam *Analisis CSIS* tahun ke 26 no II tahun 1997, hal. 168-179.

akomodatif terhadap pemerintah dan pimpinan partainya dimana mereka akan mengorbankan kualitas dan mengutamakan *patronage* sebagai akibat negative bagi penampilan anggota DPR ketika mereka memasuki dunia politik Jakarta yang sangat rumit. Tidak jarang pula pimpinan partai politik merekrut orang-orang yang memang mempunyai basis kekuasaan yang kuat pada tingkat local tetapi tidak memiliki latar belakang dan kecakapan yang cukup untuk menjadikannya seorang legislatif yang baik dan tangguh.



Gambar 34: Hanya ada tiga peserta pemilu sejak Pemilu 1977 hingga 1997 di masa Orde Baru

Gaffar memberikan sejumlah contoh dengan perbandingan seorang Tuan Guru di Lombok dengan seorang Kyai di Jawa Timur. Sebagai contoh, seorang Tuan Guru di Lombok memang memiliki basis kekuasaan yang sangat besar di Lombok. Tetapi, basis kekuasaan yang kuat pada tingkat local belum menjadikan ia seorang legislatif yang tangguh karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Tetapi seorang kyai yang sangat terkenal di Jombang Jawa Timur memang sangat dihormati dan disegani di Jawa Timur. Tetapi ia belum menjadi seorang legislatif yang tangguh karena dalam pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPR diperlukan dukungan ilmu pengetahuan yang bersifat sekular.

Banyak persoalan yang bersifat teknis yang harus dihadapi seorang anggota DPR untuk didiskusikan dengan kalangan pejabat pemerintah eksekutif dengan pengalaman yang sangat luas karena

mereka merupakan birokrat karir yang tahu benar persoalan di departemennya. Gaffar menjelaskannya demikian,<sup>50</sup>

“Oleh karena itu tidak jarang kesetaraan antara pejabat eksekutif dengan sebagian besar anggota DPR itu menjadi sangat pincang, apalagi kalau anggota DPR yang terpilih ini betul-betul baru memasuki rimba raya politik Jakarta.”

Gaffar menjelaskan untuk rekrutmen anggota DPR perlu diadakan perubahan sistem pemilihan umum dari sistem pemilihan yang bersifat *Proportional Representation* (PR) menjadi sistem pemilihan yang bersifat pluralitas yaitu dengan menggunakan *simple majority single ballot system* yang di Indonesia dikenal dengan sistem distrik. Dengan sistem ini, *the winner takes all*, artinya dengan perolehan suara mayoritas yang sederhana si pemenang akan memenangkan semua perolehan kursi di wilayah itu. Dengan menggunakan sistem rekrutmen seperti itu, wajah DPR akan berubah karena akan terpilih anggota DPR yang lebih berkualitas, lebih berwibawa dan mempunyai kecenderungan untuk independen dari partai dan lebih berorientasi pada masyarakat pemilih atau *constituency* mereka.

Pandangan Affan Gaffar tentang politik aliran di masa Orde Baru di Pulau Jawa tersebut bisa ditelusuri dalam peta politik nasional di masa Era Reformasi dalam lima kali Pemilu Legislatif sejak tahun 1999 hingga Pemilu Legislatif tahun 2019. Penelusuran itu misalnya dengan melihat bagaimana para politisi Kristiani bisa memenangkan suara signifikan dalam pemilu legislative yang justru mayoritas di basis-basis Islam yang kuat seperti Jawa Barat, banten, DKI dan sejumlah provinsi lain. Mengandalkan isu primordial dan patron klien saja tentu tidak mencukupi ketika melihat keterpilihan caleg-caleg Kristen justru dari basis Islam yang kuat.

Tentu saja tidak bisa ditolak begitu saja adanya unsur nasionalisme dalam keterpilihan caleg-caleg Kristen tersebut. Karena tidak mungkin caleg Kristen terpilih dari basis Islam yang kuat kalau mereka tidak dipilih oleh warga yang sangat mayoritas berbeda

---

<sup>50</sup> Gaffar, *Politik Indonesia .... op.cit.*, hal. 290.

suku dan agama dengan caleg Kristen yang berarti di sana ada semangat nasionalisme, baik yang diusung oleh partai maupun yang diusung oleh caleg bersangkutan. Keterpilihan caleg Kristen tidak bisa dilepaskan dari sikap nasionalisme dan visi misi partai pengusungnya sehingga mereka bisa diterima.

Suharto (1921-2008), presiden kedua Indonesia, berkuasa di tengah krisis darurat dan pertumpahan darah. Pendahulunya, Sukarno, telah menciptakan komposisi pemerintahan antagonis yang berbahaya yang terdiri dari faksi-faksi nasionalis, komunis, dan agama yang mencurigakan. Partai lain yang mencari kekuatan politik adalah tentara, yang menjadi lebih berpengaruh dalam politik Indonesia pada 1950-an ketika dibutuhkan untuk menumpas serangkaian pemberontakan yang mengancam persatuan Indonesia.

Keempat kelompok ini sangat curiga satu sama lain. Ketidakpercayaan ini memuncak dalam tragedi pada pertengahan 1960-an ketika sekelompok perwira sayap kiri, di bawah pengaruh Partai Komunis Indonesia (menurut versi tentara), melakukan kudeta dengan menculik dan membunuh tujuh pemimpin militer. Kunci dari mereka yang menuduh. Aku mencintaimu. menggulingkan Presiden Soekarno. Suharto, seorang pejabat tinggi yang mengambil alih kekuasaan militer selama periode kekacauan ini, mengklaim bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) berada di balik semua kekacauan ini. Selama bulan-bulan berikutnya, ratusan ribu komunis dan tersangka komunis dibantai di Sumatera, Jawa, dan Bali. Terlepas dari banyak fakta palsu, jelas bahwa Jenderal Suharto muncul sebagai pemegang kekuasaan utama dalam kekacauan tahun 1960-an.

Pelacakan peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru merupakan peristiwa yang belum selesai. Situasinya dapat digambarkan. Ketika pada 11 Maret 1966, Indonesia masih shock dan terjebak dalam kekacauan. Pada hari yang sama, Presiden Soekarno dipaksa untuk menandatangani dekrit yang memberi Jenderal Suharto kekuatan untuk mengambil tindakan untuk menjaga keamanan, perdamaian, dan stabilitas negara. Keputusan ini kemudian dikenal sebagai dokumen Supersemar (Perintah Sebelas Maret) dan berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer kekuasaan eksekutif dari Sukarno

ke Suharto. Suharto dengan cepat melarang semua kegiatan PKI, mulai membersihkan tentara dari unsur-unsur sayap kiri, dan mulai memperkuat peran politik militer dalam masyarakat Indonesia.

Saat masih presiden, kekuasaan Sukarno memudar dan Suharto secara resmi dinyatakan sebagai presiden pada tahun 1967 dan dilantik sebagai presiden kedua Indonesia pada tahun 1968. Ini menandai munculnya era baru yang disebut "Orde Baru" dan menandakan perubahan dalam kebijakan pemerintah. Pemerintah Suharto fokus pada pembangunan ekonomi. Hubungan dengan Barat, yang telah dihancurkan Sukarno, dipulihkan, memungkinkan bantuan asing yang sangat dibutuhkan mengalir ke Indonesia. Para teknokrat memulai manajemen fiskal yang hati-hati dan konfrontasi yang berbahaya dan mahal melawan Malaysia dihentikan.

Langkah Suharto selanjutnya adalah depolitisasi Indonesia. Menteri tidak bisa membuat kebijakan sendiri. Sebaliknya, mereka harus melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh atasannya (presiden). Golkar (kependekan dari Golkar, atau kelompok fungsional) digunakan sebagai kendaraan parlementer Suharto yang kuat. Golkar mencakup beberapa ratus kelompok fungsional yang lebih kecil (seperti serikat pekerja, petani dan pengusaha) yang memastikan bahwa partai politik tidak dapat lagi memobilisasi masyarakat Indonesia.

Golkar dikembangkan sebagai alat untuk memastikan bahwa mayoritas suara dalam pemilu mendukung pemerintah. Golkar memiliki jaringan yang menjangkau ke desa-desa dan didanai untuk memajukan Pemerintah Pusat. Pejabat publik harus mendukung Golkar, sedangkan kepala desa mendapat bagian suara Golkar, yang harus dihormati. Kebijakan ini membuahkan kemenangan besar bagi Golkar dalam pemilihan umum 1971.

Untuk lebih memperkuat kekuatan politiknya, Suharto "menekan" sembilan partai politik yang ada untuk bergabung, hanya menyisakan dua partai. Partai pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari partai-partai Islam dan pihak kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang terdiri dari partai-partai nasionalis dan Kristen. Namun, aktivitas politik kedua

partai tersebut sangat terbatas, sehingga masa kampanye hanya menjelang pemilihan umum.

Ciri dasar situasi pemerintahan Orde Baru sejak awal adalah pemerintahan yang semakin otoriter setelah lebih dari sepuluh tahun berkuasa. Sejak awal Orde Baru, tingkat pertumbuhan ekonomi makro sangat mengesankan (penjelasan lebih rinci dapat ditemukan di bagian 'Keajaiban Orde Baru'). Namun, kebijakan ini juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Indonesia karena pemerintah dinilai terlalu fokus menarik investor asing. Sementara itu, peluang investasi besar hanya ditawarkan kepada orang Indonesia yang biasanya perwira militer atau sekelompok kecil warga keturunan Tionghoa (yang merupakan kelompok minoritas di Indonesia tetapi mendominasi perekonomian).

Muak dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), ribuan orang berdemonstrasi pada 1974 ketika Perdana Menteri Jepang berkunjung ke Jakarta. Demonstrasi ini berubah menjadi kerusuhan besar-besaran yang disebut "kerusuhan Malari". Itu adalah pengalaman yang mengerikan bagi pemerintahan baru karena menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa mengendalikan massa. Khawatir suatu hari akan ada perlawanan dari jutaan masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan, pemerintah mengambil kebijakan baru (yang lebih mendesak). Dua belas surat kabar ditutup dan wartawan ditahan tanpa pengadilan. Hal ini mendorong media untuk menyensor diri mereka sendiri. Semua ketidakpuasan yang diungkapkan secara terbuka (seperti demonstrasi) segera ditekan. Aspek ekonomi dari perubahan kebijakan ini yang banyak mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia merupakan awal dari upaya pembatasan investasi asing dan kebijakan yang memberikan perlakuan khusus kepada pengusaha pribumi.



Gambar 35: Gaya Presiden Soeharto di zaman Orde Baru pangkas partai politik

Dalam politik nasional, Suharto berhasil semakin memperkuat posisinya di tahun 1970-an. Puncak produksi minyak nasional menjamin penerimaan negara yang melimpah. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program pengentasan kemiskinan. Namun, secara internasional, citra Indonesia telah memburuk karena invasi Timor Timur. Setelah penghentian kekuasaan kolonial Portugis - dan deklarasi kemerdekaan Timor Timur pada tahun 1975 - tentara Indonesia dengan cepat menyerbu negara itu; invasi kekerasan. Pada tahun 1984, semua organisasi sosial-politik harus mendeklarasikan Pancasila (lima prinsip dasar negara Indonesia yang diperkenalkan oleh Sukarno pada tahun 1940-an) sebagai satu-satunya ideologi mereka. Lebih lanjut, Suharto menggunakan Pancasila sebagai alat represif karena semua ormas diancam akan dituduh melakukan tindakan anti-Pancasila.

#### **b. Oposisi Menguat dan Kejatuhan Orde Baru Suharto**

Dapat dikatakan bahwa pada tahun 1980-an, Suharto berada di puncak kekuasaannya. Semua pemilu dimenangkan dengan mudah. Selanjutnya, ia berhasil membuat militer tidak berdaya. Seperti partai politik dan pejabat publik, militer hanya bekerja untuk melaksanakan kebijakan Suharto. Namun depolitisasi masyarakat Indonesia ini telah

menimbulkan efek samping yang besar, yaitu meningkatnya kesadaran akan Islam, khususnya di kalangan anak muda Indonesia. Karena arena politik adalah wilayah tertutup, umat Islam melihat Islam sebagai alternatif yang aman. Keberatan dan keluhan tentang pemerintah dibahas di masjid dan khutbah karena terlalu berbahaya untuk berbicara dalam demonstrasi (yang juga akan berhenti jika itu terjadi). Kebangkitan Islam menyebabkan perubahan kebijakan lebih lanjut di awal 1990-an.

Karena kekuatan Islam selalu kuat sepanjang sejarah Indonesia, para pemimpin umum organisasi Muslim seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki lebih banyak ruang untuk mengkritik Suharto (politisi). Suharto (Muslim tradisional yang kurang religius) mulai mengadopsi pendekatan baru terhadap Islam pada awal 1990-an, termasuk ziarah Suharto ke Mekah pada 1991, pengerahan lebih banyak perwira "ramah Islam", memimpin benteng-benteng pertahanan. angkatan bersenjata dan pangkalan Indonesia. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. ICMI). ICMI didirikan lebih sebagai tempat untuk mengekspresikan kontribusi Muslim terhadap kebijakan publik daripada sebagai organisasi politik massa. Keanggotaannya termasuk para pemimpin Islam yang kritis dan tidak terlibat, serta para menteri kabinet. Semua upaya gabungan ini berhasil meredam kritik dari komunitas Muslim.

Selama tahun 1990-an, pemerintah Orde Baru Suharto mulai kehilangan kendali karena orang Indonesia menjadi lebih tegas. Ini sebagian karena keberhasilan mereka sendiri: perkembangan ekonomi yang mengesankan telah memungkinkan lebih banyak orang Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan orang-orang terpelajar ini frustrasi karena mereka tidak memiliki pengaruh untuk mengubah situasi politik di negara ini. Sedangkan pengusaha pribumi frustrasi karena tidak mendapatkan peluang bisnis karena peluang bisnis besar hanya diberikan kepada keluarga Soeharto dan teman dekatnya (kroni-kroninya). Sejak 1993, demonstrasi jalanan semakin sering terjadi dan bukannya tanpa hasil, misalnya, undian yang disponsori pemerintah terpaksa dihentikan karena demonstrasi oleh mahasiswa dan kelompok Muslim. Selain itu, beberapa pejabat yang didukung

oleh pemerintah pusat dikalahkan dalam pemilihan di provinsi. Hal ini menunjukkan kepada publik bahwa rezim Suharto bukannya tanpa kelemahan.

Isu lain yang berdampak negatif pada posisi pemerintah adalah kegiatannya mencampuri urusan internal PDI. Megawati Soekarnoputri (putri Soekarno) terpilih sebagai presiden umum PDI pada 1993 menggantikan Suryadi. Namun, pemerintah tidak mengakui keputusan ini dan memerintahkan pemilihan ulang. Megawati, yang semakin kritis terhadap rezim Suharto, dipandang sebagai ancaman nyata karena status ayahnya. Karena itu, pemerintah pusat mendukung Suryadi dalam kongres lain tanpa mengundang partisipasi Megawati. Hal ini mengakibatkan terpilihnya kembali Suryadi sebagai presiden jenderal, namun Megawati jelas menolak mengakui hasil kongres buatan ini. Hal ini kemudian menyebabkan perpecahan di dalam PDI, serta bentrokan dengan kekerasan di kantor pusatnya di Jakarta. Publik kecewa karena Soeharto ikut campur dalam urusan internal PDI, terutama menyangkut putri Sukarno.

Legitimasi pemerintahan otoriter Suharto terutama bersumber dari perkembangan ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahannya. Setelah keputusan tahun 1960-an, proses industrialisasi mengubah Indonesia menjadi ekonomi yang menjanjikan. Lembaga internasional berpengaruh (seperti Bank Dunia) menyatakan Indonesia sebagai "keajaiban Asia Timur" pada tahun 1990. Istilah lain yang digunakan oleh lembaga internasional untuk menggambarkan kinerja ekonomi Indonesia adalah "harimau Asia" dan "ekonomi Asia Asia. Asia. Asia. Kinerja tinggi. (HPAE). Tentu saja dunia internasional juga menyadari bahwa pemerintah tidak selalu menghormati hak asasi manusia. Namun ironisnya, sifat represif Orde Baru juga menjadi kunci pengentasan kemiskinan bagi jutaan rakyat. Tahun 1960-an, lebih dari 50% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, sedangkan pada tahun 1993 angka ini turun menjadi 13,5% dari total penduduk. Indikator sosial lainnya (seperti partisipasi sekolah, kematian bayi, harapan hidup) menunjukkan hasil positif yang serupa.

Gaya pemerintahan Suharto adalah sistem patronase politik. Sebagai imbalan atas dukungan politik atau keuangan, ia membujuk para pengkritiknya dengan memberi mereka pekerjaan pemerintah yang baik dan peluang bisnis yang menguntungkan. Namun, perlakuan istimewa ini tidak terbatas pada pengkritiknya. Selama dekade terakhir pemerintahan Suharto, anak-anak dan teman-teman dekatnya mampu membentuk kerajaan bisnis hanya berkat hubungan dekatnya dengan Suharto. Meskipun banyak orang Indonesia yang frustrasi dengan tingginya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam pemerintahan, pemerintah selalu dapat merujuk pada perkembangan ekonomi yang mengesankan dan memberi tahu publik bahwa upaya sedang dilakukan untuk memberantas korupsi di negara ini. adalah.

Namun, pilar ekonomi yang menjadi alat legitimasi tersebut menghilang ketika krisis keuangan Asia melanda tahun 1997-1998 (penjelasan lebih rinci dapat ditemukan di bagian Krisis Keuangan Asia). Indonesia menjadi negara yang paling terkena dampak krisis ini, yang kemudian menimbulkan efek bola salju. Dari krisis ekonomi, dampaknya terus menimbulkan krisis sosial dan politik. Banyak prestasi ekonomi dan sosial yang runtuh dan rakyat Indonesia memutuskan untuk menuntut pemerintahan baru (tanpa kehadiran Suharto). Jakarta menjadi medan pertempuran di mana kerusuhan menghancurkan ribuan bangunan dan lebih dari seribu orang tewas. Pada 21 Mei 1998, Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, sekutu dekat Suharto, menjadi presiden ketiga Indonesia. Dia tidak punya pilihan selain menerima tuntutan rakyat Indonesia untuk memulai era Reformasi.

#### **4. Rangkuman**

- a. Pengikut partai Islam (PPP) adalah responden yang terlihat paling ideologis. Hampir sebahagian terbesar responden menjawab pilihan mereka terhadap PPP karena merasa memilih partai Islam merupakan keharusan selaku Muslim. Sepertiga pemilih PPP juga mengatakan mereka memilih karena diminta pemimpin mereka.

Pemimpin Islam mampu meyakinkan pengikutnya bahwa memilih partai Islam itu bagian dari ibadah.

- b. Alasan memilih PDI tampaknya karena mengagumi warisan kejayaan Soekarno masih populer di kalangan pemilih PDI. Responden pemilih PDI memilih partai itu dengan argumentasi tidak suka PPP dan Golkar. Maka ada kecenderungan di antara pemilih PDI yang anti kemapanan pemerintah dan partai Islam. Alasan lainnya memilih PDI karena tekanan pertemanan, yaitu untuk melakukan hal yang sama dengan orang lain.

## 5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek

### a. Latihan

- 1.) Setiap mahasiswa ditugaskan untuk menjelaskan praktek implementasi politik aliran dalam konteks demokrasi Indonesia dalam Pemilu Presiden 2014 dan 2019, serta Pilada DKI Jakarta 2017. Masing- masing memilih satu jenis pemilu saja dan menjelaskan bagaimana itu terjadi.
- 2.) Penjelasan implementasi politik aliran dalam salah satu pemilu di atas secara deskriptif.
- 3.) Indikator penjelasan implementasi politik aliran di atas didasarkan pada nilai, prinsip, dan prinsip politik aliran sebagaimana telah dijelaskan pada modul ini.

### b. Lembar Kerja Praktik

Dalam lembar kerja praktek ini mahasiswa menuliskan nama ketiga peserta pemilu di Orde Baru dan bagaimana politik aliran masing-masing sesuai materi di atas.

No	Peserta Pemilu Orde Baru	Praktek Politik Aliran
1	Partai Persatuan Pembangunan	
2	Golongan Karya	
3	Partai Demokrasi Indonesia	

**c. Evaluasi Pembelajaran**

**d. Umpan Balik**

**C.PENUTUP**

**1. Rangkuman**

Mempelajari modul ini akan mendorong mahasiswa atau siapapun yang pembaca untuk memahami bahwa politik aliran di masa Orde Baru tetap terjadi walaupun sistem pemerintahan bersifat otoriter dan hegemoni. Politik aliran justru menjadi pilihan yang sangat menentukan bagi rakyat khususnya di daerah-daerah yang jauh dari periferi yakni di daerah-daerah pinggiran yang sering atau kerap tidak terjangkau oleh kekuasaan pemerintah pusat.

Politik aliran tersebut tidak hanya mencapai partai non pemerintah yakni PPP dan PDI sebagai dua partai yang menjadi pesaing Golkar miliknya pemerintah selama masa Pemilihan Umum di Orde Baru walaupun tidak pernah bisa memperoleh hasil yang mampu menyaingi Golongan Karya. Tetapi politik aliran tetap juga menjadi pilihan bagi rakyat ketika memilih Golongan Karya sebagai organisasi social politik yang diusung oleh pemerintahan berkuasa dalam peserta pemilu di Orde Baru. Tetap saja ada warga memilih Golkar justru ketika dirinya merupakan aliran politik yang terikat dengan Golongan Karya sebagaimana ditemukan dalam hasil penelitian yang sudah dijelaskan di atas.

Ringkasnya, politik aliran bukan sesuatu yang dilarang dan dimusuhi dalam pemerintahan Orde Baru karena memang politik aliran yang terjadi tidak akan membuat berkurang sangat banyak perolehan suara Golongan Karya di setiap pemilu. Terbukti Golongan Karya selalu menjadi pemenang tunggal pemilu dengan perolehan suara sangat signifikan jauh melampaui perolehan suara nasional kedua partai lain. Hasil pemilu tersebut selalu terjadi di sepanjang pemilu masa Orde Baru.

## 2. Daftar Istilah

Istilah	Arti
Orde Baru	Orde Baru (seringkali disingkat Orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela.
Golongan Karya	Golongan Karya di masa Orde Baru adalah salah satu organisasi social politik (yang setara dengan dua Partai Politik) sebagai peserta sepanjang masa Pemilu Orde Baru. Maka bisa disebut bahwa Partai Golongan Karya adalah sebuah partai politik di Indonesia. Didirikan sebagai Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya) pada tahun 1964, dan berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam pemilihan nasional pada tahun 1971 sebagai Golkar (Golongan Karya). Golkar tidak resmi menjadi partai politik sampai tahun 1999, ketika itu diperlukan untuk menjadi sebuah partai untuk kontes pemilihan. Golkar adalah kelompok politik yang berkuasa dari 1971 hingga 1999, di bawah presiden Suharto dan B. J. Habibie. Ia kemudian bergabung dengan koalisi yang berkuasa di bawah presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
	<p>Presiden Joko Widodo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terpilih pada tahun 2014, Golkar awalnya bergabung dengan koalisi oposisi yang dipimpin oleh mantan jenderal Prabowo Subianto tetapi pada tahun 2016 beralih kesetiaannya kepada pemerintah Widodo.</p>
<p>PPP</p>	<p>Partai Persatuan Pembangunan (disingkat PPP atau P-3 (tiga) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Pada saat pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973 partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Parmusi. Ketua sementara saat itu adalah Mohammad Syafa'at Mintaredja. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973.</p>
<p>PDI</p>	<p>Partai Demokrasi Indonesia (PDI) adalah salah satu partai politik di Indonesia yang pernah menjadi kontestan Pemilu. PDI didirikan pada tanggal 10 Januari 1973, merupakan fusi (penggabungan) dari beberapa partai yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan juga dua partai keagamaan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.</p>

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
	<p>Dalam tubuh PDI, massa terbesar adalah berasal dari PNI, partai yang didirikan oleh Soekarno dengan basis massa di Jawa Timur dan Jawa Tengah. IPKI adalah partai yang sangat anti-PKI pada zaman Orde Lama dalam hal ini posisinya adalah berseberangan dengan Partai Murba yang dibubarkan oleh Keputusan Presiden pada tanggal 21 September 1965. PDI mempunyai komitmen ideologi Pancasila sebagai prinsip dasar perjuangannya. Pada awal berdirinya, pada tahun 1973, PDI dipimpin oleh Mohammad Isnaeni.</p> <p>Dengan berkembangnya semangat rehabilitasi nama Soekarno yang merupakan "Proklamator dan juga pencetus Pancasila" maka pada masa kepemimpinan Soerjadi pada tahun 1986 mulailah diadakan pendekatan terhadap keluarga Sukarno yaitu Megawati Soekarnoputri dan juga Guruh Soekarnoputra untuk bergabung dalam PDI. Dalam pemilu 1987 PDI mendapatkan sambutan positif baik dari kaum Sukarno (PNI) dan terutama juga golongan pemilih muda pemula.</p>
Patron (Politik)	Patronasi adalah pemberian bantuan, dukungan, keistimewaan, atau bantuan keuangan dari suatu organisasi atau individu kepada organisasi atau individu yang lainnya. Dalam sejarah seni, istilah patronasi seni mengacu kepada dukungan yang diberikan oleh para raja, paus, dan orang kaya kepada para seniman. Di beberapa negara, istilah ini mengacu kepada patronasi politik, yaitu penggunaan sumber daya negara untuk

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
	<p>memberikan imbalan kepada individu yang telah memberikan dukungan elektoral. Beberapa jenis sistem patronasi tidak dilarang, seperti pengangkatan menteri dari kalangan anggota partai. Namun, ada pula bentuk patronasi yang tergolong sebagai tindakan korupsi, kolusi atau nepotisme.</p>
Klien (politik)	<p>Klien adalah bahagian yang tidak terpisahkan dan posisinya lebih rendah dari posisi dan kudukannya dari Patron. Kliean adalah pihak yang dimanfaatkan oleh patron untuk kepentingannya dan kliean menerima hasil manfaat yang dia dapat dari Patron. Sebab itu hubungan dalam patron-klien tidak permanen, hanya ada selama komoditas yang dipertukarkan antar kedua pihak (patron dan klien) mengalir lancar. Juga, terjadi semacam pembaruan "kontrak" baik diajukan oleh si patron atau si klien seputar komoditas yang dipertukarkan tersebut. Klien umumnya menyerahkan kerja, pendapatan, suara, kepatuhan politik, dan dukungan bagi patron, agar patron dapat terus memelihara jabatan dan kekuasaannya. Sebagai imbal-balik, klien memperoleh perlindungan, akses informasi maupun sumber daya, identitas kelompok, dan kesempatan meraih kemajuan pribadi.</p>
Hierarki kekuasaan	<p>Adalaha susunan secarateratur dan berurut dari paling atas hingga paling rendah dari posisi-posisi aau jenjang dalam kekuasaan politik. Sosok-sosok penguasa yang sudah mampu menduduki tempat tertinggi dalam percaturan perpolitikan suatu daerah baik dari tingkat</p>

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
	<p>pusat maupun daerah pasti berusaha untuk mempertahankan kekuasaan yang sudah diraihinya dengan membentuk pasukan pengaman kekuasaan agar tidak lepas dari genggamannya. Berbagai alasan dijadikan sebagai landasan pembentukannya hirarki kekuasaan tersebut, baik dari alasan pelestarian kekuasaan, pembagian kue-kue pembangunan, sampai dengan alasan mempertahankan wilayah kekuasaan demi generasi masa depan. Hirarki kekuasaan yang terbentuk biasanya terdiri dari sekumpulan orang-orang yang dianggap punya misi dan visi sama dalam menjalankan sebuah roda kekuasaan. Orang-orang yang dianggap setia dan tidak akan mengguncahkan kedudukan sang penguasa dengan berbagai alasan. Orang-orang yang bahkan akan terus mendukung dengan segala daya dan upaya melanggengkan kekuasaan yang sudah diraih dan bahkan kalau perlu mempertahankan kekuasaan yang sudah diraih selama yang mampu mereka pertahankan.</p>

### 3. Daftar Referensi

*Analisis CSIS tahun ke 26 no II tahun 1997.*

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara PascaReformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Berger, P dan Luckmann. T. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan. ILP3ES : Jakarta. Berry, John W. et.el (1999). Psikologi Lintas Budaya : Riset dan Aplikasi*. PT. Gramedia : Jakarta, 1990.

Blondel, J. *Comperative Government*. London : Prentice Hall  
Chandra Kirana, Geertz dan Masalah Kesukuan. Prisma No. 2, 1995

Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik Jakarta*. Jakarta, 2010

Geertz, Clifford. *Tafsir Kebudayaan*. (Terjemahan oleh Fransisco Budi Hardiman). Yogyakarta : Kanisius, 1992.

Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princenton University Press, 1980.

Gurr, Ted Robert (1995) *Minorities At Risk : A Global Ethnopolitical Conflicts*. Washington : Institute of Peace Press.

Hariyanto, I. *Melangkah Dari Reruntuhan Tragedi Situbondo*. Jakarta Grasindo, 1998.

Hefner, Robert W. *Geger Tengger, Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*. LkiS : Yogyakarta, 1999.

Human Right Watch / Asia (1998). *Konflik Etnis di Kalimantan Barat (terjemahan Harian / Hartono)*. Yogyakarta : Institut Arus Informasi, 1998.

Huntinton, Samuel P. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia (Terjemahan M. Sadat Ismail)*. Yogyakarta : Qalam, 2000.

James C Scott (2009). *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia*. The American Political Science Review Vol. 66, No. 1.

Liddle, William (1970), *Ethnicity, Party and Nationality Integration, In Indonesia Case Study*. New Haven and London : Yale University, 1970.

- Membina Hubungan dengan Konstituen, Seri Penguatan Legislatif.*  
USAID dari rakyat Amerika: Local Government Support  
Program (Tanpa Tahun)
- Rauf, Maswadi, “Musyawarah untuk Mufakat: Sebuah Cara  
Penentuan Kebijakan Politik dalam Amir Santoso (ed.).  
*Pembangunan Politik di Indonesia.* [tanpa penerbit, tanpa  
tahun].
- Samosir, Osbin. *Keterwakilan Politik Kristen di Basis Islam yang  
Kuat.* Jakarta: UKIPress, 2017.
- Sukarna. *Ideologi: Suatu Studi Ilmu Politik.* Bandung: Penerbit  
Alumni, 1981.
- Vlesenthal, East - Abraham Bridgestahl. *Politic Behaviour vol 7 no  
4, tahun 1997.*
- Yoyo Rohaniah, d. E. (2015). *Pengantar Ilmu Politik Kajian  
Mendasar Ilmu Politik.* Malang: Intrans Publishing, 2015.

## **MODUL 9**

### **KETERWAKILAN POLITIK PADA PEMILU ERA REFORMASI: Belajar dari Keterpilihan Minoritas**

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **1. Deskripsi Singkat**

Pembahasan pada modul ini merupakan bagian dari analisis terhadap praktek sistem perwakilan politik yang terjadi dalam masa Pemilihan Umum di Era Reformasi. Apalagi dalam dua kali pemilihan nasional terakhir saat BMP ini ditulis yakni Pemilihan Umum Nasional Tahun 2014 dan Pemilu Nasional Tahun 2019 yang sangat terasa dominasi praktek politik identitas. Hasil dari pemilu era Reformasi khususnya di masa dua pemilu tersebut di atas setidaknya akan menjadi refleksi bagaimana sistem perwakilan politik bisa berjalan di Indonesia dalam era demokrasi modern.

Juga akan dilihat bagaimana kehadiran para politisi dari kalangan minoritas dalam hal ini para politisi Kristen justru ketika isu politik identitas menjadi sangat kuat dan kental padahal mereka dicalonkan dari daerah berbasis agama yang berbeda yakni Islam yang justru menjadi basis dari sangat kuatnya isu politik identitas terjadi. Maka dengan melihat Modul ke 9 ini sebagai modul terakhir, refleksi kita akan sistem perwakilan politik di masa Era Reformasi justru akan sangat menarik. Alasannya karena karakter sistem perwakilan di masa Era Reformasi ini dengan sistem pemilu dan kondisi politiknya sangat berbeda jauh dari sistem perwakilan politik melalui pemilihan umum di masa Orde Lama dan masa Orde Baru.

##### **2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

Capaian pembelajaran dari Modul 9 ini adalah:

- a. Mampu memahami dan mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan bagaimana Keterwakilan Politik Pada Pemilu Era Reformasi dengan Belajar Dari Keterpilihan Minoritas
- b. Mampu melihat dan merefleksikan bagaimana politik Indonesia di Era Reformasi justru dikotori oleh maraknya Politik Identitas,

demokrasi Indonesia justru kuat dengan isu-isu politik Identitas yang justru harus dihindari tersebut

- c. Mampu memahami dan menganalisis implementasi Sistem Perwakilan Politik di Era Reformasi ketika maraknya politik identitas khususnya atas nama agama dalam kaitannya dengan Nasib Politisi Kristen di Basis Islam di Era Reformasi, serta Alasan Pemilih Muslim Memilih Caleg Kristen di Basis Islam. Suatu fakta riil yang menarik dalam Pemilu Era Reformasi Indonesia.
- d. Terbentuknya kesadaran sosial akan persoalan politik bangsa berdasarkan pemahaman akan Teori Sistem Perwakilan Politik sehingga menemukan solusi atas fenomena politik berdasarkan konsep dan teori yang dipelajari;
- e. Menganalisis fenomena politik berdasarkan pembelajaran student *center learning* melalui praktek penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

### **3. Kemampuan Akhir**

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari Modul 9 ini adalah:

Mahasiswa/i mampu memahami dan mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan berbagai perilaku politik, dan partisipasi politik dalam sistem perwakilan politik yang terjadi di Era Reformasi.

### **4. Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)**

### **5. Kegunaan Modul 9**

Membantu mahasiswa mengidentifikasi dan menganalisis Sistem Perwakilan Politik di Era Reformasi termasuk nasib para politisi kalangan minoritas terkait dengan bentuk-bentuk perilaku politik, aktor politik, serta mengukur bentuk partisipasi politik dalam proses pembuatan keputusan politik.

## 6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi Pokok:

**“KETERWAKILAN POLITIK PADA PEMILU ERA REFORMASI: Belajar dari Keterpilihan Minoritas”**

Sub Materi:

- a. Maraknya Politik Identitas
- b. Nasib Politisi Kristen di Basis Islam di Era Reformasi
- c. Alasan Pemilih Muslim Memilih Caleg Kristen di Basis Islam

## B. KEGIATAN PEMBELAJARAN

### 1. Judul Kegiatan Pembelajaran:

**“KETERWAKILAN POLITIK PADA PEMILU ERA REFORMASI: Belajar dari Keterpilihan Minoritas”**

### 2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu mahasiswa mengidentifikasi dan menganalisis Sistem Perwakilan Politik di Era Reformasi termasuk nasib para politisi kalangan minoritas dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia.

### 3. Uraian, Fakta Pemilu, dan Analisis

#### a.) Memahami Kondisi Politik Era Reformasi

Sistem perwakilan politik yang digagas oleh sejumlah pemikir politik tentang politik keterwakilan sebagaimana diungkapkan dalam bab-bab terdahulu merupakan hasil pemikiran setelah melihat bagaimana perkembangan politik keterwakilan di hampir seluruh belahan dunia. Allan Ware melihat kehadiran figure atau sosok yang mampu menarik simpati pemilih akan menjadi wakil pilihan rakyat di era modern. Sementara sistem keterwakilan menurut Anne Philips yakni harus merujuk pada *politics of presence* (politik kehadiran) adalah salah satu penegasan tentang pentingnya kehadiran langsung para pihak yang harus diwakili. Bagi Philips, posisi si terwakil harus benar-benar hadir dalam perwakilan politik tanpa harus memberikan

perwakilan dimaksud ke wakil yang bukan rumpunnya karena bisa malah bertindak salah dan tidak paham dari prinsip dasarnya.

Termasuk dalam konteks sistem perwakilan politik di Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Clifford Geertz, Affan Gaffar, Maswadi Rauf adalah gambaran dari sistem politik Indonesia dalam mewujudkan perwakilan-perwakilan politik di masanya masing-masing. Jika Clifford Geertz memahami sistem perwakilan politik Indonesia sarat dengan aspek aspek primordial, yang kemudian oleh Maswadi Rauf melihatnya bahwa ada dua aspek primordial yang selalu masuk dalam peta politik Indonesia yakni aspek primordial suku dan primordial agama. Dalam tataran yang cukup mengkhawatirkan, Maswadi Rauf menegaskan bahwa isu primordial agama jika masuk dalam tataran politik menjadi aspek primordial yang paling menakutkan. Maka sebaiknya dan mestinya isu primordial terutama atas nama agama tidak dibawa- bawa dalam politik praktis Indonesia.

Jika kita melihat pandangan salah satu pemikir politik terpenting, David Easton, sebagai salah satu ilmuwan yang mencoba membangun ilmu politik yang sistematis melalui dua tahap, kita dapat merenungkan bagaimana proses sistem politik itu berkembang. itu terjadi di Indonesia. Pertama, melalui tulisan ilmiahnya “The Political System”, ia menekankan perlunya teori umum dalam ilmu politik. Kedua, dalam tulisan ilmiahnya yang lain “A Framework for Political Analysis” dan “An Analysis of the System of Political Life”, ia mulai mengenalkan konsep dan mencari konsep untuk mendukung tulisan-tulisannya sebelumnya, kemudian mencoba menerapkannya pada aktivitas politik yang konkrit atau praktis. Dalam hal ini, Easton telah menguraikan kerangka dasar untuk mempelajari sistem politik. Kerangka kerja Easton dapat beradaptasi dan fleksibel, karena dapat digunakan oleh berbagai struktur sosial dan politik. Ada kemungkinan teori Easton dapat diimprovisasi oleh penggunaanya dalam menjelaskan fenomena sistem politik.



Gambar 36: Mahasiswa bersama rakyat menduduki Gedung Parlemen pada Mei 1998 memaksa Presiden Soeharto mundur setelah berkuasa 32 tahun

Easton mendefinisikan istilah politik sebagai "proses otoriter dalam menetapkan nilai-nilai dalam masyarakat." Pemahaman politik sebagai pembentukan nilai-nilai otoritatif ini menandai dua tahap dalam pembentukan teorinya tentang sistem politik. Perhatian terhadap nilai sebagai komoditas yang dinegosiasikan dalam masyarakat merupakan titik awal dari proses politik. Namun proses pemberian nilai ini tidak dilakukan secara sembarangan atau oleh siapapun, melainkan oleh lembaga masyarakat yang memiliki kewenangan untuk itu.

Sementara itu, Easton mengklaim bahwa ada 4 (empat) asumsi yang mendasari pemikiran umumnya ketika mempelajari sistem politik sebagai berikut. Pertama, sains membutuhkan konstruksi atau bangunan yang sistematis untuk mensistematisasikan (menyusun) fakta atau data yang ditemukan. Kedua, peneliti dalam kehidupan politik harus memandang sistem politik sebagai suatu sistem, bukan sebagai bagian atau bagian yang terpisah. Ketiga, penelitian sistem politik terdiri dari dua jenis data, yaitu data psikologis dan data situasional. Data psikologis terdiri dari karakteristik pribadi dan motivasi peserta politik. Data situasi terdiri dari semua aktivitas yang muncul karena pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan tersebut muncul dari lingkungan fisik (topografi, geografi), lingkungan organik non-manusia (flora, fauna), dan lingkungan sosial (manusia, tindakan dan reaksinya). Keempat, sistem politik harus dianggap tidak seimbang.

Dari penjelasan di atas, asumsi-asumsi yang dikemukakan Easton dapat diringkas dalam poin-poin berikut. Pertama, perlunya membangun kerangka sistem politik yang jelas secara bertahap. Kedua, perlu diperjelas konsep mana yang harus dipelajari dalam upaya menjelaskan fenomena sistem politik. Ketiga, perlu diperjelas lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menetapkan nilai-nilai dalam masyarakat. Keempat, perlunya pemahaman bahwa sistem politik merupakan gambaran yang komprehensif, sehingga tidak dapat dikaji secara parsial. Misalnya, kita tidak hanya memeriksa legislatif tanpa mengaitkannya dengan peran eksekutif dalam penegakan hukum. Kelima, Easton juga menekankan bahwa kajian sistem politik harus memperhitungkan berbagai pengaruh lingkungan. Bahwa kondisi psikologis masyarakat, pola geografis wilayah negara atau situasi yang berkembang di tingkat internasional harus diperhatikan karena pengaruhnya terhadap sistem politik. Dengan kata lain, studi tentang sistem politik tidak boleh bersifat historis. Keenam, peneliti sistem politik harus memahami bahwa sistem politik berkembang dalam ketimpangan, karena justru dalam ketimpangan inilah alur kerja sistem politik maju. Jika tidak ada masalah atau kebutuhan, mengapa sistem politik itu ada dan berjalan?

Selanjutnya David Easton mengajukan definisi sistem politik yang terdiri dari 3 (tiga) unsur sebagai berikut. Pertama, sistem nilai politik (melalui politik). Artinya, sistem politik menetapkan nilai (melalui kebijakan). Kedua, penugasan memiliki otoritas. Artinya, penetapannya bersifat memaksa atau otoritatif. Ketiga, tugas resminya adalah menyatukan masyarakat secara keseluruhan. Artinya, tekad yang memaksa akan mengikat masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditegaskan bahwa sistem politik memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, pola permanen hubungan manusia yang melembaga di berbagai badan politik, baik berupa suprastruktur politik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maupun infrastruktur politik (partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik dan politik). Kedua, kebijakan yang mencakup pendistribusian atau pendistribusian aset berwujud dan tidak berwujud untuk menjamin kesejahteraan. Dengan

kata lain, berbagi dan menetapkan nilai status bersifat mengikat. Ketiga, penggunaan kekuasaan atau wewenang untuk memaksakan paksaan fisik secara legal. integrasi dan adaptasi masyarakat, baik secara internal maupun eksternal.

Maksud dan Beddy Irawan menjelaskan hasil analisis pemikiran Easton, bahwa sistem politik terdiri dari serangkaian lembaga dan kegiatan politik dalam masyarakat yang fungsinya mengubah tuntutan, dukungan dan sumber daya menjadi keputusan atau kebijakan yang berwibawa dan mengikat bagi semua anggota dari masyarakat.

Dengan kata lain, sistem politik terdiri dari beberapa komponen. Pertama, subsistem input, yang terdiri dari tuntutan, dukungan dan sumber daya. Kedua, subsistem proses (input), yang meliputi proses konversi input-to-output, atau juga proses konversi atau black box. Ketiga, subsistem output, yaitu hasil atau produk dari proses konversi berupa keputusan atau kebijakan. Keempat, subsistem lingkungan (environment), yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi sistem politik, seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, geografis, dll. Kelima, subsistem umpan balik, yaitu dampak pelaksanaan suatu keputusan atau kebijakan baik positif maupun negatif, yang dapat dimanfaatkan oleh suatu sistem politik.

Beberapa pihak dapat memberikan dukungan dan sumber daya, baik secara individu maupun kelompok, untuk mendukung klaim yang telah diajukan untuk diproses lebih lanjut. Klaim tanpa dukungan dan sumber daya yang kuat dapat mati sebelum diproses. Upaya memasukkan input ke dalam sistem politik yang kemudian diolah menjadi output juga sangat dipengaruhi oleh tekanan lingkungan.

Proses konversi dalam sistem politik terdiri dari suprastruktur politik (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan infrastruktur politik (partai politik, kelompok kepentingan, media, tokoh masyarakat, anggota masyarakat, struktur birokrasi, prosedur, mekanisme politik, sikap dan perilaku pengambil keputusan, dll) semua berinteraksi dalam suatu kegiatan atau proses untuk mengubah input menjadi output. Proses yang terjadi dalam sistem politik disebut proses konversi, black box, dan entry.

Produk atau hasil dari proses konversi tersebut adalah produk kebijakan publik. Ini adalah bentuk yang ingin diambil pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan tersebut akan dirilis secara resmi ke seluruh lapisan masyarakat. Artinya kebijakan-kebijakan yang telah dikembangkan oleh pemerintah dapat diterapkan secara hukum kepada seluruh anggota masyarakat.

Konsekuensi pelaksanaan kebijakan yang merupakan hasil dari proses suatu sistem politik dapat berupa dampak positif sesuai dengan harapan para pengambil keputusan. Artinya, setelah suatu kebijakan ditetapkan ternyata memiliki banyak kegunaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka kebijakan tersebut diterima secara umum atau didukung oleh masyarakat. Namun, sebuah kebijakan juga berpotensi menimbulkan dampak negatif yang tidak terduga.

Umpan balik dari kebijakan tersebut tentu saja memunculkan kebijakan, baik positif maupun negatif, akan menjadi umpan balik yang akan digunakan oleh pengambil kebijakan sebagai input baru yang kemudian akan diproses dalam sistem politik. Begitu seterusnya hingga menjadi sebuah siklus, dimulai dari input, kemudian diproses, dan kemudian berubah menjadi output, yang dampaknya kebijakan akan menjadi feedback yang akan diserap sebagai input untuk proses selanjutnya.

Lingkungan (environment) suatu sistem politik berupa kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, keamanan, geografis dan lainnya, mempengaruhi semua subsistem politik. Sebagai contoh, suatu sistem politik yang dipengaruhi oleh sistem sosial, yaitu dalam masyarakat yang mengembangkan gaya hidup paternalistik, feodal, aristokrat, dan otokratis, maka gerakan politik menuju sistem demokrasi akan mengalami hambatan. Berbeda dengan masyarakat yang mengembangkan cara hidup yang demokratis, juga akan menjadi tempat yang subur bagi tumbuhnya sistem politik yang demokratis.

Sistem politik juga dipengaruhi oleh sistem kepercayaan dan/atau agama yang dianut oleh suatu masyarakat. Dalam masyarakat yang mayoritas beragama Hindu, terutama bagi mereka yang masih menganut tradisi kasta sebagai sistem sosial, perkembangan sistem politik yang demokratis akan terhambat. Sedangkan dalam ajaran



Pengaruh lingkungan selain sebagai input juga akan mendorong munculnya tuntutan-tuntutan yang dapat langsung ditransformasikan dalam sistem politik. Di sisi lain, karena pengaruh lingkungan, berbagai cobaan bisa mati (tidak berfungsi) sehingga tidak bisa masuk ke sistem politik. Selain itu, pengaruh lingkungan dalam proses konversi (dengan input) juga mempengaruhi kuantitas dan kualitas produk atau kebijakan yang akan dihasilkan. Dalam hal ini, pengaruh lingkungan dapat memudahkan atau menghambat proses konversi, yang pada gilirannya juga akan mempengaruhi output sistem politik.

Implementasi kebijakan publik yang dihasilkan oleh sistem politik juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, yang dapat membentuk kualitas dampak kebijakan yang akan muncul di masa yang akan datang. Dampak dari kebijakan tersebut, baik positif maupun negatif, dapat dijadikan sebagai umpan balik yang dapat dijadikan sebagai masukan baru yang dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap sistem politik. Di sisi lain, dalam kehidupan politik nyata, lingkungan juga dapat dipengaruhi oleh sistem politik. Dalam konteks ini, ada pengaruh timbal balik antara lingkungan dan sistem politik.

#### **b.) Maraknya Politik Identitas**

Lalu bagaimana dengan politik aliran yang dikemukakan oleh Affan Gaffar yang melihat bahwa dalam konteks para pemilih di Pulau Jawa dua aspek paling dominan, yakni politik aliran terhadap kalangan santri, abangan dan priyayi, serta kehadiran sosok tokoh pemimpin organisasi sebagai acuan pilihan politik. Pikiran Affan Gaffar terakhir ini sejajar dengan pandangan James Scoot terkait politik *patron and client* dimana *client* atau masyarakat pemilih selalu akan cenderung mengikuti patron atau sosok yang dikaguminya dan yang berpengaruh sangat serius terhadap diri pribadinya.

Pertanyaannya, bagaimana dengan pemilu legislative yang terjadi di Indonesia sejak Era Reformasi? Penting untuk melihat apakah pandangan-pandangan sistem keterwakilan politik di atas berlaku dengan proses penentuan perwakilan politik di masa era Reformasi. Pemaparan berikut dengan fakta-fakta yang terjadi dengan para politisi

beragama Kristiani di basis Islam yang kuat dalam pemilu Era Reformasi akan memberi pemahaman baru terkait proses penentuan perwakilan politik Indonesia.

Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Tahun 2019 di Indonesia sarat dengan politik identitas agama. Berlanjut pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, situasi pemilihan mempertegas politik identitas agama tersebut. Bisa jadi ketiga masa pemilu tersebut merupakan masa-masa paling suram dalam politik Indonesia sepanjang sejak kemerdekaan yang sarat dengan penjatuhan salah satu kubu atas nama penggunaan identitas tertentu dalam politik. Masyarakat cenderung tidak bergairah melanjutkan proses demokrasi karena kampanye hitam dan kotor merusak pemilihan umum. Sosok demokrasi Indonesia terkesan “dikotori” oleh sangat meluasnya isu-isu politik identitas atas nama agama dan suku serta latar belakang si calon sejak Pemilu Presiden 2014, yang berlanjut pada Pemilu Kadal DKI dan Pemilu Presiden 2019.

Di ketiga masa pemilu tersebut, para calon pun seolah ‘dipaksa’ terbelah sebagai kubu-kubuan. Ada kubu yang dipersepsikan dengan kubu yang berada dalam partai Allah bagi pendukung identitas agama tertentu dan partai Iblis dilabelkan bagi yang berseberangan dengannya. Prinsip-Prinsip demokrasi yakni hormat pada martabat manusia, tidak dimasuki isu-isu primordialitas seperti dianjurkan oleh Maswadi Rauf, pemilihan yang terbuka dan adil, kebebasan bagi para pemilih, semuanya justru terasa sangat memudar bahkan hilang yang sempat merusak demokrasi Indonesia. Sejak dulu isu politik identitas agama paling berbahaya bagi demokrasi dan proses politik sehat di Indonesia.

Namun bagaimana dengan pemilu legislative dalam rentang waktu Pemilu 2014 dan pemilu 2019 tersebut khususnya terkait dengan kalangan minoritas? Kalangan minoritas yang akan dicoba dilihat dalam materi berikut adalah kalangan politisi Kristiani pada masa pemilu legislative 2014 dan 2019. Pertanyaannya, Bagaimana nasib para politisi Kristen sebagai kalangan minoritas dalam situasi politik identitas agama yang sangat keras tersebut apakah juga menjadi korban dari politik identitas?

Bagaimana keterpilihan para caleg beragama Kristiani berpengaruh saat itu justru ketika mereka dicalonkan oleh partai politiknya dari daerah berbasis Islam yang kuat? Sikap personal caleg Kristen yang dapat dipercaya antara kata dan perbuatannya, lebih sedikit berbicara tetapi banyak berbuat mampu melampaui ketakutan dalam politik identitas agama. Penelitian ini melihat Pemilihan Umum 2014 dan 2019 untuk menjadi refleksi menuju Pemilihan Umum Serentak 2024 lewat wawancara mendalam dan kajian literatur.

Resiko politik identitas agama yang buruk dalam Pemilu Presiden Tahun 2014, Pemilu Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, dan Pemilu Presiden Tahun 2019 menciptakan ketakutan sebahagian besar masyarakat Indonesia. Masyarakat anti pati dengan proses pemilu yang memperburuk demokrasi Indonesia. Pemilu Presiden 2014 dan 2019 mengusung Joko “Jokowi” Widodo dan Prabowo Subianto. Pemilu 2019 lebih buruk dari Pemilu 2014 karena terlihat sangar, menakutkan, politik identitas terbuka, dan berlangsung rusuh. Kampanye negatif bertebaran terhadap Prabowo Subianto sementara Jokowi menjadi sasaran kampanye hitam.

Politik identitas suku, ras, antargolongan, terutama atas nama agama (SARA) sarat mengotori ruang publik selama penyelenggaraan Pemilu 2014 dan 2019. Kubu yang memperjuangkan ideologi nasionalis demokratis berhadapan dengan kubu yang memperjuangkan nilai-nilai Islam yang dikhawatirkan untuk pembentukan ideology negara agama. Padahal isu identitas agama dalam politik Indonesia mestinya sudah berakhir sejak perdebatan Pancasila sebagai ideology sejak tahun 1945 hingga tahun 1957.

Dua provinsi sayap ibukota negara yakni Provinsi Banten di sebelah Barat dan Provinsi Jawa Barat di sebelah Timur memberikan kekalahan kepada petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Tahun 2014 dan Tahun 2019. Jokowi kalah karena pencalonannya tidak direstui oleh para alim ulama dan tokoh Islam fanatic di sana.

Selain pemilu Presiden itu, isu politik ideology agama yang buruk terjadi juga di Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017. Pasalnya, Gubernur DKI petahana yang beragama Kristen, Basuki

Tjahja Purnama (Ahok) memenangkan putaran pertama pemilihan gubernur, dan di putaran kedua Ahok diadili habis-habisan. Dipicu oleh ketergelinciran lidahnya atas kesalahan pengucapan terkait isi Kitab Suci Alquran dalam suatu kampanye di Kabupaten Kepulauan Seribu, Ahok divonis hukuman penjara oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hokum tetap (*final and binding*) persis saat tahapan pemilihan gubernur masih berlangsung. Tiga pengalaman pahit politik identitas berturut turut tersebut menimbulkan luka batin para pemilih.

**Tabel 4:** Perolehan Suara Pilpres Tahun 2019

	<b>Joko Widodo- Mahruf Amin</b>	<b>Prabowo Subianto- Sandiaga Uno</b>	<b>Selisih Suara</b>
<b>Provinsi DKI Jakarta</b>	3.279.547 suara (51,68%)	3.066.137 suara (48,32%)	Joko Widodo unggul: 213.410 suara (3,36%). jumlah sah: 6.345.684 suara
<b>Provinsi Jawa Barat</b>	10.750.568 suara (40,07%)	16.077.446 suara (59,93%).	Prabowo unggul: 5.326.878 suara (19,86%) Jumah sah: 26.828.014 suara
<b>Provinsi Banten</b>	2.537.524 suara (38,46%)	4.059.514 suara (61,54%),	Prabowo unggul: 1.521.990 suara (23,07%) Jumlah sah: 6.597.038 suara

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2019)

Data Tabel 4 di atas menjelaskan, di Provinsi Banten, Prabowo-Sandiaga mendapat 4.059.514 suara (61,54%) unggul jauh sejumlah 1.521.990 suara (23,07%) dari pasangan Jokowi-Ma'ruf (Kompas, 2019). Sementara di Provinsi Jawa Barat, pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf hanya mendapat 10.750.568 suara (40,07%), Prabowo-Sandiaga unggul 5.326.878 suara (19,86%). Di Provinsi DKI Jakarta, pasangan Jokowi-Ma'ruf hanya menang tipis dengan meraih 3.279.547 suara (51,68%) dari Prabowo-Sandiaga.

Politik identitas agama di atas memunculkan dua pertanyaan: *pertama*, apa penyebab menguatnya isu identitas agama dalam politik di Indonesia terakhir ini? *Kedua*, bagaimana nasib para politisi beragama Kristiani saat itu ketika mereka dicalonkan oleh partainya di daerah-daerah berbasis Islam seperti Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI, Sulawesi Selatan, Riau, dan lain-lain?

Maka penting menjawab kedua pertanyaan di atas dengan menampilkan gambaran umum dari traumatic masyarakat atas politik identitas, mengurai alasan kelahiran politik identitas agama yang cukup merisaukan, kemenangan Prabowo di tiga provinsi utama Indonesia, kiprah para politisi beragama Kristen di Basis Islam. Termasuk diantaranya bahwa politik identitas didukung para alim ulama kelompok garis keras untuk mewujudkan negara berideology Khilafah sebagai catatan serius menuju Pemilu serentak 2024.

Kajian terkait politik identitas dalam konteks Indonesia dirasakan sangat penting untuk terus menerus digali untuk melacak bagaimana pertumbuhan demokrasi itu sendiri. Akhir-akhir ini, komunitas ilmiah di Indonesia semakin meminati bidang kajian politik sebagai upaya mencari alternatif dari khazanah budaya sendiri untuk mengimbangi kekuatan dan kelemahan serta keberlakuan konsep-konsep politik yang berasal dari politik Barat.<sup>51</sup> Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an, otoritas ilmu-ilmu sosial di Indonesia amat mendorong usaha oleh ilmuwan Indonesia mengembangkan konsep-konsep politik dari khazanah kebudayaan Indonesia sendiri.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Sulaeman, *Pemikiran Demokrasi Moh Hatta*, [disertasi] (Jakarta: Ilmu Politik UI, 2009), hlm. 73-79.

<sup>52</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 48.



Gambar 38: Empat Presiden Indonesia hasil pemilu Era Reformasi: pembatasan masa jabatan presiden

Mengapa situasi ini terjadi? Jika kita menelaah sistem politik pasca Reformasi, semua yang terjadi tidak lepas dari fakta sejarah sistem politik Indonesia di masa lalu. Pengalaman Orde Lama dan Orde Baru meninggalkan kesan yang mendalam pada sistem politik Indonesia. Peran elit yang terlalu dominan membuat masyarakat tidak berdaya untuk membangun dirinya dan berpartisipasi dalam penciptaan sistem politik yang stabil, sebaliknya muncul beberapa masalah yang belum terselesaikan. Masyarakat atau rakyat merupakan faktor penentu berfungsinya suatu sistem politik, karena masyarakat dianggap sebagai subjek dan objek dari sistem politik yang ada. Menurut Nico Schulte Nordholt (dalam Juliansyah), kekuatan sistem politik membutuhkan dukungan tingkat tinggi dari berbagai peran dalam sistem politik itu sendiri.<sup>7</sup> Jika kita meninjau secara singkat lima persyaratan yang disebutkan oleh Linz dan Stepan, kita tentu dapat menyimpulkan bahwa kondisi bangsa dan negara Indonesia jauh dari memadai. Kelima kondisi ini sangat penting bagi proses transisi menuju sistem demokrasi. Pertama, masyarakat sipil yang bebas dan aktif. Kedua, komunitas politik, termasuk elit partai politik, relatif otonom. Ketiga, penegakan hukum. Keempat, birokrasi yang profesional. Kelima, masyarakat ekonomi yang relatif otonom dari negara dan dari pasar murni.

Masyarakat madani diberi ruang bebas dan aktif agar dapat memainkan peran politik dalam menentukan arah kehidupan berbangsa

dan bernegara. Masyarakat sipil memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan arah tindakan untuk menciptakan masyarakat yang berdaya untuk menentukan nasibnya sendiri. Peran anggota masyarakat tidak hanya tercermin melalui berbagai tindakan politik, seperti memilih dalam pemilu secara bebas dan bertanggung jawab, tetapi mencakup penentuan nasib sendiri. Dalam hal ini, peran pemerintah adalah menjadi katalisator bagi tumbuhnya masyarakat madani yang berdaya melalui berbagai program kebijakan pemerintah di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Masyarakat tidak hanya pasif dan menunggu apa yang akan dilakukan pemerintah. Sedangkan masyarakat adalah mitra pemerintah dalam mencapai tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...".

Posisi partai politik menjadi sangat strategis ketika Indonesia memasuki babak baru dalam sistem politik yang lebih terbuka. Partai politik dan elit politik tidak hanya bergantung pada kekuatan di luar kerangka sistem politik. Persoalannya sekarang, parpol dan elite politik masih belum memiliki kepercayaan diri untuk mengambil keputusan, bahkan terlalu bergantung pada dukungan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Budaya dukungan inilah yang menjadi penyebab lemahnya parpol dan elit politik untuk mandiri dalam menentukan proses persaingan politik dan menentukan sikap politik. Independensi partai politik dan elit politik diperlukan agar tidak memiliki rasa ketergantungan kepada pemerintah, bahkan untuk menentukan sikap politik untuk memimpin oposisi atau koalisi. Keberanian partai politik untuk menentukan posisinya sangat diperlukan untuk menjaga kontaminasi kepentingan rezim yang berkuasa dengan kepentingan rakyat. Pengawasan dan penguasaan kekuasaan oleh pihak oposisi menunjukkan berjalannya sistem checks and balances dalam sistem politik. Jika ini tidak terjadi, dikhawatirkan aktivitas parlemen tambahan akan meningkat untuk memberikan tekanan pada pemerintah.

Demokrasi yang berfungsi dengan baik harus didukung oleh kekuatan masyarakat sipil agar elit politik dapat mengimplementasikan dengan baik hasil keputusan politik yang dibuat dalam sistem politik. Keputusan dibuat untuk kepentingan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, peran penegak hukum dalam mengeksekusi keputusan politik yang telah dibuat menjadi sangat penting. Hati nurani yang dihasilkan adalah penerapan hukum sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sehingga hukum tidak digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Memang benar bahwa instrumen hukum yang kompleks dapat diterapkan untuk membela kebenaran, keadilan, dan kebaikan bersama. Akibatnya, penerapan hukum tidak diskriminatif, tetapi didasarkan pada bukti dan fakta hukum.

Penerapan hukum diterapkan sesuai dengan rasa keadilan, kejujuran, dan kebenaran sebagai prinsip dasar bagi pengembangan proses penyidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hukum dibuat untuk menjaga ketertiban dan kelangsungan hidup masyarakat politik, sehingga politik membutuhkan hukum untuk menciptakan rasa keamanan hukum, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia. Di negara demokrasi, hukum dibuat dan dilaksanakan untuk menciptakan kepastian dan membangun kepercayaan dalam masyarakat, sehingga hak-hak rakyat dilindungi dan dilakukan tindakan terhadap pelaku tindak pidana untuk menciptakan ketertiban sosial.

Roda pemerintahan dapat berjalan jika kepentingan politik dipisahkan dari kepentingan birokrasi. Birokrasi dibentuk untuk menjalankan tugas politik atau politik yang telah dijalankan. Peran birokrasi dapat memberikan dukungan yang kuat bagi jalannya pemerintahan. Tugas dan fungsi birokrasi dapat terlihat jelas jika demokrasi terbuka lebar. Artinya birokrasi tidak termasuk dalam proses politik, tetapi lebih terlibat dalam implementasi kebijakan politik. Masalah utama yang muncul adalah bagaimana meletakkan dasar-dasar pembentukan sistem politik yang demokratis. Menurut Alfred Stepan, keputusan rezim untuk memulai reformasi menuju demokrasi umumnya terjadi karena didasarkan pada pertimbangan kelompok elit bahwa kepentingan jangka panjang mereka akan lebih terjamin jika diperjuangkan dalam lingkungan yang demokratis. Namun, jalur

reformasi dari atas secara umum telah menghasilkan beberapa tren. Pertama, penguasa dapat menghentikan proses demokratisasi karena situasi yang muncul pada masa liberalisasi dinilai terlalu mahal dibandingkan dengan biaya represi. Kedua, karena demokratisasi dari atas dikaitkan dengan membela kepentingan elit, maka kecenderungannya adalah munculnya demokrasi terbatas. Ketiga, kekuatan militer akan terus berjuang untuk mempertahankan haknya dan ini akan sangat mengganggu proses demokratisasi.



Gambar 39: Partai-partai politik berkibar tumbuh subur di masa Era Reformasi sejak 1998

Reformasi yang menunggu mahasiswa dan masyarakat akan mengalami perubahan yang tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, mereka yang berkuasa harus berusaha mengontrol proses demokrasi yang sedang berlangsung. Pertimbangan tersebut, dengan berbagai alasan, tidak membenarkan semua tindakan pemerintah (penguasa) hanya untuk mempertahankan kekuasaan, baik berupa biaya ekonomi yang tinggi dalam kegiatan demokrasi, stabilitas politik melalui penyederhanaan partai politik atau penghapusan peran dari RPD. Perwakilan. Dengan kata lain, tidak dapat dibenarkan jika pemegang kekuasaan hanya berorientasi pada mempertahankan kekuasaan, apalagi jika diambil secara kurang komprehensif dan merugikan kepentingan rakyat. Di era demokrasi, ada lembaga lain yang merasa dirugikan dengan keterbatasan kewenangan untuk melakukan berbagai aktivitas

politik, terutama militer, yang diuntungkan dengan terbatasnya ruang untuk mempengaruhi berbagai keputusan politik.

Kesediaan pemegang kekuasaan untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya untuk diawasi oleh pihak lain dianggap terlalu mahal bagi pemegang kekuasaan. Pada akhirnya, tak sedikit elit politik yang memilih melakukan tindakan represif. Faktanya, mereka yang berkuasa lebih sadar akan risiko yang mereka hadapi ketika tindakan represif terhadap partai tampaknya bertentangan dengan kebijakan mereka. Untuk menjaga kelangsungan kekuasaannya, tidak jarang para elit politik memilih sikap dan tindakan yang terkesan demokratis untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan, sehingga terciptalah quasi-demokrasi. Demokrasi ini dilakukan semata-mata untuk menentukan batas-batas tatanan kelompok atau masyarakat yang seolah-olah terlibat dalam proses demokrasi. Tak heran, beberapa elit politik memberikan porsi tertentu kepada militer untuk posisi yang dinilai sangat strategis dari sisi politik dan ekonomi. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk mewujudkan demokrasi semu, bukan demokrasi ideal seperti yang diharapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **c.) Alasan Pemilih Muslim Memilih Caleg Minoritas**

Bagaimana pencapaian para calon legislatif beragama minoritas ketika mereka dicalonkan di basis Islam dalam situasi seperti ini? Tentu patut dan menarik melihat bagaimana nasib para politisi minoritas yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan (gabungan kedua agama itu kami sebut saja Kristen) di tengah situasi politik identitas agama Islam yang sangat memanas sepanjang Pemilu 2014, 2017 dan 2019 tersebut terutama bagi mereka yang menjadi calon di basis-basis Islam yang kuat seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Riau. Dan bagaimana nasib mereka dalam Pemilihan tahun 2024 mendatang? Dalam dua kali Pemilihan Umum Legislative (2014 dan 2019) di Indonesia, jumlah kursi dari anggota legislatif beragama Kristen justru meraih kursi secara signifikan. Provinsi Jawa Barat selalu memberi kursi legislative beragama Kristen yang cukup signifikan.

**Tabel 5:**  
Daftar Provinsi berbasis Islam dengan Anggota Legislatif  
beragama Kristen di Pemilu 2014<sup>53</sup>

PROVINSI	PARTAI POLITIK					TOTAL
	PDIP	Demo krat	Gerin dra	Golkar	Nasdem	
<b>JABAR</b>	<b>6</b>	-	-	-	-	<b>6 kursi</b>
DKI	5	-	-	-	-	5 kursi
JATIM	4	-	1	-	-	5 kursi
SUMUT	2	2	2	1	1	8 kursi
RIAU	2	-	-	-	-	2 kursi
JATENG	2	-	2	-	-	4 kursi
TOTAL	21 kursi	2 kursi	5 kursi	1 kursi	1 kursi	30 KURSI

Jika melihat data Tabel 5 Pemilu Legislatif 2014 di atas, kursi terbesar PDI Perjuangan sebagai partai yang bukan berbasis agama lebih banyak berasal dari Provinsi Jawa Barat yakni sejumlah 6 kursi, berturut-turut 5 kursi dari DKI dan 4 kursi dari Jawa Timur. Tabel 2 dan Tabel 3 menjelaskan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai kaum nasionalis selalu menjadi partai politik penyumbang kursi bagi anggota legislative beragama Kristen setidaknya di 6 (enam) provinsi yang berbasis Islam atau setidaknya mayoritas dominan berpenduduk agama Islam.

---

<sup>53</sup> *Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Periode 2014 – 2019* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2014).

**Tabel 6:**  
Daftar Provinsi berbasis Islam dengan Anggota Legislatif  
beragama Kristen di Pemilu 2019<sup>54</sup>

PROVINSI	PARTAI POLITIK					JUMLAH
	PDIP	Demo krat	Gerin dra	Golkar	Nas dem	
SUMUT	5	2	-	1	1	9 kursi
DKI	7	-	-	1	-	8 kursi
JATENG	6	-	1	-	-	7 kursi
JABAR	4	-	-	-	-	4 kursi
JATIM	3	-	1	-	-	4 kursi
RIAU	2	-	-	-	-	2 kursi
JUMLAH	27 kursi	2 kursi	2 kursi	2 kursi	1 kursi	34 KURSI

Dari data Tabel 6 terkait Pemilu Legislatif 2019, PDI Perjuangan tetap menjadi penyumbang kursi terbesar yang jumlahnya lebih besar dari Pileg 2014 sejumlah 21 kursi menjadi 27 kursi. Provinsi Sumatera Utara menjadi penyumbang kursi terbesar sejumlah 9 kursi mengalahkan Provinsi Jawa Barat di Pileg 2014 sejumlah 6 kursi, menyusul Provinsi DKI dengan 8 kursi. Jika dilakukan perbandingan antara peran dan pelibatan tokoh-tokoh Kristen masa lalu dan tokoh-tokoh Kristen masa kini di Indonesia, ada anggapan kuat bahwa peran dan pelibatan orang Kristen secara politik lebih nyata, cukup kuat, dan relatif berpengaruh di masa lalu dibandingkan masa kini.

Padahal dari segi persentase, jumlah penduduk beragama Kristiani (baik Protestan maupun Katolik) hanya sedikit, tetapi secara politik memiliki pengakuan yang setara dengan penduduk yang beragama mayoritas Islam. Bentuk kesetaraan dalam demokrasi yang dewasa. Berikut ini ditunjukkan Persentase Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama (BPS, 2008):

---

<sup>54</sup> *Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Periode 2019 – 2024* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019).

- Islam	: 192.932.919 jiwa (88,8%)
- <b>Kristen Protestan</b>	<b>: 12.395.753 jiwa (5,7%)</b>
- <b>Kristen Katolik</b>	<b>: 6.563.199 jiwa (3,0%)</b>
- Hindu	: 3.698.282 jiwa (1,7%)
- Buddha	: 1.306.248 jiwa (0,6%)
- Khonghucu	: 205.808 jiwa (0,1%)
- Lain-lainnya	: 243.931 jiwa (0,1%)

=====  
**Total 217.346.140 jiwa (100%)**

Data di atas menunjukkan total jumlah penduduk beragama Kristen (Katolik dan Protestan) adalah 18.958.952 jiwa atau (8,7%). Maka mestinya umat Kristen mendapatkan kursi sebesar 8,71% dari suara yang diperebutkan di setiap Pemilu. Bagaimana hasilnya di Pemilu Legislatif?

Data Table-7 menunjukkan bahwa persentase perolehan kursi yang diraih oleh para anggota legislatif Kristen meningkat dari 12,5% tahun 2014 menjadi 14,43% di Pemilu Legislatif 2019. Pada Pemilu 2019, PDI Perjuangan menjadi partai yang mendominasi perolehan kursi anggota legislative beragama Krisiten yakni 48 kursi (8,35%). Perolehan ini meningkat tajam dibandingkan Pemilu 2014 yang hanya 35 kursi (6,25%). Partai Nasdem melonjak tajam memperoleh 12 kursi (2,09%) di peringkat kedua di bawah PDI Perjuangan dibandingkan Pemilu 2014 yang hanya memperoleh 3 kursi (0,54%).

Patut diperhatikan dua partai berbasis Islam moderat pada Pileg 2019 memberikan 4 kursi sekaligus (0,70%) yang dihasilkan dari dua partai yakni PAN dan PKB yang masing-masing menyumbangkan 2 kursi. Artinya, para anggota legislative Krisen juga berasal dari partai-partai berbasis agama Islam.

**Tabel 7:**  
Kursi DPR RI Beragama Kristen Hasil Pemilu Legislatif 2019<sup>55</sup>

<b>Pemilu 2019</b>	<b>Partai</b>	<b>Jlh Kursi</b>	<b>% Kursi</b>	<b>Keterangan</b>
Partai Kristen	-	-	-	Total: 575 kursi (100%)
Partai Non Kristen	PDI Perjuangan	48	8,35%	<b>Perbandingan:</b> - Penduduk Kristen: 8,71% - Kursi Kristen DPR: 14,43% - <b>Selisih: 5,72 %</b>
	Nasdem	12	2,09%	
	Golkar	8	1,39%	
	Gerindra	6	1,04%	
	Demokrat	5	2,36%	
	PAN	2	0,35%	
	PKB	2	0,35%	
<b>TOTAL</b>		<b>83 kursi</b>	<b>14,43 %</b>	

Data Tabel-7 menunjukkan perolehan kursi terbesar para caleg beragama Kristen melalui PDI Perjuangan yakni 35 kursi. Diperingkat kedua ada Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto, calon Presiden 2014 dan 2019 yang didukung oleh para ulama Islam khususnya di Jawa Barat. Di tengah isu politik identitas yang sangat panas 2014 dan 2019, apa yang membuat para pemilih Muslim menjatuhkan pilihan demokrasi pada politisi beragama minoritas Kristen? Kami mewawancarai mendalam sejumlah pemilih beragama Islam. Mereka adalah Abah Abidin (73 tahun) Koordinator Pakorba (Paguyuban Korban Orde Baru) se Kabupaten Sukabumi dan Haji Didi Supriadi (56 tahun) penduduk Kelurahan Mundusari Kecamatan Pusakanagara, Pamanukan-Subang.

Dengan kalimat sederhana sangat bisa dipahami bahwa alasannya adalah karena kedua pemilih Muslim tersebut terpesona dengan sikap tulus dan baik caleg Kristen karena janjinya dapat dipercaya, mereka bertindak sebelum berbicara, sedikit berbicara tetapi banyak berbuat untuk kepentingan rakyat. Sikap jujur dan tidak berjanji muluk-muluk, dan selalu hadir di tengah persoalan masyarakat. Maka benar kata Alan Ware bahwa jika potensi individu sudah layak dijual ke pemilih dan

<sup>55</sup> Profil Anggota Dewan [...] Periode 2019 – 2024, *op.cit.*

mampu menaikkan suara partai politik, maka peranan partai tidak lagi dominan.

**Tabel 8:**  
Kursi DPR RI Beragama Kristen Hasil Pemilu Legislatif 2014<sup>56</sup>

Pemilu 2014	Nama Partai	Jlh Kursi	% Kursi	Keterangan
Partai Kristen	-	-	-	Total: 560 kursi (100%) Kursi Kristen: 11,96%
Partai Non Kristen	PDI Perjuangan	35	6,25%	<b>Perbandingan:</b> - Penduduk Kristen: 8,71% - Kursi Kristen DPR: 12,50% - Selisih: 3,79%
	DEMOKRAT	11	1,96%	
	GERINDRA	11	1,96%	
	GOLKAR	7	1,25%	
	NASDEM	3	0,54	
	HANURA	3	0,54%	
<b>TOTAL</b>		<b>70 kursi</b>	<b>12,50 %</b>	

Argumentasi pemilih Muslim dapat dikategorikan dalam lima alasan, yakni: *pertama*, kemampuan caleg bersangkutan bersikap santun dan mampu mengambil hati warga dalam nuansa tata krama agama dan budaya setempat. *Kedua*, karena caleg yang bersangkutan adalah bahagian dari korban Orde Baru karena terkait dengan PKI sehingga menggalang dukungan dari Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba). *Ketiga*, kerelaan caleg Kristen untuk memberikan pengobatan gratis terbuka kepada seluruh warga yang kontinu setiap bulan tidak terikat hanya seat Pemilu. *Keempat*, pendekatan pembangunan fisik sarana umum seperti mesjid, air minum, jalan raya. *Kelima*, kemampuan melakukan pendekatan ke sejumlah tokoh local khususnya pemerintah daerah sekaligus dengan memanfaatkan gerbong partai.

<sup>56</sup> Profil Anggota Dewan [...] Periode 2014 – 2019, *op.cit.*



Gambar 40: Antusiasme pemilih di luar negeri pada Pemilu Nasional 2019.  
Partisipasi pemilih adalah salah satu wujud kebebasan politik warga

Tentu saja teori Affan Gaffar bahwa politik aliran masih sangat kuat di Indonesia sebagai preferensi pilihan bisa dikatakan tidak sepenuhnya dapat diterima. Dari analisis penelitiannya di daerah Brobanti, Yogyakarta, Affan Gaffar memperkuat teori bahwa ada hubungan yang sangat dekat diantara orientasi sosio religious individu dengan preferensi pilihan. Data dari Brobanti termasuk mendukung gagasan bahwa warga tertarik untuk memilih tergantung orientasi sosio religious mereka. Sehingga Santri akan tertarik untuk memilih partai Islam, sementara Abangan cenderung untuk mendukung partai secular dalam Pemilu. Gaffar menjelaskan bahwa stabilitas pola preferensi pilihan jelas dalam analisis ini. Pemilih Santri tampaknya menjadi lebih ideologis dalam membuat keputusan pilihan daripada Abangan. Buktinya pemilih Muslim tetap menjatuhkan pilihan politik kepada para caleg Kristen walaupun politik identities sangat kotor terjadi di masa Pemilu yang sama.

Ribka Tjiptaning seorang anggota legislative perempuan beragama Kristiani hasil Pemilu 2014 dan 2019 di daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat dicintai dan dipilih warga beragama Muslim justru ketika Ribka secara terbuka mengaku diri sebagai keturunan dari pengikut Partai Komunis tahun 1955. Ikatan emosionalitas yang sangat tepat seperti digambarkan oleh Clifford Geertz bahwa aspek politik

ketika sudah berbaaur dengan aspek primordialisme menjadi sesuatu yang sangat sulit dipisahkan. Penduduk Desa Cicolawing sudah terikat secara primordial sangat kuat terhadap Ribka persis seperti yang dimaksudkan oleh Clifford Geertz. Padahal di Desa Cicolawing Kecamatan Pawenang itu sekitar 99,90% beragama Muslim yang memenangkan Ribka Tjiptaning.

Apakah pengalaman serupa ini masih akan terjadi dalam Pemilihan nasional serentak tahun 2024 yang diperkirakan akan membawa politik identitas agama (Islam) yang akan semakin terang benderang untuk upaya mendirikan negara Khilafah Islam?

#### **4. Rangkuman**

Dari pengalaman politik dengan penonjolan politik primordial atas nama agama dalam Pemilihan Nasional Indonesia 2014 dan 2019, dan Pilkada Gubernur DKI Jakarta, maka keterwakilan politik mendapat beban yang lebih besar dibandingkan dalam situasi normal. Semakin menguatnya politik identitas atau primordialisme politik tentu akan menjadi tantangan sangat serius dan menjadi catatan penting bagi perwujudan negara demokratis. Jika isu primordialisme politik tetap dibiarkan meajalela dalam dalam peta politik nasional dan lokal, bukan tidak mungkin primordialisme politik bakal menjadi ancaman serius bagi kesatuan bangsa Indonesia menghadapi Pemilu 2024 dan pemilu-pemilu selanjutnya. Apalagi dalam Pemilu tahun 2004, Presiden Jokowi tidak lagi mencalonkan diri sehingga sangat dikhawatirkan pemenang pilpres adalah calon presiden yang diusung oleh pihak pendukung negara Khilafah. Demokrasi hanya akan bertumbuh lebih baik ketika kehidupan bernegara semua kalangan termasuk kalangan minoritas semakin nyaman, dan penegakan upaya menghormati martabat manusia walau berbeda suku dan agamanya, dan upaya upaya sejenis.

Usulan dari kajian Modul 9 ini adalah perlunya penelitian lebih lanjut ke sejumlah wilayah lain untuk memperkuat apakah sesungguhnya politik identitas sedang bertumbuh di Indonesia? Misalnya apakah ada kandidat beragama Muslim justru menang di basis-basis beragama Kristiani. Studi-studi demokrasi yang lebih luas

dibutuhkan termasuk mencari tahu bagaimana masa depan demokrasi Indonesia ke Pemilu 2024 nanti dan ke depannya setelah politik identitas yang sangat buruk di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 lalu.

## **5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek**

### **a. Latihan**

- i. Mahasiswa dipersilakan mendiskusikan bagaimana sistem perwakilan politik di Era Reformasi dengan melihat perilaku aktor politik di Indonesia berdasarkan uraian di atas.
- ii. Mahasiswa mendiskusikan bentuk sistem perwakilan yang mestinya digagas di Indonesia saat ini untuk pembangunan demokrasi Indonesia yang lebih baik.

### **b. Lembar Kerja Praktik**

### **c. Evaluasi Pembelajaran**

Penguasaan materi dan kedalaman penjelasan dalam diskusi di kelas

### **d. Umpan Balik**

## **C. PENUTUP**

### **1. Rangkuman**

Politik keterwakilan untuk pemilu legislatif ternyata tidak berpengaruh secara gamblang dengan maraknya politik identitas. Terlihat dari pemilu legislative 2014 dan pemilu 2019, perolehan kursi para caleg-caleg beragama minoritas justru tidak terlalu signifikan berkurang termasuk pemilihan untuk para caleg minoritas beragama Nasrani di basis-basis Muslim walaupun suhu tensi politik identitas sangat marak saat itu. Ternyata isu-isu politik identitas lebih menyentuh pada pemilihan kepala daerah yakni Gubernur di DKI Jakarta dan pemilihan Presiden Republik Indonesia, tidak terlalu memberi pengaruh signifikan pada pemilihan legislative walaupun proses pemilihannya dilakukan pada saat yang bersamaan atau hampir bersamaan.

## 2. Daftar Istilah

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
Politik identitas	Politik identitas umumnya mengacu pada subset politik di mana kelompok orang dengan identitas ras, agama, etnis, sosial atau budaya yang sama berusaha untuk mempromosikan kepentingan atau kepentingan khusus mereka sendiri. Stanford Encyclopedia of Philosophy mengatakan, politik identitas “biasanya bertujuan untuk mengamankan kebebasan politik dari konstituen tertentu yang terpinggirkan dalam konteks yang lebih besar”. Philosophy Talk mengatakan bahwa “gerakan feminis, gerakan hak-hak sipil, dan gerakan pembebasan gay adalah contoh dari jenis pengorganisasian politik ini”, sementara Vox menambahkan bahwa fokusnya “biasanya jatuh pada wanita, ras minoritas, imigran, orang LGBTQ, dan agama minoritas”.
Era reformasi	Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. ... Reformasi Indonesia: Di Indonesia, kata Reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Gerakan atau Era Reformasi menjadi peristiwa bersejarah di Indonesia, karena mampu menuntaskan rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun, sejak 1966. Era reformasi atau era pasca-Suharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
	dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, B.J. Habibie.
Nasrani	Sebutan "Nasrani" diterapkan pada pengikut ajaran-ajaran Yesus Kristus yang diambil dari kata Nazaret, dikarenakan Yesus berasal dari kota Nazaret maka pengikutnya dinamakan Nasrani. Kata "Nasrani" ini melekat pada awalnya hanya untuk komunitas Yahudi pengikut Yesus, baru di kemudian hari banyak diadopsi oleh komunitas non Yahudi. Selain Nasrani, diyakini oleh para sarjana dan Bapa Gereja bahwa masih ada satu lagi komunitas Yahudi pengikut Yesus, yaitu Ebionit. Yang membedakan di antara keduanya adalah Kaum Ebionit ini menolak Keilahian Yesus, sementara Nasrani mengimani hal ini.
Daerah Basis (agama)	Adalah daerah yang mayoritas terbesar penduduknya beragama tertentu, misalnya Islam, Protestan, Katolik, Hindu. Basis agama ini digambarkan dari mayoritas penduduknya yang sangat besar biasanya persentase penduduk yang memeluk salahsatu agama melebihi 70 persen, yang ditandai dengan tanda-tanda keagamaan yang mayoritas dankehadiran rumah rumah ibadah untuk salah satu agama yang mudah didapatkan.
Pilpres	Pemilihan Presiden yang dalam konteks Indonesia disebut pilpres Ketika terjadi pemilihan presiden secara langsung sejak pemilu nasional tahun 2004. Masa-masa Pilpres sejak tahun 2004 menjadi sesuatu yang sangat menarik dalam peta politik Indonesia yang kerap tidak terhindarkan dari isu-isu primordial politik atau

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
	politik identitas, sebagaimana sangat marak terjadi dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.
Pilkada	Pilkada adalah Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup: Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, Wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Dalam konteks Politik Indonesia, pilkada langsung pertama diadakana tahun 2005 secara kedaerahan sesuai masa berakhirnya jabatan setiap kepala daerah. Namun kemudian diadakan pilkada serentak secara nasional yang dimulai sejak Pilkada serentak tahun 2015, lalu menyusul Pilkada serentak nasional tahun 2017, dan pilkada serentak tahun 2018.
Isu SARA	SARA merupakan akronim (singkatan) dari empat kata: Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Maka isu SARA adalah isu-isu dalam masyarkat baiksecara politik maupun sosiologis yang kerap diangkat untuk membedakan paham atau pandangan yang dimilikinya dengan pandangan atau paham yang dimilikioleh kelompok lain. Mempertentangkan SARAdalam konteks Indonesia selalu menjadi isu sangat sensitif. Banyak kasus yang kemudian diseret ke isu SARA. Menurut hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan, isu Suku, Agama, Ras, dan

Istilah	Arti
	Antargolongan (SARA) menjadi ancaman besar dalam peta politik Indonesia sebagaimana etrjadi di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Peneliti LIPI Syarif Hidayat mengatakan, isu SARA menjadi besar karena dikapitalisasi dan dimanipulasi elite politik.

### 3. Daftar Referensi:

- Fuqoha dan Sukendar, “Dinamika Gerakan Sosial Politik Islam Dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019” dalam *Proceeding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*. Bandung: STIA LAN Bandung, Oktober 2018.
- Hasil Penelitian Indeks Demokrasi Asia: Kasus Indonesia Tahun 2014 oleh Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI, dipublikasikan di Pasca Sarjana UI, Jl Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2014).
- Komara, Endang. *Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi*. Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, 2 (2), 2015, 117-124
- Kurniawan, Budi. “Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi” dalam *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2018/ISSN: 1978-4457*.
- Lestari, Sri (wartawan BBC). “Pertarungan pilpres sengit di media social” dalam *BBC Indonesia*, pada 5 Juli 2014.
- Muhsin Z., Mumuh. “Penyebaran Islam Di Jawa Barat, makalah yang disampaikan dalam *Saresehan Nasional “Sejarah Perjuangan Syaikhuna Badruzzaman (1898 – 1972)* pada tanggal 13 Juni 2010 di Pondok Pesantren al-Falah, Mekargalih, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut Jawa Barat.

- Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Periode 2014 – 2019*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2014.
- Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Periode 2019 – 2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019.
- Rauf, Maswadi. *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Diknas, 2000.
- Salim, A. *Perubahan Sosial*. Yogyakarta : Yogyakarta : PT.Tiara Wacana, 2002.
- Silalahi, Harry Tjan. “Kader Kristen: Urgensi dan Tantangan”, dalam *Panggilan Membangun Bangsa dan Negara. Dasar Pedoman dan Arah Keterlibatan Politik Kristen*. Jakarta: PDKB Kasih Demi Bangsa, 2009.
- Sulaeman, Affan. *Pemikiran Demokrasi Moh Hatta*, [disertasi] (Jakarta: Ilmu Politik UI, 2009).

## DAFTAR LAMPIRAN BMP

### **Lampiran I: Struktur Penulisan Makalah**

#### **JUDUL MAKALAH ANDA**

*(judul harus mengacu pada satu topik, lokasi, saat terjadinya, serta menguraikan secara terang benderang apa yang menjadi masalah yang akan diangkat sebagai topik utama. Dipersilahkan menggunakan hubungan sebab akibat antara satu hal terhadap topik yang lain.)*

**Uraian setiap bab dan Sub bab dijelaskan demikian:**

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang Masalah (*judul sub bab*)**

Latar Belakang Masalah ini berisi :

- Alasan rasional yang membuat makalah ini menarik untuk ditelaah, dianalisis dsb, berdasarkan fakta, data, referensi atau temuan dari penelitian sebelumnya.
- Gejala-gejala kesenjangan yang terjadi di masyarakat maupun pemerintah. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana analisis dalam makalah anda dapat mengatasi kesenjangan yang ada.
- Kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan permasalahan yang baru dan akan menghambat, mengganggu, atau mengancam suatu proses untuk mencapai tujuan.
- Pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis.
- Penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dan dianalisis dalam lingkup studi yang anda tekuni.

Seperti tulisan pada umumnya, penulisan latar belakang masalah terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pembuka yang memuat gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Bagian isi yang memuat fakta, fenomena, data-data dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tetap dibiarkan. Bagian penutup yang memuat alternative penyelesaian masalah yang bisa ditawarkan.

### **B. Rumusan Masalah (*judul sub bab*)**

Pada sub bab rumusan masalah ini harus berisi penjelasan tentang masalah yang anda teliti, analisis dan ditelaah. Jelaskan rincian masalah tersebut.

### **C. Pertanyaan Kritis (*judul sub bab*)**

Pada sub bab ini anda mengajukan minimal dua pertanyaan, maksimal tiga pertanyaan, yang menjadi panduan dalam menulis makalah ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus mampu mengurai masalah yang anda teliti. Oleh karena itu jawaban dari pertanyaan tersebut ada pada kesimpulan, yang mampu menjadi solusi atas masalah yang anda teliti yang ada pada sub bab rumusan masalah.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

"Berisi teori dan konsep yang dipakai untuk menganalisis masalah yang anda kemukakan di rumusan masalah. Teori dan Konsep tersebut dijelaskan secara detail, rinci dengan ada sumber pustaka yang menjadi acuan yang ditulis dalam bentuk footnote (catatan kaki) atau bodynote (pilih salah satu, kalau anda pakai footnote maka jangan lagi pakai bodynote begitupun sebaliknya), bukan pointers," Judul sub bab tergantung penjelasan dari teori atau konsep yang anda gunakan. Jika anda menggunakan teori maka judul-judul sub bab adalah rincian unsur dari teori. Jika konsep maka judul sub bab adalah konsep-konsep yang anda gunakan yang dapat dipakai untuk menganalisis masalah pada sub bab rumusan masalah di bab I.

## **BAB III PEMBAHASAN**

"Bab ini berisi data, informasi, argumentasi yang anda temukan berkaitan dengan masalah yang menjadi objek analisis anda" "Kemudian anda analisis menggunakan teori dan konsep yang sudah anda jelaskan di Bab II".

Judul sub bab anda pilih berdasarkan indikator dari teori/konsep yang dapat secara terperinci menjelaskan, mengurai, menganalisis masalah pada sub bab rumusan masalah di bab I.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan (*judul sub bab*)**

Merupakan jawaban yang dihasilkan dari proses analisis di Bab IV. Jawaban pada sub bab ini adalah jawaban yang sesuai dengan pertanyaan kritis pada bab I.

### **B. Rekomendasi (*judul sub bab*)**

Merupakan isi rekomendasi anda kepada pemerintah, atau partai politik atau media massa atau pelaku ekonomi atau masyarakat, pada intinya semua pihak yang terkait dengan masalah yang anda analisis. Rekomendasi itu berisi saran tentang bagaimana caranya mengubah atau memperbaharui perilaku, kebijakan, atau strategi agar masalah yang anda analisis tidak terjadi lagi di masa yang akan datang atau dapat diselesaikan dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi data sumber referensi yang anda pakai dalam makalah anda dengan cara penulisannya sbb: *Nama penulis (dibalik). Judul buku (huruf miring dan kapital di awal setiap kata). Kota terbit : nama penerbit dan Tahun terbit buku/Jurnal/Majalah.*

### **Contoh :**

A. Dahl, R. *Dilemmas Of Pluralist Democracy Autonomy vs Control* (Terj). Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

**Contoh penulisan Footnote dan Bodynote :** (tidak boleh menggunakan keduanya bersamaan, jika anda memilih footnote maka seluruh isi makalah anda harus menggunakan footnote semuanya, tidak boleh ada yang menggunakan bodynote lagi. Begitupun jika anda memilih bodynote. Penggunaannya ada pada seluruh kalimat atau informasi yang tidak anda ketahui sendiri, yaitu yang dikatakan oleh orang lain yang anda

kutip dari buku, media massa. Jika anda kutip dari jurnal, skripsi, makalah orang lain, maka anda adalah pengutip kedua sehingga anda harus menulis sumber pengutip pertama. Termasuk data yang anda gunakan dalam makalah anda haruslah ditulis sumbernya baik menggunakan *footnote* atau *bodynote*.

**Contoh penggunaan bodynote dalam menulis kutipan :**

Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial (L. Castells, 2010 : 22).

**Contoh penggunaan footnote dalam menulis kutipan :**

Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial.<sup>2</sup>

Sumber Yang Anda Tulis Dalam Footnote Atau Bodynote Itu Yang Akan Menjadi Isi Dari Daftar Pustaka Dalam Makalah Anda.

---

<sup>2</sup> L. Castell, *Profil Etnik Jakarta*. Depok: Penerbit Masup, 2010. Hal. 22.  
(Contoh Footnote)

**Lampiran II : Struktur Penulisan Paper atau Artikel**

**JUDUL PAPER ATAU ARTIKEL ANDA**

*(judul harus fokus tempat/lokus, waktu, dan menggambarkan masalah yang anda analisis. Boleh menggambarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat.*

*Judul huruf kapital seluruhnya, dan bold)*

**A. Latar Belakang Masalah (*kapital di awal kata, dan bold*)**

Dalam Latar Belakang Masalah ini berisi :

- Alasan rasional yang membuat makalah ini menarik untuk ditelaah, dianalisis dsb, berdasarkan fakta, data, referensi atau temuan dari penelitian sebelumnya.
- Gejala-gejala kesenjangan yang terjadi di masyarakat maupun pemerintah. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana analisis dalam makalah anda dapat mengatasi kesenjangan yang ada.
- Kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan permasalahan yang baru dan akan menghambat, mengganggu, atau mengancam suatu proses untuk mencapai tujuan.
- Pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis.
- Penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dan dianalisis dalam lingkup studi yang akan diteliti.

Seperti tulisan pada umumnya, penulisan latar belakang masalah terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pembuka yang memuat gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Bagian isi yang memuat fakta, fenomena, data-data dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tetap dibiarkan. Bagian penutup yang memuat alternative penyelesaian masalah yang bisa ditawarkan.

### **B. Tinjauan Teoritis (*kapital di awal kata, dan bold*)**

"Berisi teori dan konsep yang dipakai untuk menganalisis masalah yang anda kemukakan di rumusan masalah. Teori dan Konsep tersebut dijelaskan secara detail, rinci dengan ada sumber pustaka yang menjadi acuan yang ditulis dalam bentuk footnote (catatan kaki) atau bodynote (pilih salah satu, kalau anda pakai footnote makajangan lagi pakai bodynote begitupun sebaliknya), bukan pointers," Judul sub bab tergantung penjelasan dari teori atau konsep yang anda gunakan. Jika anda menggunakan teori maka judul-judul sub bab adalah rincian unsur dari teori. Jika konsep maka judul sub bab adalah konsep-konsep yang anda gunakan yang dapat dipakai untuk menganalisis masalah yang sudah anda jelaskan pada latar belakang masalah.

### **C. ANALISIS (*kapital di awal kata, dan bold*)**

"Bab ini berisi data, informasi, argumentasi yang anda temukan berkaitan dengan masalah yang menjadi objek analisis anda" "Kemudian anda analisis menggunakan teori dan konsep yang sudah anda jelaskan di Bab II".

Judul sub bab anda pilih berdasarkan indikator dari teori/konsep yang dapat secara terperinci menjelaskan, mengurai, menganalisis masalah pada sub bab rumusan masalah di bab I.

### **D. KESIMPULAN (*kapital di awal kata, dan bold*)**

Merupakan deskripsi jawaban yang dihasilkan dari proses analisis di sub bab Analisis. Jawaban pada sub bab ini adalah solusi dari masalah yang dijelaskan pada latar belakang masalah. Pada deskripsi jawaban ini juga anda boleh memasukkan rekomendasi perubahan yang dapat dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang anda analisis agar tidak terjadi lagi, seperti pemerintah, atau partai politik atau media massa atau pelaku ekonomi atau masyarakat, pada intinya semua pihak yang terkait dengan masalah yang anda analisis.

## DAFTAR PUSTAKA

Berisi data sumber referensi yang anda pakai dalam makalah anda dengan cara penulisannya sbb: *Nama penulis (dibalik).. Judul buku (huruf miring dan kapital di awal setiap kata). Kota terbit : nama penerbit, tahun terbit buku.* Contoh :

A. Dahl, R. *Dilemmas Of Pluralist Democracy Autonomy vs Control (Terj).* Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

**Contoh penulisan Footnote dan Bodynote :** (tidak boleh menggunakan keduanya bersamaan, jika anda memilih footnote maka seluruh isi makalah anda harus menggunakan footnote semuanya, tidak boleh ada yang menggunakan bodynote lagi. Begitupun jika anda memilih bodynote. Penggunaanya ada pada seluruh kalimat atau informasi yang tidak anda ketahui sendiri, yaitu yang dikatakan oleh orang lain yang anda kutip dari buku, media massa. Jika anda kutip dari jurnal, skripsi, makalah orang lain, maka anda adalah pengutip kedua sehingga anda harus menulis sumber pengutip pertama. Termasuk data yang anda gunakan dalam makalah anda haruslah ditulis sumbernya baik menggunakan footnote atau bodynote).

**Contoh penggunaan bodynote dalam menulis kutipan (APA Style) :** Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakikisosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negarademokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial (L. Castells, 2010 : 22).

**Contoh penggunaan footnote dalam menulis kutipan :**

Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan

hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial.<sup>3</sup>

**Sumber Yang Anda Tulis Dalam Footnote Atau Bodynote Itu Yang Akan Menjadi Isi Dari Daftar Pustaka Dalam Makalah Anda.**

---

<sup>3</sup> L. Castell, *Profil Etnik Jakarta*. Depok: Penerbit Masup, 2010. Hal. 22.  
(Contoh Footnote)

## BIOGRAFI PENYUSUN



**DR OSBIN SAMOSIR, M.Si**, lahir di Pulau Samosir, Sumatera Utara Jumat 4 Mei 1973, menempuh pendidikan Sekolah Dasar Katolik Santo Paulus Onanunggu Pulau Samosir (1980-1986) dan Sekolah Menengah Pertama Katolik Bakti Mulia Onanunggu Pulau Samosir (1986-1989). Lulus dari SMA Seminari Menengah Christos Sacerdos Pematangsiantar tahun 1993. Osbin menyelesaikan S-1 Filsafat dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas, Medan tahun 1999. Osbin menyelesaikan S-2 (Magister) Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Salemba Jakarta lulus Februari 2004, dan menyelesaikan S-3 (Doktor) dari Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Januari 2013. Saat ini menjadi dosen di Ilmu Politik FISIPOL Universitas Kristen Indonesia (UKI) Cawang, Jakarta.